



SEJARAH PENDIDIKAN DAERAH SUMATERA SELATAN



Direktorat
Kebudayaan

29/1983

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi
Kebudayaan Daerah Pusat Penelitian
Sejarah dan Budaya Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan
1980 / 1981



370.9816
MAM
S

SEJARAH PENDIDIKAN DAERAH SUMATERA SELATAN

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi
Kebudayaan Daerah Pusat Penelitian
Sejarah dan Budaya Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan
1980 / 1981

Milik Dep. P dan K

Tidak diperdagangkan

SEJARAH PENDIDIKAN DAERAH SUMATERA SELATAN

**Editor : Masykuri
Sutrisno Kutoyo**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROYEK INVENTARISASI DAN DOMUMENTASI KEBUDAYAAN DAERAH
1980 / 1981**

PERPUSTAKAAN	
DIT. SEBARAN & NILAI TRADISIONAL	
Nomor Induk :	429/83
Tanggal terbit :	5-4-83
Set/hasil dari :	Proyek MKD
Nomor lain :	370-459816
Kopi ke :	I

KATA PENGANTAR

Usaha untuk lebih menyempurnakan hasil Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Sumatera Selatan tahun 1980/1981 senantiasa di tingkatkan. Dalam Pelaksanaan penelitian kedaerah daerah di Sumatera Selatan, tenaga dari Universitas Sriwijaya Palembang dan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Selatan mempunyai andil besar dalam meneliti dan menginventaris aspek - aspek yang terjalin dalam proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Sumatera Selatan 1980 / 1981 sesuai dengan penggarisan dari Pusat.

Penelitian tersebut meliputi 5 aspek, yaitu :

1. Sejarah Daerah Sumatera Selatan (tentang sejarah daerah)
2. Adat istiadat Daerah Sumatera Selatan (tentang sistim kesatuan hidup setempat)
3. Permainan Rakyat Daerah Sumatera Selatan (lanjutan)
4. Cerita Rakyat Daerah Sumatera Selatan (tokoh mitologis dan legenda-
ris)
5. Geografi Budaya Daerah Sumatera Selatan (pola pemukiman)

Sebagai hasil akhir yang didapat adalah berupa buku hasil penelitian kelima aspek di atas, kami persembahkan untuk memperkaya khasanah koleksi kebudayaan nasional kita di masa - masa yang akan datang. Kepada Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Bapak Rektor Universitas Sriwijaya, Bapak Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Selatan, Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat II dan Kakandep P & K Kabupaten / Kotamadya se Sumatera Selatan serta semua pihak yang membantu dan menyumbangkan tenaga dan fikiran dalam penyelesaian target Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Sumatera Selatan tahun 1980 / 1981 ini kami ucapkan terima kasih.

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi
Kebudayaan Daerah Sumatera Selatan
Pemimpin



Drs. Zainal Abidin Hanif

PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah menghasilkan beberapa macam naskah kebudayaan daerah diantaranya ialah naskah : Sejarah Pendidikan Daerah Sumatera Selatan 1980 / 1981.

Kami menyadari bahwa naskah ini belumlah merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, tetapi baru pada tahap pencatatan, yang diharapkan dapat disempurnakan pada waktu - waktu selanjutnya.

Berhasilnya usaha ini berkat kerja sama yang baik antara Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional dengan Pimpinan dan Staf Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi, Leknas/LIPI dan tenaga ahli perorangan di daerah.

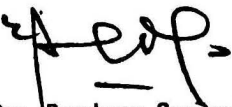
Oleh karena itu dengan selesainya naskah ini, maka kepada semua pihak yang tersebut di atas kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih.

Demikian pula kepada tim penulis naskah ini di daerah yang terdiri dari : **Drs. Ma'moen Abdullah, Dra. Ny. Menny Ma'moen, Drs. Bandiman, Drs. Djumiran, Drs. M. Alimansyur** dan tim penyempurna naskah di pusat yang terdiri dari : **Masykuri dan Sutrisno Kutoyo**.

Harapan kami, terbitan ini ada manfaatnya.

Jakarta, 28 Januari 1982

Pemimpin Proyek


(**Drs. Bambang Suwondo**)
NIP. 130117589

Kata Sambutan Ka. Kanwil Dep. P dan K Propinsi Sumatera Selatan

Penulisan naskah penelitian kebudayaan daerah Sumatera Selatan tahun 1980/1981 telah selesai, dan bahkan telah selesai pula dievaluasi pada tingkat Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Pusat.

Aspek Sejarah dengan judul " Sejarah Pendidikan Daerah Sumatera Selatan " dan aspek Geografi Budaya dengan judul " Pola Pemukiman Daerah Sumatera Selatan " kini mendapat kesempatan untuk dicetak dan diedarkan oleh Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Sumatera Selatan.

Kepercayaan yang telah dilimpahkan oleh IDKD Pusat kepada IDKD Sumatera Selatan untuk mencetak dan menerbitkan kedua buku diatas adalah merupakan suatu kepercayaan yang bernilai tinggi.

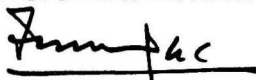
Kepada tim Proyek IDKD Sumatera Selatan dan segenap tim peneliti, baik itu dari Universitas Sriwijaya atau dari Kanwil Departemen P dan K Propinsi Sumatera Selatan melalui kesempatan ini disampaikan rasa bangga dan terima kasih atas usaha serta ketekunan dalam meneliti, mengolah serta menyusun suatu naskah yang amat berharga itu.

Kepada Pimpinan IDKD Pusat yang memberi kepercayaan kepada Daerah Sumatera Selatan dalam mencetak buku dimaksud, juga kami ucapkan terima kasih. Mudah - mudahan kepercayaan yang diberikan itu akan menjadi modal bagi petugas Proyek IDKD Sumatera Selatan, tim peneliti tahun 1981/1982 agar lebih giat lagi menjalankan tugasnya serta lebih menyempurnakan lagi hasil penelitian kebudayaan di daerah Sumatera Selatan.

Selanjutnya, dengan menyadari akan segala kekurangan yang ada dalam usaha meningkatkan hasil penelitian kebudayaan daerah Sumatera Selatan selama ini, kiranya buku ini dapatlah memberikan dorongan dan rangsangan untuk lebih mensukseskan usaha seterusnya. Selain itu terkandung harapan agar buku yang berjudul " Pola Pemukiman Daerah Sumatera Selatan " dapat menambah baha koleksi dilingkungan Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional Departemen P dan K RI, juga untuk pengetahuan bagi semua pembaca sebagai upaya untuk terus membina dan mengembangkan kebudayaan nasional.

Palembang, 10 Nopember 1981

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN P DAN K
PROPINSI SUMATERA SELATAN


Drs. AHMAD MUSA

D A F T A R I S I

	Halaman. ⁴
Kata Pengantar dari Pimpro IDKD Sumsel	ii
Pengantar Pimpinan Proyek	iii
Kata Sambutan Ka. Kanwil Dep. P dan K. Prop. Sumsel.	iv
Daftar Isi	v
 BAB I. P E N D A H U L U A N	 1
A. Latarbelakang budaya masyarakat	5
B. Perkembangan Pendidikan secara garis besar	13
 BAB II. PENDIDIKAN TRADISIONAL	 17
A. Pengaruh agama Hindu / Budha	17
B. Pengaruh Agama Islam	26
 BAB III. PENDIDIKAN BARAT	 38
 BAB IV PENDIDIKAN PADA ABAD KE - 20	 41
A. Pendidikan Pemerintah Hindia Belanda	41
B. Pendidikan Pergerakan Nasional	50
 BAB V. PENDIDIKAN JAMAN JEPANG DAN INDONESIA MERDEKA.	
1. Jaman Jepang (Pendidikan Pemerintah)	64
2. Pendidikan Jaman Indonesia Merdeka	74
A. Pendidikan Pemerintah	64
B. Pendidikan Swasta	197
 Daftar Kepustakaan	 230
Lampiran	232
Daftar Informan	236
Daftar Kata - kata	237

B A B I

PENDAHULUAN

Propinsi Sumatera Selatan yang kita kenal sekarang ini, meliputi delapan daerah Kabupaten dan dua daerah Kotamadya terletak 102° dan 108° Bujur Timur dan antara $1^{\circ}30'$ dan 4° Lintang Selatan dengan dilintasi Bujur Timur 105° sebagai dasar penentuan waktu Indonesia bagian Barat. Di sebelah Utara daerah ini dibatasi oleh Propinsi Jambi dan Laut Cina Selatan, disebelah Timur oleh Selat Karimata dan Laut Jawa, disebelah Selatan oleh Propinsi Lampung dan disebelah Barat oleh Propinsi Bengkulu. Pada jaman dahulu daerah ini pernah menjadi pusat perdagangan dalam dan luar negeri, setelah muncul kerajaan Sriwijaya sebagai suatu talasokrasi (suatu kekuatan laut) pada akhir abad ke - 7 Masehi.

Sebagai suatu kerajaan maritim yang memiliki armada angkatan laut yang ampuh dalam kerangka penguasaan selat Malaka dan selat Sunda, ia juga merupakan pusat studi agama Budha. 1) Tetapi kemudian ia berangsur-angsur menjadi lemah pada permulaan abad ke - 11 Masehi, bahkan pada jaman Raja Kartanegara (peristiwa Pemalayu 1275) dan " Sumpah Palapa " Patih Gajah mada telah mengakhiri kerajaan itu dalam tahun 1377 Masehi

Setelah itu pada tahun 1521 Masehi, ketika cahaya Matahari Wilwatikta sudah pudar tenggelam dikaki langit keruntuhannya, maka mulailah muncul kembali bandar Palembang sebagai pusat penguasa tunggal yang pernah memegang peranan penting di Asia Tenggara. Palembang sebagai tanah asal Raden Fattah, berkembang menjadi pusat politik - ekonomi dan kebudayaan dengan Islam sebagai motor pendorong yang kuat.

Ketika jaman Kesultanan Palembang - sebelum pemerintah kolonial Belanda menguasai daerah ini pada awal abad ke - 19, secara geografis nama " Sumatera Selatan " mencakup seluruh wilayah bagian Selatan Sumatera termasuk Bangka - Belitung. Tetapi setelah pengakuan Kedaulatan 1949, daerah

1) Satyawati Suleiman, Concise Ancient history of Indonesia, Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional, Jakarta, 1977, hal. 17 pada permulaan tahun 1980 Team Peneliti dari P4N Dirjen Kebudayaan dibawah pimpinan Dra. S. Suleiman telah meninjau lokasi daerah Bukit Siguntang dan sekiarnya, dan telah menemukan kreweng - kreweng porselin dan gerabah dari abad ke - 8 dan ke - 9 Masehi

yang terdiri dari keresidenan - keresidenan, secara bertahap mulai ada usaha kearah otonomi yang terlepas dari Palembang sebagai ibu kota propinsi dan yang paling akhir (bulan Nopember 1968) daerah Bengkulu melepaskan diri dari Palembang sebagai ibukota propinsi Sumatera Selatan.

Setelah daerah ini dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda, daerah Sumatera bagian Selatan terbagi atas keresidenan - keresidenan, yang masing-masing dikepalai oleh seorang Residen. Keresidenan Palembang sendiri demikian pula keresidenan - keresidenan yang lain, terbagi atas beberapa Afdeling yang dikepalai oleh seorang Asisten Residen, dan suatu Afdeling terbagi lagi beberapa Onderafdeling yang masing - masing dipimpin oleh seorang Kontreleur (Binnenlandsche Bestuur Ambtenaren) dan penguasa - penguasa tradisional oleh penduduk pribumi seperti : Demang, Pasirah, Pembarap, Penghulu (Inheemsche Bestuur Ambtenaren) dengan dibantu oleh perabot desa yang terdiri dari Kerio, Punggawa dan Khotib. Oleh sebab itu tidak mengherankan apabila daerah Sumaterabagian Selatan yang sekarang terdiri dari beberapa Propinsi, memiliki adat kebiasaan dan latar belakang historis yang sama, sehingga masa lampau daerah ini tidak hanya terbatas pada kehidupan politik saja, tetapi juga meliputi perkembangan sosial - budaya, khusus mengenai pendidikan di daerah ini.

1. Tujuan Penelitian :

Secara umum Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya mampu menyediakan data dan informasi kebudayaan untuk keperluan pelaksanaan kebijaksanaan kebudayaan, pendidikan dan masyarakat. Sedangkan secara khusus untuk mengumpulkan dan menyusun buku sejarah Daerah tentang Sejarah Pendidikan di daerah secara tematis, terutama untuk melengkapi pengetahuan tentang sejarah Pendidikan dengan mendokumentasikan pemikiran pendidikan dan mencatat tokoh - tokoh pendidikan.

2. Masalah :

Salah satu aspek kebudayaan daerah Sumatera Selatan yang belum banyak di ungkapkan adalah " Sejarah Pendidikan ", karena belum banyak diteliti dan dikembangkan secara sempurna. Secara khoronologis dan terperinci mengenai aspek tersebut belum pernah dibukukan secara utuh dan belum pula merupakan suatu kebulatan untuk seluruh daerah Sumatera Selatan. Kalau ada catatan mengenai pendidikan daerah ini, biasanya disisipkan pada

buku Sejarah Pendidikan Nasional. Dengan demikian suatu masalah yang dihadapi sekarang dalam aspek ini, adalah belum adanya suatu tulisan lengkap dan menyeluruh tentang " sejarah Pendidikan daerah Sumatera Selatan " sampai sekarang ini.

Dalam hubungan ini dirasa amat perlu melakukan pencatatan tentang bahan - bahan sejarah Pendidikan, yang merupakan salahsatu aspek kehidupan masyarakat daerah ini dari abad ke - abad, bahkan pada zaman kebesaran kerajaan Sriwijaya telah ada lembaga pendidikan Tinggi dengan reputasi internasional. Oleh sebab itu pencatatan yang demikian dirasakan sumber penting gunanya - di samping untuk memelihara kebudayaan daerah sebagai kebudayaan Nasional, juga untuk melengkapi dan meramu Sejarah Pendidikan Nasional Indonesia di masa - masa yang akan datang.

Untuk melakukan suatu penelitian yang mendalam dan sempurna guna mengatasi masalah ini, sudah barang tentu memerlukan biaya yang cukup besar dan tersedianya waktu yang relatif cukup banyak. Oleh karena waktu dan dana yang tersedia sangat terbatas, maka hasil laporan ini tidak lengkap, dan sesungguhnya masih banyak bahan - bahan sejarah yang belum dapat dikumpulkan oleh para ahli.

3. Ruang Lingkup :

Seperti yang telah disebutkan pada tujuan penelitian ini, maka ruang lingkungnya meliputi Sejarah Pendidikan Tradisional, Pendidikan Barat, Pendidikan abad ke - 20 dan termasuk Pendidikan jaman Jepang yang dikelola oleh Departemen P & K atau diluar Departemen tersebut. Bahan - bahan sejarah yang tersebut diatas sejauh mungkin telah diusahakan oleh anggota Team peneliti untuk menjangkau seluruh wilayah administrasi Propinsi Sumatera Selatan yaitu : Kabupaten MURA, MUBA, LAHAT, LIOT, OKI, OKU, BANGKA, BELITUNG dan dua daerah Kotamadya (Palembang dan Pangkalpinang)

4. Pertanggung jawab ilmiah prosedur Penelitian :

4.1. Pelaksanaan survei ini berdasarkan surat perjanjian - kerja No. 017 /IDKD/V/80/SS. tanggal 27 Mei 1980, yang telah memakan waktu enam bulan mulai dari persiapan sampai menjadi naskah, dan secara terperinci waktu pelaksanaannya sebagai berikut :

- Persiapan untuk terjun kelapangan 7 hari.
- Diskusi dan pengarahan antara anggota team 3 hari.

— Survei lapangan	30 hari.
— Pengolahan data / data prosesing	60 hari.
— Penulisan konsep naskah / diskusi	65 hari.
— Editing / Evaluasi dan revisi	25 hari.
— Perbanyak laporan setelah revisi	19 hari.
Jumlah	± 200 hari.

Field research dilakukan di daerah Kabupaten/Kotamadya, kecuali daerah Bangka - Belitung tidak didatangi secara langsung mengingat biaya yang tidak memungkinkan.

4.2. Sebagai mana lazim dilakukan oleh peneliti - peneliti dilapangan, maka dibentuklah suatu team peneliti dan kemudian ditetapkan lokasi - lokasi sebagai sample dari populasi yang akan diteliti suatu sample yang merupakan bagian dari pada populasi, sebagai contoh dari populasi tersebut. Penelitian telah berlangsung sejak bulan Juli hingga awal Nopember 1980 dengan didahului studi ke layakan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Sedangkan pengolahan dan analisa data berlangsung selama bulan Nopember sampai akhir bulan Desember 1980, yang seterusnya dilanjutkan dengan penulisan naskah sebagai lapporan terakhir. Mengenai metode penelitian yang digunakan sebagai landasan kegiatan pelaksanaan untuk mendapatkan sumber data sejarah Pendidikan adalah metode deskriptif. Kata deskriptif dalam hubungan ini bermakna, bahwa penelitian ini dilakukan seobjektif mungkin dan didasarkan semata - mata atas fakta, walaupun bahan yang di olah dipilih dari semua data yang terkumpul sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu memperoleh gambaran yang lengkap dan menyeluruh mengenai sejarah Pendidikan Daerah ini.

4.3. Teknik pengumpulan data dilakukan sebagai berikut :

- 4.3.1. Studi kelayakan dan obsevasi ke daerah - daerah penelitian yang telah ditetapkan.
- 4.3.2. Melakukan wawancara dengan mempergunakan pertanyaan - pertanyaan tertulis yang telah disiapkan lebih dulu.
- 4.3.3. Melakukan studi kepustakaan sebagai unsur penunjang (peleng-

kap) untuk membandingkan bahan - bahan yang telah diperoleh dari lapangan atau bahan - bahan yang erat hubungannya dengan tujuan penelitian studi kepustakaan ini.

A. LATAR BELAKANG BUDAYA MASYARAKAT :

Pulau Sumatera yang membujur dari arah Barat - Laut ke Tenggara dengan memotong garis Khatulistiwa, secara administratif telah terbagi atas beberapa Propinsi, dan salah satu daripada propinsi itu adalah Propinsi Sumatera Selatan dengan ibukotanya Palembang. Pada awal revolusi fisik secara territorial daerah Sumatera Selatan bukan saja seperti yang ada sekarang, melainkan mencakup daerah yang lebih luas termasuk Jambi, Bengkulu dan Lampung. Oleh karena itu sisa - sisa peninggalan yang terdapat di daerah ini merupakan jalinan yang tak dapat di pisahkan apabila ditinjau dari segi geografis. Kemudian dalam perkembangan sejarah daerah ini pada masa alam kemerdekaan, secara bertahap daerah daerah tersebut berdiri dengan status propinsi, dan salah satu diantara propinsi itu adalah Propinsi Sumatera Selatan yang lazim dikenal dengan nama daerah " Batanghari Sembilan ".

Luas daerahnya $\pm 109.254 \text{ Km}^2$ dengan penduduknya $\pm 3.803.260$ orang, sehingga tiap - tiap Km^2 didiami oleh penduduk ± 35 orang, 2) suatu daerah yang relatif jarang penduduknya jika dibandingkan dengan pulau Jawa dan Bali.

Kalau kita perhatikan lebih lanjut mengenai peta daerah Sumatera Selatan ini, maka tampak oleh kita daerah inipun - seperti daerah - daerah lain di sepanjang pulau Sumatera , terbagi atas dua daerah berdasarkan tinggi rendahnya dari permukaan laut. Sebelah Barat yang menjadi hulu sungai Batanghari Sembilan sampai kelereng Bukit Barisan merupakan dataran tinggi (pegunungan) dengan hutan yang lebat, sedangkan daerah - daerah menyisir pantai Timur Sumatera sebagian besar dataran rendah dan rawa - rawa. Semakin dekat dengan pantai atau kuala sungai, daerahnya terdiri dari rawa - rawa yang ditumbuhi hutan bakau (mangrove) seperti : kayu gelam, pohon nipah dan lain - lain. Meskipun daerah ini sepanjang tahun mendapatkan curah hujan yang cukup tinggi, namun masyarakat masih dapat membedakan antara musim hujan dan musim kemarau. Oleh sebab itu iklim di daerah ini sangat ditentukan oleh angin musim, yang pada bulan - bulan Nopember - Desember - Januari

angin musim, yang pada bulan - bulan Nopember - Desember - Januari Februari dan Maret menghembus angin dari arah Barat dengan membawa hujan, sedangkan dalam bulan Mei - Juni - Juli - Agustus dan September menghembus angin dari jurusan Tenggara yang membawa udara kering dari Benua Australia. Dengan adanya musim kering dan hujan, maka suhu udara di daerah ini rata - rata tinggi dan curah hujan yang tinggi pula. 3).

Pada umumnya sifat - sifat sungai di daerah ini mempunyai perbedaan tinggi permukaan air pada sepanjang aliran, tebingnya curam, banyak rintangan batang kayu yang tak hanyut dan terbenam di pinggir - pinggir sungai, banjir setiap tahun dan proses pendangkalan serta pembentukan rawa - rawa berlangsung terus sampai ke muara sungai. Sungai Musi yang panjangnya + 553 Km menjadi induk Batanghari Sembilan, mulai dari muara sungai Lematang sudah mulai terdapat pembentukan rawa - rawa sampai ke kuala Sungsang. Pada tiap kali pasang naik permukaan tanah digenangi air, terutama dimusim hujan hampir sebagian besar daerah tersebut terendam air dan penuh dengan lumpur. Karena daerah ini letaknya di daerah tropis sebelah selatan Khatulistiwa, iklimnya lembab dan hujan yang turun banyak sekali, sedangkan hutan rimba sudah berhenti pada ketinggian 1000 meter di daerah pegunungan sebagai akibat pengawanan yang tebal dan dingin yang kuat. Sebagai akibat keadaan alam di daerah ini yang sampai sekarang ini masih dirasakan oleh sebagian besar masyarakat di pedesaan, proses pembentukan rawa - rawa di sepanjang tebing sampai ke kuala sungai, lebatnya hutan - rimba, sukarnya komunikasi antara daerah yang satu dengan yang lainnya - lebih - lebih dimusim peng hujan, maka induk sungai Musi dengan anak - Batanghari Sembilanlah yang menjadi faktor terpenting bagi lalu - lintas perdagangan, penanaman ke kuasaan, pemasukan kebudayaan dari luar oleh golongan emigran yang berasal dari pulau sekitarnya atau dari pedagang - pedagang asing.

Mengenai batas propinsi Sumatera Selatan dengan daerah Jambi Bengkulu dan Lampung, secara mutlak tidak ada ketentuan yang dibuat oleh manusia, kecuali batas - batas yang telah ditetapkan berdasarkan sejarah pertumbuhan daerah dan yang kemudian diikrarkan oleh perjanjian antar daerah.

2) Dikutif dari Biro Statistik dan Sensus Kantor Gubernur Sumatera Selatan.

3) R.W. van Bemmelen, The Geology of Indonesia, vol. I A, the Hague 1949, halaman 6

Batas alam yang dapat diketengahkan adalah Bukit Barisan yang memisahkan daerah ini dengan propinsi Bengkulu dan aliran Sungai Masuji yang memisahkan dengan daerah Lampung.

Daerah Sumatera Selatan meliputi delapan Kabupaten seperti : Musi Banyuasin, Musi Rawas, Lematang Ilir Ogan Tengah, Lahat, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Bangka, Belitung dan dua Kotamadya (Palembang dan Pangkal Pinang) didiami oleh berbagai suku bangsa dan dialek, bahasa, adat istiadat dan letak geografis yang berbeda - beda. Menambah ragam suku bangsa di daerah ini terdapat pula penduduk pendatang, sehingga timbul istilah adanya penduduk asli yang dikenal dengan nama " orang Kubu " atau suku anak - dalem. Suku anak Dalem ini mendiami daerah pedalaman kabupaten MUBA misalnya : daerah Banyulincir, Bayat dan daerah sungai Lilin.

Disamping itu terdapat pula di daerah pantai pulau Belitung suku Sekak atau "Sawang" dan di pulau Bangka sendiri hidup suku Mapur yang hidupnya didaratan. 4).

Disamping itu masing - masing daerah Kabupaten memiliki lagat bahasa nya sendiri - sendiri seperti : Kabupaten Ogan Komering Ilir terdapat suku Pegagan, Meranjat, Kayu Agung, Pedamaran. Teloko dan lain - lain. Di Kabupaten Ogan Komering Ulu terdapat suku Ranau, Daya, Kisam, Komering dan Ogan. Di Kabupaten LIOT terdapat suku Semendo Darat, Lematang dan Enim. Di Kabupaten Lahat adanya suku Pasemah, Kikim, Lintang dan Lematang. Di kabupaten MURA dan MUBA terdapat suku Rejang, Palembang, Rawas, Kubu dan Saling. 5) Kadang - kadang diantara penduduk dalam satu lingkungan daerah wilayah Kabupaten atau antar Kabupaten sendiri memiliki bahasa yang masing - masing pembicaranya saling tidak mengerti misalnya : Bahasa Komering, Bahasa Kayu Agung, Bahasa Rejang dan sebagainya.

Hal ini mungkin disebabkan antara lain karena sukarnya komunikasi antara daerah yang satu dengan yang lain, dimana bahasa - bahasa itu berkembang melalui proses pemecahan dan isolasi yang lama antara kelompok - kelompok yang mengucapkan bahasa - bahasa tersebut. Bahasa - bahasa daerah yang terdapat di daerah ini belum begitu banyak diteliti, dan baru akhir - akhir ini

4) Team Penyusun Monografi daerah Propinsi Sumsel, Monografi Sumatera Selatan, Perwakilan Dep. Pendidikan & Kebudayaan Peropinsi Sumatera Selatan, 1974, halaman 39

5) Adat Istiadat Daerah Sumatera Selatan, Proyek IDKD, 1977/1978, halaman 36

* nampaknya Lembaga UNSRI dipercayakan untuk melakukan penelitian di bidang tersebut oleh Pusat Lembaga Bahasa di Jakarta.

Sistem huruf yang khas dimiliki oleh masyarakat di daerah ini dikenal dengan nama " tulisan Ulu " yang mirip dengan tulisan Batak. Aksara tersebut ditulis pada kulit kayu (" karas "), tanduk hewan dan bambu yang sampai sekarang belum banyak diteliti oleh para ahli.

Selain dari pada itu mereka mempergunakan huruf " Arab Gundul ", yang sudah barang tentu huruf tersebut dikenal setelah agama Islam datang di daerah ini pada abad ke - 8 Masehi. 6).

Barangsiapa yang pernah berlayar menyusur sungai Musi dan anak-anak sungainya, akan nampak dikiri - kanan sungai berupa hutan - belukar yang di selingi dusun-dusun kecil disana - sini, sedangkan di kota Palembang dan Pedamaran sendiri adanya rumah - rakit terapung diatas air disebelah menyebelah aliran sungai, seperti yang telah pernah digambarkan oleh W.P. Groeneveldt mengenai Palembang dalam abad ke - 17. 7)

Dusun - dusun kecil yang dimaksudkan itu merupakan pusat kehidupan masyarakat, yang termasuk kedalam masyarakat hukum territorial yang terkecil dan terdiri dari kampung - kampung. Pada umumnya rumah rakyat di didirikan di atas tiang kayu, dan besar kecilnya rumah tergantung kepada kemampuan orang itu sendiri. Mungkin dulunya untuk menghindari bahaya banjir dan serangan dari binatang buas. Rumah - rumah itu biasanya berbentuk bujur sangkar memanjang dengan pintu tangganya menghadap ke jalan raya dengan membelakangi sungai (perigi). Atapnya ada yang mempergunakan daun rumbia yg dianyam dan kebanyakan sekarang ini mempergunakan atap genteng. Pada umumnya kayu - bahan yang dipergunakan untuk rumah adalah kayu kelas satu seperti kayu unglan, kayu tembesu dan lain - lain. Menurut kepercayaan setempat, rumah panggung atau limas yang didirikan diatas tiang kayu akan lebih memudahkan upacara pemandian mayat sebelum dikebumikan dan se kaligus mempercepat roh - roh jahat untuk terus masuk ke dalam bumi. Di samping rumah - rumah tersebut, kita akan melihat segala macam bentuk pe

6) Sejarah Daerah Sumatera Selatan, Proyek IDKD, 1977/1978, halaman 142; Panitia Penyelenggara MTQ Pertamina se Indonesia ke-II, Masuk dan Perkembangan agama Islam di bumi Sriwijaya, Plaju, 1974, halaman 23

7) W.P. Groeneveldt, Notes on the Malay Archipelago and Malacca compiled from Chinese Sources, V.B.G XXXIX, 1880, halaman 106

rahu yang hilir mudik di sungai - sungai (perahu motor, perahu dengan mesin tempel dan besar kecilnya perahu tambangan), rakit - rakit kayu dipinggir sungai yang dipergunakan sebagai tempat mandi dan mencuci pakaian, dan tidak ketinggalan anak - anak nakal telanjang bulat bercemplungan di air menikmati " daily watersportnya ".

Penduduk Sumatera Selatan pada umumnya petani seperti penduduk dari lain - lain daerah di Indonesia. Di berbagai tempat di lereng Bukit Barisan di dataran tinggi dan tempat - tempat terpencil lainnya seperti daerah suku anak - dalem, banyak penduduk masih melakukan bercocok tanam dengan teknik peladangan. Tetapi setelah perang Dunia I, beberapa kelompok masyarakat yang tinggal di dataran rendah atau tidak jauh dari daerah lebak, telah mulai bercocok tanam dengan teknik persawahan yang tergantung pada alam. Baik sistem perladangan maupun persawahan di daerah ini - kecuali daerah transmigrasi Upang, diusahakan secara tradisional. Kebanyakan ladang - ladang mereka letaknya jauh dari dusun, dan untuk menentukan waktu pembukaan hutan untuk perladangan, biasanya penduduk setempat telah mempunyai perhitungan sendiri sehingga waktu menanam padi bertepatan dengan permulaan musim penghujan. Mengenai cara mengerjakannya mula - mula dengan menebang pohon - pohon menjelang musim kemarau. Setelah selesai pekerjaan itu dibiarkan beberapa hari sampai kayu - kayu itu kering dan kemudian dibakar habis sambil dibersihkan dengan kapak (parang) dan cangkul. Apabila saatnya tiba untuk penanaman, maka dengan cara gotong royong (" bawe " menurut adat kebiasaan masyarakat MUBA) mereka menaburkan benih padi dengan alat pelobang yang disebut " tugal ". Disamping menaburkan benih padi, mereka juga menanam, sayur - sayuran, lombok, ubi, pepaya dan lain - lain. Hasilnya cukup memadai dan dapat memenuhi kebutuhan hidup dalam masa satu tahun. Kemudian setelah masyarakat di daerah ini mengenal cara menanam karet, maka setelah ladang tersebut tidak memungkinkan untuk ditanam padi kembali - mengingat kesuburan tanah dan produktifitas sudah mulai menurun, ladang tersebut ditanami pohon karet dan demikianlah seterusnya berlaku asal mulanya perkebunan karet Rakyat di daerah ini disamping adanya perkebunan karet yang diusahakan oleh bangsa Asing.

Disamping bercocok tanam di ladang / sawah dengan padi sebagai tanaman pokok, beberapa kelompok masyarakat yang tinggal di kota - kota besar giat dalam dunia perdagangan. Perdagangan merupakan aktivitas yang

terpenting bagi masyarakat kota, bahkan pada jaman Kesultanan Palembang perdagangan lada di daerah ini telah memainkan peranan penting disamping perdagangan hasil hutan lainnya. Kesultanan Palembang sebagai kerajaan dagang yang berarti karena ekspor ladanya, karena lada memasuki perdagangan internasional dan lada itu pulalah yang menjadi sebab keruntuhannya. Rupanya suatu gejala umum di Indonesia pada waktu itu, ialah tanaman-dagang untuk pasaran Eropahlah yang membesarkan keraton - keraton itu, tapi tanaman itu pulalah sebab utama yang meruntuhkan. 8) Mata uang boleh dikatakan telah mereka kenal sejak dulu, malah pada saat ini mereka telah dapat mempergunakan Bank sebagai tempat penyimpanan uang dan telah mengenal pula sistem pembayaran dengan menggunakan cek. Kemudian hasil lada ini cepat menurun, lebih - lebih setelah pemerintah kolonial Belanda menganjurkan kepada rakyat untuk menanam pohon karet. Masa akhir - akhir ini nampaknya hasil bumi yang banyak mendapat devisa bagi daerah ini ialah karet, terutama di daerah - daerah dataran rendah (kabupaten Mura, Muba, Liot dan OKU) dan kopi yang banyak dihasilkan oleh daerah pegunungan seperti daerah Pagaralam dan daerah sekitarnya. Bagi rakyat yang tinggal di daerah lebak atau rawa - rawa, hasil perdagangan mereka adalah ikan. Tetapi akhir - akhir ini produksi ikan sungai tidak memadai karena akibat penyalahgunaan stroem elektris telah banyak membunuh bibit - bibit ikan.

Di daerah Sumatera Selatan - seperti di daerah lain di Indonesia, kelompok kekerabatan terkecil adalah keluarga - batih yang terdiri dari ayah, Ibu dan anak-anak yang belum kawin. Sedangkan anak yang telah kawin membentuk lagi keluarga - batih dan seterusnya. Tetapi oleh karena keadaan belum memungkinkan, maka kadang - kadang di dalam sebuah rumah terdapat dua keluarga-batih yang masing - masing merupakan kesatuan ekonomis dalam hal mengerjakan ladang/sawah atau kebun. Setelah mereka mampu untuk berdiri sendiri dalam arti mendapatkan rumah pemberian dari orang tua atau membeli sendiri, mulailah memisahkan diri dan terbentuklah keluarga - batih yang baru menurut gadis keturunan ayah (Patrilineal). Kedudukan suami memegang peranan penting sebagai kepala keluarga, sedangkan si isteri masuk keluarga suami dan bersama - sama ikut bertanggung jawab dalam pendidikan dan masa depan anak - anak mereka.

8) Moh. Idwar Saleh, Sedjarah Bandjarmasin, KPPK. Balai Pendidikan Guru, Bandung, halaman.20

Sistem matrilineal bisa terjadi apabila orang tua tidak memiliki anak laki-laki, atau beberapa daerah seperti Tanjungraja dan Lahat - Pagaralam berlaku adat kebiasaan yang disebut " tunggu Tuban ", suatu kebiasaan yang turun temurun menetapkan anak perempuan tertua sebagai pewaris utama dan bertanggung jawab terhadap orang tuanya sebelum meninggal dunia. Pada jaman sebelum perang dunia ke - dua, ruang gerak anak gadis sangatlah terbatas dan diluar berpergian secara bebas tanpa ada pengawasan saudara laki-laki atau orang tua nya. Tetapi akhir - akhir ini tradisi itu mulai kendor dan dianggap sebagai hambatan untuk kemajuan, terutama bagi keluarga yang telah mengecap pendidikan umum.

Dalam hal mencari jodoh dalam kalangan masyarakat Sumatera Selatan akhir - akhir ini terdapat dua cara ; pertama cara peminangan yang pada dasarnya bersumber dari pergaulan muda - mudi dan mendapat restu dari orang tua kedua belah pihak, sedangkan cara yang kedua adalah " melarai " tanpa dires-tui oleh orang tua si gadis. Perkawinan ideal di jaman sebelum perang Dunia adalah perkawinan antara saudara sepupu atau ada kaitannya dengan keluarga namun kebiasaan itu bukanlah suatu hal yang diwajibkan. Oleh sebab itu tidak sedikit pemuda - pemuda kawin dengan gadis - gadis yang bukan keluarganya. Mengenai cara peminangan dalam proses pelaksanaan sampai terjadi ikatan perkawinan adalah sebagai berikut : Apabila keluarga si pemuda sudah berketetapan untuk melamar seorang gadis, secara informal pihak keluarga pemuda mengadakan hubungan dengan orang tua si gadis. Setelah lamaran itu diterima dengan baik, maka secara resmi diutuslah kepada keluarga si gadis, suatu utusan yang terdiri dari laki-laki dan wanita yang dianggap sudah berumur dengan seorang juru bicaranya. Biasanya juru Bicara yang dimaksudkan itu adalah orang yang pandai bicara dan disegani oleh masyarakat setempat. Pertemuan kedua belah pihak yang disaksikan oleh kaum kerabat dan tetangga terdekat itu dikenal dengan istilah " ngetas janji ", dan pada pertemuan itu pulalah diputuskan mengenai maskawin, hari perkawinan, tempat perkawinan dan sumbangan biaya dari pihak laki-laki.

Seperti lazimnya masyarakat tradisional di negeri kita ini, masyarakat di daerah ini terdiri dari kelompok - kelompok : kelompok menurut suku, kepercayaan, pekerjaan, status kelahiran dan sebagainya. Dalam hal ini kita dapat membedakan antara masyarakat Palembang asli dengan masyarakat yang tinggal di daerah Ulu yang belum banyak mendapat pengaruh dari luar. Palembang sebagai pusat kerajaan tradisional, masyarakatnya lebih ba-

nyak seluk beluknya dari pada masyarakat modern sekarang ini. Tetapi baik masyarakat di pusat kerajaan maupun di daerah Uluu, secara umum dapat di bagi atas dua golongan besar yaitu : golongan penguasa dan golongan yang diperintah. Di pusat kerajaan, Raja adalah sebagai kepala pemerintahan yang di bantu oleh keluarganya sebagai Pegawai Tinggi (Sentana Manteri) dan golongan Priyayi yang disebut Manteri biasa. Adapun golongan Priyayi terdiri dari Pangeran, Raden dan Mas - Agus. Selain dari pada itu terdapat golongan rakyat (non elite) yang jumlahnya jauh lebih besar dari golongan tersebut diatas seperti : Kiyai Mas, Kiyai Agus dan Rakyat biasa (orang - orang Miji, orang Senan dan orang - orang yang tergadai dirinya/budak belian). 9) Nampaknya gelar - gelar tersebut masih juga dipakai, tetapi tidak lagi mempunyai arti seperti dulu. Stratifikasi sosial yang berdasarkan kelahiran ini nampaknya semakin lama semakin menciut artinya dalam proses perkembangan masyarakat di daerah ini, namun stratifikasi sosial yang baru yang condong untuk berkembang atas dasar tinggi rendahnya pangkat dalam sistem birokrasi kepegawaian, atau atas dasar pendidikan sekolahan belum lagi mendapat wujud yang mantap.

Ditinjau dari keadaan iklim dan alamnya, potensi daerah ini untuk membangun ekonominya tidak hanya terletak dalam bidang pertanian saja, tetapi terutama juga dalam sektor perkebunan karet rakyat dan kelapa sawit. Hampir seluruh daerah dataran rendah dapat ditanami oleh pohon karet dan kelapa sawit. Walaupun demikian usaha perkebunan hanya dapat diandalkan untuk menghasilkan modal bagi pembangunan, apabila usaha kearah itu dilakukan dengan teknologi modern dan bantuan subsidi dari Pemerintah dalam pembukaan atau rehabilitasi ladang - ladang karet rakyat yang tidak produktif lagi. Suatu hal yang mengembirakan mengenai daerah ini adalah fasilitas pendidikan formal, yang dari tahun ketahun bertambah jumlahnya sekolah - sekolah seperti : Sekolah Dasar, Sekolah Menengah, Sekolah menengah kejuruan dan dalam kota Palembang sendiri terdapat dua Perguruan Tinggi Negeri (Universitas Sriwijaya dan Institut Agama Islam Raden Fattah) dan beberapa Perguruan Tinggi Swasta (Muhammadiyah dan Yayasan Sakyakirti), yang sudah jauh lebih baik dari pada pendidikan dalam jaman penjajahan. Namun demikian selain aspek positif dari kenyataan ini, dapat pula dihubungkan dengan masalah lain, yaitu sikap mental yang diwarisi dan gaya hidup masyarakat

9) J.L.van Sevenhoven, Lukisan tentang Ibukota Palembang, Bharatara, Jakarta, 1971, halaman 25 - 28.

kat jajahan Belanda yang terlampau lama mempengaruhi kebudayaan di daerah ini, sehingga cita-cita orang tua mereka untuk menempa anak - anaknya menjadi pegawai negeri, merupakan tujuan terakhir walaupun usaha untuk menjadi pegawai negeri akhir - akhir ini bukanlah suatu hal yang mudah.

B. PERKEMBANGAN PENDIDIKAN SECARA GARIS BESAR :

Pengetahuan kita tentang pendidikan Indonesia asli sebelum mendapat pengaruh dari dunia luar (India), tidak banyak kita ketahui dengan pasti. Tetapi apabila kita berpaling kepada beberapa suku bangsa Indonesia sendiri Yang sampai sekarang ini masih hidup sederhana seperti suku Anak Dalem (Kubu) di daerah ini, kiranya berlaku apa yang pernah dikatakan oleh Dr. Vloemans; bahwa pendidikan itu pemberian pengertian dan contoh - contoh secara langsung, justeru karena manusia itu sendiri adalah makhluk budaya.

Apabila kita perhatikan poladasar kehidupan suku bangsa yang masih hidup bersahaja, apakah mereka itu hidup mengembara atau berburu dan hidup terutama dari pertanian/berternak, mempunyai pengaruh yang besar pula pada cara pendidikan yang diberikan. Masyarakat pedesaan di daerah ini yang hidup bercocok tanam dengan padi sebagai tanaman pokok, tentu nya sejak dari kecil anak - anak ikut dilatih melakukan pekerjaan di sawah/ ladang. Sekurang - kurangnya mereka telah mengenal beberapa alat yang di perlukan untuk mengerjakan sawah/ladang. Demikian pula masyarakat yang tinggal di daerah lebak (sebelah menyebelah sungai Batanghari Sembilan atau pantai), diberi contoh oleh orang tuanya cara - cara menangkap ikan, diajar berenang, mengempang sungai dan membuat alat - alat yang berhubungan dengan penangkapan ikan seperti : bubu, jempirai, jala, pukut dan sebagainya. Oleh karena itu tujuan pendidikan yang diberikan tidak dengan sengaja itu merupakan pendidikan yang praktis, serbaguna dan efisien.

Sementara mereka masih hidup serba bersahaja, nampaknya pendidikan dalam lingkungan keluarga sudah dianggap memenuhi kebutuhan, dimana peranan ayah dan ibu sebagai pendidik memegang peranan penting. Ayah mengajarkan pengetahuan dan kepandaian yang ada padanya kepada anak laki - laki, sedangkan ibu berbuat demikian pula terhadap anak - anak perempuan. Disamping orang tua sebagai pendidik, di dalam masyarakat seperti itu biasanya terdapat suatu golongan yang memiliki kecakapan istimewa, karena disamping memiliki pengetahuan duniawi juga memiliki pengetahuan

maknawiah, yang lazim di daerah ini disebut " poyang - poyang " (kata itu berasal dari " empu " dan " hyang "). Poyang - Poyang ini kemudian sering disebut " Guru " atau " Kiyai " setelah daerah ini mendapat pengaruh Islam, yang menjadi titik tumpu dan sebagai tempat bertanya mengenai hal - hal yang berhubungan dengan alam gaib dan hubungan sesama manusia (adat istiadat).

Ketika munculnya kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan pantai di daerah ini, maka agama Budha dijadikan agama Negara, dan dalam perkembangannya kemudian menduduki tempat yang penting - tidak hanya dalam dunia pelayaran - perdagangan, tapi juga sebagai pusat ilmu pengetahuan agama Budha, di Asia Tenggara. Walaupun agama itu anti Kasta, namun dalam perkembangannya hanyalah terbatas pada kalangan penghuni keraton saja dan tidak menyebar ke daerah Uluu. Dasar pendidikannya dititik beratkan pada ajaran agama Budha, disamping ilmu kejuruan dan keterampilan lainnya yang sejalan dengan kebijaksanaan yang dianut oleh keraton-dagang tersebut. Apa yang pernah diberitakan oleh I - Tsing mengenai pusat studi agama Budha yang pernah ada di daerah ini, tentunya tidak akan banyak berbeda dengan pusat pendidikan agama Budha di Nalanda, bahkan di Nalanda sendiri terdapat ashrama itu para siswa yang berasal dari Sriwijaya untuk memperdalam ilmu pengetahuannya.

Kemudian menjelang runtuhnya kerajaan Sriwijaya dan semakin longgarnya hubungan daerah ini dengan kerajaan Indonesia - Hindu di Jawa, maka mulailah pendidikan diberikan oleh Ulama Guru (Kiyai) pada siswa - siswa dalam jumlah yang terbatas berdasarkan agama Islam.

Agama Islam sebagai dasar ilmu pengetahuan yang diberikan kepada masyarakat melalui sistem pengajian, yang mula - mula pusat kegiatan pendidikan dan pengajaran di rumah Ulama Guru (pak Kiyai) dan kemudian berlangsung di mesjid/langgar. Akhirnya pendidikan dan pengajaran Islam yang lebih lanjut dilaksanakan di Pesantren dan kemudian di Madrasah - Madrasah.

Pendidikan Barat di daerah ini baru pertama kali dikenal pada akhir abad ke-19, yaitu dengan ditandai adanya usaha Zending di daerah Tanjung-sakti. Kemudian pada permulaan abad ke 20 yang dianggap sebagai awal pelaksanaan Politik Etika di daerah di daerah ini, dengan berdirinya sekolah-Gevernemen yang lazim disebut " Sekolah Desa ". Dalam rangka untuk me nyebar luaskan bahasa Belanda dikalangan masyarakat tertentu, pada kota-kota tertentu dibukalah sekolah - sekolah yang berbahasa pengantarnya bahasa Belanda misalnya : HIS,HCS,MULO dan sebagainya.

Sesuai dengan politik kolonial Belanda, pada dasarnya tujuan pendirian sekolah - sekolah tersebut adalah untuk mendapatkan tenaga - tenaga terdidik untuk dipergunakan dalam instansi pemerintah atau perkebunan - perkebunan Asing sebagai jurutulis dengan gaji yang murah.

Disamping adanya sekolah - sekolah Negeri, terdapat juga di daerah ini sekolah - sekolah yang dikelola oleh perorangan atau badan Swasta, baik yang bernaftaskan agama maupun yang bersifat nasional. Mengenai sekolah - sekolah yang bernaftaskan agama Islam, biasanya diusahakan oleh perorangan, organisasi Serikat Islam dan Muhammadiyah. Disamping itu terdapat pula di beberapa daerah, sekolah - sekolah yang bernaung dibawah Perguruan Tamam Siswa, dan sekolah - sekolah yang diasuh oleh Missi.

Setelah daerah ini diduduki oleh Jepang, maka semua sekolah Negeri - kecuali sekolah yang berbahasa pengantar bahasa Belanda atau guru-gurunya orang Belanda, dijadikan alat untuk menanamkan landasan idiil "Hakko - Ichi - U" yaitu mengajak bangsa Indonesia untuk bekerja sama dengan Jepang dalam rangka mencapai "Kemakmuran Bersama Asia Raya".

Sekolah - sekolah yang berbahasa pengantar bahasa Belanda dihapuskan sama sekali, sedangkan sekolah - sekolah swasta yang ada di daerah ini pada waktu itu, praktis tidak dapat berkembang dan akhirnya bubar.

Dengan semboyan "Indonesia - Nippon sama - sama", maka semangat dan disiplin Jepang dipompakan di sekolah - sekolah dalam rangka persiapan lahir dan batin untuk menghadapi perang Asia Timur Raya. Suatu hal yang terjadi pada masa itu, adanya perubahan yang penting sekali artinya bagi perkembangan pendidikan dan pengajaran selanjutnya di Indonesia, yaitu terhapusnya dualisme pengajaran dan pemakaian bahasa Indonesia, baik sebagai bahasa resmi maupun sebagai bahasa pengantar pada tiap - tiap jenis sekolah.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, timbullah perubahan - perubahan di segala lapangan, dan perubahan itu tidak hanya terjadi dalam lapangan pemerintahan saja, tetapi juga perubahan itu terjadi dalam dunia pendidikan. Perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan merupakan perubahan - perubahan yang bersifat mendasar, yaitu menyangkut landasan idiil, tujuan pendidikan, sistem persekolahan dan kesempatan belajar yang diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia.

Walaupun negara kita mengalami beberapa kali perubahan UUD, namun dasar dan falsafah Negara tidak mengalami perubahan, dan oleh karena itu Pancasila tetap dijadikan landasan idiil pendidikan di Indonesia.

Mengenai tujuan pendidikan selalu disesuaikan dengan keadaan, yang pada mulanya ditekankan kepada penanaman semangat patriotisme. Kemudian berdasarkan Undang - Undang No. 4/1950 dan Undang - Undang No. 12 tahun 1954, tujuan pendidikan lebih ditekankan kepada pembentukan manusia susila yang cakap dan demokratis. Akhirnya sampai sekarang, tujuan pendidikan Nasional diperbaharui dengan keputusan Presiden RI No. 145/1965 dengan dikokohkan oleh Ketetapan MPRS No. XXVII / MPRS / 1966 pasal 3 berbunyi sebagai berikut : membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan - ketentuan seperti yang dikehendaki oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mengenai sistem persekolahan di Indonesia berlaku lima tingkat : Pra Sekolah (Taman Kanak - Kanak), Pendidikan Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (Umum dan Kejuruan), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (Umum dan Kejuruan) dan Perguruan Tinggi dalam bentuk Universitas, Institut, Akademi atau Sekolah Tinggi yang diatur oleh Undang - Undang No. 22 tahun 1961. Sedangkan mengenai kesempatan belajar diatur oleh Undang - Undang Pendidikan tahun 1950 pasal 17; bahwa setiap warga negara RI mempunyai hak yang sama untuk diterima menjadi murid suatu sekolah, jika memenuhi syarat - syarat yang ditetapkan untuk pendidikan dan pengajaran pada sekolah itu.

Berbicara mengenai sekolah - sekolah di daerah ini dalam kurun waktu penjajahan Belanda sampai pada awal Revolusi Fisik, baik jenis maupun jumlah sekolah sangat langka, jika dibandingkan dengan keadaan di Jawa. Pada jaman kolonial Belanda tidak adanya demokratisasi dalam dunia pendidikan dan terbatasnya sekolah - sekolah yang dibangun oleh pemerintah, mengingat biaya yang tersedia tidak mencukupi dan minat dari masyarakat sendiri kurang sekali untuk memasuki sekolah - sekolah pemerintah sebagai akibat tradisi setempat.

Kemudian pada jaman Jepang, perkembangan sekolah - sekolah di daerah ini semakin menciut bahkan banyak yang membubarkan diri atau dihapuskan oleh Jepang. Oleh sebab itu pada awal Revolusi Fisik, banyak diantara pemuda - pemudi yang berasal dari daerah ini meneruskan sekolahnya ke Jawa, mengingat langkanya sekolah - sekolah di daerah ini dan ditinjau dari segi biaya lebih menguntungkan di Jawa. Tetapi setelah tahun enam puluhan dan seterusnya, mulailah bertambah sekolah - sekolah didirikan oleh Pemerintah atau badan Swasta, baik tingkat Sekolah Lanjutan Atas maupun tingkat Akademi atau Universitas. Dengan bertambahnya sekolah - sekolah tersebut di daerah ini, maka dari tahun ke tahun semakin berkuranglah pemuda - pemudi meneruskan pelajarannya ke Jawa.

B A B II

PENDIDIKAN TRADISIONAL

A. PENGARUH AGAMA HINDU DAN BUDHA :

Sebelum masyarakat di daerah ini menerima pengaruh kebudayaan Hindu, leluhur kita dalam melaksanakan tugas untuk mendidik anak - anaknya berlaku apa yang pernah dikatakan oleh Dr. Vloemans; bahwa pendidikan itu berarti memberi pengertian dan contoh - contoh secara langsung, seperti yang berlaku dikalangan masyarakat suku Anak Dalem (suku Kubu) di daerah ini. Pendidikan hanyalah merupakan pewarisan kebiasaan yang turun temurun dalam kelompok masyarakat yang tidak terlepas dari pengaruh lingkungan alam sekitar mereka bertempat tinggal menetap.

Type masyarakat pedesaan yang tinggal di daerah dataran tinggi dan disebelah menyebelah sungai Batanghari Sembilan ¹⁾ pada dasarnya sama, yaitu teknik bercocok tanam di ladang/sawah dengan padi sebagai tanaman pokok sambil berburu binatang atau menangkap ikan sebagai pekerjaan sampingan. Mereka yang tinggal di dataran rendah atau dipinggir - pinggir sungai - disamping usaha pokok mengerjakan sawah yang tergantung pada alam sekali setahun, menangkap ikan dengan cara - cara tradisional di sungai atau lebak - lebung dianggap sebagai mata pencaharian yang tidak kalah pentingnya dengan menanam padi disawah. Oleh sebab itu pengetahuan mereka yang tinggal didaerah tersebut mengenai cara menangkap ikan jauh lebih kompleks pengetahuannya daripada mereka yang tinggal didataran tinggi atau sebaliknya.

Apa yang dilakukan oleh orang tua dikerjakan atau dibiasakan pula pada anak - anaknya, dan sejak kecil anak - anak sudah diajak untuk mengikuti pekerjaan orang dewasa misalnya : berburu, menangkap ikan, berladang/bersawah, membuka hutan, membuat senjata, membuat perahu dan lain-lain bagi anak lelaki. Sedangkan bagi anak wanita diajarkan cara menganyam tikar, membuat bakul/keranjang, memasak nasi dan tugas - tugas lain yang berhu-

¹⁾ Yang dimaksud Batanghari Sembilan : s. Kelingi, s. Bliti, s. Lakitan, s. Rawas, s. Rupit. s. Batanghari Leko, s. Lematang, s. Ogan, dan s. Komerling. Kesembilan anak sungai tersebut dianggap sebagai suatu latar belakang historis yang memegang peranan penting dalam proses penyebaran kekuasaan, kebudayaan dan ekonomi.

bugan dengan rumah tangga. Kesemuanya itu pendidikan diberikan secara langsung dan tidak melembaga. Demikian pula mengenai beberapa isyarat dalam bentuk suara, tanda - tanda khusus dan mimpi dijelaskan secara lisan ke pada mereka dan lambat laun dapat dimengerti dan dihayati secara turun temurun. Disamping beberapa isyarat yang tersebut diatas, tidak kurang pentingnya peranan folklore yang dikenal dengan nama " andai - andai " 2) di daerah ini - tidak hanya sebagai pelipur lara bagi yang mendengarkan, berfungsi juga sebagai alat pendidikan moral seperti yang terkandung dalam cerita Si Pahit Lidah, Batubelah Batubetangkup dan sebagainya. Demikian pula mengenai andai - andai panjang (Jemaran dan Jelihiman) yang disampaikan oleh pawang / dukun di malam hari dan didengarkan oleh orang banyak, merupakan suatu cara yang unik dalam kerangka pendidikan di daerah ini.

Apabila kita simpulkan mengenai penjelasan diatas sebagai hasil pengamatan penulis, maka sebelum kedatangan kebudayaan Hindu di daerah ini telah mengenal suatu sistem pendidikan tradisional yang erat hubungannya dengan cara hidup setempat untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia seperti : berladang/bersawah, berburu, menangkap ikan dan lain - lain. Partisipasi secara langsung, baik secara berkelompok atau perorangan dalam semua kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidup, merupakan suatu sistem yang telah berlaku di daerah ini dari abad ke abad dalam masyarakat pedesaan, dimana peranan orang tua atau pemuka rakyat setempat yang dikenal dengan nama " Poyang " (kata itu berasal dari Empu dan Hyang) menjadi titik tumpuh sistem pendidikan dalam masyarakat tradisional sebelum daerah ini mendapat pengaruh kebudayaan Hindu/Budha.

Pada awal sejarah pendidikan di daerah ini telah dimulai dengan pendidikan dalam lingkungan keluarga sendiri yang bertujuan supaya anak - anaknya kelak kemudian hari dapat memegang kekuasaan dalam masyarakat sebagai manusia yang memiliki kecakapan istimewa, manusia yang bersifat gotong royong, manusia yang menghormati poyang - poyang dan manusia yang taat kepada adat. 3) Oleh karena orang tua atau poyang-poyang yang menjadi pusat penyampaian pewarisan kebiasaan yang turun temurun, maka sistem

2) Kertas kerja Ma'moen Abdullah pada Swminar Folklore di Jogjakarta dengan judul : Andai - andai sebagai cerita rakyat Sumsel, Universitas Gajah - mada, 1975 ; James Danandjaja, Guna Teater Rakyat bagi kehidupan masyarakat Indonesia, dalam Berita Antropologi Th.VII. No.22 Juli 1975, Jakarta, halaman 46.

pendidikan seperti ini dapat dianggap sebagai emberio bagi perkembangan pendidikan selanjutnya setelah mendapat pengaruh dari luar (Hindu/Budha dan Islam). Pemuka - pemuka rakyat (poyang - poyang) yang dianggap golongan terkemuka berdasarkan konsepsi kepemimpinan masyarakat tradisional yang berorientasi pada religio-magis, yang di beberapa daerah Kabupaten dikenal dengan nama " jurai tuo ", pada umumnya mengenal pengetahuan menulis dalam bentuk " aksara Uluan ". 4) Ada kemungkinan aksara tersebut sebagai sisa peninggalan nenek moyang kita atau sekurang - ku rangnya masyarakat di daerah ini mengenal tulisan pada kurun waktu kebudayaan Hindu datang ke Nusantara.

Namun demikian aksara Uluan yang belum banyak diteliti itu, nampaknya tidak semua orang dapat menuliskan dan tau artinya, dan hanya terbatas pada tua - tua dusun saja atau orang - orang yang termasuk golongan tertentu (jurai tuo) secara turun temurun.

Pada umumnya bangsa Indonesia memasuki kurun sejarah setelah kebudayaan Hindu datang ke Nusantara dalam abad pertama atau ke-dua Masehi, dengan pengertian bahwa pengaruh kebudayaan itu hanya terbatas pada tempat - tempat yang tidak jauh letaknya dari urat-nadi jalan-dagang Internasional via selat Malaka. Jadi tidak mengherankan apabila daerah pantai Timur Sumatera - khusus daerah pantai Timur Sumatera bagian Selatan, telah mendapat pengaruh kebudayaan Hindu pada awal Tarikh Masehi. 5) Kepala-kepala suku yang berkuasa pada waktu itu memperkembangkan kebudayaan asli sambil menciptakan hubungan Internasional yang kuat dengan dunia Asia. Untuk kepentingan mereka dalam dunia perdagangan Internasional, tindakan kearah organisasi yang lebih teratur terhadap keraton dan rakyat, maka di panggillah pendukung - pendukung kebudayaan India ke Timur. Investitur terhadap kepala-kepala suku tadi yang bersifat sakral legimitasi, menimbulkan kedatuan kedatuan baru sebagai tempat golongan penguasa dan golongan Hirokrasinya yang menentukan politik dan kebudayaan negara. Diantara kedatuan - kedatuan itu baru dikenal pada akhir abad ke - 7 Masehi, dimana

3) I. Djumhur, Drs. H. Danasuparta, Sedjarah Pendidikan, CV. Ilmu, Bandung, 1976, halaman 104 - 105

4) Tulisan tangan yang lebih dikenal dengan nama " tulisan Ulu " ditulis pada kulit kayu (" karas "), tanduk dan bambu dapat disamakan dengan daun rontal di Bali sebagai pengganti kertas pada waktu itu, banyak terdapat di daerah LIOT yang sebagian besar tidak terpelihara.

* kerajaan Sriwijaya yang pusat kuasanya terletak tidak jauh dari kota Palembang sekarang ini.6) merupakan negara pantai yang berdasarkan konsep - konsep agama Budha.7)

Awal penetrasi agama Budha di daerah ini, nampaknya hanya terbatas pada kalangan penguasa atau golongan yang terdekat dengan penguasa saja, sedangkan pengaruhnya di daerah Uluu belum begitu kelihatan. Mungkin sekali sulitnya hubungan antara kota pelabuhan dengan daerah - daerah Uluu, menyebabkan penyebaran kebudayaan itu tidak begitu lancar karena satu-satunya hubungan pada waktu itu mempergunakan jalan sungai. Akibat keadaan alam di daerah ini, proses pembentukan rawa - rawa sampai ke muara Sungai, lebatnya hutan - rimba yang dihuni oleh binatang buas, telah proses perkembangan kebudayaanpun ke daerah - daerah Uluu semakin longgar. Oleh sebab itu masyarakat pedesaan yang hidupnya bertani dengan padi sebagai tanaman pokok, masih tetap teguh memegang tradisi lama seperti penyembahan benda - benda sakti atau roh - roh nenek moyang. Salah satu faktor itu pulalah yang menyebabkan Islam mudah berkembang di daerah Uluu, karena pengaruh Buddhisme sangat tipis dan perkembangannya hanya terbatas pada golongan aristokrasi saja. 8) sekalipun agama itu sendiri anti kasta.

Walaupun telah ada tanda - tanda agama Budha di daerah ini dengan diketemukannya patung Budha dengan corak Amarawati di Bukit Siguntang, namun gambaran yang lengkap mengenai Pendidikan dan ilmu pengetahuan didapati dari sumber - sumber Cina beberapa abad kemudian. Salah seorang diantara musafir - musafir Cina yang pernah melakukan perjalanan ke India dan singgah di Sriwijaya adalah I - Tsing.

Sebelum sampai ke India ia singgah lebih dulu di Sriwijaya selama enam bulan untuk mempelajari gramatika bahasa Sanskerta dalam tahun 671 Masehi. Kemudian dalam perjalanan pulang kembali ke negeri asalnya, dalam tahun 685 Masehi singgah lagi untuk menyalin dan menterjemahkan kitab - kitab

5) C. Nooteboom, Sumatera dan Pelayaran di Samudera Hindia, Bhadrata, Jakarta, 1972, halaman 10-14 ; Prof. Dr. N. J. Krom, Zaman Hindu, PT. Pembangunan, Djakarta, 1954, halaman 29

6) Kebanyakan para ahli menentukan lokasi pusat kerajaan itu dipulau Sumatera, tetapi kenyataannya prasasti-prasasti sebagian besar diketemukan di daerah Sumatera bagian Selatan.

7) Prof. Dr. Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1976, halaman 23

agama Budha. Oleh karena tugas tersebut sangat berat dan memerlukan pembantu-pembantu khusus, maka ia pulang ke Canton menjemput empat orang pembantu dan kemudian dibawa ke Sriwijaya. Rupa - rupanya tidak hanya kitab - kitab yang berhubungan dengan agama Budha saja yang digarapnya, tetapi juga menulis dua biografi musyafir - musyafir pendahuluannya dan suatu karya tulis yang berbobot mengenai pelaksanaan agama Budha di India dan di Semenanjung Melayu. Akhirnya hasil karya ilmiahnya itu dikirimkan ke Cina melalui utusan seorang ulama - musyafir pada tahun 692, sedangkan ia sendiri baru sempat pulang ke Canton dalam tahun 695 Masehi. 9)

Karya tulis I - Tsing yang menceritakan hal ikwal orang - orang yang mendahului dia telah diterjemahkan kedalam bahasa Prancis dengan judul " *Memoire sur les religieux eminents qui allerent chercher la Loidans les pays d'occident* " dan karya tulis lainnya yang telah disalin kedalam bahasa Inggris dengan judul " *A recard of the Buddhist religion as practised in India and the Malay Archipelago* ", merupakan sumber penting bagi kita untuk mengetahui ciri - ciri agama Budha yang berkembang pada waktu itu. Demikian pula mengenai fungsi Sriwijaya sebagai kerajaan - pantai, telah menduduki tempat yang penting sebagai pusat ilmu pengetahuan agama Budha di Asia Tenggara, dimana Palembang sendiri kemudian menjadi pusat ziarah pemeluk agama Budha. 10)

Para peziarah ini berdatangan dari berbagai penjuru terutama dari Cina, dan disamping itu dari India sendiri berdatangan pula para pendeta ketempat ini dalam perjalanannya ke Jawa. Usaha untuk meningkatkan pengetahuan tentang agama Budha terus dikembangkan, lebih - lebih pada masa pemerintahan Raja Balaputera Dewa dan sesudahnya. Atas permintaan raja Balaputera Dewa kepada raja Dewapaladewa, maka didirikanlah wihara di Nalanda sebagai tempat penampungan bagi mahasiswa yang datang dari Sriwijaya atau dari daerah Timur lainnya. Kemudian dalam tahun 1005 raja pengganti Balaputera membangun sebuah candi Budha di Nagipattana dengan nama Cudamaniwarman-wiraha. 11)

8) Dra.Sutari Imam Barnadib, Pengantar Sejarah Pendidikan I, Yayasan FIP-IKIP.Jogyakarta, 1975, halaman 8

9) Prof. Dr. N.J.Krom, op cit, halaman 54 - 55

10) Sartono Kartodirdjo.et al, Sejarah Nasional Indonesia II, Balai pustaka Jakarta, 1977, halaman 53

11) Ibid, halaman 57

Di dalam agama Budha sendiri perniagaan dapat sejalan dengan agama, karena cita - cita ke Bodhisatwaan merupakan inti kehidupan rohaniawan dalam arti bahwa setiap individu harus berusaha dan berbuat demi keselamatan umat manusia, agar manusia itu sendiri mempunyai arti didunia ini. 12) Perbuatan adalah dasar - hidup mereka dan betapa rendahnya atau pekerjaan apa saja tetap dianggap mulia, sehingga pekerjaan berniaga sambil merampok adalah suatu hal yang lumrah. Terkutuklah mereka yang tidak berbuat apa-apa !! Oleh sebab itu tidak mengherankan apabila dalam sejarah Tiongkok dalam abad ke - 9/10 Masehi, biara - biara sebagai tempat para pendeta agama Budha menjadi pusat kegiatan Bank dan menjadi tempat pertemuan saudagar - saudagar asing. 13)

Apa yang diberitakan oleh Fa-Hien yang pernah berkunjung ke India mengenai masa pemerintahan raja Candragupta II ± 375 Masehi, dimana suatu biara yang dapat menampung 1000 orang biarawan yang melakukan studi dan diskusi/seminar. Biara tersebut merupakan ashrama bagi mereka dengan diperlengkapi enam ruang sidang yang cukup luas, gedung bertingkat tiga, dikelilingi oleh dinding tembok setinggi sepuluh meter dan tiga buah menara tinggi terpancang di kiri kanan bangunan tersebut.

Keadaan bangunan dan sistem pendidikan yang berlaku pada waktu itu, sedikit banyaknya berpengaruh dan berkembang di Sriwijaya pada waktu kerajaan itu mencapai puncak kebesarannya berdasarkan konsep agama Budha sebagai agama negara. Sesuai dengan berita musyafir I-Tsing yang pernah melakukan studi kelayakan di Sriwijaya, ia menggambarkan keadaan perkembangan agama Budha pada waktu itu dan pusat kegiatan ilmu pengetahuan yang pernah dikunjungi oleh seorang mahaguru Dharmapala yang pernah memberikan kuliah di Universitas Nalanda. Disamping itu terdapat tujuh orang dosen tetap memberikan pengajaran dan salah satu diantaranya Shakyakirti yang mempunyai reputasi internasional.

Demikian pula dalam tahun 720 Masehi pusat kegiatan ilmu pengetahuan itu dikunjungi oleh Vajrabodi dan Amogavajra 14) dalam rangka menyebarkan agama Budha Mahayana di daerah Selata.

12) R. Moh. Ali, Peranan bangsa Indonesia dalam Sejarah Asia Tenggara, Bhratara, Jakarta, 1963, halaman 32

13) Dra. Sutari Iman Barnadib, Op cit, halaman 9

14) M. O. Parlingungan, Tuan Ku Rao, Tanjung Pengharapan, Medan, 1964, halaman 576

Yang menarik perhatian kita mengenai bahasa Melayu Kuno yang secara resmi dipakai oleh kerajaan Sriwijaya, maka besar kemungkinan bahasa tersebut - disamping bahasa Sanskerta dan Pali, dipelajari juga oleh para musafir atau mahaguru yang pernah memberikan pendidikan dan pengajaran di pusat kegiatan ilmu pengetahuan tersebut. Betapa penting posisi dan fungsi kerajaan Sriwijaya sebagai pusat kegiatan ilmu pengetahuan - disamping pusat pelayaran - perdagangan, banyak dikunjungi oleh musafir - ulama untuk mempelajari ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan agama atau yang ada sangkut pautnya dengan pelayaran - perdagangan. Sebagai kerajaan-pantai lambat laun menjadi kuat dan termasyhur dimana - mana, karena orientasinya pada pelayaran - perdagangan dengan daerah - daerah seberang lautan, dan secara keseluruhan telah menguasai urat - nadi pelayaran via selat Malaka termasuk beberapa daerah di semenanjung Malaya pada akhir abad ke - 8 ($\pm$ 775 Masehi). 15)

Untuk melaksanakan perdagangan yang luas itu diperlukan sarana dan prasarana transportasi serta pegawai-pegawai yang dapat menjalankan semua kegiatan yang berhubungan dengan itu. Maka untuk ini diperlukan pendidikan atau keterampilan (menghitung laba - rugi, ilmu pelayaran, membuat perahu dan sebagainya), karena perdagangan itu sendiri meminta pendidikan yang praktis dan langsung dapat dipakai dalam perniagaan. Oleh sebab itu pada awal proses pengembangan pendidikan di dalam keraton - dagang dimulai dengan ilmu - ilmu praktis yang berhubungan dengan pelayaran - perdagangan, dan kemudian menjadi pusat kegiatan ilmu pengetahuan yang bersifat spiritual - regius. Karena letak ibukotanya dipertengahan jalan - dagang laut antara Tiongkok - India, tidak mengherankan ibukota Sriwijaya tersebut telah menjadi pusat pertemuan saudagar - saudagar asing dan pendeta - pendeta dalam perjalanan dari Tiongkok ke India atau sebaliknya, sehingga akhirnya menjadi pusat perdagangan dan pusat pengkajian agama Budha.

Apabila kita mengakui dinasti Cailendra bagian dari keluarga raja - raja Sriwijaya, yang pada akhir abad ke - 8 Masehi pernah meletakkan titik tumpu kuasanya di daerah Jawa Tengah, maka bangunan - bangunan suci yang masih berdiri sekarang ini (Borobudur, Mendut, Pawon) adalah hasil karya seni bangun dan seni pahat dalam kerangka arsitektur yang tidak ternilai. Pada

15) Satyawati Suleiman, Concise Ancient History of Indonesia, Pusat Penelitian Purbakala & Peninggalan Nasional, Jakarta, 1977, halaman 18

* salah satu candi Borobudur dapat terlihat suatu lukisan yang menggambarkan sistem sekolahan pada waktu itu. Di tengah - tengah pendapa besar duduk se orang pendeta (Brahmana) yang dikelilingi oleh siswa - siswa yang sedang me megang buku untuk belajar membaca dan menulis. Siswa - siswa tinggal bersama dengan Gurunya dalam satu ashrama, dimana guru itu sendiri tidak menerima gaji karena hidupnya telah dijamin oleh siswanya sendiri. Dasar pendidikan tentunya dititik beratkan pada agama Budha - disamping ilmu ke juruan lainnya, yang sejalan dengan politik yang dianut oleh keraton-dagang untuk memperoleh laba yang besar. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa pendidikan pada masa - masa sebelum dan sesudah perkembangan agama Budha di daerah ini telah teratur dengan baik, walaupun disana - sini (daerah Uluan) terdapat sistem pendidikan yang berpusat pada orang tua (rumah tangga).

Pada abad - abad terakhir menjelang runtuhnya kerajaan Sriwijaya yang telah diawali oleh serbuan Cola dalam tahun 1024/1025 Masehi dan akhirnya dalam pertarungan perebutan antara keraton - keraton di Nusantara, yang pada taraf terakhir dimenangkan oleh Jawa sebagai kerajaan agraris - maritim 16)nampaknya sistem pendidikan tidak lagi dijalankan secara besar - besaran seperti keadaan sebelumnya. Keadaan itu berlaku di Indonesia pada umumnya ketika menjelang runtuhnya kerajaan-kerajaan Indonesia - Hindu 17) dan munculnya kota - kota bandar yang bernaifaskan Islam sebagai ideologi yang kuat.

Pendidikan diberikan oleh Ulama Guru pada siswa - siswa dalam jumlah terbatas ditempat ibadat (mesjid) atau dirumah Ulama Guru itu sendiri. Ilmu yang diberikan tidak hanya bersifat spiritual - religius saja, tapi juga ilmu - ilmu yang bersifat praktis diajarkan kepada mereka, seperti ilmu beladiri (pencak), dukun patah, pertanian, pelayaran - perdagangan, perikanan dan sebagainya. Namun ilmu - ilmu tersebut diberikan kepada mereka secara turun temurun melalui jalur keturunan. Oleh sebab itu apa yang kita lihat pada masyarakat yang hidup di pedesaan sekarang ini, ilmu yang praktis itu tidak semua orang memilikinya dan secara khusus dikuasai oleh suatu kelompok keluarga/daerah secara turun temurun.

16) B.Schrieke, Indonesian Spciological Studies, W.van Hoeve the Hague Bandung, 1955, halaman 16

17) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pendidikan di Indonesia da ri Jaman ke Jaman, Jakarta, 1979, halaman 29

Pengaruh kekuasaan Barat di daerah ini baru dimulai pada awal abad ke-19, meskipun pengaruh VOC telah dimulai sejak tahun 1722. Kemudian penduduk daerah ini secara riil baru diintensifkan pada tahun 1808, yaitu dalam rangka politik Daendels mempertahankan pulau Jawa dari serangan Inggris, sehingga Palembang sebagai pusat Kesultanan diduduki oleh pasukan Daendels yang berkekuatan 100 orang.¹⁸⁾

Baik bangsa Belanda maupun bangsa Inggris, nampaknya tidak memberikan pengaruh khusus kepada corak pendidikan di daerah ini, karena hubungan mereka itu hanyalah terbatas dalam dunia perdagangan saja.

Seperti telah kita ketahui bahwa Inggris telah menduduki Bengkulu waktu itu, sedangkan antara Inggris dan Belanda sendiri bermusuhan. Dalam usaha untuk menguasai Palembang dan mengusir tentara pendudukan Daendels, Raffles pernah mengadakan kontak dengan Sultan (Machmud Badarddin II) dengan mengirimkan 80 pucuk senjata dan amunisi.

Hubungan Kesultanan Palembang dengan bangsa Portugis di Malaka sampai pada akhir abad ke - 16 selalu mengikuti kebijaksanaan Demak, yang telah mengambil alih peran Malaka dalam menyebarkan agama Islam di daerah Nusantara. Serbuan Demak terhadap Malaka sejak tahun 1512 - 1513 ; 1535 1551 dan 1574¹⁹⁾ selalu mendapat bantuan dari Palembang, sehingga tidak memberikan kesempatan kepada bangsa itu untuk berpengaruh di daerah ini. Dengan adanya persaingan antara Inggris di Bengkulu dengan Daendels untuk menguasai daerah ini sebagai penghasil lada dan timah, menyebabkan pengaruh Barat sangat minim dan perkembangan pendidikan tradisional tidak mengalami perubahan yang bersifat mendasar.

Sementara Inggris masih berkuasa di Bengkulu, sempat juga misi Jerman dibawah zending Kristen memasuki daerah Tanjung sakti pada tahun 1860, dan oleh karena sesuatu hal tugas suci itu diserahkan kepada misi Katolik dalam tahun 1896,²⁰⁾ dibawah asuhan seorang pastor Pater J van Meuts.²¹⁾ Oleh karena itu sempat juga mereka membuka sebuah sekolah

18) H. J. de Graaf, Geschiedenis van Indonesia, W van Hoeve, 's Gravenhage, Bandung, 1949, halaman 305

19) B.Schrieke, Op cit, halaman 146; B.H.M. Vlekke, Nusantara a history of Indonesia, PT. Soeroengan, Jakarta, 1961, halaman 97

20) Kementerian Penerangan, Rep. Indonesia Prop. Sumsel, Jakarta, 1954, halaman 706

21) Majelis Agung Waligereja Indonesia (MAWI), Sejarah Gereja katolik Indonesia, Arnoldus Ende - Flores, 1974, halaman 167

x

Desa (Volkschool) tiga tahun dan Voorvolkschool dua tahun di Simpang tiga Tanjung sakti, di Benting dan di Jokobelut dibawah asuhan P.J.van Hoof dan kemudian dilanjutkan oleh Vanjenshien. Setelah itu dibuka pula sebuah sekolah pertanian (Landbouwschool) yang lama belajar satu tahun. ²²⁾ Dalam masyarakat setempat sekolah itu lebih dikenal dengan nama " sekolah Minggu " karena kegiatannya pada hari Minggu saja di Gereja. Mula - mula sekolah tersebut mendidik + 30 orang murid dan kemudian menjadi 50 orang murid. Tetapi dalam tahun 1918 sekolah tersebut terpaksa ditutup karena tidak ada muridnya. Penyebaran agama Katholik dengan mempergunakan sarana pendidikan yang setingkat dengan pendidikan dasar pada akhir abad ke - 19, hanyalah terbatas di daerah sekitar Tanjung sakti saja dan tidak dapat menjangkau daerah yang lebih luas, karena mendapat tantangan hebat dari masyarakat setempat setelah masuknya Serikat Islam di daerah Pagaralam pada awal abad ke -20.

Akhirnya setelah jatuhnya kesultanan Palembang yang ditandai dengan diasingkannya Sultan Machmud Badaruddin II ketempat pembuangannya di Ternate, maka antara tahun 1848 - 1868 daerah Uluu satu demi satu berhasil dikuasai oleh pemerintah Belanda, ²³⁾ dan kemudian mengambil alih segala harta benda termasuk milik gereja Katholik dengan lembaga pendidikannya.

B. PENGARUH AGAMA ISLAM :

Apabila agama Islam masuk ke daerah ini belumlah dapat diketahui secara pasti. Namun demikian karena letak geografis Indonesia dan daerah Sumatera Selatan pada khususnya berpapasan dengan garis Khatulistiwa, kunci dua Samudra dan jembatan antara daratan Asia - Australia, merupakan pintu gerbang yang sangat penting dan silang pertemuan antara pedagang-pedagang yang datang dari segala penjuru, sehingga daerah ini amat terbuka bagi migrasi bangsa - bangsa, penetrasi kebudayaan dan ekspansi politik - ekonomi. Itulah sebabnya pulau Sumatera - termasuk daerah Sumatera Selatan, jauh lebih dulu berkenalan dengan Islam dari pada daerah - daerah lain di Indonesia, apabila kita menganggap " jalan dagang - dunia " via selat Malaka sebagai

²²⁾ Wawancara dengan sdr. H. Jentamat dan Wasin, T'sakti, 7 - 7 - 1980.

²³⁾ J.L. van Sevenhoven, Lukisan tentang ibukota Palembang, Bhratara, Jakarta, 1971, halaman 46

perintis jalan kebudayaan bagi penetrasi Islam ke Timur. Sebagai akibat perkembangan Internasional yang melalui jalan - dagang tersebut, maka pada awal abad ke - 8 Masehi Islam sudah sampai di daerah ini, 24) yang dibawa oleh pedagang - pedagang asing seperti : prang - orang Gujarat, Arab dan Parsi sebagai missionaris handelsman. Rupa - rupanya agama Islam pada waktu itu belum merupakan faktor dominan dan masih memerlukan waktu beberapa abad kemudian, karena kerajaan Sriwijaya masih berkuasa penuh dan kemudian daerah ini dibawah pengaruh Majapahit. Tetapi ketika hubungan daerah ini dengan Majapahit semakin longgar, maka Palembang sebagai tanah asal Raden Fattah mulai berkembang menjadi pusat politik - ekonomi dan kebudayaan, yang dianggap sebagai pusat tenaga ekspansi baru dengan Islam sebagai motor pendorong yang kuat di daerah ini.

Kota Palembang yang terletak disebelah menyebelah sungai Musi – yang sekarang menjadi ibukota Propinsi Sumatera Selatan, dahulu dibangun disuatu tempat yang tidak jauh dari Bukit Siguntang, suatu tempat yang telah dipilih berdasarkan pertimbangan - pertimbangan seksama, dimana lalu-lintas perdangan via anak sungai Batanghari Sembilan dapat dikuasai. Karenanya betapa penting anak - anak sungai itu sebagai jalur komunikasi dalam usaha menyebarkan agama Islam ke daerah Uluu.

Masuk dan berkembangannya agama Islam di daerah ini pada umumnya melalui dua jalur; jalur pertama melalui pedagang-pedagang asing Moslem yang tinggal di kota pelabuhan. Oleh karena kedudukan sosial - ekonominya jauh lebih baik dan tingkah laku yang sopan, menyebabkan mereka berpengaruh dikalangan masyarakat. Apabila seorang pribumi terkemuka telah memeluk agama tersebut, maka rakyat kebanyakan akan dengan mudah terpenggil pula. Demikian pula peranan kepala keluarga sangat menentukan, karena apabila seorang ayah telah memeluk agama Islam maka mau tidak mau anak - isterinyapun akan mengikutinya pula. Jalur yang kedua ialah melalui para pedagang Sumatera Selatan sendiri yang banyak bepergian berdagang ke tempat lain, dimana agama itu sudah berkembang seperti di Perlak (Passai) dan Malaka. Selama pergaulan dalam perdagangan itu mereka belajar agama

24) Panitia Penyelenggara MTQ Pertamina se Indonesia Ke-II, Masuk dan Perkembangan agama Islam di bumi Sriwijaya, Plaju, 1974, halaman 23; Lihat - dan bandingkan M.O. Parlindungan, op cit, halaman 576.

Islam, dan ketika mereka kembali bukan saja barang dagangan yang dibawa, akan tetapi ajaran agama itupun mereka kembangkan. Dalam rangka mengembangkan agama itu sasaran utama adalah anak - isterinya dan kemudian dikalangan keluarga terdekat dan seterusnya.

Pelajaran yang pertama antara lain mengucapkan " kalima Sahadat ", cara melakukan Sholat dan membaca ayat - ayat Al Qur'an yang dapat dibacakan pada waktu sholat. Kemudian apabila sudah dirasakan perlu untuk mengetahui / mempelajari lebih mendalam, maka harus pergi kerumah Ulama - Guru (Kiyai) atau mendatangkan sendiri Ulama Guru untuk memberikan pengajaran agama yang sangat terbatas dikalangan anak - Isteri, keluarga terdekat dan tetangga. Oleh sebab itu sistem pendidikan pada abad - abad terakhir jatuhnya kerajaan Hindu di Indonesia, tidak lagi dijalankan secara besar - besaran seperti keadaan sebelumnya.

Disetiap dusun biasanya terdapat pemuka agama, yang dianggap oleh masyarakat sebagai tempat tumpuan ilmu gaib dan ilmu - ilmu lainnya yang bersifat spiritual - religius. Sebagai pemuka agama yang memiliki fungsi ganda - memberikan doa pada waktu upacara dusun atau keluarga - menguburkan orang mati - menyembelih binatang menurut agama, dapat juga berfungsi sebagai " dukun " yang memberikan penyembuhan (jampi - jampi) segala macam penyakit.

Pengajian yang diberikan di rumah Ulama Guru merupakan pelopor pendidikan yang dilakukan di mesjid/langgar yang bersifat elementer,²⁵⁾ yaitu dimulai dengan mempelajari huruf Arab atau kadang - kadang langsung mengikuti guru dengan menirukan apa yang telah dibacakan dari kitab suci Al Qur'an. Cara memberikan pelajaran di rumah atau di mesjid/langgar jauh berbeda dengan cara mengajarkan di sekolah - sekolah modern.

Ia tidak menganut sistem tertentu dan yang menjadi tujuan pokok pengajaran, yaitu agar murid - murid dapat membaca kitab suci tersebut sampai tamat sambil melagukan menurut irama tertentu. Sistem pengajaran berlaku secara *hoofdelijk*, yaitu pelajaran diberikan orang perorang secara lisan dan menghadap Ulama Guru satu persatu, sedangkan murid - murid yang lain menunggu giliran sambil mendengarkan duduk bersilah mengelili-

²⁵⁾ Menurut pengamatan penulis, ada beberapa daerah yang langsung mendirikan mesjid dan ada juga mendirikan langgar lebih dulu. Namun sistem pengajian di daerah ini dilakukan dirumah Ulama Guru sebelum ada mesjid / langgar. Pengajian tersebut mempunyai sistem " Guru Kula ".

ngi dengan menghadapi Guru. Apabila muridnya hanya terdiri dari beberapa orang saja, biasanya mereka duduk berhadapan sebelah kanan sambil mendengarkan pelajaran yang diberikan. Sementara mereka yang belum mendapatkan giliran membaca, murid - murid lainnya berlatih dengan suara yang keras, sehingga ditempat pengajian itu kedengaran suara yang bersimpangsiur. Meskipun demikian guru yang sudah berpengalaman selalu saja siap melakukan koreksi terhadap suara yang bersimpangan siur itu, dan dapat mengetahui mana yang salah dan kemudian diperbaikinya. Memang perbaikan-perbaikan itu perlu sekali, karena jika kata - kata serta kalimat - kalimat itu salah diucapkan, maka akan hilanglah nilai dan makna yang sebenarnya.

Pelajaran biasanya diberikan pada pagi hari setelah selesai sembahyang subuh atau pada petang hari sesudah sembahyang maghrib yang memakan waktu $\pm$ dua jam. Mengenai lamanya belajar tidak ditentukan, tetapi kadang-kadang dapat juga selesai beberapa bulan dan umumnya memakan waktu satu tahun. Uang sekolah tidak dipungut, tetapi pada waktu anak dibawa/ diserahkan kepada Ulama Guru untuk diberi pelajaran - apakah tempat belajarnya dirumah Ulama Guru ataukah di mesjid / langgar, biasanya orang tua si anak membawa suatu hadiah berupa benda " in natura " atau uang.

Biasanya tidak hanya pada waktu itu saja orang tua si anak memberikan hadiah, namun swaktu - waktu Ulama Guru menerima suatu bingkisan berupa ikan, buah - buahan dan hasil bumi lainnya dari orang tua si Murid, ²⁶⁾ se dangkan bagi mereka yang miskin anaknya dapat juga mengikuti pelajaran tanpa memberikan sesuatu.

Setelah mereka menyelesaikan pelajarannya dalam arti tamat membaca Al Qur'an, maka diadakan upacara selamatan (" khataman ") di rumah Pak Guru atau di mesjid / langgar dengan mengundang makan bersama kerabat terdekat, tua - tua kampung dan teman - teman murid. Semua biaya untuk keperluan tersebut dipikul bersama oleh orang tua murid yang bersangkutan.

Betapa erat hubungan antara murid dengan Ulama Guru pada umumnya berlangsung terus dan tetap terpelihara dengan baik sampai Ulama Guru tersebut meninggal dunia, sekalipun murid itu sendiri telah melanjutkan pendidikan pada lembaga yang lebih tinggi. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya me

²⁶⁾ Wawancara dengan sdr. Syargawi Kepala Ibtida'yah Negeri Lumpatan 6 Desember 1980; wawancara dengan Bapak H. Munir eks guru Ibtida'yah pa da jaman pemerintah Belanda.

reka memberikan fitrah tiap - tiap tahun kepada Gurunya sebagai suatu kewajiban moral.

Apabila kita perhatikan sistem pendidikan yang berlaku di daerah ini pada awal perkembangan agama Islam - apakah pengajian itu dilaksanakan di rumah Ulama Guru atau di mesjid/langgar, kiranya dapat disamakan dengan tingkat hidup Brahmacarin yang berlaku dalam masyarakat Hindu. Oleh sebab itu dalam masyarakat moslem pada umumnya, adanya undang-undang wajib belajar yang tidak tertulis, yaitu setiap anak laki - laki dan perempuan yang sudah berumur tujuh tahun diwajibkan belajar mengaji Al Qur'an dan cara - cara melakukan sholat. Karenanya dapat kita katakan bahwa dimana terdapat masyarakat moslem ulama Guru, disana mulai adanya pengajaran Islam yang merupakan proto-type daripada Pesantren yang sebenarnya. 27)

Ulama Guru biasanya disebut " Kiyai " yang mendapatkan tempat tersendiri dalam masyarakat tradisional yang berdasarkan kesaktian (kharismatis) dan kehidupan keagamaan di daerah ini. Ia dihormati bukan saja oleh murid - muridnya, tetapi juga oleh seluruh masyarakat yang ada disekitarnya. Tradisi memberi banyak contoh tentang kesaktian dan kekuasaan pemimpin agama di Indonesia, baik pada jaman pra Islam maupun pada jaman sesudah masuknya agama Islam. Poyang - poyang atau kepala - kepala suku di daerah ini pada jaman pra - Islam, dianggap sebagai manusia yang luar biasa lagi perkasa, karena disamping kebolehan dalam pengetahuan maknawiah juga memiliki kesaktian atau kharisma.

Ia memiliki fungsi ganda dalam masyarakat - disamping mengatur warganya dalam kehidupan pemerintahan sehari - hari, secara otomatis memimpin warganya dalam kehidupan kerohanian seperti : upacara pembukaan hutan untuk ladang, upacara sesudah panen, mengempang sungai / lebak - lebung dan sebagainya. Oleh sebab itu pada awal periode penyebaran agama Islam di daerah Uluu, para muballigh (ulama Guru) yang lebih terkenal dengan panggilan " Kiyai " terpaksa mengikuti kondisi dan situasi di daerah tersebut demi untuk mempermudah pekerjaannya, karena masyarakat, karena masyarakat pe-

27) Prof. Soegarda Poerbakawaja, Pendidikan dalam alam Indonesia Merdeka, Gunung Agung, Jakarta, 1970, halaman 17 -- 18; Dra. Sutari Iman Bernadib, op cit, halaman 19.

desaan masih dalam süssana tradisional - irrasional yang diliputi oleh religio-magis. 28)

Beberapa orang yang perlu dicatat dan berjasa menyebarkan agama Islam di daerah - daerah Uluan seperti : di daerah Musi Banyuasin sendiri kita kenal Haji Hasan alias Haji Sepuh Jambi, Kiyai Marogan Haji Abdulhamid dan Abdulrahman yang lebih dikenal dengan nama Kiyai Delamat; di daerah Musi Rawas misalnya Mujang Jawe Gelar Mangkubumi, Kiyai Delamat, Pangeran Abuleman dan penghulu Haji Pidin; di daerah Lematang Ilir Ogan Tengah antara lain Syeh Mahmud Said Ratu Syeh Alam Raja Kuasa Kute Talang Gumiling ayek Lematang, Syeh Angkasa Ibrahim Human Ayek Lematang, Akhmad Sabirin Anom Suro, Raden Pallawa, Syeh Jalil, Ahmad Muhammad dan lain - lain; di daerah Lahat yang berpusat di Prodipo oleh Baharuddin Nurqadim alias Puyang Awak; di daerah Bangka-Belitung sendiri dikenal dengan nama Tuan Sarah, Nukhada Sulaiman, Qori, Syeh Abubakar (Sayid Hasan) yang kesemuanya berasal dari Johor. 29)

Perkembangan agama Islam di daerah Ogan Komerling Ilir dan Ogan Komerling Ulu tercatat nama - nama : Tuan Umar Baginda Sari (Raden Amar), Sayid Akhmad. Sayid Hamimul Hamim, Khotib Jamal, Pangeran Mas, Tuan Syarif Ali, Tuan Murarob, Tuan Tanjung Idris Salam, Umpu Si Jadi Holau, Umpu di Padang, Syeh Muhammad Saman, Haji Juana, Kemas Jambi, Marto Khotib, Haji Jamaluddin, Penghulu Umar dan lain - lain.

Sejarah penyebaran agama Islam pada hari - hari pertama di daerah ini menunjukkan adanya hubungan yang erat dengan sejarah hidup dan sejarah perjuangan Ulama Guru atau para Kiyai yang tersebut diatas.

Para kiyai tersebut dapat disamakan dengan para Wali di Jawa, yang sebagian besar dari mereka itu berasal dari negeri asing, bahkan asal usulnya kadang-kadang tidak diketahui dengan jelas. Dapat diduga bahwa para Kiyai tersebut dalam menyiarkan agama Islam dikalangan umat, tidaklah merupakan berpidato atau ceramah dimuka umum seperti yang berlaku dengan penyiaran agama sekarang ini, tetapi dalam kelompok - kelompok yang terbatas dan kemudian diteruskan dari mulut kemulut. Artinya dimana saja terdapat masyarakat

28) Sejarah Daerah Sumatera Selatan Provek IDKD 1977/1978, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Dep. Pendidikan & Keb. halaman 124 - 125.

29) Panitya Penyelenggara MTQ Pertamina se Indonesia ke II/1974, op - cit, halaman 27 - 35

* Islam atau pak Kiyai (Guru ngaji) , disana mulai adanya pengajaran Islam, yang mula - mula berlaku dikalangan keluarga sendiri atau di Mesjid/langgar, dan setelah pengikut - pengikutnya bertambah banyak, maka terjadilah tabligh - tabligh yang diadakan didalam suatu lembaga yang disebut pondok-pesantren. Oleh sebab itu dalam penyiaran agama Islam yang dilakukan oleh para Kiyai (muballigh - muballigh) di daerah Sumatera Selatan sangat rapat hubungannya dengan mesjid/langgar dan pesantren - pesantren.

Lembaga pesantren yang pertama kalinya di daerah ini (daerah OKI/ OKU) adalah berlokasi di marga Madang Suku II atas usaha Haji Juana yang berasal dari Banten. 30) Mereka tinggal dalam suatu pondok yang dapat di anggap sebagai ashrama, dimana mereka tidak hanya menerima pengajaran agama saja tapi juga ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan bercocok tanam dan pertukangan. Dalam tahun 1750 pesantren itu dibina oleh Kemas Jambi yang berasal dari Palembang dan kemudian diteruskan oleh Haji Jamaluddin yang berasal dari Martapura (kalimantan).

Pendidikan atau cara memberikan pengajaran yang telah berlaku pada jaman sebelumnya dilanjutkan oleh mereka (Pak Kiyai) sedemikian rupa, sehingga dari abad ke - abad lembaga itu menjadi basis - gerak - agama dan tempat pembentukan kader yang tidak dapat diabaikan, 31)meskipun dalam beberapa hal banyak terdapat kekurangan - kekurangan pada sistem pendidikan dan pengajaran itu. Tetapi apabila dilihat dari sudut pendidikan agama, pondok pesantren pada umumnya sudah memberikan jasanya yang tidak ternilai harganya kepada masyarakat Islam, karena telah banyak mencetak santri - santri yang memiliki iman yang kuat sebagai akibat pengaruh kehidupan dan kehidupan yang dicontohkan oleh Gurunya dan mellieu agama yang meliputi masyarakat pesantren sehari sehari - harinya. 32) Disamping itu pula lembaga tersebut telah memupuk semangat persatuan yang berdasarkan agama Islam, tempat tersebut banyak dikunjungi oleh pemuda - pemuda dari daerah - daerah lain yang memiliki bahasa dan alat kebiasaan yang berbeda seperti dari Koming, Kayuagung, Musi dan lain - lain.

30) Ibid, halaman 33.

31) Achdiat K. Mihardja, Polemik Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1948, halaman 49

32) Dr. A. Mukti Ali, Alam Pikiran Islam Modern di Indonesia, Tintamas Djakarta, 1964, halaman 17

Luas dan sempitnya bahan studi di pondok pesantren tidak sama, tetapi pada umumnya mereka itu (murid - murid) telah mendapatkan pendidikan elementer dari Mesjid/langgar setempat. Demikian pula mengenai lamanya belajar tidak sama, karena ada yang belajar hanya satu tahun saja dan ada pula yang belajar bertahun - tahun lamanya.

Gambaran global mengenai pelajaran pada pesantren seharai - hari, kira - kira dapat dukemukakan sebagai berikut : biasanya sesudah sembahyang Subuh pelajaran pertama dimulai dan menjelang makan siang mereka berbakti untuk keperluan bersama seperti : membersihkan halaman, kebun, bersawah dan sebagainya. Setelah selesai makan siang mereka beristirahat sambil tidur-tiduran menghafal pelajaran yang telah diberikan, dan kemudian setelah sembahyang Maghrib dan Isya' pelajaran dimulai lagi. Pelajaran inti yang diberikan dalam proses belajar mengajar adalah mengenai dogma agama (Usuluddin) yang meliputi dasar kepercayaan atau keyakinan Islam dan Ilmu Al Fikh yang meliputi :

1. Syahadat, suatu pernyataan yang harus diucapkan oleh setiap Muslim bahwa tidak ada Tuhan yang harus disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya.
2. Melakukan Sholat lima waktu.
3. Membayar zakat kepada fakir miskin.
4. Berpuasa dalam bulan suci Ramadhan.
5. Menunaikan ibadah Haji bagi mereka yang mampu. 33)

Nampaknya pendidikan dan pengajaran yang diberikan oleh Pak Kiyai itu pada dasarnya hanyalah mengenai pokok - pokok agama dalam segala macam aspeknya. Oleh karena pendidikan agama Islam sebagai lanjutan dari sistem pengajian Al Qur'an di Mesjid/langgar, maka pendidikan di pesantren pada umumnya dapat disebut " pengajian al Kitab ", karena disitu di pelajari kitab-kitab Fikih, kitab Tafsir, kitab Tauhid, bahasa Arab dan lain - lain. Ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Hadith dan Al Qur'an dan tafsir - tafsirnya - begitu pula mengenai ilmu al Kalam - Tauhid, biasanya termasuk pelajaran yang agak tinggi dengan sistem klasikal.

33) Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke-Jaman, Jakarta, 1979, halaman 34; I Djumhur, Drs. Danasuparta, Op cit, halaman 113; Drs. Abu Ahmadi, Sejarah Pendidikan, CV. Toha Putra, Semarang, 1975, halaman 16

Meskipun pengetahuan umum pada mulanya jarang diajarkan di pesantren, tetapi proses perluasan pengajian dan penentuan corak - corak pengetahuan yang diberikan dalam lembaga itu sangat tergantung kepada keadaan Guru (Pak Kiyai) dan kecakapannya.

Nampaknya pada masa - masa awal perkembangan lembaga itu, rencana pelajaran yang tertentu, sistematis dan pembagian kelas belum ada, sehingga tidak dapat dipastikan sesudah berapa tahunkah murid - murid itu baru di anggap sudah menamatkan pelajarannya. Demikian pula tidak ada peraturan khusus mengenai syarat penerimaan murid masuk, baik mengenai usia maupun mengenai kecakapannya. Hal tersebut memang tidak dipikirkan karena tujuan yang pertama daripada pesantren ialah sekedar menyiarkan agama Islam sambil beribadat. 34) Maka oleh sebab itu kita dapat murid - murid dari bermacam - macam usianya. ada yang masih muda tetapi ada pula yang sangat lanjut usianya. Seperti yang telah disebutkan diatas, bahan pelajaran yang di berikan hanya mengenai pelajaran agama saja disamping penguasaan bahasa Arab secara pasif. Oleh karena tidak diberikan pengetahuan umum sebagai bekal bagi murid untuk menghadapi kehidupan sehari - hari, maka dipandang dari sudut paedagogis penyelenggaraannya berat sebelah. Tetapi dilihat dari sudut pendidikan moral, lembaga pendidikan itu sudah memberikan jasanya yang tidak ternilai harganya kepada masyarakat Islam di daerah ini secara keseluruhan.

Sebelum pelajaran dimulai murid - murid diharuskan belajar sendiri (muthala'ah), sehingga dengan tidak disadari mereka telah dididik belajar sendiri dan membahas sendiri langsung dari kitab yang dipelajari atau dengan kata lain mereka itu telah mengenal " CBSA " (cara belajar siswa aktif). Meskipun cara memberikan pengajaran dan pendidikan di pesantren pada umumnya sangat sederhana, tetapi nampaknya telah memiliki beberapa sistem yang tertentu. sistem mana yang disebut " sistem serogan " dan " sistem Weton ". 35) Yang dimaksudkan sistem sorogan, murid satu demi satu menghadapi Guru untuk menerima pelajaran dengan menyorongkan kitabnya, sehingga dalam sejarah pendidikan sistem itu lebih mendekati sistem hoofde-lijk (individual.)

34) H. Abubakar. Sedjarah Mesjid dan amal Ibadah dalamnya, Adil & Co, Jakarta, 1955 halaman 49

35) Drs. Amir Hamzah Wirjosukarto, Pembaharuan Pendidikan dan Pengajaran Islam yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah, Penyelenggara Publikasi Pembaharuan Pendidikan Pengajaran Islam, Jogjakarta, 1962, halaman. 74

Sistem itu berlaku bagi murid - murid pada tingkat permulaan dan biasanya diberikan oleh murid yang telah tinggi tingkatnya (guru bantu). Sedangkan sistem weton atau sering disebut " sistem halaqah " berlaku dalam cara memberikan pelajaran pada murid - murid yang telah lanjut pelajarannya di mana mereka duduk mengelilingi Gurunya sambil mendengarkan pelajaran yang diberikan.

Pada sistem ini sifatnya agak lain, karena setiap kali dimulai dengan pelajaran yang baru guru tidak memperdulikan apakah pelajaran yang telah lampau sudah dikuasai atau belum, Murid - murid belajar secara klasikal dan tiap - tiap mereka mendapatkan bahan pelajaran yang sama.

Sistem ini disebut sistem " weton " karena kata itu sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti " waktu ", justeru karena pelajaran diberikan pada waktu-waktu tertentu. Bagaimanapun juga lembaga pesantren yang pernah ada di daerah ini, sedikit banyaknya ada pengaruh dengan pesantren di Jawa.

Lama belajar menurut sistem diatas tidak ditentukan menurut jam, tetapi berlangsung menurut ketentuan Guru (pak Kiyai) sendiri. Betapa besar pengaruh pak kiyai kepada muridnya, baik pada waktu belajar maupun dalam keadaan sehari - hari kurang bersifat demokratis, tetapi lebih menjurus kearah hubungan yang lebih bersifat otoritair.³⁶⁾ Hal ini disebabkan karena mereka menganggap bahwa pak Kiyai selain dari pada memiliki pengetahuan agama yang cukup banyak, juga dianggap sebagai orang keramat dalam masyarakat tradisional yang belum banyak mendapatkan pengaruh dari luar. oleh sebab itu penghargaan dan penghormatan masyarakat setempat dan murid - murid kepada pak Kiyai sama besarnya dengan penghargaan terhadap kaum Brahmana dalam Masyarakat Hindu.³⁷⁾ Untuk menentukan tinggi rendahnya pelajaran seseorang murid dapat dilihat pada kitab yang sedang dipelajarinya seperti mata pelajaran Ilmu Fikih, kitab yang terendah adalah Fat - hul Qarib dan yang tertinggi antara lain ' Al Mahalli, sehingga bagi seorang murid sudah merasa bangga kalau sudah mempelajari kitab ' Al Mahalli.

Lembaga pesantren di daerah ini pada masa sebelum dan sesudah kedatangan pengaruh Barat (Inggris dan Belanda) tidak banyak mengalami pero-

³⁶⁾ Ibid, halaman 82

³⁷⁾ Sutejo Bradjanegara, Sejarah Pendidikan Indonesia, Fasco, Jakarta, 1956, halaman 82

x

bahan, namun dari tahun ke - tahun selalu menyesuaikan dirinya menurut kehendak jaman, tetapi pada dasarnya tidak berubah tujuannya semula dari pada tempat menyiarkan agama Islam dan membentuk kader - kader Guru yang berwatak Islam, dan kemudian mereka akan mengemban tugas suci untuk mengislamkan masyarakat di daerah ini. Kalaupun ada perubahan di sana sini, adalah sebagai akibat banyak sedikitnya pengalaman - pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh orang - orang yang naik haji berasal dari daerah ini pada perempat abad ke - 20.

Hubungan VOC hanya terbatas pada Sultan saja, 38) sedangkan hubungan Portugis secara langsung dengan daerah ini sama sekali tidak ada, walaupun ada beberapa barang dagangannya jatuh ketangan rakyat melalui pedagang Cina atau Arab. Di Sumatera Selatan khususnya VOC hanya dapat tinggal pada suatu benteng yang terletak di sungai Aur berhadapan dengan benteng Kesultanan yang dipisahkan oleh sungai Musi. Mereka hanya berhubungan dengan petugas istana dalam masalah perdagangan lada, dimana hubungan itu selalu tidak konsisten. Tetapi setelah Belanda dapat mengalahkan Sultan Mahmud Badaruddin II, maka pada akhir abad ke - 19 mulailah pemerintah Hindia Belanda berorientasi ke daerah pedalaman, tanpa memperhatikan masalah pendidikan pribumi, karena pada dasarnya mereka tidak akan mencampuri soal - soal agama sesuai dengan kebijaksanaan politik pemerintah yang di kenal dengan "onthoudings politik". 39) Kemudian pada tahun 1882 pemerintah Hindia Belanda membentuk "Priesteraad" (Dewan Ulama) yang diberi tugas untuk mengawasi pengajaran agama di lembaga Pesantren, sehingga pengawasan terhadap pendidikan agama Islam daerah ini telah membawa pengaruh yang tidak sedikit dalam proses perkembangan pendidikan tradisional di daerah ini. Ruang gerak bertambah sempit dan lembaga pendidikan agama itu sendiri tidak dapat berkembang sebagaimana mustinya, lebih lebih setelah pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan "Goeroe Ordonantie" dalam tahun 1925 (Staatsblad No. 219) yang mengharuskan orang - orang yang akan memberi pengajaran untuk minta izin lebih dulu.

Suatu hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan mengenai proses pembaharuan pendidikan Islam menuju kepada sistem pendidikan Islam

38) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, op cit, halaman 42

39) Prof. Soegarda Poerbakawaja, op cit, halaman 16

modern, yaitu mengenai kedatangan bangsa Eropah di daerah ini mempunyai pengaruh yang sangat buruk terhadap perkembangan Islam secara keseluruhan walaupun pada akhir abad ke - 19 hubungan rokhaniah antara golongan Eropah di Indonesia dengan bangsa Indonesia sendiri sangat terbatas. Setelah dijalankan apa yang disebut " Politik Ethika " dalam tahun 1900, 40) dan realisasinya di daerah ini baru pada permulaan abad ke - 20, maka berangsur - angsur tambah meratailah pendidikan Belanda itu dikalangan atasan, disamping kemajuan - ke majuan yang pesat yang diperoleh oleh missi dan zending dalam dunia pendidikan baik didalam maupun diluar Jawa. 41) merupakan tantangan hebat bagi lembaga - lembaga pendidikan islam pada waktu itu. Apa yang dikatakan oleh Drs. Amir Hamzah Wirjosoekarto. 42) nasib pesantren pada waktu itu sangat menyedihkan. Keadaannya turun-mundur, membeku tertinggal jaman, fanatisme dan sebagainya meliputi lembaga Pesantren. Sebab - sebabnya dapat dicari karena kedudukannya geisolir (ter-sisih), aliran kebangkitan Islam telah dihalang - halangi masuk ke Indonesia dan non koprasi dipihak Pesantren sendiri terhadap apa saja yang berbau Barat (Belanda) menyebabkan ibarat katak didalam tempurung.

Demikianlah keadaan lembaga pendidikan Islam dan masyarakatnya di daerah ini pada akhir abad ke - 19 dan permulaan abad ke - 20, sehingga tiap-tiap periode dari pada sejarah kebudayaan sesuatu bangsa, akan memaksa ke pada golongan beragama untuk meninjau kembali isi dari pada kekayaan aqidah dan agamanya, dan begitulah sejarah kebudayaan dunia berjalan Kemunduran dan kefanatikan yang meliputi masyarakat Islam dan sikap " neutral " dibidang agama pada sekolah - sekolah pemerintah ketika itu, rehabilitasi Islam di Indonesia pada umumnya dan daerah Sumatera Selatan pada khususnya, mendapatkan manifestasinya dalam gerakan - gerakan Islam, dimana gerakan Muhammadiyah dan organisasi Islam lainnya (Serikat Islam) berangsur - angsur mendirikan Madrasah - madrasah, 43) sebagai akibat keadaan dan motif politik yang menguasainya dalam rangka pembaharuan lembaga pendidikan Islam secara menyeluruh.

40) J.S. Furnival, Netherlands Idie, a Study of plural economy, The Macmillan, New York, 1944, halaman 366

41) Ibid, halaman 380 - 381.

42) Drs. Amir Hamzah Wirjosoekarto, op cit, halaman 42

43) Dr. A. Mukti Ali, op cit, halaman 34

B A B III

PENDIDIKAN BARAT

Pengaruh Portugis dan VOC :

Pada Bab II laporan ini telah disinggung mengenai pengaruh bangsa Portugis dan VOC di daerah ini sebelum abad ke - 20. Namun perlu juga dijelaskan peranan kedua bangsa itu di daerah ini, untuk memperoleh gambaran konkrit sebagai bahan perbandingan dengan daerah - daerah Indonesia lainnya. Apa yang telah kita ketahui, bahwa keinginan bangsa Portugis untuk menghan curkan potensi Islam dimana - mana adalah pelaksanaan idee perang Salib, avonturisme perajurit - perajurit bangsawan dan nafsu monopoli ¹⁾ untuk me nguasai route perdagangan Asia. Oleh sebab itu hegemoni atas lautan Indone- sia dan penguasaan perdagangan di Asia Tenggara, adalah suatu tujuan utama menjadikan Indonesia sebagai " silang kehidupan " bagi bangsa Portugis. Penyakit perang Salib yang diimpor oleh armada Portugis ke perairan Asia dan Indonesia pada khususnya, merupakan tantangan hebat bagi pedagang-pe dagang muslim, yang selama ini menguasai jalan - dagang Asia via selat Malaka. Ekspansi Portugis di perairan Asia Selatan dengan mempergunakan kekuatan militer dan teknik perang dilaut terbuka,²⁾ dengan mudah menduduki Mala- ka dalam tahun 1511 sebagai pusat kegiatan pedagang - pedagang muslim pa- da waktu itu.

Rupa - rupanya maksud Portugis untuk mematikan perdagangan Islam dengan menikam Malaka sebagai jantungnya, telah membawa akibat sebaliknya, pin- dahnya piet a terre golongan muslim ke Sumatera Utara dan Sumatera bagian Selatan, yaitu dengan bangkitnya Aceh, Palembang dan Banten sebagai kota bandar yang berarti pada waktu itu.

Walaupun bangsa Portugis telah menanamkan kekuasaannya di Malaka selama 1¼ abad lebih, namun pengaruhnya terhadap daerah ini nampaknya tidak begitu jelas, karena Palembang sebagai kota bandar sampai akhir abad ke - 16 selalu mengikuti kebijaksanaan Demak, yang telah mengambil alih

¹⁾B. Schrieke, Indonesia sociological Studies I, Sumur, Bandung, 1960, halaman 37

²⁾R. Moh. Ali, Peranan bangsa Indonesia dalam sejarah Asia Tenggara, Bhratara, Jakarta, 1963, halaman 71.

peran Malaka dalam menjalankan politik konfrontasi terhadap bangsa tersebut. Ikut sertanya Palembang dalam menunjang ekspansi Demak ke Malaka sejak tahun 1512, 1513, 1535, 1551 dan 1574³⁾ telah memperkecil kesempatan bagi bangsa Portugis untuk menyebarkan pengaruhnya di daerah ini sebagai sumber lada, lebih - lebih setelah munculnya Inggris di Bengkulu dan VOC di Batavia. Persaingan antara bangsa Portugis dan VOC untuk memperoleh pengaruh di daerah ini, telah mengakhiri kekuasaan Portugis di Malaka dalam Tahun 1641, dan mulailah hubungan dagang antara Kesultanan Palembang dengan VOC setelah perjanjian dagang ditanda tangani pada tanggal 21 Juni 1641.⁴⁾

Dengan berakhirnya kekuasaan Portugis di Malaka, maka mulailah pengaruh VOC dalam dunia perdagangan lada, yang hanya terbatas pada hubungan - dagang dengan penguasa - penguasa Kesultanan Palembang saja. Walaupun hubungan antara VOC dengan Kesultanan Palembang secara formal sudah dimulai, namun hubungan tersebut selalu tidak konsisten dan masing-masing pihak bertindak sendiri - sendiri, seperti yang terjadi dalam tahun 1655 VOC pikul Lada milik orang Tionghoa dan kemudian dalam tahun 1657 orang Palembang merampas beberapa buah kapal Belanda, membunuh 42 orang penumpang dan menawan 25 orang anak buah kapal tersebut.⁵⁾ Hubungan yang tidak stabil antara VOC dengan penguasa - penguasa Kesultanan sampai dibubarkannya VOC dalam tahun 1799 dan runtuhnya Kesultanan Palembang dalam tahun 1825 - yang ditandai dengan diasingkannya Sultan Mahmud Badharuddin II ke Ternate, merupakan latar belakang historis kekuasaan Belanda di daerah ini dan pengaruhnya masih terbatas pada tempat-tempat tertentu, dimana kekuatan Belanda dipusatkan pada loji Sungai Aur⁶⁾ yang terletak dipinggir Sungai Musi berhadapan dengan Benteng Kesultanan sekarang. Oleh karena pengaruhnya terbatas dalam kota Palembang saja, yang berarti belum dapat menjangkau daerah Uluu, maka sistem pendidikan tradisional masih tetap berpengaruh dikalangan masyarakat pedesaan sampai pada akhir abad ke - 19.

3) B. Schrieke, op cit, halaman 233

4) Ibid, halaman 62

5) H.J. de Graaf, Geschiedenis van Indonesia, W. Van Hoeve 's Gravenhage Bandung, 1949, halaman 304

6) Team Perumus Diskusi, Risalah sejarah Perjuangan St. Machmud Badaruddin II, Kotamadya Palembang, 1980, halaman 6.

Kegiatan Ulama Guru atau para Kyayi semakin aktif menyebarkan agama Islam dengan melalui sistem pengajian di Mesjid/Langgar atau di rumah-rumah Pak Kiyai sendiri, terutama sekali dirasakan keadaan itu di daerah Pagaralam dan sekitarnya, setelah ada kegiatan zending yang berdomisili di Tanjungsakti dalam tahun 1860. Oleh karena sesuatu hal yang menghambat kegiatan zending tersebut, maka tugas tersebut dilanjutkan oleh missi Katholik dalam tahun 1896 dibawah asuhan seorang Pastor bernama J.van Meuts.⁷⁾ Walaupun missi Katholik sudah memiliki basis di daerah tersebut pada akhir abad ke - 19 dengan mendirikan sebuah gereja dan membuka beberapa sekolah seperti yang telah dijelaskan pada Bab II, namun pengaruhnya di daerah Sumatera Selatan secara keseluruhan tidak ada artinya sama sekali, jika dibandingkan dengan daerah - daerah yang pernah diduduki Portugis di kepulauan Maluku. Dengan kata lain, pengaruh Barat (Belanda) di daerah ini hingga akhir abad ke - 19 hanyalah terbatas di dalam dinding tembok (loji) sebagai tempat tinggal orang - orang Belanda di dalam kota Palembang. Pengaruh pendidikan Barat di daerah ini baru dapat dirasakan setelah adanya pelaksanaan Politik Etika pada awal abad ke - 20, yaitu dengan adanya sekolah - sekolah desa (sekolah angka 3) di daerah pedaleman, dan disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah kolonial Belanda serta pengusaha Asing untuk mendapatkan tenaga juru tulis dengan upah yang murah.

⁷⁾ Majelis Agung Waligereja Indonesia, Sejarah Gereja Katholik Indonesia 3, Arnoldus Ende - Flores, 1974, halaman 167.

B A B IV

PENDIDIKAN PADA ABAD KE-20

A. PENDIDIKAN PEMERINTAH HINDIA BELANDA :

1. Pengaruh Politik Etika :

Semenjak permulaan abad ke-20 di seluruh dunia terdapat perkembangan dan pembaharuan, khususnya dibidang politik,ekonomi dan idiil, dan demikian pula di Indonesia. Perusahaan - perusahaan Eropa di Indonesia mengalami kemajuan pesat dan berkembang dengan cepat. Dengan demikian mereka membutuhkan pekerja - pekerja yang terdidik dan ahli. Selain itu penduduk Bumiputera sendiri mulai bangkit dan menyadari dirinya dirinya.

Namun secara menyeluruh bagi rakyat pada umumnya tidak dirasakan adanya perbaikan - perbaikan sosial. Dikalangan orang - orang Belanda sendiri timbul aliran - aliran untuk memberikan kepada penduduk asli bagian dari keuntungan yang diperoleh orang - orang Eropa (Belanda) selama mereka menguasai Indonesia. Aliran ini berpendapat bahwa pada orang - orang Bumiputera harus diperkenalkan kebudayaan dan pengetahuan Barat yang telah menjadikan Belanda bangsa yang besar. Aliran atau faham ini dikenal sebagai Politik Etis (" Etische Politiek ").

Gagasan tersebut dicetuskan semula oleh Van Deventer pada tahun 1899 dengan mottonya "Hutan Kehormatan" (de Eereschuld). Politik Etis ini diarahkan untuk kepentingan penduduk Bumiputera dengan cara memajukan penduduk asli secepat - cepetnya via pendidikan secara Barat.

Langkah politik baru itu menjadi lebih terkenal dengan slogannya Pendidikan, Irigasi dan Imigrasi. Oleh karena itu dalam dua dasawarsa semenjak tahun 1900 pemerintah Hindia Belanda banyak mendirikan sekolah yang berorientasi pada cara berpikir orang Barat. Berbeda dengan Snouck Hurgronje yang mendukung pemberian pendidikan kepada golongan aristokrat Bumiputera, maka van Deventer mengajurkan pemberian pendidikan Barat kepada orang-orang golongan bawah atau rakyat biasa.

Tokoh ini tidak secara tegas menyatakan bahwa orang dari golongan rakyat biasa yang harus didahulukan, tetapi ia menganjurkan supaya rakyat biasa tidak diabaikan, dan oleh karena itu banyak didirikan sekolah - sekolah Desa yang berbahasa pengantar bahasa daerah, disamping sekolah - sekolah

yang berorientasi Barat dan berbahasa pengantar bahasa Belanda. ¹⁾ Sehubungan dengan "arah Etis" (Etische koers) yang menjadi dasar landasan dari langkah-langkah dalam pendidikan di Hindia Belanda maka pemerintah mendasarkan kebijaksanaannya pada pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. Pendidikan dan pengetahuan Barat diterapkan sebanyak mungkin bagi golongan penduduk Bumiputera, dan untuk itu bahasa Belanda diharapkan menjadi bahasa pengantar di sekolah-sekolah.
2. Pemberian pendidikan rendah bagi golongan Bumiputera disesuaikan dengan kebutuhan mereka.

Atas dasar itu pulalah maka corak dan sistem pendidikan dan persekolahan di Hindia Belanda pada abad ke-20 dapat ditempuh melalui dua jalur, disatu pihak melalui jalur pertama diharapkan dapat terpenuhi kebutuhan akan unsur-unsur dari lapisan atas serta tenaga terdidik bermutu tinggi bagi keperluan industri dan ekonomi, dan di lain pihak terpenuhi kebutuhan tenaga menengah dan rendah yang berpendidikan. ²⁾

Berdirinya sekolah Desa (Sekolah angka Tiga) dapat dihubungkan dengan pasal 1 surat Keputusan Raja (Koninklijk Besluit) tertanggal 28 September 1892 Nomor 44 (Lembaran Negara 1893 Nomor 125) yang membagi sekolah Negeri Bumiputera di Hindia Belanda dalam dua kategori yaitu sekolah kelas satu dan sekolah kelas dua. ³⁾ Sekolah Desa atau angka tiga diperuntukkan bagi penduduk Bumiputera pada umumnya, sehingga rencana pelajarannya sangat sederhana (hanya sampai kelas tiga) dan lama pendidikannya tiga tahun saja. Itulah sebabnya disebut dengan istilah "sekolah angka tiga" atau lazim dikenal dengan nama "Sekolah Desa" (Volksschool) dengan bahasa pengantarnya bahasa daerah. Sesuai dengan tujuannya yang hanya sekedar memenuhi kebutuhan tenaga terdidik bagi keperluan administrasi pemerintahan tingkat rendah (Marga), maka jumlah sekolah yang dibuka waktu itu sangat terbatas dan hanya terdapat pada tingkat distrik atau Marga saja. Baru pada tahun 1900 ada sekolah yang dikenal dengan sekolah angka tiga yang lama pendidikannya tiga tahun. Tetapi kemudian dalam perkembangan

¹⁾Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pendidikan di Indonesia Dari Jaman ke-jaman, 1979, halaman 63

²⁾Ibid., halaman 63 -- 64.

³⁾Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pendidikan di Indonesia 1900 - 1940, 1977, halaman 5 - 6

sekolah angka tiga tersebut ditambah dengan dua tahun lagi, yang dikenal dengan nama " Sekolah sambungan " (Vervolgschool) di ibu kota Marga saja, sedangkan sekolah angka tiga hanya dibuka di desa - desa yang dianggap perlu.

2. Pendidikan Sekolah Dasar :

2.1. ELS (Enropesche Lagereschool)

Pendidikan bagi anak - anak pegawai Pamongpraja (Binnenlands Bestuur Ambtenaren) termasuk anak - anak Residen, Asisten Residen dan Kontrolir. Sekolah tersebut hanya terdapat ditempat dimana penguasa - penguasa tersebut berdomisili, yang lama pendidikannya tujuh tahun.

Menurut keterangan M.Z, Oemar (pensiunan pegawai Perwakilan Dep. P dan K Sumatera Selatan) dan M. Toha (pensiunan PSK Dinas P dan K kabupaten Lahat), bahwa ELS sudah ada sebelum HIS didirikan di daerah ini. Di Kota Palembang hanya ada sebuah ELS yang terletak di jalan Gubah yaitu yang sekarang ditempati SMP Negeri XIII, sedangkan diluar kota Palembang hanya terdapat di Kota Lahat sebuah, dimana gedungnya sekarang ini ditempati oleh Taman Kanak - kanak Persit.

2.2. HCS (Hollandsch Chinese School) :

Seperti hal di Jawa, pemerintah Hindia Belanda tidak hanya memperhatikan pendidikan anak - anak Bumiputera saja, melainkan juga terhadap anak - anak Timur Asing khusus bangsa Cina. Untuk itu didirikan lah HCS dengan bahasa pengantarnya bahasa Belanda dan lama pendidikannya 7 tahun. Menurut keterangan R.M. Akip, berdirinya HCS di Palembang tidak jauh berbeda waktunya dengan berdiri HIS, yaitu pada tahun 1920. Di kota Palembang sendiri hanya terdapat sebuah HCS, yang pada tahun 1930 tercatat sebagai kepala sekolahnya Joannes Hendricus Antonius Wiederhoff. ⁴⁾ Mengenai tempat sekolah itu menurut keterangan Pastor van Gisbergen SCJ berada di 7 Ulu Palembang. Di samping itu menurut keterangan Gazali Abbas BA (Kakandep P dan K

⁴⁾Akte Notaris Yayasan Xaverius Palembang Nomor 11 tanggal 5 Mei 1930 (Notaris Christian Maathuis).

LIOT), selain di Palembang sekolah semacam itu terdapat juga di Prabumulih, Muara Enim dan Tanjung Enim.

2.3. HIS (Hollandsch Inlandsche School) :

Sekolah ini adalah sekolah Rendah untuk golongan penduduk keturunan Indonesia Asli (Bumiputera), yang lama pendidikannya 7 tahun berbahasa pengantar bahasa Belanda. Berdirinya HIS di Keresidenan Palembang ada hubungannya dengan usaha pemerintah Belanda di daerah ini dalam perluasan pemakaian bahasa Belanda dikalangan penduduk Bumiputera, dan sesuai dengan surat Keputusan Ratu tertanggal 16 Februari 1914 No. 23 (Lembaran Negara 1914 Nomor 762). 5) Menurut keterangan Kailany (Pensiunan Perwakilan P dan K Sumsel), Bahwa minat masyarakat agar anak - anaknya dapat diterima di HIS cukup besar, tetapi banyak hal - hal yang membatasi minat tersebut. Rupa - rupanya hambatan - hambatan itu sesuai dengan surat rahasia Direktur PAK lama (MS. Koster) tertanggal 29 Oktober 1910 Nomor 235 yang menyatakan; penerimaan murid pada sekolah Bumiputera kelas I (HIS) pertama - tama harus dipertimbangkan dahulu anak - anak dari orang bangsawan, terkemuka dan berada.⁶⁾ Karenanya yang dapat diterima sebagai murid HIS diutamakan anak - anak Pasirah, Pembarap, Demang dan pegawai - pegawai pemerintah. Itupun melalui seleksi yang cukup ketat.

Menurut keterangan MZ. Oemar HIS di Kota Palembang baru didirikan pada tahun 1920, dan dalam perkembangannya ada dua buah HIS yaitu HIS I dan HIS II, yang keduanya berlokasi di jalan Kebun Duku.

Berdirinya HIS di luar kota Palembang disebabkan adanya desakan masyarakat setempat, sehingga terpaksa pemerintah Belanda di daerah ini mendirikan HIS Martapura, Baturaja, Muara Enim, Lahat dan Tanjung pandan (Belitung). Di Tobaali (Bangka) pernah juga didirikan HIS, tetapi oleh karena beberapa hal terpaksa ditutup pada tahun 1940. ⁷⁾

5) Departemen Pendidikan & Kebudayaan, Op cit, halaman 211.

6) Ibid, halaman 169.

7) Kementerian Penerangan, Republik Indonesia Propinsi Sumatera Selatan, 1954, halaman 629

Saudara Kaelany dan MZ.Oemar menyatakan, bahwa HIS Baturaja didirikan pada tahun 1938, dan merupakan salah satu HIS yang dipimpin oleh orang Bumiputera yaitu Abdullah Nawawi dari sekian HIS yang kesemuanya dikepalai oleh orang Belanda, dan salah seorang gurunya di sebut Nuronil Adil. Sedangkan HIS Lahat dikepalai oleh van Zijl dan sekolah ini berlokasi di jalan Talang Jawa yang sekarang ditempati SD Negeri No. 3.

2.4. Sekolah kelas dua :

Sekolah ini merupakan sekolah Rendah untuk Bumiputera, yang lama pendidikannya lima tahun berbahasa pengantar bahasa daerah. Menurut keterangan Zainal Abidin Ahmad (Kepala Bidang PMU Kanwil Dep. P & K Sumatera Selatan), sesuai dengan susunan pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu, dimana daerah ini dibagi atas afdeling, Onderafdeling, Distrik. Onderdistrik, Marga dan Dusun, maka di setiap daerah Onderafdeling yang dikepalai oleh Controleur didirikan sekolah kelas dua, kecuali di Gunung Megang yang bukan merupakan tempat kedudukan Controleur.

Dengan dibukanya Sekolah kelas dua ditempat tersebut, merupakan suatu kebanggaan bagi masyarakat setempat (Gunung Megang), yang pernah menjadi kepala sekolah disana adalah Adnan dan AR Rachman. Sedangkan di Kota Palembang yang terbagi dua oleh sungai Musi menjadi wilayah seberang Ulu dan seberang Ilir, masing - masing ada sebuah sekolah kelas dua. Untuk seberang Ilir sekolah tersebut terletak di jalan Segaran 11 Ilir Palembang dan sekarang ditempati oleh dua SD Negeri (SD No. 3 dan SD No. 39). Di seberang Ulu sekolah tersebut terletak di 8 Ulu. Tetapi menurut keterangan Kaelany, dalam perkembangan selanjutnya di wilayah KOMADYA Palembang terdapat 5 buah sekolah kelas dua, yaitu terletak di 11 Ilir, Boom Baru, Bukit Kecil Tangga Buntung dan 8 Ulu. Pada umumnya guru - guru sekolah kelas dua ini merupakan produk Normaalschool di Palembang.

2.5. Volks School :

Seperti telah dikemukakan terdahulu, maka kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda dalam pengembangan pendidikan bagi penduduk Bumiputera didasarkan pada pokok pikiran tentang memberikan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Perbedaan kehidupan

an dan penghidupan antara kota dan desa menjadikan pola perbedaan dan corak pendidikan yang diberikan. Penduduk desa membutuhkan pendidikan rakyat dalam arti yang sesungguhnya, yaitu yang berkaitan dengan kebutuhan dari dan sesuai dengan penduduk desa. Karenanya pelajaran yang diberikan mempunyai arti yang penting bagi perjuangan hidupnya yaitu :

- 1). memperbaiki pengertian tentang pertanian dan perkebunan buah-buahan.
- 2). Memberi pengertian sehat tentang peternakan.
- 3). Mengembangkan keterampilan dan rasa seni dalam mengerjakan kain dan bahan yang diketemukan di daerah dimana ia bertempat tinggal.⁸⁾

Menurut keterangan Zainal Abidin Ahmad, bahwa sesuai dengan susunan pemerintahan seperti tersebut diatas, sekolah Desa (Volksschool) ini hanya terdapat dimarga - marga dan dusun - dusun, dan dalam soal pembiayaannya adalah tanggung jawan Marga setempat. Perlu diketahui bahwa Pesirah di daerah ini yang merupakan penguasa tradisional, jauh lebih kaya dari pada seorang Demang (Wedana), karena ia mempunyai hak memungut pajak serta mengumpulkan hasil daerah yang langsung dikuasainya. Karena itu dapat dikatakan bahwa setiap Marga berusaha mendirikan sekolah - sekolah tersebut.

Senada dengan surat Direktur (MS Koster) kepada Gubernur jenderal van Heutz tertanggal 23 Nopember 1908 Nomor 17036, yang tetap mempertahankan hidupnya sekolah - sekolah rakyat yang sederhana meskipun di tiap Controleur ada sekolah kelas dua. 9) Sesusi dengan keterangan Drs. Ma'moen Abdullah (dosen Fak, Keguruan UNSRI), bahwa Volksschool ini terus ada sampai akhir kekuasaan pemerintah Belanda dengan datangnya tentara pendudukan jepang di daerah ini.

2.6. Vervolg School :

Gagasan mendirikan sekolah " Vervolg " dalam rangka pengembangan pendidikan bagi penduduk Bumiputera, didasarkan pada suatu

⁸⁾Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Op cit, halaman 31

⁹⁾Ibid, halaman 115

pendapat bahwa tidaklah cukup hanya mengandalkan kepada perluasan Sekolah Desa 3 tahunsaja, karena pengetahuan yang didapatkan sangat minim. Type sekolah ini hanya dapat diterima dalam kerangka fase pertama pemberantasan buta huruf, karena secara edukatif sangat kecil artinya.

Pernyataan ini tidak mengimplikasikan untuk memperkecil nilai paedagogis sekolah desa, jika menghargai kegunaan dalam lingkungan dimana sama sekali tidak ada sekolah. Menurut pengalaman - meskipun hasilnya kecil secara murni edukatif, namun mempunyai arti sosial yang penting. Tetapi sekolah Desa baru benar - benar sekolah, apabila membuka pintu untuk memasuki sekolah rendah yang lebih sempurna. Untuk itu harus juga secara relatif disediakan kesempatan. Jadi disamping perluasan sekolah Desa, harus diadakan penyebaran sekolah " Vervolg " secara lebih luas. Untuk sementara diperkirakan perbandingan jumlah sekolah Vervolg dengan sekolah Desa di luar Jawa dan Madura sebagai perbandingan 20 : 1. Penyebaran ini dikaitkan dengan perkembangan dan kebutuhan daerah.¹⁰⁾

Menurut keterangan Zainal Abidin Ahmad, baik susunan pemerintahan tradisional di Sumatera Selatan maupun penyebaran penduduknya berbeda dengan keadaan di Jawa. Sekolah Vervolg yang merupakan Sekolah Sambungan dari sekolah Desa tiga tahun, yang terdiri dari kelas empat dan kelas lima, jumlahnya tidak banyak. Lain halnya dengan sekolah Desa yang pembiayaannya dipikul oleh Marga. Sekolah Vervolg ini oleh pemerintah didirikan di ibu kota Marga pada umumnya. Baik Volksschool maupun Vervolgschool tenaga guru - gurunya dikenal sebagai guru bantu atau magang tamatan Kweekeling atau CVO (Cursus Volks - Onderwijzer). Di Kota Palembang tidak terdapat sekolah " vervolg " karena pemerintah mendirikan sekolah kelas dua, yang lengkap dari kelas satu sampai kelas lima.

2.7. Schakel School :

Dalam menghadapi kritik yang datang dari berbagai pihak terhadap sistem pendidikan rendah untuk orang Bumiputera, bahwa HIS wa-

¹⁰⁾ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Buku II, Op cit, halaman 303 - 304.

laupun dalam arti yang sebenarnya bukan sekolah ningrat, terutama di sediakan untuk anak - anak dari kaum paling terkemuka dalam masyarakat Indonesia, dan bahwa anak - anak yang masuk di sekolah kelas dua, relatif mempunyai sedikit kemungkinan untuk melanjutkan belajar.

Kedua masalah tersebut telah dibahas dalam pidato pada 21 Juli 1918 di Dewan Rakyat mengenai keseluruhan politik pendidikan dan di dalam pidato itu diuraikan, bahwa ada kemungkinan untuk mengatasi ke dua persoalan tersebut. Dalam usaha mencari perbaikan yang di adakan oleh Direktur Pendidikan dan agama K.F. Greutzberg dalam pembicaraan dengan Inspektur pendidikan HIS (Hellwing) mengenai kemungkinan mempersiapkan siswa - siswa yang sangat pandai dari kelas 4 atau 5 di sekolah kelas dua Bumiputera untuk melalui semacam sekolah peralihan dapat melanjutkan belajar di MULO (Meer Uitgebreid Leger Onderwijs). Sudah barang tentu di sekolah type baru ini harus di ajarkan bahasa Belanda dengan intensif. Baik Dewan Hindia maupun Dewan Rakyat tidak berkeberatan dan ternyata gagasan K.F.Creutzberg tersebut diatas disetujui oleh pemerintah, sehingga dalam tahun 1921 di buka sekolah peralihan yang pertama di Bandung dan Padang Panjang.¹¹⁾

Menurut keterangan Kaelany dan MZ Oemar, sekolah peralihan semacam ini di daerah ini hanya terdapat sebuah saja dan didirikan sekitar tahun 1930-an. Murid - muridnya berasal dari sekolah kelas dua yang telah menyelesaikan pelajaran di kelas tiga dengan melalui saringan yang ketat. Dengan kata lain murid - murid yang dapat diterima adalah mereka yang terpandai. Lama pendidikannya 5 tahun dan bahasa pengantarnya bahasa Belanda. Mereka yang menyelesaikan di sekolah peralihan ini dapat disamakan dengan murid - murid lulusan HIS dan dapat melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi, misalnya MULO. Sekolah peralihan (Schakelschool) ini meskipun hanya ada sebuah saja di daerah ini, tetapi jumlah muridnya tidak banyak dan rata-rata 30 orang murid pada tiap kelas. Diantara Guru - gurunya ialah Sutan Takdir Alisyabana, Saaduddin Djambek, M. Hutasoit dan MZ. Oemar. Sekolah yang terkenal dengan nama Openbare Schakelschool ini berlokasi di 15 Ilir, yang sekarang ini ditempati oleh SD Negeri No. 2 dan No. 24.

¹¹⁾ Ibid, halaman 60 - 61.

3. Pendidikan Menengah Umum :

MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) :

Sekolah ini merupakan satu jenis sekolah lanjutan yang menurut sistem persekolahan Belanda digolongkan dalam sekolah Dasar yaitu Sekolah Dasar yang lebih luas, kelanjutan dari sekolah Dasar yang berbahasa pengantar bahasa Belanda. Lama pendidikannya antara tiga sampai empat tahun, dimana pertama kali didirikan pada tahun 1914 dan diperuntukkan bagi golongan Bumi putera dan Timur Asing. 12) Di daerah ini menurut keterangan Zainal Abidin Ahmad, hanya ada sebuah Mulo yang di dirikan oleh Pemerintah sekitar tahun 1930 - an. Gedungnya terletak di jalan Talang Semut Lama, yang sekarang ditempati oleh SMP Negeri I Palembang. Jumlah kelas setelah dalam perkembangannya menjadi 8 kelas yang terbagi atas dua kelas persiapan (voor-klas), 2 kelas satu, 1 kelas dua bagian A, 1 kelas dua bagian B, 1 kelas tiga bagian A dan 1 kelas tiga bagian B. Sekolah ini memperoleh siswanya dari tamatan dua buah HIS dan HCS yang ada di Kota Palembang. Oleh karena melalui saringan yang cukup ketat, maka MULO tersebut tidak banyak siswanya, dan diperkirakan rata - rata per kelasnya ± 30 orang, dan salah satu diantara gurugurunya yang berkebangsaan Indonesia adalah RHA Rani.

4. Pendidikan Kejuruan :

Sekolah Guru (Kweekschool) :

Lembaga pendidikan keguruan ini adalah lembaga yang tertua dan sudah ada sejak permulaan abad ke - 19. Mula - mula yang mendirikan lembaga ini adalah kalangan - kalangan Zending dan Missi dalam bentuk kursus-kursus. Sekolah Guru Negeri yang pertama didirikan pada tahun pada tahun 1851 di Surakarta, sedangkan sebelum itu pemerintah telah menyelenggarakan kursus - kursus guru yang diberi nama " Normaalschool " yang dipersiapkan untuk menghasilkan guru - guru Sekolah Dasar. Pada abad ke - 20 sejalan dengan perkembangan dan kemajuan dibidang pendidikan dan pengajaran, maka pendidikan Guru juga mengalami perubahan dan akhirnya terdapat tiga macam yaitu :

¹²⁾BP3K, Pendidikan di Indonesia 1900 - 1974, Balai Pustaka, Jakarta. 1976, halaman. 38.

- a. Normaalschool, sekolah Guru dengan masa pendidikan empat tahun dan menerima lulusan sekolah Dasar lima tahun, berbahasa pengantar bahasa Melayu.
- b. Kweekschool, sekolah Guru empat tahun yang menerima lulusan sekolah Dasar berbahasa pengantar bahasa Belanda.
- c. Hollansch Inlandsche Kweekschool, sekolah guru enam tahun berbahasa pengantar bahasa Belanda untuk guru - guru HIS / HCS.

Disamping sekolah tersebut diatas masih terdapat kursus - kursus yang diselenggarakan oleh Swasta terutama lembaga keagamaan. Lama kursus bervariasi antara dua sampai empat tahun dengan macam penamaan dan istilah. ¹³⁾

Menurut keterangan MZ. Oemar, bahwa sejalan pula dengan kebijaksanaan pemerintah dalam pengembangan pemakaian bahasa Belanda dikalangan masyarakat Bumiputera, maka pada tahun 1920 bersamaan waktu dengan di bukanya HIS di Palembang, di Lahat dibuka sebuah Sekolah Guru (Kweekschool) untuk menghasilkan tenaga pendidik bagi sekolah Rendah. Sekolah tersebut kemudian dipindahkan ke Muara Enim, bahkan pada tahun 1927 terpaksa ditutup dan siswa - siswanya ditampung oleh Kweekschool Medan dan Bukit Tinggi. Setahun kemudian Kweekschool Medan ditutup juga, sehingga untuk seluruh Sumatera hanyalah tinggal sebuah Kweekschool yaitu di Bukit Tinggi. Penutupan Kweekschool di Lahat/Muara Enim itu (1927) kiranya dapat dihubungkan dengan kebijaksanaan pemerintah dalam pembaharuan sekolah pendidikan Guru untuk sekolah Dasar dengan bahasa Belanda melalui organisasi Kweekschool. Faktor lain yang menyebabkan penutupan sekolah tersebut, karena dianggap oleh pemerintah sebagai tempat kegiatan aktivis untuk menanamkan rasa Nasionalisme. Akhirnya dari 12 Kweekschool Negeri 5 buah di ubah menjadi HIK (Holland Inlandse Kweekschool) dan yang lainnya ditiadakan. ¹⁴⁾

B. PENDIDIKAN PERGERAKAN NASIONAL :

1. Motivasi (Nasional dan Keagamaan)

Dalam dua dasa warsa pertama abad ke - 20, pendidikan dasar di Hindia Belanda mengalami kemajuan yang sangat pesat. Demikian pesatnya seakan-

¹³⁾ Ibid, halaman 40

¹⁴⁾ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Buku II, Op cit, halaman 99

akan pendidikan yang sudah berlangsung sebelumnya (pendidikan tradisional) belum banyak mempunyai arti. Oleh karena itu pemerintah berusaha menciptakan suatu sistem yang umum bagi sekian banyak golongan penduduk yang beraneka ragam. Secara umum sistem pendidikan khususnya sistem persekolahan didasarkan atas golongan penduduk menurut keturunan atau stratifikasi sosial yang ada dan menurut golongan kebangsaan yang berlaku pada waktu itu. ¹⁵⁾ Akan tetapi pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Hindia Belanda tidak selalu memenuhi kebutuhan semua golongan dalam masyarakat. Pada umumnya pendidikan pemerintah hanya dapat memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang oleh masyarakat di rasakan dan ini pada umumnya terletak dibidang intelektual, yaitu mengenai berbagai pengetahuan yang perlu dimiliki oleh setiap orang untuk dapat memajukan hidup dan penghidupannya dalam masyarakat, agar dapat ikut serta dalam kegiatan - kegiatan politik, ekonomi dan kebudayaan. Dengan kata lain bahwa pendidikan oleh pemerintah adalah netral, dalam arti tidak mencampuri urusan - urusan mengenai agama. ¹⁶⁾ Oleh karena itu orang - orang yang menginginkan pendidikan agama bagi anak - anaknya mengadakan usaha khusus, yaitu mendirikan sekolah - sekolah dimana unsur agama mendapat tempatnya.

Meskipun oleh pihak golongan Islam yang sejak dulu sudah menyelenggarakan pendidikannya sendiri dalam bentuk Pesantren atau madrasah - madrasah, secara teoritis tidak masuk dalam perhatian pemerintah Belanda, karena pemerintah dalam hal ini mengambil kebijaksanaan menjalankan apa yang di sebut " politik van onthouding " (politik tidak campur tangan). Tetapi dalam praktiknya - dengan melalui Dewan Ulama, lembaga - lembaga dikeluarkannya Goeroe Ordonatie (Staatsblad No. 219).

Lain halnya dengan sekolah - sekolah Swasta yang diselenggarakan oleh golongan Katholik dan Kristen, atas dasar suatu peraturan subsidi diberi bantuan untuk dapat menyelenggarakan pendidikan yang dikehendaki dengan sebaik - baiknya dengan syarat - syarat yang menjamin ketertiban umum dan mutu pendidikan. ¹⁷⁾

¹⁵⁾ BP3K, Op cit, halaman 37

¹⁶⁾ Prof Soegarda Poerbakawatja, Pendidikan dalam alam Indonesia Merdeka, Gunung Agung, Jakarta, 1970, halaman 206

¹⁷⁾ Ibid, Loc cit.

Perasaan Nasional yang mulai berkembang dikalangan kaum terpelajar memandang pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Hindia Belanda tidak sesuai dengan aspirasi bangsa Indonesia. Oleh karena itu mereka ingin mengubah sistem pendidikan yang kurang tepat tersebut.

Disertai pula dengan kesadaran berorganisasi yang diliputi oleh rasa Nasionalisme yang murni, paedagogis dan kultural, melahirkan perkembangan baru di lapangan pendidikan dan pengajaran. Mereka insyaf bahwa penyelenggaraan pendidikan yang bersifat nasional harus segera dimasukkan kedalam program perjuangan, yaitu mencapai kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Atas dasar itu pulalah maka lahirilah perguruan - perguruan yang bersifat nasional atau sekolah - sekolah Swasta yang diselenggarakan oleh perintis - perintis Kemerdekaan. Sekolah - sekolah tersebut yang diselenggarakan sesuai dengan tuntutan agama ialah :

1. Sekolah - sekolah Serikat Islam.
2. Sekolah - sekolah Muhammadiyah.
3. Sumatera Thawalib di Padang Panjang.
4. Sekolah - sekolah Nahdhatul Ulama.
5. Sekolah - sekolah Persatuan Umat Islam (PUI) dan lain - lain. ¹⁸⁾

Sedangkan sekolah - sekolah yang diselenggarakan sesuai dengan tuntutan Nasional ialah :

1. Taman Siswa, yang bermula didirikan di Jogjakarta
2. Sekolah Serikat Rakyat di Semarang yang berhaluan Komunis.
3. Kesatrian Instituut yang didirikan oleh Dr. Douwes Dekker (Dr. Setiabudi) di Bandung. ¹⁹⁾

2. Kelembagaan :

a. Taman Siswa :

Sebelum membicarakan tentang Perguruan Taman Siswa cabang Palembang dan sekitarnya, perlu diungkapkan lebih dulu sejarah lahirnya lembaga itu di Jogjakarta. sebagai organisasi dan sistem pendidikan Nasional Indonesia murni yang didirikan pada tanggal 3 Juli 1922 oleh Ki. Hajar Dewantara. Mula - mula bernama " Nasional Onderwijs Instituut Taman Siswa Jogjakarta "

¹⁸⁾ | Djumhur dan Drs. H. Danasuparta, Sejarah Pendidikan, CV Ilmu, Bandung, 1976, halaman 149

¹⁹⁾ | ibid, Loc cit.

Sistem pendidikannya berdasarkan atas kebudayaan Nasional dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Intelektualisme harus di jauhi dan dipraktikkan sistem among, yang menyokong kodrat anak - anak. Hal ini berarti tidak melalui perintah paksaan tetapi dengan melalui tuntunan agar berkembang hidup lahir batin menurut kodratnya sendiri - sendiri dan terkenal dengan semboyan " tut wuri handayani ". Adapun sistem among itu mengemukakan dua dasar yaitu :

1. Kemerdekaan sebagai syarat untuk menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir batin, hingga dapat hidup merdeka dalam arti dapat berdiri sendiri.
2. Kodral alam sebagai syarat untuk menghidupkan dan mencapai kemajuan dengan secepat - cepatnya dan sebaik - baiknya. ²⁰⁾

Meskipun pada saat berdirinya Taman Siswa baru dimulai dengan Kinderergarten (TK) yang dikalangan Taman Siswa disebut Taman Indria dan Kursus Guru, tetapi karena dasar pendidikan tersebut telah berhasil menyentuh hati nurani bangsa Indonesia, maka Taman Siswa cepat meluas dan berkembang ke seluruh pelosok tanah air sesuai dengan kondisi, tempat dan waktu. Pemerintah Hindia Belanda sendiri merasa khawatir akan perkembangan lembaga itu yang begitu pesatnya, sehingga dalam tahun 1931 timbullah pendapat dikalangan Pemerintah Hindia Belanda, bahwa jika pengajaran di sekolah - sekolah pemerintah tidak selekasnya diperbaharui, maka dalam waktu 10 tahun Taman Siswa akan menguasai seluruh bidang pendidikan dan pengajaran partikelir. ²¹⁾

Sejalan dengan kekhawatiran tersebut, Pemerintah Hindia Belanda menciptakan sebagai sarana preventifnya, dengan dikeluarkan Ordonansi Pengawasan Pendidikan Partikelir yang tidak bersubsidi pada tanggal 1 Oktober 1932, ²²⁾ yang dikenal dengan nama Wilde Scholen Ordonnantie. Meskipun mengalami banyak rintangan terutama dari pemerintah, namun dasar demokrasi yang lebih mengutamakan perluasan pendidikan secara horisental

²⁰⁾ Drs. Abu Ahmadi, Sejarah Pendidikan, CV Toha Putera, Semarang, 1975, halaman 43 -- 44

²¹⁾ Ensiklopedia Umum, Yayasan Kanisius, Jogjakarta, 1973, halaman 1287

²²⁾ Ibid, Loc cit

dari pada secara vertikal. Dengan kata lain lebih mendahulukan pendidikan untuk rakyat banyak dari pada pendidikan untuk sebagian kecil rakyat (the privileged few).²³⁾ Lagi pula tuntunan Nasional yang senada dengan lahir dan berkembangnya Nasionalisme menempatkan lembaga Tamansiswa sebagai lembaga pendidikan yang dapat diterima diseluruh tanah air.

Perguruan Tamansiswa cabang Palembang didirikan pada tanggal 3 Juli 1932, dimana Akte pendiriannya termasuk dalam Perguruan Tamansiswa Pusat (Jogjakarta) tanggal 1 September 1951 yang tercatat dalam daftar Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jogjakarta tanggal 14 Maret 1953 Nomor.03/1953/J.²⁴⁾ Berdirinya Tamansiswa di daerah ini untuk pertama kalinya dirintis oleh Ki Hanung (tokoh Tamansiswa Pusat), Bapak RA.Nadjamuddin dan Bapak Raden Mad (kedua - duanya adalah putera daerah ini). Ternyata berdirinya perguruan ini mendapat simpati masyarakat, dan sebagai langkah pertama dibuka sebuah Sekolah Rendah berbahasa Belanda, yang dalam istilah Tamansiswa disebut " Taman Muda " yang sejajar dengan HIS. Sekolah ini pada mulannya berlokasi disekitar Hotel Haji Nangling jalan Cek Syeh sekarang. Pada umumnya murid - murid berasal dari mereka yang tidak mendapat kesempatan mengikuti pendidikan yang diusahakan oleh Pemerintah. Guna menampung pendidikan lanjutannya, maka pada tahun 1938 didirikanlah MULO Tamansiswa (Taman Dewasa). Setelah pada tahun 1934 Tamansiswa mampu mendirikan gedung sendiri di kompleks Tamansiswa sekarang ini. Sangat disayangkan bahwa MULO Tamansiswa ini harus menghentikan kegiatannya setelah Jepang menduduki daerah ini.²⁵⁾

b. Serikat Islam :

Perkembangan pendidikan di daerah ini sekitar tahun tiga puluhan boleh dikatakan masih ketinggalan bila dibandingkan dengan daerah - daerah Indonesia lainnya. Pada umumnya sekolah - sekolah yang ada diselenggarakan oleh lembaga - lembaga keagamaan disamping sekolah - sekolah yang diusahakan oleh pemerintah Hindia Belanda. Seperti telah dikemukakan diatas. bah-

²³⁾Prof. Soegarda Poerbakawatja, Op cit, halaman 219

²⁴⁾Wawancara dengan Bapak Bakhtiar, Ketua Perguruan Tamansiswa cabang Palembang, 18 --- 11 --- 1980.

²⁵⁾Kementerian Penerangan, Republik Indonesia Propinsi Sumatera Selatan, 1954, halaman 630.

wa baru pada tahun 1920 pemerintah mendirikan HIS di daerah ini. Diantara sekolah - sekolah swasta yang diselenggarakan oleh lembaga agama Islam ialah Pendidikan Islam Air Itam yang terletak di daerah Musi Ilir. Sekolah ini didirikan pada tahun 1937 oleh H.A. Hamid, dan pada tahun yang bersamaan Pendidikan Islam Air Itam berkembang sampai ke Sungai Rotan dan Ampat Petulai Curup, yang kedua - duanya terletak di daerah LIOT sekarang. Karena sekolah di Air Itam itu mendapatkan dukungan dari masyarakat sekitarnya dan dalam perkembangan kemudian menjadi lebih pesat, sekolah tersebut sengaja dikunjungi oleh de Boer sebagai Asisten Residen Afdeling Palembang Ilir untuk melihat dari dekat. de Boer beranggapan bahwa sekolah Air Itam itu akan menjadi lawan yang gigih terhadap pemerintah.

Pada tahun 1938 Pendidikan Islam di Air Itam menggabungkan diri dalam kegiatan politik dalam kegiatan politik Serikat Islam (PSII), sehingga semua sekolah yang didirikan berada dalam naungan Perguruan PSII. Hingga tahun 1940 di daerah cabang Air Itam terdapat lebih dari 10 buah sekolah PSII, dan di dusun Air Itam sendiri terdapat sebuah sekolah yang terdiri dari 6 lokal dan pada tingkat - tingkat yang tertinggi diajarkan pula bahasa Inggris. Melihat pesatnya kemajuan sekolah - sekolah PSII, maka tahun 1941 pemerintah mendirikan Schakelschool di Air Itam sebagai saingan, mengambil tempat dibawah kolong rumah seorang penduduk dengan dua orang guru dan 15 - 20 orang murid. Salah seorang diantara guru itu adalah H. Asnawi Mangkualam sampai sekolah itu ditutup segera setelah Jepang menduduki Sumatera Selatan pada tahun 1942. ²⁶⁾

c. Muhammadiyah :

Seperti telah diketahui bahwa permulaan abad ke - 20 merupakan lahirnya partai - partai dan organisasi - organisasi sebagai pengaruh kesadaran nasional. Sejalan dengan lahirnya Budi Utomo pada tahun 1908 dan bersamaan dengan datangnya gelombang pembaharuan di bidang agama yang datang dari Mesir, Arab dan India, maka K.H.A. Dahlan yang telah mempelajari pembaharuan itu kemudian mendirikan organisasi yang disebut " Muhammadiyah ". Perkumpulan tersebut dapat dianggap sebagai pelopor pembaharuan dalam mengajarkan agama Islam di Indonesia. Muhammadiyah didirikan di Jogjakarta

²⁶⁾ Dinas Sosial Daerah Tk. I Sumsel, Perintis Kemerdekaan Indonesia, Palembang, 1978, halaman 20 - 22

pada tanggal 18 Nopember 1912 oleh KHA. Dahlan. Perkumpulan ini bertujuan meluaskan dan mempertinggi pendidikan ajaran Islam secara modern serta memperteguh keyakinan tentang agama Islam. Untuk mencapai tujuan itu Muhammadiyah mendirikan sekolah - sekolah dibawah Majelis Pengajaran. Usaha - usaha lain ialah memperluas pengajian - pengajian dibawah bimbingan Majelis Tabligh dan mendirikan panti - panti asuhan, rumah sakit dan poliklinik dibawah PKU (Majelis Pembinaan Kesejahteraan dan Umat).²⁷⁾

Perkumpulan Muhammadiyah masuk ke daerah ini sekitar tahun 1928/1929, dan baru pada tahun 1932 dibentuk Daerah Muhammadiyah Lampung-Palembang dengan Zainal Abidin Djambek sebagai Konsul yang kemudian digantikan oleh RZ. Fanani. ²⁸⁾ Menurut keterangan Drs. M. Tusin Djamiludin bahwa pembawa Muhammadiyah ke Palembang disebut antara lain :

- 1). Haji Ridwan yang berasal dari Kota Gede Jogjakarta yang datang di daerah ini sebagai pedagang batik sambil melakukan da'wah Islam. Da'wah yang disampaikananya itu dalam waktu singkat mendapatkan sambutan dari rekan - rekannya sesama pedagang di pasar 16 Ilir. Mereka itu antara lain Haji Anang bin H. Saleh, Mgs. Ahmad, Haji Abdulhalim, Haji Muhammad, Abdulkarim, Abdulkasim dan Haji Djamal.
- 2). Rusli yang berasal dari Padang, pegawai Kantor Pos Palembang, yang kemudian menggabungkan diri dalam acara pengajian yang diasuh oleh Haji Ridwan.
- 3). Raden Subono Purwowiyoto, seorang terpelajar lulusan Klein Ambtenaar Bogor, berasal dari Semarang dan tiba di Palembang pada tahun 1929 sebagai pegawai Kas Negeri Palembang. Segera setelah kedatangannya di Palembang ia menggabungkan diri dalam kelompok pengajian yang diasuh oleh Haji Ridwan. Sewaktu masih di Brebes (Jawa Tengah) ia telah berkenalan dengan organisasi tersebut, bahkan menjadi salah seorang pimpinan Muhammadiyah setempat.
- 4). Zainal Abidin Djambek, asal dari Padang bekerja pada BPM Plaju, yang juga menggabungkan diri dalam pengajian yang diasuh oleh H. Ridwan.²⁹⁾

²⁷⁾ I. Djumhur & Drs. H. Danasuparta, Op cit, halaman 162 – 164

²⁸⁾ K.A.H. Dahlan, Zaman Penjajahan Belanda dan Riwayat mulai berdirinya serta Tenaga orang yang mendirikan, halaman 33

²⁹⁾ Bulletin Muhammadiyah Sumatera Selatan, No.3, Maret 1980, halaman. 5 – 7

Dengan adanya keempat tenaga pendatang tersebut, maka makin semaraklah pengajian yang mereka selenggarakan dan pesertanyapun makin bertambah. Setelah pengajian itu berjalan beberapa lama dan pengertian pesertanya terhadap tugas mereka sebagai Muslim dan sebagai anggota organisasi, maka mulailah untuk menggerakkan amal bhakti serta usaha guna mengikuti kemajuan jaman, sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Dan untuk itu terlebih dulu mereka dirikan ranting dan cabang Muhammadiyah dalam kota Palembang, dimana hasil susunan pengurusnya mereka laporkan kepada Pengurus Besar Muhammadiyah di Jogjakarta. 30)

Menurut keterangan Ibrahim Ja'far sebagai wakil Ketua Majelis Pendidikan Kotamadya Palembang, ranting Muhammadiyah yang mula - mula didirikan ialah ranting Talang Jawa, Seberang Ulu dan 24 Ilir. Ketiga ranting inilah yang kemudian menjadi cabang Muhammadiyah Palembang yang diresmikan pada tahun 1930. Kemudian pada tahun 1931 di Plaju berdiri cabang Muhammadiyah dengan ketuanya yang pertama Abdulmalik Sidik. Setelah itu berdiri pula cabang organisasi itu di Baturaja berkat usaha Kiyai Haji Bakri, dan demikianlah seterusnya menyebar ke daerah pedaleman.

Menurut keterangan Drs. M. Tusin Jamaluddin sebagai anggota pengurus Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan, bahwa sekolah Muhammadiyah (Sekolah Dasar) resmi didirikan baru pada tahun 1932, yaitu : SD di 4 Ulu, SD di jalan Mayor Ruslan dan HIS di 24 Ilir Palembang. Empat tahun kemudian dibuka SD di Kertapati dan pada tahun 1938 didirikan HIS dan Schakel School di 4 Ulu Palembang. Demikian pula MULO Muhammadiyah didirikan pada waktu itu. Pada jaman Jepang, sekolah - sekolah yang bernaung dibawah Muhammadiyah, pada umumnya tidak ada kegiatan, kecuali yang berusaha bertahan ialah SD 4 Ulu, SD di Jalan Mayor Ruslan, SD di Plaju dan SD di Bukit kecil.

Situasi Muhammadiyah di Sumatera Selatan digambarkan sebagai berikut :
 " Menurut susunan zaman Belanda Konsul daerah Palembang itu memimpin dua daerah yaitu Palembang dan Lampung. Dan pernah juga dicoba memasuki daerah Bangka dan Belitung. Nasib Muhammadiyah dalam daerah - daerah itu setelah Jepang masuk amat menyedihkan. Konsul daerah Palembang R.Z. Fanany tidak sanggup mempertahankan, sehingga Muhammadiyah daerah

30) Ibid, Loc cit.

Palembang terpaksa dibubarkannya sendiri tidak berapa lama sesudah Jepang masuk sehingga selama pendudukan Balatentera Jepang hilanglah suara Muhammadiyah dari daerah itu. Pemimpin - pemimpin Muhammadiyah di luar kota Palembang yang masih cinta kepada perserikatan tetap menjaga hak milik dan wakaf Muhammadiyah dan ada juga yang tetap melanjutkan amalnya walaupun nama Muhammadiyah tidak boleh disebut - sebut. Waktu saya datang ke Tanjung Enim dipertengahan bulan April 1944 saya dapati Musholla Muhammadiyah masih tetap disembahyangi. Tiap - tiap habis jama'ah Magrib anggota Muhammadiyah masih tetap berkumpul habis sembahyang Isya' mengaji, berkursus dan lain - lain. Bangku - bangku sekolah tersusun tetapi musholla. Ketika saya tanyai akan dipengapakan bangku - bangku sekolah itu karena sekolah sudah ditutup. Pengurusnya menjawab : disimpan baik - baik menunggu waktunya akan dipergunakan kembali. Itulah sebabnya maka saudara A. Ma lik Siddik pulang dari Palembang ke Bukittinggi ". 31)

d. Madrasah - Madrasah di Sumatera Selatan :

Menurut keterangan Haji Munir (tokoh agama dari Kabupaten Muba dan Kiyai Haji Zainal Fikri sekarang Rektor IAIN Raden Fattah Palembang) bahwa lembaga pendidikan sekolah agama di daerah ini pada umumnya diselenggarakan oleh orang - orang pribumi yang baru pulang menunaikan ibadah Haji. Oleh karena tingkat pengetahuan mereka tidak begitu mendalam mengenai ilmu - ilmu yang berhubungan dengan Ilmu Al Fikh, maka yang diajarkan kepada murid - murid hanyalah berkisar pada cara membaca Al Qur'an saja dan peraturan - peraturan tentang sembahyang lima waktu. Biasanya pendidikan dilakukan secara perorangan dengan biaya yang dipikul oleh murid-murid, sedangkan tempat pendidikan berada di bawah rumah (rumah - rumah tradisional di daerah ini adalah rumah panggung). Waktu belajarpun tidak tentu dan tidak teratur, mengingat kondisi rakyat setempat. Bahkan kadang-kadang ditutup sementara sedang musim panen atau menabur bibit padi di sawah. Kemudian sekolah yang tidak teratur itu disempurnakan oleh orang - orang pribumi pula yang sengaja belajar di Mekkah beberapa tahun, kemudian pulang ketanah air dan menyempurnakan sekolah - sekolah tradisional tersebut dalam bentuk Madrasah. Pada umumnya sekolah madrasah - madrasah tersebut setingkat dengan Sekolah Rendah atau dikenal dengan nama "Ibtida'iah" Hanya beberapa daerah saja yang dapat menyelenggarakan sekolah madrasah

31) K.A.H. Dahlan, Op cit, halaman 81 — 82

tingkat Tsanawiyah yaitu apabila terdapat beberapa orang Haji yang telah mendapat pelajaran di Mekkah yang dikenal dengan Sekolah Darul 'Ulum. Orang - orang itu di daerah MUBA antara lain Haji Rasyid Siddiq dan Haji Amir Hamzah, sedangkan di daerah OKU ialah Kiyai Haji Zainal Fikri dan Kiyai haji Daud Rusdy.

Sebagaimana diketahui bahwa agama Islam masuk ke Sumatera Selatan ada yang dari jurusan Selatan (Jawa Barat), sehingga pendidikan Islam di daerah ini banyak mengikuti pendidikan Islam di Jawa.

Demikian pula mengenai pondok Pesantren atau Madrasah - Madrasah di daerah ini hampir sama sistemnya dan kitab-kitabnya yang dipakai di Jawa. Diantara sekian banyak pondok Pesantren dan Madrasah yang tertua dan terkenal di daerah ini :

1. Pondok Pesantren yang berlokasi di Marga Madang Suku II yang didirikan oleh Haji Juwana yang berasal dari Banten pada tahun 1656.
2. Madrasah Al-Quranyah didirikan oleh Kiyai Haji Muhammad Yunus, kira - kira dalam tahun 1920 di Palembang, yang terdiri dari tingkat Ibtida'iyah dan Tsanawiyah. Pada masa jayanya murid - muridnya pernah mencapai 400 orang dan guru - gurunya terdapat 5 orang, yang sampai sekarang masih hidup.
3. Sekolah Ahliah Dinyah didirikan oleh Kiyai Masagus Haji Nanang Misri pada tahun 1920 di Palembang, yang terdiri dari tingkat Ibtida'iyah dan Tsanawiyah.
4. Madrasah Narulfalah didirikan oleh Kiyai Haji Abubakar Al-Bastari pada tahun 1934 di Palembang dan terdiri dari ; tingkat Ibtida'iyah yang lama pendidikannya 5 tahun, Tingkat Tsanawiyah lama pendidikannya 3 tahun dan tingkat Alyah lama pelajarannya 2 tahun. Pada masa jayanya pernah jumlah muridnya mencapai + 600 orang.
5. Madrasah Darul Farun didirikan oleh Kiyai Haji Ibrachim pada tahun 1938 di Palembang, yang terdiri dari tingkat Ibtida'iyah dan tingkat Tsanawiyah.

Lain dari pada itu banyak lagi madrasah - madrasah di daerah ini mulai dari kota - kota sampai ke dusun - dusun, seperti Madrasah Salathiyah, Dinyah Tarbyah Islamiyah, Nurul Huda dan lain - lain.³²⁾

³²⁾ Prof. H. Mahmud Junus, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia Mutiara, Jakarta, 1979, halaman 211 - 213

e. Pondok Pesantren Nurul Islam Seri Bandung :

Mengenai penjelasan pondok Pesantren ini akan dibicarakan lebih lanjut pada bagian terakhir laporan ini, yaitu pada bagian pendidikan Swasta di jaman Kemerdekaan. Pesantren ini berlokasi di daerah OKI (Tanjung Batu) didirikan oleh Kiyai Haji Anwar bin Haji Kumpul pada tanggal 1 Nopember 1932 M. (2 Rajab 1351 H.). Latarbelakang berdirinya pesantren ini, adanya dorongan masyarakat setempat yang menghendaki pendidikan Islam berbentuk sekolah dan dukungan dari pemerintah setempat. Sebagai tujuannya untuk mendidik dan membimbing serta membawa para santri, agar menjadi manusia muslim yang berilmu, beriman, beramal saleh serta berakhlak mulia dan nantinya dapat menjadi anggota masyarakat yang berdaya guna, berbakti terhadap agama, tanah air dan bangsa dengan jiwa ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pada mulanya hanya terdapat tingkat Ibtida'iah untuk putera saja, dan salah satu diantara lembaga pendidikan Islam yang dapat bertahan pada Jaman Jepang.

f. Lembaga pendidikan Katholik dan Kristen :

1. Perguruan Katholik :

Wilayah propinsi Sumatera Selatan terdapat dua buah Keuskupan : Keuskupan Palembang dan Keuskupan Pangkal Pinang, yang masing - masing Keuskupan bekerja imam - imam yang berbeda Ordonya. Ordo SCJ di wilayah Palembang dan Ordo SSCC di wilayah Pangkal Pinang. Dengan demikian berdirinya sekolah - sekolah yang berdasarkan agama Katholik tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan Ordo - ordo tersebut.

1.1. Keuskupan Palembang (Perguruan Xaverius) :

Imam - Imam ordo SCJ tiba didaerah ini pada bulan September 1924, dimana pos pertamanya di Tanjungsakti. Sebelum kedatangan mereka itu telah bekerja di tempat ini pastor Y. van Meurs S.J. sejak tahun 1887 dengan membuka sebuah sekolah di Tanjungsakti pada tanggal 1 September 1887 dengan dua ruang yang terpisah, sebuah di pastoran dan yang lain di rumah seorang bekas zendeling Y.C.Kersten. Walaupun ada campur tangan Residen Langen mengenai sekolah tersebut pada tahun 1889, namun jalannya tidak begitu lancar karena kekurangan

murid yang di perlukan dalam arti hadir tiap - tiap hari. 33)

Pengalaman yang pahit dialami pula oleh pastor P.J. van Hoof, dimana pada tahun 1911 ia berusaha menghidupkan kembali sekolah - sekolah yang pernah ada, sehingga tahun 1915 - 1916 membuka dua - tiga sekolah di Benting dan Joko Bloot (Simpangtiga). Setelah suster - suster Belaskasihian tiba disana, pada tahun 1917 sempat memberikan pelajaran jahit menjahit dan kerajinan tangan. 34)

Disamping pos pertama di Tanjungsakti, pada tahun 1925 kota Palembang dijadikan pos ke-dua oleh S.C.J. untuk meneruskan usaha yang telah di bina oleh mereka sendiri. untuk lebih memantapkan lembaga itu, maka diben tuklah suatu Yayasan yang diberi nama " Yayasan Xaverius " dengan Akte Notaris Christian Maathuis pada tanggal 5 Mei 1930, 35) dengan susunan pengurusnya : Pastor J. J. van der Sangen sebagai Ketua, Pastor A. Hermelink sebagai Sekretaris, Nyonya Yda Maria Gerarda Wilhelmina van Peer sebagai Bendahara, dan FPH van Alfen dengan JHA. Wiedenhoff sebagai anggota. Disamping itu perlu juga dicatat nama pastor H.J.D. van Oort S.C.J. yang pada tahun 1926 bulan Maret mendirikan Karya Melania di Palembang, dan merupakan cabang dari Karya Melania di Nederland. Pada tahun itu juga didirikan sekolah Theresia, sebuah HIS yang sedianya dikhususkan untuk anak - anak perempuan. Pada tahun 1927 suster - suster Hati Kudus mengambil alih sekolah tersebut yang terletak dibelakang kantor Pengadilan lama (Lorong Landrad). Kemudian menyusul didirikan Vervolgschool di Lorong Pagar alam, membuka ELS bagi anak - anak Eropa yang beragama Katholik dan sebuah Tk. 36)

Menurut keterangan Nyonya Sudiropranoto (Pensiunan guru SD Xaverius Palembang), bahwa Karya Melania merupakan Sekolah Rakyat kelas II dipimpin oleh Ibu Rosa yang berlokasi di jalan Mayor Ruslan atau Bengkel Melati sekarang. Sedangkan Sekolah Theresia dalam praktiknya mengajar anak laki - laki dan perempuan, yang sebagian besar anak - anak itu berasal dari anak - anak Cina, Indo - Belanda dan anak - anak KNIL (koninklij ke Nederlandsch Indische Leger). Pada tahun 1933 sekolah ini terdiri dari kelas

34) Ibid, halaman 168 - 169

35) Stichtingsbrief Xaverius Vereeniging, no.11, dd.5 Mei 1930 (Notaris Christiaan Maathuis)

36) G. Vriens S.J. Op cit, halaman 182

nol (O) sampai kelas tujuh, dimana sekolah tersebut dipimpin oleh Suster Martini yang dibantu oleh Tumeon dan Nyonya Soediropranoto. Pada bulan Agustus 1935 dibuka sekolah HCS dan setahun kemudian Frater-Frater Bunda Hati Kudus datang ke Palembang dan mengambil alih murid laki - laki dari sekolah Theresia. Setelah itu kedua sekolah tersebut digabungkan menjadi satu dalam tahun 1938 dengan nama " Andreas School ".³⁷⁾ Sementara di Palembang para biarawan dan biarawati mendirikan berjenis - jenis sekolah, maka di Kota Lahat dibuka sekolah Dasar (HIS) pada tahun 1933 dibawah pimpinan pastor Hoogetboom S.C.J. dengan muridnya yang bermacam-macam bangsa dan usianya. Kemudian pada tahun 1936 sekolah itu diambil alih oleh suster - suster Carolus Borromeus dibawah pimpinan suster Cornelianne, yang sebelumnya telah mempunyai posnya di Bengkulu. Pada tahun 1938 sekolah ini berkembang dibawah pimpinan suster Laurentia dengan membangun sebuah kompleks sekolah di jalan Gumei, bahkan pada tahun 1939 telah dibuka sebuah MULO. ³⁸⁾

Sekolah Katholik di Lahat ini akhirnya dikenal dengan nama Sekolah Santo Yosef.

1.2. Keuskupan Pangkal Pinang :

Setelah kota Mentok diresmikan sebagai stasi dalam tahun 1925 dengan imamnya yang pertama pastor Meijer, dan kemudian tiba disana 8 orang suster Pemeliharaan Illahi telah membuka sekolah Santa Maria pada tanggal 3 Nopember 1925, kecuali HCS dibuka pula Taman Kanak - kanak dengan 36 orang murid. Pada tahun 1927 telah diusahakan untuk membuka MULO tapi tak dapat bertahan lama.³⁹⁾ Demikian pula stasi Belinyu dibuka sebuah sekolah dengan asrama atas usaha pastor Zaat pada tanggal 5 Nopember 1929, yang kemudian diserahkan ke pada beberapa orang suster pada tahun 1931. Oleh karena stasi Belinyu mengalami kemunduran, maka stasi Pangkal Pinang dibuka oleh pastor Bakker dengan membuka sekolah pada tahun 1931. Ketika bruder - bruder Dongen tiba disana dalam tahun 1934, maka pengelolaan sekolah tersebut diserahkan pada mereka, sedangkan pastor Bakker akan mempersiapkan sekolah puteri. Akhirnya dalam tahun 1938 suster - sus-

37) Ibid, Loc cit

38) Ibid, halaman 184 -- 185

39) Ibid, halaman 254

ter yang dinanti - nantikan tiba di Pangkal Pinang dan langsung memimpin sekolah puteri tersebut. Pastor van Gelder yang tadinya menjadi guru pada sekolah tersebut mendapat tugas di Sungai Liat untuk membantu pastor disana yang telah memulai kegiatannya pada tahun 1937. Menjelang masuknya Jepang disana, sekolah puteri di Sungai Liat terdiri 3 kelas. 40)

2. Perguruan Methodist :

Pusat Gereja Methodist di Indonesia berada di Medan sejak tahun 1905, yang mengemban tugas gerejani, pendidikan dan sosial. Menurut keterangan SMH Panggabean MA (Kepala Sekolah Methodist I Palembang) bahwa sekolah Methodist di Palembang pertama kalinya didirikan oleh Solomon Pakianathan, seorang bangsa India dari Malaysia pada tahun 1908. Mula - mula sekolah ini bernama " Mission School " yang berlokasi di lorong Basah. Pada mulanya setiap anak boleh memasuki sekolah ini, tapi kenyataannya yang tertarik ialah orang - orang Cina, India dan orang - orang yang mampu. Kemudian namanya diganti dengan " Methodist English School " setelah memiliki gedung sendiri yang terletak di jalan Tengkuruk. Guru - gurunya adalah orang orang Indonesia dan diantaranya A. Malik, sedangkan pimpinannya antara lain Albert Hamel dan John Wesley Day. Ketika Jepang menduduki daerah ini, sekolah ini ditutup seperti halnya sekolah - sekolah yang dikelola oleh Yayasan Xaverius lainnya.

3. Perguruan Kristen :

Sebagai usaha Gereja - gereja Kristen di Palembang, lahirlah ELS pada tahun 1938 dibawah naungan Yayasan " Vereeniging Voor Christelijk Onderwijs te Palembang " yang didirikan pada tahun 1938 dengan Akte No. 88, badan Hukum No. A43/25/17. Sekolah ini berlokasi di jalan Merdeka dan pendirinya van Bosch van Ach. Nama sekolah tersebut dikenal dengan nama " Beatrix School " yang menampung murid - murid campuran, dan setelah Jepang menduduki kota Palembang sekolah inipun di tutup. Setelah Indonesia Mereka sekolah ini dihidupkan kembali yang dikelola oleh HKBP, GPIB, dan Siloan. Mengenai perkembangan lebih lanjut sekolah ini, lihat pada Bab terakhir dari laporan ini.

40) Ibid, halaman 260 – 267

B A B V

PENDIDIKAN JAMAN JEPANG DAN INDONESIA MERDEKA

I. JAMAN JEPANG :

A. PENDIDIKAN PEMERINTAH :

Seperti telah diketahui tujuan Jepang menduduki kepulauan Indonesia untuk menguasai sumber bahan - mentah dan gudang tenaga manusia, yang sangat besar artinya bagi kelangsungan Perang Asia Timur Raya. Daerah Sumatra Selatan yang dipandang dari potensi perang adalah unsur yang sangat menentukan, karena merupakan penghasil bahan - bakar yang cukup kaya, sehingga pada tanggal 14 Februari 1942 daerah ini diserbu dan diduduki oleh tentara Jepang. Mulai saat itu berakhirilah masa penjajahan bangsa Belanda dan mulailah era baru di daerah ini, yakni jaman pendudukan Militer Jepang yang berlangsung sampai tahun 1945.

Perkembangan ekonomi dan industri Jepang membutuhkan wilayah yang luas - disamping sebagai daerah pasaran juga sebagai sumber bahan mentah, oleh karena itu perluasan daerah seakan - akan merupakan suatu keharusan yang mutlak. Rencana perluasan daerah itu melahirkan suatu konsep yang dikenal dengan nama " Hakko - Ichi - U " dalam rangka mendirikan " Kemakmuran Bersama Asia Raya " yang telah dipublikasikan sejak tahun 1940. ¹⁾ Menurut rencana itu Jepang akan menjadi pusat suatu lingkungan pengaruh atas daerah - daerah : Mancuria, daratan Cina, Kepulauan Filipina, kepulauan Indonesia, Thailand, Malaysia, Indocina dan Asia (Rusia). Jepang akan menjadi pusat industri presisi, sedangkan Mancuria akan dikembangkan menjadi daerah pertambangan industri berat dan Industri kimia, dan Cina sendiri akan dikembangkan menjadi industri ringan dan tekstil. ²⁾

Adapun daerah - daerah lainnya tetap merupakan sumber bahan mentah untuk mensuplay daerah - daerah industri tersebut. Rencana ekspansi Jepang serta konsep " Hakko - Ichi - U atau " Kemakmuran Bersama Asia Raya " itu, dianggap sebagai suatu keharusan yang tidak dapat ditawar dan oleh kalangan militer diterima serta disambut dengan hangat, karena menjanjikan prestise - prestise kepahlawanan dan pengabdian.

¹⁾Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan & Kebudayaan, Pendidikan di Indonesia 1900 - 1974, Balai Pustaka, Jakarta, 1975, halaman 25

²⁾Ibid, Loc cit.

Dengan semboyan " Asia untuk bangsa Asia " dan ideologi " Hakko - Ichi - U ", Jepang berhasil menguasai daerah yang berpenduduk empat ratus juta jiwa, yang antara lain menghasilkan 50 % produksi karet dan 70% produksi timah dunia. ³⁾ Indonesia sebagai sumber bahan mentah serta gudang tenaga manusia yang dapat diharapkan untuk menunjang pelaksanaan Perang Asia Timur Raya, merupakan sasaran yang perlu dibina sebaik - baiknya, oleh karena itu ideologi Hakko - Ichi - U yang pada dasarnya merupakan alat tersembunyi ekspansi Jepang harus ditanamkan/dipompakan kepada seluruh rakyat Indonesia pada umumnya dan rakyat Sumatera Selatan khususnya.

Dalam melancarkan usaha tersebut diatas pemerintah militer Jepang membentuk/mengerahkan barisan propaganda, terdiri dari pemuka - pemuka masyarakat dari daerah ini yang telah mendapat gemblengan langsung dari pemimpin - pemimpin Jepang, dengan didampingi oleh orang - orang Jepang sendiri. Barisan propaganda tersebut terkenal dengan nama " Sendenbu ", dan tugas utama yang dibebankan oleh Jepang kepadanya ialah menyebar luaskan ideologi " Hakko - Ichi - U ", disamping itu ideologi baru tersebut harus dapat menghancurkan ideologi Indonesia Raya. ⁴⁾

Usaha untuk menyebar luaskan dan menanamkan ideologi baru tersebut melalui beberapa jalur, yakni melalui pegawai Negeri (Pamong Praja), para Alim - Ulama dan melalui jalur pendidikan (Guru - guru). Dalam rangka itu lah para Demang, Pesirah, Alim - Ulama dan Guru - guru yang mewakili daerahnya masing - masing dikumpulkan di kota Palembang dalam beberapa bulan lamanya untuk digembleng, diberi latihan - latihan serta indoktrinasi tentang semangat Jepang. Mereka dibebani tugas sebagai penyebar luas ideologi tersebut dan sekaligus menanamkan perasaan " anti Barat / Amerika " ke pada seluruh rakyat di daerah ini. Untuk maksud tersebut diciptakan beberapa nyanyian, baik dalam bahasa Jepang maupun dalam bahasa Indonesia, yang menggambarkan kejahatan bangsa - bangsa Eropa/Amerika karena telah memperbudak bangsa - bangsa Asia, dan oleh karena itu harus dienyahkan dari seluruh Asia. Dalam hal ini Jepanglah yang akan memimpin bangsa - bangsa Asia dalam mengusir bangsa - bangsa penjajah tersebut.

Nyanyian - nyanyian itu harus dihafalkan/dinyanyikan dengan penuh semangat oleh penduduk, terutama pegawai Negeri dan pelajar, sehingga perasaan

³⁾ Ibid, halaman 30

⁴⁾ Djumhur, Drs. H. Danasuparta, Sejarah Pendidikan, CV. Ilmu Bandung, Bandung - Bogor, 1976, halaman 195

arti Barat meresap serta dihayati oleh anak - anak sekolah dan seluruh rakyat. Dengan usaha itu diharapkan rakyat di daerah ini akan bersimpati kepada Jepang sebaliknya membenci kaum Sekutu, dan dengan demikian seluruh rakyat mau memberikan bantuan secara maksimal dalam bentuk materi, tenaga dan jiwa mereka bagi pelaksanaan Perang Suci yang didengung - dengunkan oleh pemerintah Militer Jepang.

Kedatangan bangsa Jepang di daerah ini mula - mula disambut dengan hangat oleh seluruh rakyat yang ingin melepaskan diri dari penjajahan bangsa Belanda, karena Jepang dianggap sebagai " juru selamat " yang telah dapat mengusir bangsa Bule dari bumi Indonesia. Dengan berbagai - bagai semboyan yang muluk - muluk seperti : " Asia untuk Bangsa Asia ", " Kemakmuran Bersama Asia Raya ", " Dai Nippon Indonesia Sama - sama " serta " Bangsa Kulit Putih Musuh Asia ", " Sekutu Musuh Kita " dan lain - lain, Jepang dapat memikat hati rakyat . Tetapi kemudian sikap rakyat berubah, karena ucapan dan semboyan - semboyan yang digembar - gemborkan itu tidak sesuai dengan perbuatan orang - orang Jepang itu sendiri. Rakyat menjadi ragu-ragu, gelisah dan ketakutan.

Akibat penyerbuan bangsa Jepang pada tanggal 14 Februari 1942. hampir semua kegiatan di segala bidang kehidupan masyarakat daerah ini terhenti untuk sementara. Sebahagian besar penduduk daerah ini baik yang tinggal di kota Palembang, di kota - kota daerah pedaleman (Sekayu. Kayuagung, Baturaja, Lahat, Muara Enim dan lain - lain), maupun yang tinggal di dusun - dusun mengungsi ke dalam hutan atau ke talang - talang. Demikian juga kegiatan di lapangan pendidikan dan pengajaran ikut terhenti, 5) dan baru kira-kira pada bulan Agustus 1942 roda pendidikan berputar kembali - sekolah - sekolah mulai dibuka, meskipun mula - mula jumlah muridnya sangat sedikit karena keadaan belum stabil.

Sebagai hasil pengamatan dan wawancara - wawancara yang telah kami lakukan di beberapa daerah Kabupaten di Sumatera Selatan, ternyata situasi/ kondisi pendidikan di daerah ini berbeda dengan apa yang terdapat di Jawa dan tempat lain di Indonesia. Rupa - rupanya sejak jaman kolonial Belanda baik jumlah maupun jenis sekolah yang dibuka di daerah ini tidak banyak. Pada jaman Jepang keadaan pendidikan di daerah ini semakin menyedihkan,

⁵⁾Wawancara dengan R.H.A. Rani cks. Kepala Perwakilan P & K Sumatera Selatan, 22 Oktober 1977.

dimana sekolah - sekolah di jaman Belanda yang jumlahnya belum memadai oleh Jepang semakin dikurangi, karena pemerintah Militer Jepang hanya memberikan sedikit perhatiannya terhadap pendidikan di daerah ini jika dibandingkan dengan di Jawa. Sekolah - sekolah yang ada pada masa pendudukan tentara Jepang ialah yang diselenggarakan oleh pemerintah Jepang dan yang diselenggarakan oleh badan - badan Swasta seperti : Taman Siswa, Muhammadiyah dan lain - lain. Pada jaman kolonial Belanda sekolah - sekolah Swasta yang terdapat di daerah ini ialah yang diselenggarakan oleh Taman Siswa, Muhammadiyah, Methodist (Zending), Katholik (Missi) dan Alim - Ulama setempat. Pada jaman Jepang sekolah - sekolah Zending dan Missi terpaksa ditutup, karena sekolah Methodist mempergunakan bahasa pengantarnya bahasa Inggris, sedangkan sekolah - sekolah Katholik guru - gurunya sebagian besar orang Belanda. Penutupan berbagai sekolah dimasa pendudukan tentara Jepang disamping faktor tersebut diatas juga disebabkan oleh kebutuhan mereka akan bangunan bangunan yang dipakai untuk asrama, bengkel, depot logistik dan lain - lain.⁶⁾ Sebagai akibat dari tindakan itu, maka jumlah sekolah di daerah ini menjadi semakin sedikit, dan boleh dikatakan keadaan pendidikan di Sumatera Selatan pada masa pendudukan tentara Jepang sangat rawan.

Sejalan dengan ideologi yang harus ditanamkan kepada seluruh rakyat Indonesia, maka landasan idiil daripada pendidikan pada masa pendudukan tentara Jepang ialah " Hakko - Ichi - U ", bangsa Jepang mengajak bangsa Indonesia untuk bekerja sama dengan mereka dalam rangka mencapai " Kemakmuran Bersama Asia Raya ".⁷⁾ Semua kegiatan di sekolah - sekolah menunjukkan pengabdian kepada pemerintah pendudukan Jepang dengan tidak mengindahkan pertumbuhan keperibadian daripada anak didik. Pedek kata pendidikan pada waktu itu diliputi oleh suasana perang, karena baik nyanyian - nyanyian, semboyan - semboyan maupun latihan - latihan fisik semuanya dihubungkan dengan persiapan lahir - bathin guna menghadapi perang.

Dengan semboyan Asia Timur Raya atas dasar Kemakmuran Bersama, maka semangat Jepang dimasukkan di sekolah - sekolah. Semua pelajar setiap pagi diharuskan mengucapkan sumpah setia kepada kaisar Jepang dan membentuk Indonesia Baru dalam rangka " Kemakmuran Bersama Asia Raya ".

⁶⁾ Kementerian Penerangan, Republik Indonesia Propinsi Sumatera Selatan, Jakarta, 1954, halaman 630.

⁷⁾ Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan & Kebudayaan, Op cit, halaman 25.

Adapun tujuan utama daripada pendidikan pada masa itu ialah "mencegah perang"; konkritnya ialah bahwa pendidikan di Indonesia harus diarahkan pada kewajiban menyediakan tenaga - tenaga buruh kasar secara cuma-cuma atau "Romusha" yang di daerah ini terkenal dengan nama Badan Pembantu Pemerintah (BPP) alias kuli kerja paksa sampai mati dan prajurit - prajurit untuk membantu peperangan bagi kepentingan Jepang. Pemuda - pemuda daerah ini dikerahkan untuk menjadi Gyugun dan Heiho.⁸⁾

Walaupun pemerintah Militer Jepang memberikan sedikit perhatian terhadap pendidikan, namun hasilnya sangat luar biasa untuk bangsa Indonesia di kemudian hari. Dalam hal ini pelajar - pelajar diharuskan mengikuti latihan fisik, latihan kemiliteran dan indoktrinasi ketat serta ditanamkan disiplin yang tinggi kepada mereka. Bahkan pada masa - masa terakhir pendudukan Jepang terdapat tanda - tanda bahwa tujuan pendidikan untuk men" Jepang" kan anak - anak Indonesia. Disamping itu penggunaan bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar resmi baik di kantor - kantor maupun di sekolah - sekolah, sehingga mendudukan bahasa Indonesia pada tempat yang sangat penting, sedangkan pemakaian bahasa Belanda dilarang dan bahasa Jepang dijadikan bahasa kedua⁹⁾ sesudah bahasa Indonesia.

Selama masa pendudukan Jepang itu pulalah bahasa Indonesia berkembang dan dipermodern. sehingga menjadi bahasa pergaulan dan bahasa ilmiah.

Sistem pengajaran yang dipakai pada masa itu adalah sistem sebelumnya dengan ditambah beberapa mata pelajaran baru, antara lain bahasa Jepang dan Taisho (gerak badan) kedalam kurikulum.¹⁰⁾

Seperti yang telah dikemukakan diatas bahwa bahasa Indonesia dijadikan bahasa pengantar pada semua tingkat sekolah, sedangkan bahasa Jepang dijadikan mata pelajaran wajib.¹¹⁾ Bahasa Belanda pada waktu itu dilarang dalam korespondensi dan Pers maupun diajarkan di sekolah - sekolah, tetapi sebaliknya pemakaian bahasa Jepang sebagai alat komunikasi baik dalam surat - menyurat maupun untuk Pers dianjurkan disamping bahasa Indonesia. Sebelum pelajaran dimulai para pelajar diharuskan mengikuti upacara penaikan/pengi-

⁸⁾ Kementerian Penerangan. Op cit, halaman 630

⁹⁾ Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan & Keb. Op cit, halaman 30

¹⁰⁾ Wawancara dengan Bapak R.H.A. Rani, 22 Oktober 1977

¹¹⁾ M.A. Azis, Japan's Colonialisme and Indonesia, Martinus Nijhoff The Hague, 1955, halaman 175

baran bendera Jepang dengan menyanyikan lagu kebangsaan Jepang (Kimigayo), menghormat (seikeirei) kepada kaisar Jepang di Tokyo dan setelah itu melakukan taiso (gerak badan). Tetapi bagi lembaga pendidikan Pesantren tidak diwajibkan, dan oleh karena itu ada beberapa Madrasah di Sumatera Selatan diubah menjadi Pesantren misalnya : Madrasah yang dipimpin oleh Ki. H. Zainal Abidin Fikri (sekarang sebagai Rektor IAIN Raden Fattah Palembang). Disamping itu para pelajar dari semua tingkat sekolah diwajibkan pula melakukan baris - berbaris, latihan kemiliteran, membersihkan gorong - gorong (got), kakus, membuat kebun di halaman sekolah untuk ditanami dengan tanaman yang menghasilkan bahan makanan seperti : jagung, ubi kayu, ketela rambat, sayur - mayur dan pohon jarak/kapas dan lain - lain. Sebagian besar waktu untuk belajar di dalam kelas dihabiskan untuk Kinrohosi (kerja bakti), dan hanya sebagian kecil saja untuk belajar dan oleh karena itu pengetahuan murid - murid pada masa pendudukan Jepang sangat minim dan kurang mendalam.

Buku - buku pelajaran boleh dikatakan langka, dan kalaulah ada tidak dapat memenuhi kebutuhan. Sebagian besar dari para pelajar tidak memiliki buku, buku tulis serta alat - alat tulis lainnya pun sangat sukar didapat, dan tidak jarang buku tulis yang telah penuh dengan tulisan direndam dengan air untuk menghilangkan tintanya, kemudian dijemur dan jika telah kering dipakai lagi untuk menulis. Selain daripada itu sandang dan pangan sulit dicari. Semangat dan adat istiadat Jepang atau nyanyian yang bertemakan semangat perang dan kutukan terhadap kaum Sekutu diajarkan di sekolah - sekolah, di samping menanamkan rasa hormat kepada guru - guru. Sehubungan dengan itu tiap - tiap pagi setelah masuk kelas, anak - anak berdiri dengan tertibnya dan memberikan salam kepada guru dengan mengucapkan " Sinsei ohayo - gozaimas " (Selamat pagi ibu / Bapak Gurū). Hal yang sama dilakukan juga pada siang/petang hari setelah pelajaran berakhir dengan mengucapkan "sinsei Kongniciwa " (Selamat siang Ibu/Bapak Guru). terutama kebiasaan itu ditanamkan pada sekolah rendah (Syoto - Koto Syogakko).

Peraturan sekolah yang menunjukkan disiplin yang keras, ialah semua pelajar pria diwajibkan mengundul rambut sampai licin, dan apabila peraturan itu dilanggar, maka pelajar yang tak patuh tersebut akan dihukum sehari penuh, yaitu dijemur dipanas matahari. Yang paling berkesan dan agak mengekan, ialah keharusan memberi hormat kepada serdadu - serdadu Jepang - terutama jika meliwati pos - pos penjagaan (piket), diharuskan berhenti lalu

memberi hormat dengan menundukkan badan sampai 90 derajat. Jika hal itu dilanggar dan kebetulan dilihat oleh serdadu yang sedang piket, biasanya di panggil dan ditempeleng.

1. Pendidikan Dasar.

Sistem persekolahan pada jaman pendudukan Militer Jepang banyak mengalami perubahan, karena sistem penggolongan baik menurut golongan bangsa maupun menurut status sosial dihapuskan.¹²⁾ Dengan demikian terjadilah pengintegrasian terhadap bermacam - macam sekolah sejenis. Berbagai - bagai jenis sekolah rendah yang diselenggarakan pada jaman pemerintah kolonial Belanda, baik yang mempergunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar maupun yang mempergunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar seperti : E.L.S, H.C.S, H.I.S, Schakelschool, Volkschool dan Vervolgschool dilebur menjadi satu jenis Sekolah Rendah (SD), yakni sekolah Rakyat 6 tahun yang dalam bahasa Jepang disebut " Kokumin - Gakko ".

Sejak jaman pendudukan Jepang sirnalah dualisme dalam pendidikan dan pengajaran di daerah ini,¹³⁾ karena pemerintah Militer Jepang hanyalah menyelenggarakan satu jenis Sekolah Rendah untuk semua golongan/Penduduk/bangsa, dan hanya mempergunakan satu bahasa pengantar (bahasa Indonesia) serta lama masa pendidikannya 6 tahun. Dalam hal ini tampak adanya demokratisirng dalam dunia pendidikan dan pengajaran yang merupakan perintis bagi masa - masa mendatang.

Pada masa itu Sekolah Rakyat 6 tahun (kokumin - Gakko) pada umumnya terdapat hanya dikota - kota yang pada jaman pemerintah kolonial Belanda memiliki sekolah H.I.S. seperti : Palembang, Kayu Agung, Tanjung - raja, Baturaja, Martapura, Muara Enim dan Lahat. Sedangkan di dusun - dusun di daerah Ulu - Musi Ilir (sekarang MUBA) — Ogan Komering Ilir Ogan Komering Ulu — Pagaralam — Lematang Ilir Ogan Tengah — Musi Rawas dan lain - lainnya. sistem persekolahan jaman kolonial Belanda masih dilanjutkan. Di dusun - dusun di daerah pedaleman Volkschool dan Vervolgschool yang lama masa pendidikannya masing - masing 3 tahun dan 2 tahun masih di

¹²⁾Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan & Kebudayaan, Op cit, halaman 41

¹³⁾Drs. Abu Ahmadi, Sejarah Pendidikan, CV. Toha Putera, Semarang, 1955 halaman 57

hidupkan / diteruskan, hanya namanya saja yang diubah dengan nama Jepang, yaitu " Syoto - Sugakko " (Volkschool) dan " Koto - Sugakko " (Vervolgschool). Dalam rangka pelaksanaan politik Etika di daerah ini (kira - kira tahun 1911), pemerintah kolonial Belanda telah membuka sekolah Desa (Volk school) yang dikenal dengan " Sekolah angka tiga " pada tiap - tiap dusun. Disamping itu untuk 6 dusun atau 7 dusun atau sampai 10 dusun dibuka hanya sebuah Vervolgschool. ¹⁴⁾Keadaan yang demikian itu dilanjutkan ketika pendudukan Jepang, kemungkinan karena belum memungkinkan untuk membuka Sekolah Rakyat 6 Tahun di susun - dusun di pedalaman.

Kemudian sistem lama itu berangsur - angsur ditinggalkan/hilang, sehingga setelah Proklamasi Kemerdekaan Vervolgschool pada tempat - tempat tertentu dihapuskan dan diganti dengan Sekolah Rakyat 6 tahun. Pada desa - desa tertentu nampaknya Sekolah Desa (Syoto - Sugakko) masih diteruskan sampai pada masa awal revolusi Fisik. Bagi mereka yang mau melanjutkan sekolahnya ke Sekolah Rakyat 6 Tahun dapat meneruskan di tempat - tempat/ kota yang telah memiliki Sekolah Rakyat tersebut dan langsung diterima di kelas empat. Apa yang telah disinggung diatas, bahwa jumlah sekolah di daerah ini sangat kurang, bahkan di jaman Jepang banyak ditutup karena gedungnya dibutuhkan untuk keperluan militer Jepang.

Sebagai suatu gambaran mengenai jumlah sekolah di daerah ini ; Pada tahun 1944 di kota Palembang yang pada waktu itu merupakan ibukota Propinsi Sumatera bagian Selatan (meliputi Sumsel, Jambi, Bengkulu, Lampung dan Bangka - Belitung), hanyalah memiliki delapan buah Sekolah Rakyat (Koku-min - Gakko) yaitu : di ladang Plaju, di daerah konsesi minyak Plaju, di Kramasan, di Bukit Kecil, di Pugaran, sekolah puteri di Kebon Duku, di Sungai Aur 7 Ulu dan di Kertapati. ¹⁵⁾

Mengenai kurikulum yang dipakai di sekolah Rakyat pada masa pendudukan Jepang ialah kurikulum pada jaman kolonial Belanda dengan menambah beberapa mata pelajaran antara lain : Bahasa Jepang, tulisan Jepang (Katagana, Hiragana dan Honzi), taisho, sejarah dan adat istiadat Jepang. Sedangkan pelajaran ilmu bumi ditinjau dari sudut geopolitik. ¹⁶⁾

¹⁴⁾Wawancara dengan Bapak R.H.A. Rani eks Kepala Perwakilan P & K Sumatera Selatan 22 Oktober 1977.

¹⁵⁾Wawancara dengan Bapak R.H.A. Rani

¹⁶⁾Prof. Soegarda Poerbakawata, Pendidikan dalam alam Indonesia Merdeka, Gunung Agung, Jakarta, 1970, halaman 33

Seperti yang telah dikemukakan diatas, bahwa waktu yang dipergunakan untuk belajar di dalam kelas hanya sebagian kecil saja, karena sebagian besar di habiskan untuk " kingrohoshi " dan untuk menghibur serdadu - serdadu Jepang dengan menyanyi dan menari. Buku pelajaran yang dipakai pada waktu itu dan sangat populer ialah buku " Matahari Terbit ", " Bunga Rampai " dan buku " Berhitung ". Hampir semua Sekolah Rendah (SD) di daerah Sumatera Selatan di masa itu mempergunakan buku - buku tersebut sebagai buku pegangan. Istilah - istilah atau nama - nama Belanda yang terdapat didalam buku itu ditutup dengan tinta hitam, sehingga tidak dapat dibaca oleh murid - murid.

Tokoh - tokoh pendidikan daerah ini pada jaman pendudukan Jepang antara lain ialah : R.H.A. Rani eks Kepala Perwakilan P & K Propinsi Sumatera Selatan, Sudiro eks Walikota Jakarta Raya, Abdul Malik SH. bekas walinegara Sumatera Selatan, Abdullah Nawawi eks Kepala P & K pada jaman Revolusi Fisik dan lain - lain.

2. Pendidikan Kejuruan :

Jika di tempat - tempat lain seperti di Jawa, Bali dan lain - lainnya pemerintah Jepang membuka sekolah - sekolah Menengah Umum atau Koto-Chu - Gakko (SMP) dan Syoto - Chu - Gakko (SMA), tidak demikian halnya di daerah Sumatera Selatan ini. Nampaknya Jepang tidak melihat kepentingannya untuk membuka sekolah Menengah Umum di daerah ini, sehingga Sekolah Menengah Umum (MULO) yang pada jaman kolonial Belanda pernah didirikan di kota Palembang, baik yang berbahasa Belanda maupun yang berbahasa Melayu (Inheemshe MULO = MULO Bumi Putera) ditutup, dan demikian pula halnya dengan sekolah MULO yang diselenggarakan oleh Missi Katolik di Lahat juga dihapuskan.¹⁷⁾

Penutupan sekolah - sekolah tersebut diatas disamping disebabkan oleh faktor guru (guru - gurunya sebagian besar orang Belanda) dan kebutuhan militer Jepang akan gedung - gedung, kemungkinan besar tidak adanya keinginan atau desakan dari masyarakat sendiri pada waktu itu. 18) Hal ini dapat dihubungkan dengan kenyataan, bahwa sekolah - sekolah Menengah Swasta pun harus ditutup seperti : Taman Siswa (Taman Dewasa) dan sekolah -

¹⁷⁾ Wawancara dengan kepala Bappeda Prop. Sumsel bulan Oktober 1977 dan wawancara dengan Moh. Toha Pensiunan PS. di Lahat 1979.

¹⁸⁾ Kementerian Penerangan, Op cit, halaman 630.

sekolah Menengah Muhammadiyah.

Meskipun Jepang meniadakan Sekolah Menengah Umum di daerah ini, namun mereka menaruh perhatian pada sekolah - sekolah Kejuruan yang disesuaikan dengan kepentingan Jepang sendiri. Sejalan dengan kepentingan Jepang, maka dibukalah beberapa sekolah Kejuruan di Kota Palembang dan Plaju seperti : Sekolah Guru, sekolah Pegawai Negeri, Sekolah Keputrian yang murid - muridnya berasal dari puteri - puteri orang terkemuka/golongan elite dan sekolah Mizuho - Gakko - en.

Di Plaju yang pada waktu itu terpisah dari Palembang (Plaju dibawah kekuasaan Syonanto) dibuka Sekolah Teknik Minyak dengan nama Minarai - Gakko dan Skyu - Kagyo - Gakko. 19) Sekolah - sekolah yang dibuka di Palembang yang disebut diatas, gedung sekolahnya di jalan Mailan (pusat pertokoan Mega Ria dan Gaya Baru Sekarang). Disamping itu di Palembang dibuka juga Sekolah Pertemuan, Sekolah Pemeliharaan Kapal terbang di Talang di Talang Betutu dan Sekolah Perkapalan di Pebem. 20)

Adapun Sekolah Guru yang dibuka pada jaman Jepang di daerah ini ada tiga macam yaitu : Kyoing - Yosijo, Dai - Chihu - Sihang - Gakko dan Dai - Nibu - Sihang - Gakko, yang lama masa pendidikan masing - masing 2 tahun, 2 tahun dan 1 tahun. 21) Mengenai sekolah Kyoing - Yosejo pada umumnya di buka di daerah Uluan, dimana pada jaman kolonial Belanda pernah ada sekolah guru Lergang (C.V.O.) untuk memenuhi kebutuhan atas guru Sekolah Desa (Volkschool). Baik Lergang pada jaman kolonial Belanda maupun Kyoing - Yosejo di jaman pendudukan Militer Jepang sifatnya tidak berkesinambungan dalam arti, satu angkatan harus ditamatkan dulu dan kemudian baru dibuka lagi angkatan berikutnya. Tidak adanya kesinambungan pada sekolah tersebut mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, disamping untuk memenuhi kebutuhan akan guru di sekolah - sekolah Desa, juga diperhitungkan faktor asrama - karena murid - muridnya harus tinggal di dalam asrama, sedangkan daya tampung asrama pada waktu itu sangat terbatas.

Murid - murid yang diterima di Dai - Nibu - Sihang — Gakko berasal dari Kyoing - Yosejo (C.V.O.) dengan melalui testing masuk dan kemudian

19) Wawancara dengan R.H.A. Rani, 22 Oktober 1977

20) Wawancara dengan Nawawi Gaffar (Purnawirawan), Oktober 1980.

21) Penulis sendiri menyaksikan sekolah tersebut dan diperkuat oleh Bapak Nawawi Gaffar bekas murid Dai - Nibu - Sihang - Gakko.

berhak mengajar di Kyoing - Yosejo, sedangkan murid - murid yang diterima di Daichibu - Sihang - Gakko berasal dari Koto - Syogakko (Kokumin - Gakko) dan setelah tamat mereka berhak mengajar di Koto - Syogakko atau Kokumin - Gakko. Sistem pengajaran di sekolah - sekolah Guru pada jaman itu mempergunakan sistem pengajaran sekolah Guru pada jaman kolonial Belanda, dengan menambah beberapa mata pelajaran baru misalnya : bahasa Jepang taiso (gerak badan), sejarah, adat istiadat dan huruf Jepang. Yang paling penting dalam proses belajar mengajar pada waktu itu, ditekankan kepada latihan fisik yang memiliki disiplin yang tinggi seperti melakukan kingrohosi, latihan militer dan setiap pagi mengucapkan sumpa setia kepada kaisar Jepang dengan menghormat ke Tokyo dalam upacara penaikan bendera dan lain-lain.

Para pelajar diharuskan tinggal diasrama, makan dan pakaian alakadarnya diberi oleh pemerintah Jepang tanpa membayar uang sekolah. Mereka diwajibkan berkebun dengan menanam ubi kayu, sayur - mayur, jagung, dan lain - lain untuk makanan mereka sendiri. Pendek kata pelajar sekolah guru pada waktu itu dibina menjadi manusia Jepang, yang penuh semangat, disiplin dan ulet, hal mana sangat menguntungkan ketika Revolusi Fisik di daerah ini karena banyak diantara mereka itu menjadi anggota BKR, Lasykar Rakyat dan ada yang sampai sekarang menjabat perwira - perwira menengah dan tinggi dalam TNI.

Mengenai sekolah Dai - Chibu - Sihang - Gakko dan Dai - Nibu - Sihang - Gakko kedua - duanya di kota Palembang, yang lama masa pendidikannya masing - masing dua tahun dan satu tahun. Sebenarnya kedua sekolah ini merupakan satu, karena kepala sekolahnya dan gedungnya juga menjadi satu dan dipimpin oleh orang Jepang bernama Sibata. Guru - gurunya yang berasal dari bangsa kita antara lain Jahya Bahar (sekarang Kolonel Infanteri), Maliki Saleh (pegawai kantor Gubernur Sumsel sekarang), Achmad dan lain - lain. Mereka yang dapat diterima di Dai - Chibu - Sihang - Gakko, selain yang berasal dari Koto - Syogakko atau Kokumin - Gakko, juga mereka yang pernah menduduki H.I.S. dan Schakelschool yang belum tamat. Bagi mereka yang telah menamatkan Dai - Chibu - Sihang - Gakko dan mendapatkan prestasi baik boleh meneruskan ke Dai - Nibu - Sihang - Gakko.²²⁾

II. PENDIDIKAN JAMAN INDONESIA MERDEKA :

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, maka

²²⁾Wawancara dengan bapak Nawawi Gaffar (Purnawirawan) Okt. 1980.

perubahan - perubahan tidak hanya terjadi dalam bidang pemerintahan saja, tetapi juga dalam bidang pendidikan. Perubahan yang terjadi dalam bidang pendidikan merupakan perubahan - perubahan yang bersifat mendasar, yaitu menyangkut penyesuaian bidang pendidikan dengan dasar dan cita - cita dari suatu bangsa dan Negara yang Merdeka. Untuk mengadakan penyesuaian dengan cita - cita bangsa Indonesia, maka bidang pendidikan mengalami perubahan dalam landasan idiilnya, tujuan pendidikan, sistem persekolahan dan kesempatan belajar yang diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia.

– Landasan Idiil :

Dalam Undang - Undang Dasar 1945 dasar dan filsafah negara Indonesia adalah Pancasila, yang kemudian dijadikan landasan idiil pendidikan di Indonesia. Walaupun dalam periode tahun 1945 - 1950, negara kita mengalami beberapa kali perubahan Undang - undang Dasar, namun dasar dan filsafah Negara Republik Indonesia tidak mengalami perubahan. Oleh karena itulah Pancasila tetap dijadikan landasan idiil pendidikan di Indonesia dari jaman ke - jaman. ²³⁾

– Tujuan Pendidikan :

Tujuan pendidikan pada waktu itu pun harus diselaraskan dengan cita - cita Bangsa Indonesia yang merdeka, maka tujuan juga mengalami perubahan. Tujuan pendidikan Indonesia secara umum dinyatakan dalam Undang - undang Dasar 1945 Bab XIII pasal 31 yang berbunyi : (1) Tiap - tiap warga negara berhak mendapat pengajaran, (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran Nasional yang diatur dengan Undang - undang. Berdasarkan isi Undang - undang Dasar tersebut, maka Menteri Pendidikan dan Pengajaran (Mr. Soewandi) dengan surat keputusan No. 104/Bhg. O tertanggal 1 Maret 1946 menunjuk Ki Hajar Dewantara untuk memimpin suatu Panitia Penyelidik Pendidikan, dan telah merumuskan tujuan pendidikan pada waktu itu, yaitu untuk mendidik warga negara yang sejati, sedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara dan masyarakat.

Dengan kata lain tujuan pendidikan pada masa itu penekanannya pada penanaman semangat patriotisme. ²⁴⁾

Penanaman semangat patriotisme sebagai tujuan pendidikan memang

²³⁾ B.P3K, Pendidikan di Indonesia Dari Jaman ke - Jaman, Dep. P & K, Jakarta, 1979, halaman 93 - 94

²⁴⁾ Ibid, halaman 95 - 96

sesuai dengan situasi dan kondisi pada waktu itu, saat mana Negara dan Bangsa Indonesia sedang berjuang melawan penjajahan, yang sewaktu - waktu pemerintah kolonial Belanda masih berusaha untuk menjajah kembali negara Indonesia. Oleh karena itu dapat dipahami mengapa semangat patriotisme sangat ditekankan oleh pemerintah sebagai tujuan pendidikan di Indonesia pada waktu itu. Sebab dengan semangat patriotisme itu kemerdekaan dapat dipertahankan dan diisi.

Pada tahun 1950 tujuan Pendidikan Indonesia mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Undang - undang No. 4 tahun 1950 mengenai dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah. Dalam Undang - undang No.4/1950 Bab II pasal 3, tujuan pendidikan Nasional Indonesia adalah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. 25)

Kemudian dalam tahun 1954 dikeluarkan Undang - undang no. 12 tentang Dasar - dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah, dimana undang - undang ini merupakan pemberlakuan kembali Undang - undang No. 4 tahun 1950 untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Ketetapan - ketetapan yang tercantum di dalamnya sama dengan ketetapan - ketetapan yang tercantum dalam Undang - undang tersebut adalah sama. 26)

Sejak tahun 1959 Indonesia berada di bawah gelora Manipol - Usdek, yang telah menjadi dewa dalam kehidupan politik Indonesia dan juga dewa dalam bidang kehidupan lainnya. Bidang pendidikanpun tak dapat luput dari pengaruh tersebut. Keputusan Presiden No. 145 tahun 1965 merumuskan tujuan pendidikan Nasional pendidikan Indonesia sesuai dengan Manipol - Usdek sebagai berikut : Tujuan pendidikan Nasional kita baik yang diselenggarakan oleh pihak Pemerintah maupun oleh pihak. Swasta, dari Pendidikan Pra - Sekolah sampai Pendidikan Tinggi, supaya melahirkan warga negara Sosialis Indonesia yang susila, yang bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat Sosialis Indonesia, adil dan makmur baik spirituil maupun materiil dan yang berjiwa Pancasila, yaitu :

- a. Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa
- b. Perikemanusiaan yang adil dan beradab
- c. Kebangsaan

25) Ibid, halaman 97 - 116

26) Ibid, halaman 116 - 117

- d. Kerakyatan
- e. Keadilan Sosial, seperti dijelaskan dalam Manipol - Usdek.²⁷⁾

Tujuan pendidikan yang digariskan oleh Manipol - Usdek ini tidak dapat bertahan lama, setelah meletus peristiwa G.30.S/PKI tahun 1965. Masyarakat Indonesia mulai sadar dan tujuan pendidikan itu merupakan produk PKI dengan menggunakan Pancasila sebagai tameng. Dengan dikeluarkannya Ketetapan MPRS No. XXVII tahun 1966, maka keputusan Presiden No. 19 tahun 1965 tentang Pokok - Pokok sistem Pendidikan Nasional Pancasila dinyatakan tidak berlaku lagi.

Tujuan Nasional Pendidikan Indonesia tahun 1966 dirumuskan dalam bentuk Ketetapan MPRS No. XXVII/MPRS/1966 tentang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam Ketetapan itu Bab II pasal 3; membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan - ketentuan seperti yang dikehendaki oleh Pembukaan Undang - Undang Dasar 1945. Pembentukan manusia Pancasila sejati ditekankan sebagai tujuan Nasional, karena sangat diperlukan untuk merubah mental masyarakat yang sudah banyak mendapat indoktrinasi Manipol Usdek. Pemurnian semangat Pancasila dianggap sebagai jaminan untuk tegaknya Orde Baru.²⁸⁾

Kemudian setelah itu pada tahun 1973 MPR hasil pemilihan Umum mengeluarkan Ketetapan No. IV/MPR/1973 yang dikenal dengan nama Garis - garis Besar Haluan Negara (GBHN) ; Pendidikan pada hekekatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan diluar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Oleh karenanya agar pendidikan dapat dimiliki oleh seluruh rakyat sesuai dengan kemampuan masing - masing individu, maka pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah. Pembangunan di bidang pendidikan didasarkan atas Falsafah negara Pancasila dan diarahkan untuk membentuk manusia - manusia pembangunan yang ber - Pancasila dan untuk membentuk manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan keterampilan, dapat mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab, dapat menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tenggang rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur, mencintai bangsanya dan sesama manusia sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Undang - undang Dasar 1945.

²⁷⁾ Ibid, halaman 117 — 118

²⁸⁾ Ibid, halaman 118

Sebagai rumusan terakhir mengenai tujuan pendidikan ditetapkan dalam Garis - garis Besar Haluan Negara menurut TAP MPR No.IV/MPR/1978 yang didalamnya memuat rumusan Tujuan Pendidikan Nasional sebagai berikut :

- (a) Pendidikan Nasional berdasarkan atas Pancasila dan bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, ketrampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia - manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama - sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.
- (b) Dalam rangka melakukan pendidikan Nasional perlu diambil langkah - langkah yang memungkinkan pengkhayatan dan pengamalan Pancasila oleh seluruh lapisan masyarakat.
- (c) Pendidikan Pancasila termasuk pendidikan moral Pancasila dan unsur - unsur yang dapat meneruskan dan mengembangkan jiwa dan nilai - nilai 1945 kepada generasi muda dimasukkan ke dalam kurikulum di sekolah sekolah, mulai dari Taman Kanak - Kanak sampai Universitas, baik Negeri maupun Swasta. ²⁹⁾

Dari uraian diatas nampak bahwa sejak Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945 tujuan Nasional Pendidikan Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan yang disesuaikan dengan situasi politik pemerintah RI, berbeda dengan landasan idiil pendidikan kita yang tetap langger.

— Sistem Persekolahan :

Sebagaimana yang diuraikan diatas bahwa bidang pendidikan setelah masa Kemerdekaan mengalami perubahan - perubahan yang mendasar, termasuk perubahan - perubahan yang menyangkut sistem persekolahan. Pada jaman sebelum Kemerdekaan sistem Persekolahan didasarkan sistem golongan, baik golongan berdasarkan bangsa maupun status sosial. Tetapi setelah Kemerdekaan sistem Persekolahan di Indonesia hanya mengenal tiga tingkat pendidikan :

- (1) Pendidikan rendah, yang pada jaman revolusi Fisik disebut Sekolah Rakyat dan lama pendidikannya 6 tahun.
- (2) Pendidikan Menengah, yang terbagi atas dua tingkat - sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)

²⁹⁾ ibid, halaman 119

yang masing - masing lama pendidikannya tiga tahun. Tingkat Sekolah Menengah ini dibagi pula atas dua jenis sekolah yaitu : Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah Kejuruan.

- (3) Pendidikan Tinggi, kesempatan untuk meneruskan studi ke lembaga pendidikan Tinggi terbuka lebar bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat.³⁰⁾ Sistem dan tujuan dari masing - masing tingkat pendidikan diatas diatur oleh Undang - undang No. 4 tahun 1950 Bab V pasal 7 yang berbunyi sebagai berikut :
- (1) Pendidikan dan Pengajaran Taman Kanak - kanak bermaksud menuntun tumbuhnya rohani dan jasmani kanak - kanak sebelum ia masuk sekolah Rendah.
- (2) Pendidikan dan Pengajaran Rendah bermaksud menuntun tumbuhnya rohani dan jasmani kanak - kanak, memberikan kesempatan kepadanya guna mengembangkan bakatnya dan kesukaannya masing - masing dan memberikan dasar - dasar pengetahuan, kecakapan dan ketangkasan baik lahir maupun batin.
- (3) Pendidikan dan pengajaran Menengah (umum dan vak) bermaksud melanjutkan dan meluaskan pendidikan dan pengajaran yang diberikan di sekolah rendah untuk mengembangkan cita hidup serta membimbing ke sanggupannya murid sebagai anggota masyarakat, mendidik tenaga - tenaga ahli dalam pelbagai lapangan sesuai dengan bakat masing - masing dan kebutuhan masyarakat/atau mempersiapkannya bagi pendidikan dan pengajaran tinggi.
- (4) Pendidikan dan Pengajaran Tinggi bermaksud memberi kesempatan kepada pelajar untuk menjadi orang yang dapat memelihara kemajuan ilmu dan kemajuan hidup kemasyarakatan.
- (5) Pendidikan dan Pengajaran luar biasa bermaksud memberi pendidikan dan pengajaran kepada orang - orang yang dalam keadaan kekurangan, baik jasmani maupun rohaninya, supaya mereka dapat memiliki hidupnya lahir batin yang layak.³¹⁾

Sejak bulan Agustus 1950 penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran berdasarkan Undang - Undang Pokok Pendidikan No. 4 tahun 1950 RI,

³⁰⁾ Ibid, halaman 98.

³¹⁾ Ibid, halaman 98 - 99

dan berlaku bagi susunan Sekolah Negeri maupun Swasta untuk seluruh Indonesia. Susunan Sekolah tersebut adalah : Sekolah Rakyat 6 tahun, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 3 tahun, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 3 tahun, dan khusus bagi pendidikan Guru selain SGB (4 tahun)³²⁾ dan SGA (3 tahun) untuk Guru sekolah Dasar - disamping itu didirikan pula PGSLP (Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama), dan Kursus B I dan B II untuk Guru Sekolah Lanjutan Atas. Kemudian dalam tahun 1954 didirikan lembaga Pendidikan Guru bertingkat Universitas yang pertama di Bandung dengan nama Pendidikan Guru (PTPG). Tetapi kemudian berdasarkan kerja sama antara Departemen P & K dengan Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, pendidikan Guru dimasukkan dalam lingkungan Universitas yaitu Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan sebagai suatu lembaga yang mendidik calon Guru Sekolah Lanjutan. Sekolah Guru A — yang akhir - akhir ini dirobah menjadi S.P.G., lama pendidikannya 3 tahun untuk menjadi Guru sekolah Dasar tetap diadakan, sedangkan Sekolah Guru B (4 tahun) dihapuskan sejak tahun 1961. Akhirnya dalam tahun 1963 FKIP dilebur menjadi Institut Keguruan Ilmu Pendidikan (IKIP), yang merupakan satu - satunya lembaga pendidikan Guru untuk Sekolah Lanjutan.

Sistem persekolahan di Indonesia dalam perkembangannya kemudian berlaku sistem lima tingkat yaitu :

- (a) Pra Sekolah (Taman Kanak - Kanak 1 atau 2 tahun)
- (b) Pendidikan Dasar 6 tahun
- (c) Sekolah Lanjutan Tingkat pertama (SLTP) 3 tahun yang terbagi menjadi Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP), Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama (SKKP) dan Sekolah Teknik (ST).
- (d) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) 3 tahun yang terbagi menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA), Sekolah Kesejahteraan Keluarga Atas (SKKA), Sekolah Teknik Menengah (STM), Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan lain - lain.

³²⁾ Mula - mula di kota Palembang sendiri pada jaman Recomba berdiri Normalschool dua tahun dan menjelang Pengakuan Kedaulatan dirobah menjadi SGB 4 tahun. Bagi mereka yang mendapat ranking pada waktu duduk di kelas III terakhir dapat diterima di SGA 3 tahun. Mereka yang mendapat ijazah SGA pada umumnya ditempatkan pada SMP/SGB di daerah.

- (e) Perguruan Tinggi 3 tahun Sarjana Muda, 5 atau 7 tahun sarjana. Lembaga ini dapat berbentuk Universitas, Institut, Akademi atau Sekolah Tinggi.

Keempat tingkat yang meliputi TK,SD,SLTP dan SLTA telah tercakup dalam Undang - Undang No. 4 tahun 1950 Bab. V. Sedangkan mengenai Perguruan Tinggi diatur dalam Undang - Undang No. 22 tahun 1961.³³⁾

— Kesempatan Belajar :

Setelah Kemerdekaan sistem persekolahan di Indonesia memberi kesempatan belajar kepada segala lapisan masyarakat, sesuai dengan isi Undang - undang Dasar 1945 Bab. XIII pasal 31 ayat 1, bahwa tiap - tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Demikian juga dalam Undang - undang Pendidikan dan Pengajaran tahun 1950 Bab. XI pasal 17 mengatakan, bahwa tiap-tiap warga negara Republik mempunyai hak yang sama untuk diterima menjadi murid suatu sekolah, jika memenuhi syarat - syarat yang ditetapkan untuk pendidikan dan pengajaran pada sekolah itu. Berdasarkan isi kedua undang-undang diatas, maka pemerintah Indonesia telah memberikan kesempatan belajar yang sama kepada setiap anak baik untuk pendidikan rendah, menengah maupun pendidikan Tinggi.

Walaupun kesempatan belajar bagi setiap anak dari setiap golongan masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memasuki sekolah tertentu, tentunya akan dibaringi oleh prestasi belajar anak itu sendiri. Karenanya apabila prestasi belajar anak itu baik, maka kesempatan untuk belajar terbuka baginya. Tentu saja dalam hal ini biaya sekolah diperlukan, karena setiap tingkat pendidikan tertentu memerlukan biaya pendidikan, dan bagi anak yang berprestasi belajar yang baik - tetapi jaminan sosial ekonominya kurang, pemerintah mengusahakan pemberian beasiswa,walaupun dalam jumlah terbatas.

Kurikulum :

Pembentukan Panitia Penyelidik Pengajaran sebagaimana diuraikan di atas, adalah dalam rangka mengubah sistem pendidikan kolonial ke dalam sistem pendidikan Nasional. Perubahan mendasar itu tidak hanya mengenai landasan idiil, tujuan, sistem dan kesempatan belajar saja, tetapi juga menyangkut masalah kurikulum pada semua tingkat pendidikan. Kurikulum yang semula diorientasikan kepada kepentingan kolonial, kini diubah dan diselaraskan

³³⁾ B.P3K, Op cit, halaman 126 - 127.

kan dengan kebutuhan bangsa yang merdeka, dan salahsatu hasil Panitya tersebut bahwa setiap rencana pelajaran pada setiap tingkat pendidikan harus memperhatikan hal - hal sebagai berikut :

- (a) Pendidikan pikiran harus dikurangi.
- (b) Isi Pelajaran harus dihubungkan dengan kehidupan sehari - hari
- (c) Memberikan perhatian terhadap kesenian
- (d) Pendidikan watak
- (e) Pendidikan Jasmani
- (f) Kewarganegaraan dan masyarakat. ³⁴⁾

Setelah Undang - Undang Pendidikan dan Pengajaran No. 4/1950 dikeluarkan, maka :

- (1) Kurikulum Pendidikan Rendah ditujukan untuk menyiapkan anak memiliki dasar - dasar pengetahuan, kecakapan dan ketangkasan baik lahir maupun batin, serta mengembangkan bakat dan kesukaannya.
- (2) Kurikulum pendidikan Menengah ditujukan untuk menyiapkan pelajar ke pendidikan Tinggi, serta mendidik tenaga - tenaga ahli dalam pelbagai lapangan khusus, sesuai dengan bakat masing - masing dan kebutuhan masyarakat.
- (3) Kurikulum pendidikan Tinggi ditujukan untuk menyiapkan pelajaran agar dapat menjadi pimpinan dalam masyarakat, dan dapat memelihara kemajuan ilmu dan kemajuan hidup kemasyarakatan.

Seperti kita ketahui kurikulum adalah suatu alat untuk mencapai tujuan pendidikan, dan dalam usaha untuk mengembangkan / meningkatkan pendidikan, kurikulum telah sering mengalami perubahan yang dimaksudkan untuk menghasilkan warga negara yang sebaik - baiknya. Kurikulum yang pertama digunakan adalah Kurikulum 1950, kemudian berubah menjadi Kurikulum 1958 dan seterusnya disusun Kurikulum 1964 yang berlaku sejak tahun 1965. Kurikulum terakhir inipun masih mengalami perubahan, karena pada tahun 1968 digunakan kurikulum baru yang mulai dilaksanakan tahun 1969 untuk SMP, SMA, SMEA, SKKP, SKKA, sedangkan untuk SMEP, SPG dilaksanakan pada tahun 1970.³⁵⁾

³⁴⁾ Ibid, halaman 105 – 108

³⁵⁾ Ibid, halaman 133

Dalam rangka Pembangunan Nasional (PELITA) guna mencapai masyarakat adil dan makmur materiil dan spiritual, bidang pendidikanpun mendapatkan perhatian khusus dengan diadakan Pembaharuan Pendidikan. Dalam hubungan inilah dilakukan penyempurnaan Kurikulum melalui Proyek Pengembangan Kurikulum dan Metoda Mengajar (PKMM), yang telah berhasil mengeluarkan kurikulum baru yang telah dibekukan oleh Menteri P & K menjadi Kurikulum 1974 untuk Proyek Perintis Sekolah Pembangunan dimana Kurikulum 1975 untuk SD, SMP, SMA, dan Kurikulum 1976 untuk sekolah Kejuruan seperti : SMEP, SMEA, SKKP, SKKA, ST, STM, dan SPG. Kurikulum inilah yang pada umumnya dipakai di sekolah - sekolah tersebut diatas pada masa sekarang ini. ³⁶⁾

— Pendidikan di Sumatera Selatan. :

Keadaan di daerah Sumatera Selatan umumnya dan Keresidenan Palembang khususnya sampai beberapa bulan setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, masih dalam suasana revolusi dan semua perhatian serta pikiran dicurahkan sepenuhnya pada hal - hal yang langsung menyangkut pemindahan kekuasaan dari tangan pemerintah Militer Jepang. Sesuai dengan situasi dan kondisi daerah pada saat itu, pengambil - alihan kekuasaan pada umumnya berjalan dengan lancar tanpa insiden - insiden yang berarti.

Tetapi pada akhir tahun 1945, yaitu segera setelah Pemerintah Republik Indonesia mulai menjalankan roda pemerintahan di Keresidenan Palembang (8 Oktober 1945), maka tidak hanya organisasi - organisasi perjuangan yang mendapat perhatian, melainkan juga usaha di bidang pendidikan dan pengajaran tidak ketinggalan. Memang sangat dirasakan oleh tokoh - tokoh pendidikan daerah ini betapa perlunya lembaga pendidikan untuk masyarakat di daerah ini, lebih - lebih jika mengingat keadaan pendidikan dan pengajaran pada masa pemerintah pendudukan Militer Jepang, baik jenis maupun jumlahnya sangat sedikit. Pada jaman Kemerdekaan sekarang ini keadaannya harus berubah - rakyat harus dicerdaskan - diberi pendidikan dan pengajaran tanpa memandang golongan ataupun status sosial, seperti yang termaktub dalam Undang - Undang Dasar 1945 Bab. XIII pasal 31 ayat (1) dan (2).

Pada jaman sebelum Kemerdekaan sistem persekolahan didasarkan sistem golongan, baik golongan berdasarkan bangsa maupun status sosial.

³⁶⁾ Dikutif dari Diktat Penetapan Instruktur Guru IPS - SLU di Malang, tanggal 14 Januari s/d 9 Februari 1980.

Mereka yang dapat diterima pada sekolah - sekolah seperti : HIS. MULO dan sejenisnya, hanyalah anak - anak bangsawan/priyayi (Demang, Asisten Demang, Pesirah, Pembarap dan Kerio) saja, sedangkan anak - anak rakyat biasa hanya dibolehkan masuk di sekolah Desa (Volkschool) yang dikenal dengan nama " Sekolah angka Tiga ". Demikian pula untuk anak - anak keturunan Cina didirikan sekolah khusus yaitu HCS. Tetapi setelah Kemerdekaan keadaannya berubah dan sistem persekolahan di daerah ini mengenal tiga tingkat pendidikan/persekolahan untuk semua golongan penduduk : (1) Pendidikan Rendah, (2) Pendidikan Menengah, (3) Pendidikan Tinggi. Sebagai akibat adanya kesempatan belajar yang diberikan kepada setiap anak, maka perkembangan murid dari ketiga tingkat sekolah tersebut dari tahun ke - tahun bertambah terus, lebih - lebih setelah tahun 1950 yaitu terbentuknya kembali Negara Kesatuan RI di daerah ini.

Kesempatan belajar yang diberikan oleh pemerintah kepada setiap anak, telah dipergunakan sebaik - baiknya oleh masyarakat, yang dari tahun ke-tahun jumlah anak yang sekolah semakin meningkat, sehingga memaksa pemuka - pemuka masyarakat/tokoh - tokoh Pendidikan dan Pemerintah setempat, melakukan usaha - usaha untuk dapat menampung hasrat dan keinginan belajar mereka dengan membuka pelbagai tingkat dan jenis sekolah yang akan kami uraikan satu persatu dibawah ini.

Rupa - rupa akibat revolusi Kemerdekaan di daerah ini telah banyak membawa perubahan dan kemungkinan - kemungkinan dalam masyarakat, yang pada masa - masa sebelumnya tidak pernah menyentuh lapisan masyarakat yang memiliki status sosial yang rendah. Dengan terbukanya kesempatan belajar bagi setiap orang tanpa melihat asal kelahiran dan statusnya dalam masyarakat, maka pada tahun enampuluhan golongan yang dulunya memegang dominasi di daerah ini mulai tergeser / kendor kedudukannya dan muncul golongan intelektual ³⁷⁾ yang pada umumnya berasal dari anak - anak petani dari Uluhan. Dengan lain perkataan, keadaan sosial pada masa-masa akhir Revolusi Fisik mulai cenderung kearah stratifikasi - sosial yang lebih ditentukan oleh tingkat pendidikan dari pada statusnya dalam masyarakat berdasarkan kelahiran. Atas dasar itu pulalah terjadi suatu mobilitas vertikal dan horizontal di kalangan masyarakat, baik yang berasal dari daerah uluhan maupun

³⁷⁾ Dr. M. Koentjaraningrat, *The Javanese of South - Centrel Jawa* dalam G.P. Murdock (ed), *Social structure of South East - Asia*, Chicago 1960, halaman 90

yang bertempat tinggal di kota - kota setelah tahun enam puluhan di daerah ini, lebih - lebih dengan terbukannya kesempatan bagi anak - anak dari semua lapisan masyarakat memasuki sekolah - sekolah yang lebih tinggi, sehingga tidak sedikit dari anak - anak tersebut yang menduduki jabatan - jabatan penting dalam pemerintahan, perusahaan - perusahaan Negara, Dosen, ABRI dan sebagainya.

1. PENDIDIKAN DASAR. :

Apa yang telah disebutkan diatas, bahwa sejak jaman Jepang berbagai jenis sekolah rendah sebagai warisan dari pemerintah kolonial Belanda dihapuskan dan diganti dengan satu jenis sekolah Rendah saja, yakni Sekolah Rakyat (SR) 6 tahun, disamping masih adanya Sekolah Desa pada tempat - tempat tertentu. Berhubung dengan keadaan sekolah sebagai sisa jaman Jepang, maka pemerintah menghadapi tiga macam usaha yaitu :

- (a) Secara berangsur - ansur mengubah semua Sekolah Desa 3 tahun menjadi SR 6 tahun.
- (b) Memperbaiki tingkatan dan mutu pelajaran, yang sejak jaman Jepang sangat merosotkeadaannya.
- (c) Menambah jumlah SR untuk dapat memenuhi kebutuhan rakyat akan pendidikan dan pengajaran.

Disamping menghadapi tiga macam usaha itu, pemerintah dihadapkan pula suatu tantangan. yakni kekurangan tenaga pengajar, gedung sekolah, alat - alat pelajaran dan perlengkapan - perlengkapan lainnya.

Mengenai keadaan / perkembangan pendidikan Dasar (SR) pada periode tahun 1945 - 1950 tidak banyak yang dapat kami kemukakan pada laporan ini, karena langkanya data baik di kota Palembang sendiri apalagi di daerah - daerah Uluhan. Hal ini dapat dimaklumi, mengingat situasi daerah ini pada awal revolusi Fisik, dimana pusat pemerintah RI selalu berpindah-pindah dari satu tempat/kota ke tempat lain (Palembang - Lahat - Lubuk Linggau - Curup dan akhirnya ke Bengkulu) dan sistem bumi hangus telah melanda daerah ini, agar supaya arsip - arsip / surat menyurat yang penting / rahasia tidak jatuh ketangan musuh.

Tetapi yang jelas bahwa jumlah Sekolah Rakyat di daerah Sumatera Selatan pada saat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sangat sedikit. Dapat digambarkan betapa rawannya keadaan pendidikan di daerah ini, dimana di kota Palembang sendiri sebagai ibukota dari wilayah yang cukup luas ketika itu, hanya

memiliki 10 buah Sekolah Rakyat Negeri saja 38)

Akan lebih menyedihkan lagi apabila meninjau keadaan pendidikan di daerah Uluu, terutama mengenai tenaga Guru, gedung sekolah dan sarana - sarana lainnya, semuanya serba kurang.

Namun bagaimanapun juga tidak dapat disangkal, bahwa perkembangan/keadaan pendidikan Dasar di daerah ini setelah Proklamasi Kemerdekaan berangsur - angsur membaik - jumlah sekolah dan muridnya dari tahun ke tahun bertambah terus, lebih - lebih setelah tahun 1950. Jika dibandingkan dengan keadaan di tempatlain, terutama di Jawa mungkin daerah ini jauh ketinggalan, tetapi jika dibandingkan dengan keadaan pada jaman kolonial Belanda dan jaman Jepang, pendidikan Dasar di daerah ini menunjukkan suatu perkembangan yang cukup mengembirakan.

Oleh karena di daerah Uluu terutama di dusun - dusun Sekolah Rakyat 6 tahun belum memungkinkan untuk dibuka disebabkan oleh beberapa faktor sehingga sistem sekolah Desa (SR 3 tahun) masih terus dilanjutkan sampai masa - masa terakhir Revolusi Fisik. Tetapi setelah itu secara berangsur - angsur sistem ini ditinggalkan, sehingga kira - kira tahun 1954 Sekolah Desa pada umumnya di dusun - dusun sudah tidak ada lagi dan diganti dengan SR 6 tahun. Menyangkut masalah gedung dan tenaga guru merupakan masalah yang pelik dan urgen, yang harus segera ditanggulangi oleh Pemerintah setempat. Seperti telah disinggung diatas, daerah ini tidak mendapat warisan gedung - gedung sekolah yang memadai dari pemerintah kolonial Belanda, dan pada jaman revolusi Fisik banyak gedung - gedung yang dibumi hanguskan atau di jadikan asrama - asrama tentera/lasykar pada waktu itu. Tidak kurang penting nya faktor gurupun sangat menentukan dalam pembukaan suatu sekolah. Sebagai akibat dari sistem persekolahan pada jaman kolonial Belanda, daerah ini tidak memiliki banyak tenaga pengajar. Oleh karena itu kekurangan guru sangat dirasakan oleh daerah ini dalam mengimbangi kesempatan belajar yang telah diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat, dan dalam menghadapi ke dua masalah itu pemerintah mengambil kebijaksanaan sebagai berikut :

(1) Balai - balai Marga yang keadaannya telah buruk dan tua untuk sementara dapat dipergunakan sebagai ruangan - ruangan kelas belajar, sementara Pemerintah belum sanggup membangun gedung sekolah yang baru. Disamping itu juga rumah - rumah partikelir / penduduk yang tidak ditempati, secara su-

38) Wawancara dengan Bapak R.H.A. Rani eks. Kepala P & K Sumsel.

karela dipinjamkan atau disewakan kepada Pemerintah untuk dipergunakan sebagai bilik - bilik tempat belajar. Pada tahun 1953 di daerah Sumatera Selatan tercatat 636 Balai Marga dengan 1760 buah bilik dalam tiga macam kondisi : 266 sedang, 278 tua dan 92 tua betul, Selain itu terdapat juga rumah-rumah milik Pemerintah/Kementerian P & K yang dipakai oleh Sekolah Rakyat dan dengan PP. 65 tahun 1950 telah diserahkan kepada Daerah Propinsi Sumatera Selatan, yang berjumlah 202 buah rumah dengan 703 lokal dalam keadaan . 55 tua, 118 sedang dan 29 yang baru. Sedangkan rumah - rumah partikelir yang dipergunakan untuk Sekolah Rakyat Pemerintah berjumlah 519 buah dengan 1393 buah bilik dalam keadaan : 293 tua, 118 sedang dan 38 yang baru. 39) Cara yang ditempuh oleh Pemerintah seperti yang digambarkan di atas rupa - rupanya belum dapat memenuhi kebutuhan yang semestinya, oleh karena itu terpaksa rumah - rumah atau balai - balai Marga yang sudah tua - bobrok - lapuk dan hampir roboh, harus mengabdikan dari pagi sampai sore hari. Sekolah - sekolah Rakyat di daerah ini harus dibuka pada pagi dan sore harinya secara bergilir.

(2) Untuk mengatasi kekurangan guru, pemerintah mendirikan/menyelenggarakan pendidikan guru secara crash-programe, yang dikenal dengan nama " Kursus Pengajar untuk Kursus Pengantar Kewajiban Belajar " (KPKPKB). Tetapi dalam pelaksanaan KPKPKB ini mengalami kesulitan, dan sebelum sampai pada waktu yang ditargetkan oleh pemerintah, terpaksa dihapuskan/diintegrasikan ke SGB.

Kedadaan yang buruk ini terutama menimpa daerah - daerah Uluu, bahkan sampai tahun enampuluhan kondisi gedung - gedung sekolah belum lagi memenuhi persyaratan yang dikehendaki. Setelah meletusnya G.30 S/PKI mulai adanya cahaya terang karena bidang pendidikan mendapat perhatian khusus dari Pemerintah, lebih - lebih dengan adanya PELITA pertama, PELITA kedua, PELITA ketiga dan seterusnya. Bagaimana perkembangan pendidikan Dasar di daerah ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini. Mulai tahun 1964 nama Sekolah Rakyat (SR) diubah menjadi Sekolah Dasar (SD), dan selanjutnya Sekolah Rakyat hendaknya dibaca " Sekolah Dasar " (SD). 40)

39) Kementerian Penerangan RI, Op cit, halaman 619

40) I Djumhur dan Drs. H. Danasuparta, Sejarah Pendidikan, CV. Ilmu Bandung, Bandung, 1976, halaman 210.

TABEL I

KEADAAN SEKOLAH RAKYAT NEGERI DI DAERAH SUM.SEL.
TAHUN 1951 -- 1953

TAHUN	JUMLAH		
	Sekolah	Murid	Guru
1951 / 1952	1298	274295	4630
1952 / 1953	1333	254671	4695
1953 / 1954	1347	265389	4559

SUMBER : Kementerian Penerangan RI Propinsi Sumatera Selatan.

TABEL II

KEADAAN SEKOLAH DASAR DI DAERAH SUMATERA SELATAN
TAHUN 1969 -- 1980

TAHUN	JUMLAH		
	Sekolah	Murid	Guru
1969 / 1970	1660	361085	8302
1970 / 1971	1668	316222	7087
1971 / 1972	1487	325938	7651
1972 / 1973	1523	333984	8143
1973 / 1974	1581	352953	11014
1974 / 1975	1599	359955	9153
1975 / 1976	1749	400465	10941
1976 / 1977	1840	405835	10884
1977 / 1978	1854	449086	12151
1978 / 1979	1983	478121	12518
1979 / 1980	2363	564534	15475

SUMBER : Kanwil Dep. P & K Propinsi Sumatera Selatan.

2. MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI (MIN) :

Penyelenggaraan Pendidikan di Indonesia pada jaman Kemerdekaan selain dikelola oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, juga dikelola oleh Departemen - Departemen lainnya seperti : Departemen Kesehatan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertanian, Departemen Agama dan lain - lain. Dalam Departemen Agama di Propinsi Sumatera Selatan terdapat Bidang Pendidikan Agama Islam yang mempunyai tugas untuk mengawasi, membina dan mengelola Pendidikan Agama Islam di daerah ini. Sekolah - sekolah yang dibawahi oleh Departemen Agama (Kanwil Dep. Agama Propinsi Sumatera Selatan) antara lain ialah " Madrasah Ibtidaiyah Negeri " (MIN).

Seperti telah disinggung diatas bahwa lembaga pendidikan " madrasah " yang didirikan dan dipelopori oleh Nizam - El - Mulk seorang Menteri dari dunia Arab pada abad ke - 11, diperkenalkan pula dan kemudian berkembang di Indonesia. Kalau pada sistem Pesantren tidak terdapat standar antara satu dengan lain, maka pada akhir abad ke- 19 dan permulaan abad ke - 20 madrasah madrasah mulai diperkenalkan pembagian menurut tingkat kemampuan dan prestasi murid, kelompok umur dan digunakannya metode klasikal. Artinya seorang Guru mengajar dihadapan banyak murid dalam satu kelas. Sistem dan metode ini sedikit banyak dipengaruhi oleh sistem Barat yang digunakan oleh pemerintah kolonial Belanda dalam sekolah - sekolah yang berjenjang dari pendidikan dasar, menengah dan tinggi. 41) Setelah jangka waktu tertentu terhadap murid - murid diadakan evaluasi mengenai prestasi belajarnya, sehingga diperkenalkan siswa ujian untuk menentukan seseorang siswa naik kelas atau tidak, dan lulus atau tidak sebagai dasar dari penyelesaian suatu tingkat pendidikan tertentu.

Lembaga pendidikan " madrasah " di Indonesia berkembang diseluruh pelosok Tanah Air. Meskipun sebagian ada yang dipengaruhi oleh madrasah Darul Uluan dan Ahaulatyah di Mekah, namun jelas sistem Barat pada jaman kolonial seperti HIS, MULO dan AMS sangat berpengaruh. Walaupun dasar pendidikan dan pengajarannya berorientasi pada ilmu Pengetahuan Agama Islam, tetapi mata pelajaran Umum diberikan pula. Madrasah memelopori penggunaan huruf Latin disamping bahasa dan huruf Arab. Mula - mula sebagai bahasa pengantar dipergunakan bahasa daerah, kemudian bahasa Melayu dan akhirnya bahasa Indonesia. Madrasah yang dimaksudkan setingkat dengan

41) BP3K, Op cit, halaman 166 – 167

Sekolah Dasar yang disebut " Madrasah Ibtidaiyah. 42)

Setelah Kemerdekaan perkembangan madrasah Ibtidaiyah di daerah ini berkembang sangat pesat, dan pada saat ini tercatat lebih kurang 120 madrasah Ibtidaiyah, diantaranya terdapat 14 buah madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN). Hampir pada tiap - tiap Kabupaten/Kotamadya memiliki sekurang - kurangnya sebuah MIN yaitu : Kotamadya Palembang 2 buah, MUBA 1 buah, OKI 1 buah, LIOT 3 buah, Lahat 1 buah, OKU 3 buah, MUBA 1 buah, Bangka 1 buah, Kotamadya Pangkal Pinang 1 buah, sedangkan Belitung belum lagi memiliki.

T A B E L III

REKAPITULASI JUMLAH MIN DAN GURU DI SUMATERA SELATAN
TAHUN AJARAN 1979 / 1980

No. Urut	Kabupaten / Kotamadya.	K e a d a a n M.I.N.		
		Jml. MIN	Guru Negeri	Guru Honor
1.	Palembang	2	36	2
2.	M u b a	1	11	5
3.	O k i	1	8	0
4.	L i o t	3	24	4
5.	L a h a t	1	1	4
6.	O k u	3	26	0
7.	M u r a	1	10	2
8.	B a n g k a	1	6	2
9.	Pangkal Pinang	1	7	4
10.	Belitung	0	0	0
	J u m l a h	14	129	23

SUMBER : Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sumatera Selatan,
Laporan Tahunan Bidang Pendidikan Agama 1979 / 1980.

42) ibid, halaman 167.

DAFTAR PENEGERIAN IBTIDAIYAH DAERAH SUMSEL

No.	N A M A	ALAMAT	S.K. MENTERI	
			Nomor	Tanggal
1.	Madrasah Ibt. Neg.	Payaraman Tnj. Batu	78/1967	20-7-1967
2.	-----"	Tanjung Ranan (liot)	78/1967	20-7-1967
3.	-----"	Lubuk Kupang(Mura)	78/1967	20-7-1967
4.	-----"	Sumberejo (Bangka)	79/1967	20-7-1967
5.	-----"	Sungai liat (Bangka)	79/1967	20-7-1967
6.	-----"	Padang Agung (OKU)	'8/1968	21-1-1968
7.	-----"	Kertapati(Palembang)	50/1968	8 -3-1968
8.	-----"	Lumpatan (Muba)	75/1968	17-4-1968
9.	-----"	Gelombang Kikim(liot)	75/1968	17-4-1968
10.	-----"	Taman Bungbuk (liot)	20/1968	2- 9-1968
11.	-----"	Tg.Periuk Muara Enim	20/1968	2- 9-1968
12.	-----"	Ulu Danau (Oki)	20/1968	2- 9-1968
13.	-----"	Batu Putih (Oki)	20/1968	2- 9-1968
14.	-----"	Pajarbulan (Liot)	20/1968	2- 9-1968

SUBER : Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sumatera Selatan.

2. PENDIDIKAN MENENGAH :

a. Sekolah Menengah Pertama :

Apa yang telah kami singgung dimuka bahwa tokoh - tokoh pendidikan daerah ini merasakan betapa perlunya lembaga pendidikan untuk masyarakat Sumatera Selatan, terutama pendidikan Sekolah Lanjutan / Sekolah Menengah Umum, mengingat selama penjajahan Belanda hanya segelintir manusia dari daerah ini saja yang dapat mengenyam pendidikan Menengah, bahkan di jaman Jepang sekolah Menengah Umum (Chu - Gakko) di daerah ini tidak dibuka sama sekali.

Keinginan untuk membuka sekolah Lanjutan baru dapat direalisasikan pada tanggal 1 Februari 1946 di kota Palembang atas anjuran Dr. A.K. Gani.⁴³⁾

⁴³⁾ Kementerian Penerangan RI, Op cit, halaman 631

Dalam tahap pertama didirikanlah tiga Sekolah Lanjutan tingkat Pertama yaitu : Sekolah Oemoem Pertama (SMOP) yang lazim dikenal dengan nama SMP, Sekolah Guru Menengah (SGM) dan Sekolah Kepandaian Puteri (SKP). Sebagai pimpinan SMP ialah R.H.A. Rani dengan dibantu oleh beberapa orang Guru misalnya : Wahidin Abas Surapati, Sjahrizad Sjahab, R.Soewarto, Abdullah Bakri dan Naroni Adil.⁴⁴⁾

Sekolah tersebut merupakan SMP yang pertama kalinya dibuka setelah Proklamasi Kemerdekaan, yang pada waktu itu memiliki murid sebanyak + 700 orang. Pada awal kegiatan sekolah tersebut banyak sekali mengalami kesulitan terutama (gedung) dan tenaga pengajar yang diperlukan. Berkat kerja sama dengan sekolah - sekolah agama seperti Qur'anyah, maka kesulitan tempat belajar mulai dapat diatasi dan demikian pula mengenai tenaga pengajarnya semakin bertambah.

Disamping itu berkat kerja sama serta bantuan dari berbagai pihak, berhasil membuat tiga buah lokal sebagai gedung SMP yang terletak di jalan Perambungan Palembang. Gedung inilah yang pertama kalinya dipakai sebagai tempat belajar baik pada waktu pagi maupun sore hari, walaupun pelajaran pada waktu itu tidak begitu teratur mengingat situasi keamanan dalam kata tidak stabil.

Adapun nafkah guru - guru SMP tersebut tergantung kepada pembayaran uang sekolah murid - murid, namun demikian sekolah ini tetap bertahan berkat kegigihan dan ketekunan pimpinan Sekolah dan pembantu - pembantu seperti : R. Soewarso, Abdullah Bakri, Wahidin Abbas Surapti, Sjahrizad Sjahab, Naroni Adil, Djuaryah Akib dan lain - lain. Mereka bersemboyan : " Berperang - bertempur boleh saja, tetapi ilmu harus dicari dan anak - anak harus diberi pendidikan " !!

Pada waktu itu pasukan Sekutu yang diboncengi oleh NICA telah tiba di Palembang. Karena Komando Sekutu meminta kepada tentara RI untuk mengosongkan tempat - tempat yang dipakai untuk keperluan tentara di daerah sepanjang " Corridor ", yaitu : Talang Semut, Jalan Merdeka, Jalan Tengkuruk, Jalan Jenderal Sudirman, Rumah Sakit Charitas, maka Markas tentara yang menempati gedung Methodist English School dipindahkan ke bekas gedung Schakel School di 15 Ilir. Dengan demikian SMP menempati gedung bekas Markas Tentara yang terletak berseberangan dengan mesjid

⁴⁴⁾Wawancara dengan R.H.Rani, 22 Oktober 1977.

Agung. Sedangkan asrama murid - murid SMP terletak di gedung sebaris dengan gedung OGEM (PLN) yang telah dibongkar, kira - kira di kaki jembatan Ampera sekarang. 45)

Tetapi pada umumnya murid - murid SMP yang tinggal di asrama tersebut diatas mengambil makanan ke asrama Sekolah Guru Menengah (SGM) yang terletak di gedung Gaya Baru di Jalan Mailan, karena asrama SGM tersebut merupakan " dapur umum " baik untuk siswa - siswa SGM sendiri maupun untuk siswa - siswa SMP, yang dipercayakan pelaksanaannya kepada Abdul Malik yang merangkap, di samping sebagai pimpinan SGM juga sebagai kepala dapur umum. 46)

Murid - murid SMP tersebut berasal dari kumpulan anak - anak yang terlanjar pelajarannya selama masa pendudukan Jepang, ditambah dengan murid murid baru tamatan dari Sekolah Rakyat pada jaman Jepang. Jadi mereka itu ada yang tamatan HIS, Schakel School, Sekolah Rakyat dari jaman Jepang, bahkan ada yang telah duduk di bangku MULO pada jaman kolonial Belanda. Sebagian besar mereka itu berasal dari daerah pedalaman (Uluan) yang berduyun - duyun datang ke kota Palembang untuk menuntut ilmu. Mereka itu berasal dari daerah MUBA, MURA, Curup, Lahat , LIOT. OKI, OKU dan lain - lain. Sejak tahun 1946 - 1949 Kepala Pendidikan dan Pengajaran RI di Sumatera Selatan adalah Abdullah Nawawi, yang pada masa evakuasi beliau ikut serta ke pedaleman. Sementara di dalam kota terbentuk negara Sumatera Selatan, pimpinan kepala Pengajaran dan Pendidikan dipegang oleh Moh. Rasyid. Setelah pemerintah RI kembali ke kota Palembang dan terbentuknya Negara Kesatuan RI 1950, berturut - turut pimpinan kantor Pendidikan dan Pengajaran yang kemudian berubah menjadi nama kantor Kepala Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan, ialah : M. Yunus - R.H.A. Rani - Madyan R.M.Akil - Drs. Morsidi - Drs. A. Musa (sampai sekarang).

Oleh karena situasi keamanan pada waktu itu - pertempuran terus menerus - hubungan antara daerah pedalaman dengan kota Palembang sangat sulit, sehingga para pelajar yang berasal dari Uluan sering tidak mendapat kiriman uang/beras dari orang tuanya, maka sebagian besar dari mereka itu memutuskan untuk pulang kekampung masing - masing, sehingga jumlah yang tadi cukup banyak akhirnya tinggal sebagian saja. Disamping itu ada pula diantara

45) Wawancara dengan R.H.A. Rani.

46) Keterangan dari Drs. Ma'moen Abd.

mereka ikut aktif membantu perjuangan melawan NICA. Sebagai akibat pertempuran Lima Hari Lima Malam di Kota Palembang pada awal bulan Januari 1947 serta pengunduran pasukan/Lasykar kita sejauh radius 20 km ke luar kota dan pemindahan pusat Pemerintah RI ke Lahat, maka terpaksa sekolah tersebut (SMP) ditutup. Bersamaan dengan hijrahnya pasukan/lasykar kita dan pusat pemerintah RI ke daerah pedaleman, ikut pula para pelajar guna membantu perjuangan di daerah pedaleman, dan dengan ikut sertanya para pelajar berhijrah mendorong para pemimpin/tokoh pendidikan kita untuk membuka sekolah - sekolah lanjutan di daerah - daerah pedaleman, agar mereka dapat meneruskan sekolahnya. Oleh sebab itu dibukalah sekolah - sekolah Lanjutan Pertama (SMP) di Baturaja dan Pagaram, dan beberapa bulan sesudah itu didirikan pula SMP di Manna (Bengkulu Selatan).⁴⁷⁾

Dibangka dan Belitung yang telah lebih dulu diduduki oleh tentera Belanda (Akhir Maret 1946), didirikan sekolah - sekolah Lanjutan misalnya di Pangkalpinang dibuka Sekolah Menengah dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia, Middelbare School (MS) dengan bahasa pengantar bahasa Belanda dan di Tanjung Pandan (Belitung) didirikan Sekolah Menengah (Middelbare School) dengan bahasa pengantar bahasa Belanda.⁴⁸⁾

Sementara itu di kota Palembang tindakan tentara Belanda semakin agresif, pada tanggal 21 Juli 1947 Aksi Militer yang pertama berkobar, Belanda merencanakan untuk menduduki/menguasai seluruh daerah pedalaman dan menghancurkan pusat Pemerintahan RI (Keresidenan Palembang) di Lahat. Hal itu memaksa Residen Abdul Rozak memindahkan pusat Pemerintahan RI dari Lahat ke Lubuk Linggau (23 Juli 1947), sebuah kota kecil di daerah pedaleman (sekarang ibu kota Kabupaten MURA). Pindahanya pusat Pemerintahan ke Lubuk Linggau, ikut serta pula para pemuda hijrah ke sana. Hal itulah yang mendorong untuk membuka sekolah SMP di Lubuk Linggau, guna menampung pemuda - pemuda pelajar yang datang ke sana dari kota Palembang, Lahat, Tanjung Enim, dan sebagainya.⁴⁹⁾

Pada waktu itu hubungan dengan Jawa sangat sulit - bersekolah ke Jawa kecil sekali kemungkinan, sedangkan sekolah - sekolah lanjutan di kota Palembang telah ditutup, dan sekolah - sekolah lanjutan yang didirikan di daerah

47) Kementerian Penerangan RI, Op cit, halaman 632

48) Ibid, Loc cit.

49) Ibid, Loc cit.

pedalaman jalannya tidak lancar/teratur, oleh karena itu banyak sekali pemuda/pemudi yang terlantar studinya. Di samping itu banyak pula diantara mereka yang bergabung dalam Tentera Nasional Indonesia Pelajar (TNIP) ikut aktif memanggul senjata bersama - sama TNI.

Tetapi pada bulan Agustus tahun 1947 di kota Palembang, sesudah penutupan SMP yang telah disebutkan diatas, diusahakan kembali membuka SMP oleh R.H.A. Rani dan kawan - kawan, kali ini dengan nama SMO (Sekolah Menengah Oemoem). Meskipun kota Palembang telah diduduki oleh tentera Belanda, dan Belanda mengetahui kegiatan R.H.A. Rani dkk, tetapi mereka tidak menggangukannya, sehingga SMO dapat berdiri sampai dipindahkannya pusat Pemerintahan Propinsi Sumatera Selatan dari kota Bengkulu ke kota Palembang dan dibubarkannya Negara Sumatera Selatan.(1950). Disamping itu tidak boleh dilupakan kegiatan Taman Siswa bagian Taman Dewasa (SMP) di bawah pimpinan Jasodipuro tetap berjalan, sehingga murid muridnya dapat terus belajar. Sedangkan pemerintah pendudukan Belanda juga membuka sebuah sekolah " Middelbaare School " yang di daerah ini di kenal dengan nama Sekolah Menengah Recomba (Regerings Commisaris Bestuure Aangelegenheden) dibawah pimpinan Amir Hamzah. Guru - guru Sekolah Menengah Recomba antara lain : Hutabarat, Ibu Fatimah, Burhanuddin, Toruan, Junus Wajidun dll. Gedung sekolahnya di SMP IV sekarang yang terletak di Jalan Dempo. ⁵⁰⁾

Sementara itu pemerintah pendudukan Belanda juga mendirikan sebuah sekolah MULO guna menampung anak - anak serdadu KNIL, anak - anak Indonesia Belanda, dan juga anak - anak pejabat bangsa kita yang mau bekerja sama dengan Belanda dibolehkan memasuki sekolah MULO tersebut, yang berlokasi di Talang Semut (SMP. Negeri I sekarang). ⁵¹⁾

Tidak dapat disangkal bahwa hubungan antara SMO dan Taman Siswa di satu pihak dengan Middelbaare School (SM Recomba) di lain pihak secara Internasional tidak baik, namun lain halnya hubungan antara siswa - siswanya, mereka akrab satu sama lainnya. Hal ini terbukti dengan adanya usaha pengibaran kembali bendera Merah Putih di halaman Taman Siswa, yang diprakarsai dan dihadiri oleh siswa - siswa dari ketiga sekolah tersebut pada akhir bulan Februari 1948. Perlu diketahui setelah Aksi Militer yang pertama, bendera Merah Putih tidak boleh lagi berkibar di kota Palembang.

⁵⁰⁾Keterangan dari Drs. Ma'moen Abd.

⁵¹⁾Keterangan dari Drs. Ma'moen Abd.

Apabila Persetujuan Linggarjati dirobek - robek oleh Belanda secara sepihak dengan melancarkan Aksi Militer yang pertama, maka Perjanjian Renville - pun mengalami nasib yang sama dengan meletusnya Aksi Militer yang kedua pada tanggal 19 Desember 1948, yang mengakibatkan dua pertiga daerah Keresidenan Palembang diduduki oleh tentera Belanda. Oleh karena itu pusat Pemerintahan RI terpaksa dipindahkan lagi dari kota Lubuk Linggau ke Curup, dan semua kegiatan pendidikan terhenti, karena gedung - gedung sekolah banyak yang dibumi hanguskan oleh tentera Belanda, seperti : gedung SMP di Pagar Alam, bekas gedung MULO di Bengkulu, gedung Semarak usaha " Semarak Bengkulu ", dan lain - lainnya.

Dalam tahun 1949 keadaan pendidikan di daerah - daerah pedalaman mulai / berangsur - angsur membaik, muncul sekolah - sekolah lanjutan, baik yang diusahakan atas inisistif Swasta, ada pula yang disokong oleh Pemerintah Negara Sumatera Selatan yang pada tanggal 1 Februari 1949 di dirikan sebagai negara boneka Belanda. Di Baturaja, Lahat, Pagar Alam, Lubuk Linggau, Curup, Bengkulu dan Tanjung Karang didirikan Sekolah Menengah (SMP).⁵²⁾

Sesudah pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949, pelajar - pelajar dari kekuasaan Republik yang tergabung dalam Tentara Nasional Indonesia Pelajar (TNIP) tidak langsung dapat memasuki bangku sekolah, tetapi baru pada waktu pusat Pemerintahan Propinsi Sumatera Selatan pindah dari Bengkulu ke kota Palembang (Maret 1950), mereka masuk ke kota Palembang bersama - sama dengan Pegawai Pemerintah Republik dan berusaha dapat duduk di bangku sekolah kembali. ⁵³⁾

Oleh karena pusat Pemerintahan Propinsi Sumatera Selatan pindah ke kota Palembang, maka timbullah gelombang perpindahan yang besar disegala lapangan. Banyak pegawai Pemerintah yang kemudia memenuhi kota Palembang, tidak hanya datang dari Bengkulu, tetapi juga dari kota Lubuk Linggau. Dengan sendiri para pelajar yang memang berasal dari daerah Palembang yang tadinya bersekolah di kota Palembang juga ikut pindah. Dengan adanya perpindahan secara besar - besaran itu, maka membawa akibat yang negatif dalam segi pendidikan bagi kota Bengkulu dan kota Lubuk Linggau. Bersamaan dengan pindahnya para pegawai Pemerintahan dan para pelajar ke kota Palembang, ikut pula para guru meninggalkan ke dua kota tersebut, sehingga terpak-

⁵²⁾ Kementerian Penerangan RI, Op cit, halaman 632

⁵³⁾ Ibid, halaman 633.

sa Sekolah Lanjutan Atas (SMA) di kota Bengkulu dan SMP di kota Lubuk Linggau kemudian dimatikan, karena tidak ada tenaga pengajar.

Pada tahun 1950 SMO yang dipimpin oleh R.H.A. Rani dipecah menjadi dua, yaitu : SMP. I dan SMP. II. Dan pada bulan Maret 1950, yaitu pada saat pusat Pemerintahan Propinsi Sumatera Selatan pindah ke kota Palembang tercatat sebanyak 12 buah SMP milik Pemerintah di seluruh Sumatera Selatan (masih meliputi Jambi, Lampung dan Bengkulu). Tetapi pada tahun 1951 jumlahnya berkurang menjadi 10 buah, karena seperti telah disebut di atas SMP di Lubuk Linggau dimatikan, sedangkan di Pangkal Pinang (Bangka) adanya penggabungan antara Middelbare School (MS) dan Sekolah Menengah (SM) menjadi satu SMP. ⁵⁴⁾

Pada tahun 1952 jumlah SMP meningkat menjadi 14 buah, karena tercatat ada 4 buah SMP yang baru didirikan, masing - masing : di Kayu Agung-Tanjung Enim - Kota Bumi - kota Palembang, sebuah. Dengan demikian di kota Palembang sendiri pada tahun 1952 terdapat tiga buah SMP. Negeri. ⁵⁵⁾

Sesuai dengan keputusan Pemerintah RI (Kementerian P dan K) di Jogjakarta, maka pada tahun 1950 didirikan Inspeksi SMP untuk seluruh daerah - daerah Propinsi di Indonesia. Untuk daerah Propinsi Sumatera Selatan didirikan Inspeksi SMP di kota Palembang pada bulan Mei 1950 R.H.A. Rani sebagai Kepala. ⁵⁶⁾ Untuk seluruh Indonesia diadakan 10 daerah Inspeksi SMP tersebut, yang merupakan suatu peningkatan jika dibandingkan dengan masa penjajahan Belanda, hanya ada satu Inspeksi MULO untuk seluruh wilayah Hindia Belanda. ⁵⁷⁾

Jika dibandingkan dengan keadaan di Jawa nampaknya perkembangan pendidikan menengah di daerah ini sangat jauh ketinggalan - Propinsi Sumatera Selatan yang pada saat itu (tahun 1952) masih meliputi Jambi, Lampung, Bengkulu dan Propinsi Sumatera Selatan sekarang ini, hanya memiliki 14 buah SMP. Negeri atau milik Pemerintah.

Seperti halnya pendidikan Dasar (sekolah Rakyat). pendidikan menengahpun menghadapi masalah yang sama, yaitu gedung sekolah dan sarana

⁵⁴⁾Wawancara dengan R.H.A. Rani, 22 Oktober 1977

⁵⁵⁾Kementerian Penerangan RI, Op cit, halaman 633.

⁵⁶⁾Wawancara dengan R.H.A. Rani, 22 Oktober 1977

⁵⁷⁾Kementerian Penerangan, Op cit, halaman 634.

lainnya. Selaras dengan perkembangannya dari masa penjajahan, maka ketika didirikan Sekolah Lanjutan Pertama (SMP) semenjak awal tahun 1946, yang pasti dimiliki hanyalah murid - murid belaka. Warisan gedung dari Pemerintah kolonial Belanda sangat kurang. Yang ada di daerah ini, baik di kota - kota maupun di pedalaman jumlahnya sangat sedikit, misalnya di kota Palembang hanya gedung - gedung HIS sebanyak 4 buah (2 buah di Kebon Duku, sebuah di 15 Ilir, dan sebuah di Indrapura), dan sebuah gedung MULO, yang sekarang ini menjadi gedung SMP. Negeri I, Sedangkan di daerah pedalaman Sumatera Selatan (yang sekarang) yang mempunyai sekolah HIS hanyalah Kayu Agung, Tanjung Raja, Baturaja, Martapura, Muara Enim, Lahat. Sampai tahun 1955 Pemerintah RI belum mendirikan gedung - gedung SMP di daerah ini.⁵⁸⁾

Bagaimana perkembangan/keadaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Propinsi Sumatera Selatan (masih meliputi Jambi, Lampung dan Bengkulu) sejak terbentuk kembali Negara Kesatuan RI sampai tahun 1953 dapat dilihat dari tabel di sebelah yang kami susun berdasarkan data Kementerian Penerangan RI tentang Propinsi Sumatera Selatan.

TABEL IV.

KEADAAN SMP NEGERI DI DAERAH PROPINSI SUMSEL
TAHUN 1950 – 1953

T A H U N	J U M L A H		
	Sekolah	Murid	Guru
1950	12	1804	51
1951	10	2035	70
1952 – 1953	14	2374	109

SUMBER : Kementerian Penerangan RI Propinsi Sumatera Selatan.

⁵⁸⁾ Ibid, Loc cit.

Sejalan dengan sistem persekolahan di Indonesia sejak jaman kemerdekaan, dimana Pemerintah RI memberikan kesempatan yang seluas - luasnya kepada setiap anak dari seluruh lapisan masyarakat, untuk memasuki pendidikan Menengah asalkan dapat memenuhi syarat yang telah ditentukan, maka pemerintah/Kementerian P dan K terus berusaha untuk menambah jumlah SMP di seluruh Indonesia, khususnya di daerah Propinsi Sumatera Selatan. Menurut pengamatan kami yang berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Wilayah Departemen P & K Propinsi Sumatera Selatan maupun dari Kandep-Kandep Kabupaten/Kotamadya, sesudah tahun 1955 perkembangan pendidikan Menengah di daerah ini cukup mengembirakar.

Bahkan setelah tahun enampuluhan pada tiap - tiap Kabupaten minimal terdapat sebuah SMP Negeri, dan setelah tahun 1966 hampir pada tiap - tiap Kecamatan telah didirikan sebuah SMP Negeri.

Walaupun secara kuantitatif SMP Negeri semakin lama semakin bertambah, tetapi tidak berarti jumlah yang telah ada itu dapat mengimbangi/menampung anak - anak tamatan Sekolah Dasar, yang dari tahun ketahun semakin banyak jumlahnya. Dengan lain perkataan, bahwa jumlah SMP Negeri yang telah dibuka oleh Pemerintah belum dapat memenuhi kebutuhan/keinginan masyarakat daerah ini, bahkan sampai tahun 1980 ini jumlah SMP Negeri belum dapat menampung arus murid yang tamat dari sekolah Dasar. Banyak orang tua yang merasa kecewa karena anaknya tidak dapat diterima di sekolah Menengah Pemerintah, dan oleh karena itu terpaksa anaknya dimasukkan ke sekolah - sekolah Swasta dengan konsekwensi biaya yang lebih besar, jika dibandingkan dengan sekolah Pemerintah. Di dalam kota Palembang sampai dengan tahun 1980 terdapat 16 SMP Negeri, sedangkan di seluruh Propinsi Sumatera Selatan tercatat sebanyak 70 buah SMP Negeri. Bagaimana perkembangan pendidikan Menengah (SMP) di daerah ini dari tahun 1966 sampai dengan 1980, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

TABEL. V

KEADAAN SMP NEGERI DI DAERAH SUMATERA SELATAN
TAHUN 1966 - 1980

T A H U N	J U M L A H		
	SEKOLAH	MURID	GURU
1966	37	12668	305
1967	37	13038	316
1968	37	14251	357
1969	37	14289	377
1970	37	15454	388
1971	37	16063	395
1972	37	15038	400
1973	37	16780	424
1974	37	17211	477
1975	37	18542	441
1976	37	20169	599
1977	58	25474	677
1978	58	23839	1538
1979/1980	70	30162	1213

SUMBER : Kanwil Departemen P & K Propinsi Sumatera Selatan.

Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN).

Seperti telah diketahui bahwa pendidikan di Indonesia pada jaman Kemerdekaan tidak hanya dikelola oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan saja, tetapi juga oleh Departemen - Departemen lain, antara lain ialah Departemen Agama RI. Sekolah - sekolah yang diasuh oleh Departemen Agama di daerah ini, yaitu dari tingkat pendidikan Dasar (SD) sampai dengan pendidikan tinggi. Yang setingkat dengan Sekolah Dasar disebut Madrasah Ibtisaiyah Negeri (MIN) telah diuraikan di depan, sedangkan yang setingkat

dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) disebut Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN).

Menurut data dari laporan - laporan Kantor Departemen Agama Propinsi Sumatera Selatan Bidang Pendidikan Agama Islam yang kami pelajari, bahwa madrasah - madrasah di daerah ini pada mulanya umumnya berstatus swasta, baru kemudian kira - kira tahun 1967 atas permohonan madrasah - madrasah bersangkutan kepada Menteri Agama RI mereka dinegerikan. Dan menurut Laporan Tahunan dari Bidang Pendidikan Agama Islam (1978 - 1980), hanya 2 buah Kabupaten dari 10 buah kabupaten/Kotamadya dalam wilayah Propinsi Sumatera Selatan yang belum memiliki Madrasah Tsanawiyah Negeri, yaitu : Kabupaten MURA dan Kabupaten Bangka. Sedangkan 8 Kabupaten/ Kotamadya lainnya minimal telah mempunyai sebuah MTsN.

Untuk seluruh Propinsi Sumatera Selatan tercatat sebanyak 16 buah Madrasah Tsanawiyah Negeri, yang pada umumnya baru pada tahun 1968 di negerikan oleh Menteri Agama RI, antara lain :

— MTsN Kota Madya Palembang,	SK. No. 8 / 1968	tanggal 2 - 1 - 1968
-- MTsN Saka Tiga -- OKI.	SK. No.74/ 1968	tanggal 17-4 - 1968
— MTsN Lumpatan — MUBA,	SK. No.76/ 1968	tanggal 7 - 4 - 1968
— MTsN Pajar Bulan — LIOT,	SK. No.201/1968	tanggal 2 - 9 - 1968
— MTsN Tanjung Periuk — LIOT,	SK. No.201/1968	tanggal 2 - 9 - 1968
— MTsN Bandar Agung — OKU,	SK. No.201/1968	tanggal 2 - 9 - 1968
— MTsN Kotanegara — OKU,	SK. No.201/1968	tanggal 2 - 9 - 1968
— MTsN Campang Tiga — OKU,	SK. No.201/1968	tanggal 2 - 9 - 1968

TABEL VI.

KEADAAN MTsN., GURU NEGERI/GURU HONORAIR DI PROPINSI
SUMATERA SELATAN TAHUN 1979/1980

No. Urut.	Kabupaten/ Kotamadya.	J U M L A H		
		MTsN	Guru Negeri	Guru Honorair
1.	Palembang	2	36	2
2.	MUBA	2	11	8
3.	OKI	2	29	8
4.	LIOT	3	24	5
5.	Lahat	1	15	8
6.	OKU	4	47	13.
7.	Pangkal Pinang	1	5	8
8.	Belitung	1	7	4
9.	MURA	0	0	0
10.	Bangka	0	0	0
J u m l a h		16	169	56

SUMBER : Departemen Agama Propinsi Sumatera Selatan.

b. Sekolah Menengah Atas (SMA).

Pada jaman Hindia Belanda di daerah Sumatera Selatan belum pernah didirikan suatu Sekolah Menengah Tingkat Atas, seperti : SMA, SGA, SMEA atau yang sederajat, yang pada jaman itu dinamai AMS, HIK, MHS, dan sebagainya. Seperti telah diketahui pemerintah Hindia Belanda hanya mendirikan sekolah untuk daerah ini sampai batas Sekolah Menengah Tingkat Pertama saja, yang pada waktu itu bernama MULO dan jumlahnya pun sangat sedikit. Apabila terdapat beberapa gelintir dari pemuda - pemuda daerah ini yang mengenyam pendidikan AMS, MOSVIA, HIK dll pada jaman Hindia Belanda,

umumnya mereka itu menerima pendidikannya di Jawa. Dan mereka itu adalah anak - anak dari golongan pejabat, seperti : Demang, Asisten Demang, Pesirah atau Kerio. Selaras dengan politik pemerintah kolonial Belanda, pendidikan tingkat menengah tersebut belum pernah menyentuh lapisan bawah masyarakat daerah ini merupakan golongan mayoritas.

Harus diakui bahwa perluasan pendidikan penduduk pribumi di daerah ini sangat lamban / terlambat jika dibandingkan dengan perkembangan pendidikan di pulau Jawa, Padang, Tapanuli dll, sebab disamping faktor kefanatikan masyarakat tradisional di daerah di daerah ini terhadap sekolah - sekolah Pemerintah Belanda yang dianggap kafir, juga faktor demografis - tifiknya jumlah penduduk di daerah yang amat luas, sehingga dikhawatirkan sekolah yang akan dibuka itu akan kekurangan murid atau tidak dikunjungi oleh anak anak. Selain itu pemerintah kolonial Belanda sendiri, selalu mempertimbangkan masalah biaya dalam peningkatan/perbaikan pendidikan di daerah jajahan justru biaya yang tersedia sangat terbatas. Pada jaman pemerintahan penduduk Jepang keadaan pendidikan lebih menyedihkan, sekolah yang ada sebelumnya sebagian ditutup.

Revolusi Kemerdekaan membawa banyak kemungkinan - kemungkinan dan perubahan - perubahan tidak hanya di bidang politik/pemerintahan, tetapi juga dalam bidang sosial - budaya. Dipelopori oleh para pemimpin dan tokoh - tokoh pendidikan daerah ini, maka didirikanlah Sekolah - sekolah Lanjutan Pertama dan Lanjutan Atas (SMA) yang sebelumnya tidak pernah ada/dikenal oleh masyarakat daerah ini. Berdirinya SMA di Sumatera Selatan dimulai dari kota Bengkulu, beberapa pula sesudah Aksi Militer yang pertama yang pada waktu itu kota Bengkulu belum mendapat gangguan dari musuh. SMA tersebut mempunyai siswa sebanyak 20 orang terdiri dari SMA. Bagian A dan SMA. Bagian B.⁵⁹⁾

Tetapi SMA di kota Bengkulu ini tidak dapat bertahan lama, karena dengan dipindahkannya Pusat Pemerintahan Propinsi Sumatera Selatan dari kota Bengkulu ke kota Palembang pada bulan Maret 1950, maka para pemimpin/pegawai Pemerintah RI, termasuk guru - guru SMA Bengkulu ikut hijrah ke Palembang. Oleh karena tidak ada tenaga pengajar akhirnya SMA di Bengkulu dimatikan, sedangkan murid - muridnya pindah ke Palembang atau bersekolah ke Jawa.

⁵⁹⁾Ibid. halaman 632 - 639.

Pada tanggal 10 Mei 1950 sesuai dengan tenaga pengajar yang ada, maka didirikanlah SMA Bagian B di kota Palembang. Murid - muridnya terdiri dari 6 orang dari SMA Bengkulu yang telah dimatikan, ditambah 22 orang murid dari SMO kelas IV yang dipimpin oleh RHA Rani, yang mutunya dianggap sederajat dengan kelas I SMA. Sebagai pimpinan SMA ini ialah S.A. Sitohang dan guru - guru lainnya RM Akil, W. G. Lap, Ny. Gentil, Hasan Delais, Frater Monfort dan Nanguning.⁶⁰⁾

Mulai tanggal 1 Juli 1950 diadakan screening terhadap pelajar - pelajar SMA ini. Dari jumlah 28 orang murid hanya 14 orang dibolehkan duduk di SMA kelas II Bagian B, sedangkan selebihnya, sebagian masuk ke SGA kelas II, sebagian lagi masuk SMA Bagian A di Jawa, dan 4 orang memasuki sekolah kejuruan, yaitu Sekolah Menengah Pertanian Atas di Bukittinggi.⁶¹⁾ Disamping itu dalam bulan itu juga penerimaan murid baru untuk kelas I sebanyak + 50 orang yang dibagi dalam dua kelas.

Adapun gedung sekolahnya mula - mula di gedung SMO, kemudian pindah menumpang untuk beberapa bulan di gedung SGA yang terletak di Jalan Indrapura, dan selanjutnya pada bulan Oktober 1951 pindah lagi ke Sekolah Rakyat di Lorong Pagar Alam sampai tahun 1955. Murid - murid yang berasal dari SMA Bengkulu diasramakan di gedung/asrama SGB (Normal - school) yang kemudian menjadi gedung SGA dan sekarang menjadi gedung SPG, Negeri. Pada bulan Maret 1951 terjadi pergantian pimpinan dari tangan S.A. Sitohang ke tangan B.M. Adnan yang sebelumnya bekerja pada Inspeksi SMP Pusat dari Kementerian P.P. dan K.⁶²⁾

Pada bulan Juni 1952 SMA/B ini mempunyai murid di kelas tertinggi sebanyak 12 orang, yang ikut ujian penghabisan dalam bulan itu dan hanya lulus sebanyak 7 orang. Dari 7 orang itu, 3 orang meneruskan pelajarannya ke Sekolah Dokter Tinggi, dan masing - masing seorang ke Fakultas Pertanian Fakultas Ekonomi, Kursus PTT dan Kursus Imigrasi.⁶³⁾

Dalam hubungan ini B.M. Adnan menyatakan, bahwa melihat hasil yang di capai - lulus ujian penghabisan melebihi 50 %, maka SMA. Negeri di Palembang

⁶⁰⁾ Ibid, halaman 639

⁶¹⁾ Ibid, Loc cit.

⁶²⁾ Ibid, Loc cit.

⁶³⁾ Ibid, halaman 640.

bang ini telah menarik perhatian umum terutama kalangan murid - murid SMA di tempat lain. Ternyata dalam tahun 1953, 11 orang dari 25 orang murid yang duduk di kelas tertinggi berasal dari SMA di Jawa.

Pada ujian penghabisan dalam bulan Juli 1953, yang lulus dari jumlah 25 orang lulus sebanyak 17 orang atau 60%. Ternyata yang lulus itu, 11 orang dari 14 orang yang sejak kelas satu belajar di SMA/B Palembang, sedangkan siswa yang pindah dari SMA dari Jawa 11 orang yang mengikuti pelajaran di SMA. Negeri Palembang mulai di kelas III, diantaranya lulus 6 orang. Guru - guru SMA/B. Negeri terdiri dari : RM. Akil, N. Patimah, J.E.C.J. Gentil, R.M. Kuparman, R. Adikusumo, Drs Tanya, M.B. Portier dan B.M. Adnan (Direktur).⁶⁴⁾

Pada tahun ajaran 1953 / 1954 tercatat jumlah murid SMA/B sebanyak 147 Orang, yang terdiri dari : kelas I A sebanyak 38 orang, kelas I. B sebanyak 36 orang, kelas II sebanyak 39 orang, dan kelas III sebanyak 34 orang. Nam-pak disini adanya suatu peningkatan jumlah murid, meskipun perkembangan dari tahun ke tahun tidak seperti apa yang di harap. Perkembangan yang kurang menggembarakan ini dapat dihubungkan dengan kondisi SMA/B Negeri itu sendiri. Tahun - tahun permulaan berdirinya SMA/B Negeri Palembang banyak menghadapi kesulitan antara lain :

- (1) Masalah gedung seperti yang dilukiskan diatas, sehingga secara psikologis kurang menguntungkan - murid - murid SMA merasa kurang menda-pat penghargaan dari Pemerintah/masyarakat, sehingga mereka merasa rendah diri.
- (2). Kekurangan tenaga pengajar, disebabkan standard hidup sangat tinggi di daerah ini dan tidak adanya perumahan bagi guru - guru, sehingga guru - guru dari luar Sumatera Selatan enggan pindah ke Palembang.

Sebagai akibat dari hal - hal tersebut di atas, maka putra / putri daerah ini pada waktu itu lebih senang pergi bersekolah ke pulau Jawa, karena di Jawa biaya hidup jauh lebih rendah dari biaya di Palembang.

Sesudah tahun 1955 mulailah ada cahaya terang dalam perkembangan SMA. Negeri di daerah ini - gedung bertingkat tiga dibangun di Bukit Besar yang pada awal tahun 1957 telah siap untuk ditempati, sehingga sejak tahun 1957 tidak lagi menumpang kesana - kemari. SMA. Negeri Palembang diperlu-

⁶⁴⁾ Ibid, Loc cit.

as dengan membuka SMA bagian A dan bagian C, yaitu SMA/B sebagai SMA. Negeri I, sedangkan SMA / A.C. sebagai SMA. Negeri II. Tetapi kedua SMA tersebut pimpinannya tetap satu, yaitu B.M. Adnan, dan gedungnyapun masih menjadi satu ialah gedung SMA di Bukit Besar atau Jalan Jaksa Agung R Suprpto, yang sekarang menjadi gedung SMA. Negeri I.

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah No.65 tahun 1951 yang antara lain berbunyi :” untuk sekolah lanjutan dan pendidikan tinggi dibiayai oleh Kementerian P dan K, selain itu pembiayaan gedung-gedung sekolah perlengkapannya dipikul oleh daerah ”,⁶⁵⁾ maka biaya pembangunan gedung SMA. Negeri Palembang merupakan hasil swadaya daerah yang pada waktu itu mengadakan perdagangan barter dengan luar negeri. Dapat dikatakan bahwa SMA. Negeri I merupakan cikal bakal dari semua SMA. Negeri yang ada di Sumatera Selatan (Palembang) sekarang ini.

Perluasan SMA. Negeri di daerah Sumatera Selatan, baik di kota Palembang sendiri maupun di daerah - daerah pedalaman. tidak dapat dipisahkan dengan kebijaksanaan Pemerintah - kerja sama antara Departemen P dan K dengan Departemen Perguruan Tinggi dalam menanggulangi kekurangan tenaga pengajar untuk Sekolah Lanjutan Atas, dengan Pengerahan Tenaga Mahasiswa (PTM), sementara lembaga - lembaga pendidikan guru Sekolah Lanjutan Atas (B.I., B.II, PTPG) belum memenuhi kebutuhan. Para Mahasiswa (PTM) disebar ke SMA, SGA, SMEA dan sekolah - sekolah yang sederajat, di seluruh Indonesia termasuk Propinsi Sumatera Selatan. Disamping itu pada tahun 1957 itu juga para lulusan B.I. dan lulusan Sarjana Muda PTPG telah memasuki kota Palembang, siap untuk ditempatkan di SMA/B Negeri dan SMA/A.C. atau SMA. Negeri I dan SMA. Negeri II.

Untuk menampung para guru SMA. Negeri tersebut, kepada mereka di beri prioritas untuk tinggal di hotel - hotel di kota Palembang berdasarkan ijin hotel yang mereka peroleh dari Pemerintah Pusat. Hotel - hotel yang menampung guru - guru tersebut antara lain : Hotel Sehati di Talang Semut, Hotel Musi di Jalan Merdeka, Hotel Sumatera di Jalan Mayor Ruslan, Hotel Sindanglaya di Jalan Kapten A.Rivai yang sekarang telah dibongkar dan diatas reruntuhannya dibangun Hotel Sanjaya, dan Hotel Riau di Jalan Dempo. Pembayaran hotel - hotel tersebut sebagian dibebankan kepada guru - guru dengan memotong 60% dari gaji mereka dan sebagian ditanggung oleh Pemerintah Pusat.

⁶⁵⁾BP3K, Op cit, halaman 140

Sesudah tahun enam puluhan hampir semua Kabupaten/Kotamadya dalam wilayah Propinsi Sumatera Selatan telah memiliki SMA. Negeri, sedangkan di kota Palembang sendiri berdiri pula SMA. Negeri III dan disusul dengan SMA. Negeri IV, yang pada mulanya keduanya merupakan filial dari SMA. Negeri I dan SMA. Negeri II. Pada tahun 1980 di Kota Palembang terdapat 5 buah SMA. Negeri. Bagaimana perkembangan SMA. Negeri di Propinsi Sumatera Selatan dapat dilihat dari tabel disebelah.

TABEL. VII

KEADAAN SMA. NEGERI DI PROPINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 1966 -- 1980

T A H U N	J U M L A H		
	SEKOLAH	MURID	GURU
1966	16	3729	146
1967	17	4668	146
1968	17	4595	146
1969	17	4926	144
1970	17	4915	153
1971	14	4320	138
1972	14	4498	145
1973	15	4843	151
1974	15	5053	177
1976	15	6389	229
1977	17	7347	230
1978	18	7794	390
1979/1980	20	9946	275

SUMBER : Kanwil Dep. P dan K Propinsi Sumatera Selatan.

Madrasah Aliyah Negeri (MAN).

Disamping Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah Departemen Agama Propinsi Sumatera Selatan juga mengasuh Madrasah Aliyah, yang menurut Laporan Tahunan 1979 - 1980 dari Bidang Pendidikan Agama di seluruh Propinsi Sumatera Selatan sebanyak 9 buah Madrasah Aliyah Negeri. Dari 10 buah Kabupaten/Kotamadya, 3 buah yang belum mempunyai Madrasah Aliyah Negeri, yaitu : Bangka, Pangkal Pinang dan Belitung. Madrasah Aliyah inipun pada umumnya mula - mula berstatus swasta, yang kemudian di beri status negeri dengan permohonan yang bersangkutan, yang hampir bersamaan waktunya dengan penegerian Madrasah Tsanawiyah Madrasah-madrasah tersebut antara lain :

- M.A.N. Saka Tiga — OKI dengan SK. No.168/1968 tanggal 17-4-1968
- M.A.N. Campang Tiga-OKU dengan SK. No.201/1968 tanggal 2-9-1968
- M.A.N. Kotamadya Palembang dengan SK. No. 168/1970 " 4-8-1970

T A B E L. VIII

KEADAAN MAN, GURU NEGERI/GURU HONORAIR DI PROPINSI
SUMATERA SELATAN TAHUN 1979 -- 1980

No. Urut	Kabupaten / Kotamadya	J U M L A H		
		MAN	Guru Negeri	Guru Honorair
1.	Palembang	2	24	16
2.	MUBA	1	1	12
3.	OKI	1	20	7
4.	LIOT	1	8	7
5.	Lahat	1	9	3
6.	OKU	2	16	3
7.	MURA	1	1	12
J U M L A H		9	79	60

SUMBER : Kanwil Departemen Agama Propinsi Sumatera Selatan.

3. Pendidikan Kejuruan

a. Pendidikan Guru.

Oleh pemerintah kolonial Belanda di daerah ini pernah didirikan beberapa sekolah guru untuk tenaga pengajar sekolah rendah, seperti : Kweek-school di Lahat (1920), Normaalcursus di kota Palembang, dan Leergang (CVO) di daerah - daerah onderafdeling, yang lama masa pendidikannya masing - masing, 4 tahun, 2 tahun, 2 tahun. Tetapi Kweekschool setelah dipindahkan dari Lahat ke Muara Enim kemudian dihapuskan (1927), karena dianggap oleh pemerintah kolonial sebagai sarang berkembangnya pendidikan modern dan pemupukan rasa kebangsaan. ⁶⁶⁾

Demikian juga Normaalcursus, setelah dianggap cukup banyak menghasilkan tenaga guru dimatikan, sedangkan Leergang (CVO) dibiarkan hidup sampai berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda di daerah ini, dan pada jaman pendudukan Jepang diganti namanya menjadi Kyoing - Yosejo. Disamping itu pemerintah kolonial Belanda juga mengadakan sistim " magang ", dan mereka yang magang di sekolah rendah, setelah 2 tahun dibolehkan mengikuti ujian Kweek ling dan jika mereka lulus barulah diakui secara syah sebagai guru. ⁶⁷⁾

Pada jaman pendudukan Jepang, selain Kyoing - Yosejo, dibuka juga Dai - Chibu - Sihang - Gakko dan Dai - Nibu - Sihang - Gakko seperti diuraikan di muka. Warisan sistim pendidikan yang kita terima dari kedua penjajah itu, menyebabkan daerah ini sangat kekurangan tenaga pengajar yang sangat dirasakan pada jaman kemerdekaan oleh masyarakat daerah ini pada umumnya dan Kementerian P.P. dan K khususnya. Oleh karena itulah tokoh - tokoh pendidikan daerah ini merasa perlu untuk mendirikan sekolah - sekolah guru disamping sekolah menengah umum dan sekolah kejuruan lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka bersamaan dengan dibukanya SMOP pada tanggal 1 Februari 1946 di kota Palembang didirikan juga Sekolah Guru Menengah (SGM) yang dipimpin oleh Abdul Malik (ex Walinegara Negara Sumatera Selatan). Jumlah muridnya pada mula didirikan sebanyak + 200 orang ⁶⁸⁾, yang terdiri dari 2/3 putra dan 1/3 putri.

Mereka itu pada umumnya berasal dari daerah Uluan - MUBA - MURA - OKI OKU - Lahat - LIOT, yang pada jaman Jepang terlantar studinya, di tambah

⁶⁶⁾Wawancara dengan Abdul Malik, SH, Oktober 1977

⁶⁷⁾Kementerian Penerangan RI, Op cit, halaman 650.

⁶⁸⁾Ibid, halaman 631

dengan murid - murid yang tamat sekolah Rakyat pada jaman Jepang.

Hampir semuanya para siswa SGM tersebut tinggal di asrama dengan cuma - cuma, dan mereka tidak diwajibkan membayar uang sekolah. Yang putra asramanya di Gedung Gaya Baru sekarang yang terletak di Jalan Mailan, sedangkan yang putri di gedung sebelahnya yang pada tahun 1975 di bongkar dan di atasnya didirikan gedung/pertokoan Megah Ria sekarang. Tempat belajar menjadi satu dengan asrama putri, karena gedung tersebut terdiri dari 12 lokal (bertingkat). Sebelum dibongkar dipergunakan oleh SMP. Negeri VIII.

Oleh karena tingkat pengetahuan serta kecerdasan para siswa SGM itu tidak sama - mereka itu ada yang tamat HIS - Schakelschool - Sekolah Rakyat jaman Jepang - ada yang telah duduk di bangku MULO, maka pada bulan Juni/Juli 1946 diadakan screening. Yang tingkat pengetahuan dan kecerdasannya lebih tinggi dimasukkan di kelas II, sedangkan yang tingkat pengetahuan serta kecerdasannya lebih rendah didudukkan di kelas I, sehingga pada bulan Agustus 1946 - tahun ajaran baru, SGM ini terdiri dari dua kelas II dan empat kelas I.⁶⁹⁾ Jika dibandingkan dengan SMOP kondisi SGM lebih baik, pengajarannya lebih lancar / teratur, jumlah tenaga pengajarnya pun lebih banyak, oleh karena itu tidak jarang guru - guru SGM merangkap di SMOP. Adapun guru - guru SGM antara lain ialah : Abdul Malik (Kepala), Nuroh Adil, Junus Wadjidun, Panhar dan lain - lainnya, sedangkan sebagai Kepala Tata - Usaha ialah Ansor Bakir. Mula - mula tampak sekali semangat belajar siswa-siswa SGM ini sangat besar, namun SGM inipun tidak dapat bertahan lama seperti halnya SMOP.

Kepergian tentara Sekutu meninggalkan kota Palembang (24 Oktober 1946) memberi peluang bagi Belanda untuk menanamkan kembali kekuasaannya di daerah ini, yang mendapat tantangan/perlawanan sengit dari seluruh rakyat. Tindakan Belanda yang semakin agresif, menyebabkan situasi keamanan semakin buruk - kehidupan sangat sulit - hubungan antara kota Palembang dengan daerah pedalaman terputus - kegiatan pendidikan tidak lancar/teratur, sehingga banyak mereka yang tidak tahan menghadapi situasi mengundurkan diri. Oleh karena itu pada akhir tahun 1946, siswa yang pada mulanya diperkirakan berjumlah + 1000 orang (SGM, SMOP, SKP) hanya

⁶⁹⁾Keterangan dari Drs. Ma'moen Abd.

tinggal ± sebanyak 400 orang saja.⁷⁰⁾ Dan kemudian sebagai akibat pertempuran Lima Hari Lima Malam di kota Palembang pada awal Januari 1947, Sekolah Guru Menengah (SGM) inipun terpaksa ditutup bersama - sama dengan SMOP dan SKP. Tetapi setelah pusat Pemerintahan Keresidenan Palembang dipindahkan ke daerah pedalaman, dan dipedalaman didirikan sekolah - sekolah lanjutan, maka di Manna (Bengkulu Selatan) didirikan juga Sekolah Guru disamping SMP.⁷¹⁾

Setelah di kota Palembang dibentuk Negara Sumatera Selatan pada tanggal 1 Februari 1949, di daerah - daerah yang diduduki oleh Belanda, oleh Pemerintah Negara boneka Belanda tersebut didirikan sekolah - sekolah guru, yaitu Normaalschool di kota Palembang di bawah pimpinan Nuzuar Alamsyah (kemudian menjadi Direktur SGA Palembang), dan Sekolah Guru Negeri atau dikenal dengan OVVO (Opleideing Voor Volk Onderwizer) yang lama pendidikannya masing - masing 2 tahun. Sekolah Guru Negeri atau OVVO itu di dirikan di kota Palembang, Kayu Agung, Baturaja, Muara Enim, masing - masing sebuah, sedangkan di Pangkal Pinang (Bangka) dan Manggar (Belitung) masing - masing juga sebuah yang didirikan oleh Pemerintah disana. Disamping itu di kota Palembang pernah juga didirikan kursus Normaال yang lama pendidikannya 6 bulan, diikuti oleh bekas murid - murid SGM, MULO dan Inheemsche MULO dan lain - lainnya. Kursus Normaال ini telah menghasilkan sejumlah guru dari dua kali angkatan. Rombongan pertama sebagian besar meneruskan pelajarannya dengan mengikuti kursus SGA yang diadakan di kota Palembang. Sedangkan Normaال school yang lama pendidikannya 2 tahun belum sempat menghasilkan guru, karena pada tahun 1950 setelah terben tuknya kembali Negara Kesatuan, di lebur menjadi SGB.

Sekolah Guru Atas (SGA). SPG.

Beberapa bulan sesudah dibukanya SMA. Negeri (Mei 1950) di kota Palembang didirikan pula Sekolah Guru Atas (SGA), tepatnya pada tanggal 1 Agustus tahun 1950, yang dipimpin oleh Nuzuar Alamsyah bekas pimpinan Normaalschool. Siswa yang mula - mula dari SGA ini tidak lebih dari 10 orang yang berasal dari anak - anak SMA/B yang kena screening, dan murid - murid tamatan SMP (SMO). Bahkan tahun ajaran berikutnya murid SGB yang telah mengikuti kuartal terakhir di kelas III dan mendapat prestasi baik/mendapat ranking, dapat diterima di kelas I SGA.

⁷⁰⁾Kementerian Penerangan RI, Op cit, halaman 632.

⁷¹⁾Ibid, Loc cit.

Lama pendidikan SGA 3 tahun, dan sebelum tahun ajaran 1956 - 1957 mereka yang tamat dari SGA semua mendapat tempat mengajar di SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama). Usaha itu bersifat sementara, karena Pemerintah menghendaki agar pelaksanaan pendidikan di Sekolah Rakyat atau SD, diserahkan kepada tenaga pengajar yang berijazah SGA (Sekolah Guru 6 tahun). Hal ini sudah dapat dilaksanakan sedikit demi sedikit sejak tahun ajaran 1956-1957. Diharapkan agar paling lambat pada tahun 1961, kekurangan akan tenaga di Sekolah Rakyat itu dapat diisi sepenuhnya, sehingga semua anak yang berumur antara 6 - 12 tahun mendapat kesempatan belajar di SR (SD). Apa bila hal itu tercapai, maka selesailah sudah yang harus dilaksanakan oleh SGB sebagai tempat mendidik calon - calon guru Sekolah Rakyat atau Sekolah Dasar. Dan untuk selanjutnya SGA - lah yang akan mendidiknya. Mulai tahun 1964 nama SGA diubah menjadi SPG (sekolah Pendidikan Guru) dan untuk selanjutnya SGA dibaca SPG. ⁷²⁾

Pada mulanya SGA menempati gedung SMP. Negeri VI sekarang, tetapi kemudian pindah ke gedung SPG yang sekarang terletak di Jalan Indrapura. Bagi siswa/siswa SGA. Negeri ini disediakan asrama putra/putri, yang terletak dalam kompleks gedung itu, terutama diprioritaskan bagi anak - anak yang berasal dari daerah pedalaman. Animo masyarakat daerah ini terhadap sekolah guru tersebut mula - mula sedang - sedang saja.

Seperti telah diketahui pada tahun limapuluhan kepada pelajar - pelajar sekolah lanjutan kejuruan dan kursus - kursus yang sederhana, oleh Pemerintah diberi tunjangan " ikatan dinas " yang berlaku semenjak tahun 1950 sampai tahun 1958. ⁷³⁾ Tunjangan ikatan dinas ini dimaksudkan untuk memperoleh sebanyak - banyaknya tenaga kejuruan dan dapat mengikat mereka supaya dalam waktu yang tertentu dapat menyumbangkan tenaga kepada Pemerintah. Demikian pula halnya dengan pelajar - pelajar SGA semenjak tahun 1950 di beri tunjangan ikatan dinas, untuk menarik perhatian / minat masyarakat terhadap sekolah Guru, dengan pengharapan agar Pemerintah mendapat tenaga guru sebanyak mungkin guna mengatasi masalah kekurangan guru pada waktu itu. Dalam peraturan tentang pemberian ikatan dinas kepada pelajar - pelajar SGA tersebut, tercantum pasal - pasal yang mengikat antara kedua pihak. Pihak pertama adalah Kepala Sekolah yang bertindak atas nama Menteri P.P. dan K yang memberi tunjangan, dan pihak kedua adalah si pelajar yang me

⁷²⁾ I. Djumhur dan Drs. H. Danasuparta. Op cit, halaman 211.

⁷³⁾ Wawancara dengan H.M. Pulungan (Bekas Kepala SGA). 20 - 1 - 81.

nerima tunjangan. Pemberian ikatan dinas ini disamping untuk memperoleh tenaga guru sebanyak - banyaknya bagi Pemerintah, juga guna memberikan pertolongan dan kelonggaran bagi anak - anak yang kurang mampu tetapi kemauannya keras untuk dapat melanjutkan pelajarannya. Perlu diingat bahwa tunjangan ikatan dinas yang diterima oleh para pelajar ketika itu memang mencukupi kebutuhan. Sebagai akibat dari adanya tunjangan ikatan dinas ini, animo masyarakat terhadap SGA meningkat. Tetapi pada tahun 1958 ketika tunjangan ikatan dinas untuk SGA dihapuskan, ternyata animo masyarakat menurun, lebih - lebih karena tamatan SGA harus mengajar di Sekolah Rakyat, animo masyarakat terhadap SGA semakin menurun.⁷⁴⁾

Kemungkinan besar menurunnya animo masyarakat terhadap Sekolah Guru Atas yang telah diubah menjadi SPG ada hubungan dengan tidak adanya pengangkatan pegawai baru sejak tahun 1968. Setelah adanya pengangkatan guru - guru baru melalui prosedur Inpres sejak tahun 1973, animo masyarakat daerah ini untuk memasuki SPG mulai meningkat. Namun pada akhir - akhir ini menurut pengamatan kami ada kecenderungan pada instansi - instansi yang mengelola masalah pengangkatan guru - guru Inpres tersebut mempergunakan kesempatan dalam kesempitan, yang akibatnya kurang menguntungkan jika ditinjau dari segi paedagogis. Hal tersebut dapat kita hubungkan apa yang pernah dilontarkan oleh Presiden Soeharto mengenai komersiil dalam jabatan.

Untuk mengisi kekurangan tenaga pengajar di daerah - daerah wilayah Propinsi Sumatera Selatan, maka dibukalah SGA di Lahat pada tanggal 1 September tahun 1959, di Pangkal Pinang pada tanggal 31 Agustus tahun 1960 dan di Kayu Agung pada tanggal 1 Agustus 1964. Sesudah itu tidak ada lagi petambahan SPG, sehingga sampai saat ini untuk Propinsi Sumatera Selatan hanya terdapat 4 buah SPG. Negeri.⁷⁵⁾ Perlu diketahui bahwa SPG yang memiliki asrama hanyalah SPG. Negeri di Palembang dan SPG. Negeri di Lahat. Asrama SPG. Negeri di Kota Palembang dapat menampung + 100 orang murid, terutama yang dari daerah dan duduk di kelas III diberi prioritas.

Satu hal yang menarik perhatian kami ialah perbandingan jumlah antara murid - murid laki - laki dan murid perempuan di SGA/SPG, yang pada

⁷⁴⁾ Wawancara dengan H.M. Pulungan.

⁷⁵⁾ Wawancara dengan M.Hatta Somi, Kep. Bidang Pendidikan Dasar dan Guru, tanggal 19 Januari 1981.

akhir - akhir ini sangat menyolok. Sejak sekolah ini didirikan sampai kira - kira tahun 1960, jumlah siswa laki - laki lebih banyak. Tetapi pada tahun enampuluhan perbandingan jumlah murid laki - laki dan perempuan fifty-fifty, sedangkan di atas tahun enampuluhan sampai sekarang ini, perbandingan jumlah murid laki - laki dan perempuan, yaitu 1 : 10. Nampaknya anak laki-laki enggan memasuki SPG, dan sekolah guru ini lebih banyak menarik perhatian / minat anak - anak perempuan. Mengapa SPG lebih banyak dimasuki atau didominasi oleh anak - anak/murid perempuan . Menurut H.M.Pulungan bekas Direktur SPG.Negeri Palembang, bahwa hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :

- (1). Faktor tradisi, masyarakat daerah ini masih berpegang pada anggapan/tradisi, bahwa anak perempuan tidak perlu bersekolah tinggi dan memakan waktu yang lama, supaya jangan sampai menjadi gadis tua.
- (2). Faktor biaya/ekonomis, SPG yang lama pendidikannya hanya tiga tahun tidak akan memakan biaya sebanyak yang harus dikeluarkan jika masuk ke sekolah lanjutan atas umum, yang setelah tamat seyogyanya melanjutkan ke perguruan tinggi, tetapi dengan memasuki SPG setelah tamat dapat diangkat menjadi guru Inpres meskipun kadang - kadang dengan cara yang kurang wajar.

Pimpinan SGA/SPG. Negeri Palembang.

- (1). Nuzuar Alamsyah tahun 1950 - 1960.
- (2). Sujitno Hadiatmodjo tahun 1960 - 1965.
- (3). H. M. Pulungan tahun 1965 - 1975.
- (4). Siti Rukmini Subronto tahun 1975 - sekarang.⁷⁶⁾

⁷⁶⁾Wawancara dengan H.M. Pulungan, .19 - 1 - 1981.

TABEL. IX

KEADAAN SPG. NEGERI DI PROPINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 1966 1980

TAHUN	J U M L A H		
	Sekolah	Murid	Guru
1966/1967	5	629	17
1967/1968	5	690	18
1968/1969	5	701	18
1969/1970	5	815	26
1970/1971	5	1061	28
1971/1972	5	1061	28
1972/1973	4	1054	31
1973/1974	4	1007	31
1974/1975	4	1118	34
1975/1976	4	1352	30
1976/1977	4	1494	38
1977/1978	4	1891	43
1978/1979	4	2065	124
1979/1980	4	2374	89

SUMBER : Kanwil Departemen P dan K Propinsi Sumatera Selatan.

Sekolah Guru B (SG 4 tahun) /SGB Negeri.

Bersamaan dengan dibukanya SGA. Negeri di kota Palembang pada tanggal 1 Agustus 1950 didirikan pula Sekolah Guru B atau SGB. Negeri (Sekolah Guru 4 tahun). Jumlah murid SGB. Negeri ini angkatan pertama sebanyak 413 orang, yang umumnya berasal dari murid - murid OVVO dan Normaalschool yang telah dilebur dan dibolehkan duduk di kelas dua atau

kelas tiga. Sedangkan murid kelas satu - murid baru, berasal dari Sekolah Rakyat yang lulus dalam ujian masuk ke SLTP. Pada dasarnya pelajaran 4 tahun itu sama dengan 3 tahun pelajaran umum (SMP), ditambah 1 tahun pelajaran kejuruan (guru). Dari kelas III SGB kuartal terakhir dengan seleksi murid - murid yang berprestasi baik dapat melanjutkan pelajaran ke SGA.

Pada mulanya SGB. Negeri ini menempati gedung SPG. Negeri yang sekarang, sedangkan SGA. Negeri/SPG (sekarang) menempati gedung SMP. Negeri VI sekarang. Tetapi direktur SGB. Negeri dan SGA. Negeri masih di rangkap oleh Nuzuar Alamsyah, baru pada tanggal 1 Desember 1950 diadakan pemisahan, sebagai direktur SGB. Negeri ialah Soemardi A. Prawira, dan SGA. Negeri tetap dibawah pimpinan Nuzuar Alamsyah. Dan mulai tanggal 1 Juli 1951 gedung SGB. Negeri di tempati oleh SGA. Negeri - SPG. Negeri sekarang di Jalan Indrapura, dan SGB. Negeri menempati gedung yang tadinya ditempati oleh SGA. Negeri, yaitu gedung SMP. Negeri VI.

Pada bulan Mei 1952 untuk SGB. Negeri didirikan sebuah asrama putra dan dapat dipakai secara darurat sejak tanggal 1 Desember 1952. Sedangkan untuk murid SGB. Negeri putri tetap tinggal di asrama di Jalan Indrapura di asrama SGA. Negeri, karena jumlah siswa SGA. Negeri sedikit, dan kedua gedung tersebut (SGB. Negeri dan SGA. Negeri) letaknya berdekatan. Kedua sekolah guru ini sebenarnya tidak dapat dipisahkan, karena menurut sejarahnya pembina/ pimpinannya dan juga guru - gurunya sama.

Pada tahun pertama dibuka SGB. Negeri hanya mempunyai 6 orang guru yaitu : Nuzuar Alamsyah (pimpinan), Soemardi A. Prawira, Hasan Delais, Saleh, Junus Wadjidun, dan Master Lap (orang Belanda). Mereka ini harus mengajar pada 11 kelas, yaitu : 3 buah kelas I, 5 buah kelas II, 2 buah kelas III dan sebuah kelas IV. Pada akhir tahun ajaran 1950/1951 SGB. Negeri ini untuk pertama kalinya menamatkan muridnya, dari 28 orang yang mengikuti ujian penghabisan 23 orang yang lulus yaitu sama dengan 81% ⁷⁷⁾ Bagaimana perkembangan SGB. Negeri di daerah Sumatera Selatan sejak berdiri (1950) sampai tahun 1953 dapat dilihat dari tabel yang kami susun.

Seperti telah diuraikan dimuka bahwa pada tahun limapuluhan kepada pelajar - pelajar sekolah lanjutan kejuruan dan kursus - kursus yang sederajat, oleh pemerintah diberi tunjangan ikatan dinas yang berlaku sejak tahun 1950. Hal sama berlaku pula bagi siswa/siswi SGB. Negeri. Palembang ini, dengan

⁷⁷⁾ Kementerian Penerangan RI, Op cit, halaman 651.

pengharapan agar Pemerintah memperoleh tenaga guru sebanyak mungkin untuk daerah ini, sehingga masalah kekurangan guru Sekolah Rakyat dapat diatasi.

Sesuai dengan Keputusan Kementerian P.P. dan K, bahwa sejak tanggal 1 Juli 1953 semua K.P.K.P.K.B. (Kursus Pengajar untuk Kursus Pengantar ke Kewajiban Belajar) dijadikan SGB, maka jumlah SGB. Negeri juga ditambah untuk daerah Propinsi Sumatera Selatan, yaitu menjadi 4 buah. Selaian di Kota Palembang, berdasarkan Keputusan tersebut di atas didirikanlah SGB. Negeri di Manggar (Belitung), di Curup (Bengkulu) dan di Tanjung Karang (Lampung), masing - masing sebuah.⁷⁸⁾

Setelah tugas yang harus dilaksanakan oleh SGB. Negeri sebagai tempat mendidik calon - calon guru Sekolah Rakyat atau SD oleh Pemerintah dianggap telah selesai, maka tugas tersebut sepenuhnya diserahkan kepada SGA/SPG. Negeri, dan semua SGB. Negeri diintegrasikan ke SGA. Negeri sejak tahun 1961.⁷⁹⁾ Demikian juga halnya dengan SGB. Negeri di daerah Sumatera Selatan, maka tamatlah riwayat SGB. Negeri di daerah ini.

T A B E L . X

PERKEMBANGAN SGB. NEGERI DI KOTA PALEMBANG TAHUN 1950 - 1953

T A H U N	Jumlah Murid	K E L A S				J U M L A H		
		I	II	III	IV	Guru	Peserta Ujian	L u l u s
1950 / 1951	413	3	5	2	1	6	28	23 - 81%
1951 / 1952	406	3	4	3	3	19	58	42 - 72%
1952 / 1953	396	3	3	4	3	15	70	50 - 71%

SUMBER : Kementerian Pencerangan RI, Propinsi Sumatera Selatan.

⁷⁸⁾ Ibid, Loc cit.

⁷⁹⁾ I. Djumbur dan Drs. H. Danasuparta, Op cit, halaman 211.

K.P.K.P.K.B. di Sumatera Selatan.

Sesuai dengan politik Pemerintah RI dalam rangka " Pemberantasan Buta Huruf " di seluruh Indonesia, dan mengingat kurangnya tenaga pengajar untuk Sekolah Rakyat, maka Pemerintah RI cq Kementerian P.P. dan K menganggap perlu mengadakan pendidikan guru yang lebih singkat. Dalam hubungan ini mulai tanggal 1 Agustus 1950 Pemerintah RI cq Kementerian P.P. dan K menyelenggarakan suatu jenis pendidikan guru secara istimewa - semacam Crash - Program, yang dinamakan " Kursus Pengajar untuk Kursus Pengantar ke Kewajiban Belajar " (KPKPKB). Tujuannya yang terutama ialah mendidik calon - calon guru yang cukup banyak dalam waktu 10 tahun mulai tahun 1950 - 1960, sehingga pada tahun 1960 Pemerintah dapat melaksanakan " Undang - undang Kewajiban Belajar " di seluruh Indonesia. 80) Sehubungan dengan politik Pemerintah itulah di daerah Propinsi Sumatera Selatan didirikan KPKPKB, pada umumnya di tiap - tiap Kewedanaan/Marga, dimana terdapat Sekolah Rakyat 6 tahun. Di wilayah Propinsi Sumatera Selatan pada akhir tahun ajaran 1951 / 1952 tercatat 103 buah KPKPKB. 81)

Kursus ini ditempatkan pada sekolah Rakyat 6 tahun, yang mempunyai paling sedikit 3 orang guru yang berijazah Normaalschool dan Kweekschool, dan programnya terdiri dari :

- (1). Pendidikan secara lisan selama 2 tahun, dan
- (2), Pendidikan secara tertulis selama 2 tahun dengan penjelasan lisan tiap-tiap triwulan selama 2 minggu.

Pendidikan untuk 2 tahun pertama diserahkan kepada guru - guru Sekolah Rakyat yang berijazah Normaalschool / Kweekschool yang terpilih, dan untuk 2 tahun berikutnya diserahkan kepada guru - guru Sekolah Lanjutan diakhiri dengan ujian Persamaan SGB. Jadi pelaksanaan Kursus ini diselingi antara belajar dan mengajar selama 4 tahun.

Syarat untuk masuk KPKPKB ini ialah ijazah Sekolah Rakyat 6 tahun dan lulus dalam ujian ke SLTP, uang sekolah tidak dipungut dan semua pengikut diharuskan menanda - tangani perjanjian ikatan dinas.

Sesudah mengikuti pendidikan selama 2 tahun yang pertama, para pengikut/ siswa diuji, yang lulus diangkat sebagai calon guru pada Kursus Pengantar Kewajiban Belajar (KPKB) atau lebih dikenal nama " Kursus Pemberantasan

80) Ibid, halaman 216.

81) Kementerian Penerangan RI, Op cit, halaman 619.

Buta Huruf ” di daerah ini. Pada calon guru tersebut disamping memberikan pelajaran pada KPKB, diharuskan pula meneruskan pelajarannya selama 2 tahun lagi, sehingga mereka dapat menempuh ujian Persamaan SGB.

Ternyata dalam pelaksanaannya KPKPKB ini banyak mendatangkan kesulitan/keluhan, baik dari pengikut - pengikut kursus maupun dari para guru KPKPKB itu sendiri. Menurut pendapat para guru KPKPKB, bahwa pada umumnya tingkat pengetahuan murid/pengikut yang telah duduk di Kelas III pada angkatan pertama, adalah sama dengan tingkat pengetahuan murid SMP kelas I, bahkan beberapa mata pelajaran lebih rendah. Sedangkan para pengikut mengeluh, bahwa sekolah tempat bekerja mereka kebanyakan dipimpin oleh guru yang tidak berijazah - paling banyak guru yang berijazah CVO dan yang sedèrajat, yang pengetahuannya pada umumnya tidak cukup untuk menerangkan hal - hal yang sulit kepada murid - murid A III (kelas III). Oleh karena itu dari pihak pengikut/murid sendiri memajukan usul sebagai berikut ” agar dapat belajar terus, jangan lagi mengajar seperti sekarang, dan kalau itu tidak dapat dipenuhi agar mereka diangkat saja menjadi guru yang disamakan dengan CVO (guru 2 tahun) sesuai dengan perjanjian kepada mereka. ”⁸²⁾

Jadi singkatnya, baik dipihak guru lebih - lebih di pihak murid tidak merasakan hasil yang diharapkan dari diadakannya KPKPKB tersebut. Keadaan yang demikian itu menyebabkan kursus tersebut mendapat dukungan dari masyarakat, terutama masyarakat guru (PGRI), maka pada permulaan tahun ajaran 1953 - 1954 atas usul PGRI, KPKPKB dinyatakan sebagai SGB. Seperti telah disebutkan di atas, bahwa dengan diintegrasikannya KPKPKB tersebut ke SGB, maka jumlah SGB di daerah ini bertambah.

Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama (PGSLP).

Untuk mengisi kebutuhan tenaga guru Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) yang dirasakan masih sangat kurang, maka oleh Pemerintah RI cq Kementerian P.P. dan K pada tahun 1953 dibukalah Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama (PGSLP). di seluruh Indonesia.

Sehubungan dengan itu di kota Palembang pada tahun ajaran 1954/1955 di buka PGSLP, yang pelaksanaannya dipercayakan kepada pimpinan SGA. Negeri, Nuzuar Alamsyah, oleh karena itu kegiatan belajarnya diadakan/dilakukan di SGA. Negeri Palembang dan guru - gurunya sebagian besar

⁸²⁾ Ibid, halaman 621 - 622.

terdiri dari guru - guru SGA. Negeri ditambah dengan guru - guru SLTA yang terdapat di kota Palembang. disesuaikan dengan jurusannya.

Maksud / tujuan dibukanya PGSLP di daerah Sumatera Selatan ini, disamping untuk mengisi kebutuhan tenaga guru, terutama untuk meningkatkan dan menstabilkan kedudukan guru - guru SMP. Negeri yang berijazah SGA yang sebenarnya diprogramkan untuk mengajar di sekolah Rakyat (SD). Oleh karena itu dalam pelaksanaannya PGSLP di daerah ini, mula - mula diperioritas kan bagi guru - guru SMP.Negeri di seluruh wilayah Propinsi Sumatera Selatan dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk tugas belajar. Sejak tahun 1954/1955 itu guru - guru SMP.Negeri di daerah - daerah berebutan mohon tugas belajar ke kota Palembang, sehingga dalam prakteknya disamping menguntungkan bagi guru - guru itu sendiri, sebaliknya menimbulkan hal hal yang negatif bagi daerah - daerah itu sendiri, karena dengan adanya kesempatan tugas belajar bagi guru - guru SMP. Negeri, SMP. Negeri di daerah - daerah menjadi Vacuum.

Menurut H.M.Pulungan bekas direktur SGA.Negeri/SPG.Negeri yang merangkap sebagai pimpinan PGSLP, bahwa lama pendidikan PGSLP ini mula - mula selama 20 bulan yang berlaku sampai tahun 1968. Kemudian sejak tahun 1968 sampai 1976 lama pendidikannya menjadi 1 tahun. Dikatakan nya pula bahwa mula-mula siswa-siswanya terdiri dari guru - guru SMP.Negeri tugas belajar yang berijazah SGA.Negeri, dan baru sejak tahun 1967 di buka bagi siswa bebas, maksudnya anak - anak yang berijazah SLTA yang belum bekerja (dari SMA.Negeri, SMEA. Negeri, STM.Negeri,SGKP. Negeri dan SPG). Bahkan pernah pula diberi kesempatan kepada guru - guru yang Berijazah PGAA.Negeri, tetapi hal itu hanya berjalan dalam dua kali angkatan, karena hal ini mendapat proses besar dari pihak Departemen Agama Propinsi Sumatera Selatan. Gara - gara kasus tersebut H.M.Pulungan dipanggil Pemerintah Pusat (Kem. P.P. dan K), karena Departemen Agama Propinsi Sumatera Selatan melaporkannya ke Pusat, bahwa guru - guru tamatan PGAA.Negeri tersebut yang belajar di PGSLP, setelah mereka tamat keluar dari Departemen Agama dan masuk ke lingkungan Departemen P dan K. eroniknya mereka pada umumnya melepaskan kopiah/kudungnya jika mengajar. Oleh karena teguran dari Pemerintah Pusat tersebut sesudah tahun 1968 guru - guru yang berijazah PGAA.Negeri tidak lagi diterima di PGSLP. Tetapi kebijaksanaan pimpinan PGSLP yang tidak memberi kesempatan lagi kepada guru - guru yang berijazah PGAA.Negeri mendapat protes pula dari masyarakat daerah ini namun demikian guru = guru yang berijazah PGAA.Negeri tetap tidak diterima di PGSLP.

Dari uraian di atas, jelas bahwa animo masyarakat pada umumnya, guru guru khusus sangat besar terhadap PGSLP, hal mana dapat dihubungkan dengan banyak jurusan yang dibuka dan jumlah siswa pada tiap - tiap jurusan, yang rata - rata sebanyak 40 orang, kecuali jurusan Menggambar.

PGSLP di Kota Palembang terdiri dari 7 Jurusan, yaitu :

(1). Jurusan Bahasa Indonesia	dengan	kode	A.1
(2). Jurusan Bahasa Inggris	dengan	kode	A.2
(3). Jurusan Ilmu Pasti.	dengan	kode	B. 1
(4). Jurusan Sejarah	dengan	kode	C.1
(5). Jurusan Ilmu Bumi	dengan	kode	C. 2
(6). Jurusan Ilmu Hayat	dengan	kode	H.
(7). Jurusan Menggambar	dengan	kode	M.

Dari jurusan - jurusan yang dibuka itu menurut H.M. Pulungan, yang paling laris ialah jurusan C.1 dan C.2, karena keduanya memiliki kelas paralel, terutama sejarah yang paling sering terdiri dari 2 kelas paralel. Jurusan yang paling kering ialah jurusan Menggambar. Seperti telah disinggung di atas, se bagai tenaga pengajar PGSLP disamping tenaga pengajar SGA.Negeri juga di ambil dari guru - guru SMA.Negeri,SMEA.Negeri, STM.Negeri, dan kemudian dosen - dosen Fkg. Unsri.

Untuk mengatasi kekosongan guru - guru SMP.Negeri di daerah - daerah sebagai akibat adanya tugas belajar ke PGSLP, maka diambil kebijaksanaan oleh Pimpinan PGSLP / Perwakilan P.P. dan K Sumatera Selatan untuk membuka PGSLP filial di daerah - daerah, dengan demikian akan mengurangi guru yang pindah ke kota Palembang. Sehubungan dengan kebijaksanaan itu, maka di Pangkal Pinang (Bangka) pada tahun 1967 dibuka PGSLP filial Sejarah (C. 1) dan Ilmu Pasti (B. 1) untuk daerah Bangka/Belitung.

Kepala PGSLP di Pangkal Pinang itu ialah Drs. Mashud Sulaiman, sedangkan guru - guru dari guru - guru SLTA yang ada disana. PGSLP di Pangkal Pinang berjalan sampai empat angkatan dan sejak tahun 1971 ditutup. ⁸³⁾

Selain PGSLP filial di Pangkal Pinang, pada tahun 1967 itu juga dibuka PGSLP filial Sejarah di Kayu Agung dan di Pagar Alam (Kabupaten Lahat). Baik PGSLP di Kayu Agung maupun PGSLP filial di Pagar Alam berlangsung

⁸³⁾Wawancara dengan H.M. Pulungan. 20 - 1 - 1981.

sampai 3 angkatan (1967 s/d 1969) dan pada tahun 1970 kedua - duanya di tutup. Adapun guru - guru PGSLP filial di daerah - daerah tersebut diambil dari guru - guru SLTA yang ada di daerahnya masing - masing. Pimpinan PGSLP filial di Pagar Alam ialah Umar BA, sedangkan pimpinan PGSLP filial di Kayu Agung ialah Ali Hanafiah, direktur SMEA Kayu Agung dan pembina nya diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tk. II Kayu Agung - OKI. Siswa rata - rata dari PGSLP Di ketiga daerah tersebut di atas tiap - tiap angkatan sebanyak + 40 orang.

Menurut H.M. Pulungan bahwa PGSLP Palembang sejak berdiri sampai tahun 1976, rata - rata tiap - tiap tahun menamatkan + 200 orang siswa, yang berarti PGSLP di Palembang telah memberikan andil yang sangat besar dalam memproduksi guru - guru SLTP untuk daerah Propinsi Sumatera Selatan dalam sejarah pendidikan di daerah ini setelah Kemerdekaan.

Tetapi untuk menghilangkan dualisme dalam LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan), maka PGSLP mulai tahun 1976 diintegrasikan ke dalam Crash Programme namun di daerah - daerah yang masih membutuhkan/ menganggap perlu PGSLP tetap dilanjutkan, misalnya saja DKI Jaya. Untuk daerah Propinsi Sumatera Selatan (Palembang) PGSLP sejak tahun 1976 telah tidak ada lagi, dan sebagai gantinya baru pada tahun 1978 muncul Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama yang Disempurnakan (PGSLP yang Disempurnakan). Dalam pelaksanaan PGSLP yang Disempurnakan ini terdapat kerjasama antara Kanwil Departemen P dan K dengan Unsri / Fkg. PGSLP yang Disempurnakan untuk daerah ini hanya menghasilkan satu angkatan.

Seperti telah diketahui bahwa pimpinan PGSLP di Palembang dirangkap oleh direktur SGA.Negeri / SPG.Negeri di Palembang, yang secara berturut - turut ialah sebagai berikut :

- (1). Nuzuar Alamsyah (1954 – 1960)
- (2). Soejitno Hadiatmodjo (1960 – 1965)
- (3). H.M. Pulungan (1965 – 1975)
- (4). Siti Rukmini Subroto (1975 – 1976)

Bagaimana perkembangan jumlah murid PGSLP dari tahun 1966 sampai dengan tahun 197 akan kami laporkan disini berdasarkan data yang kami kutip dari Kanwil Departemen P dan K Propinsi Sumatera Selatan seperti dibawah ini :

Tahun 1966	Jumlah	Siswa	91 orang.
Tahun 1967	Jumlah	Siswa	157 orang.
Tahun 1968	Jumlah	Siswa	208 orang.
Tahun 1969	Jumlah	Siswa	623 orang.
Tahun 1970	Jumlah	Siswa	361 orang.
Tahun 1971	Jumlah	Siswa	365 orang.
Tahun 1972	Jumlah	Siswa	207 orang.
Tahun 1973	Jumlah	Siswa	341 orang.
Tahun 1974	Jumlah	Siswa	118 orang.
Tahun 1975	Jumlah	Siswa	339 orang.
Tahun 1976	Jumlah	Siswa	344 orang.

Sedangkan jumlah murid PGSLP sejak berdirinya yaitu tahun 1954 sampai dengan tahun 1965 tidak berhasil kami kumpulkan, karena di Kanwil Departemen P dan K sendiri tidak ada datanya, alasannya karena situasi pada tahun 1965, maka banyak sekali bendel/dokumen yang hilang.

PGSLP yang Disempurnakan dan Program D₁ dan D₂.

Seperti telah disinggung di atas untuk menghilangkan dualisme dalam LPTK, maka mulai tahun 1976 PGSLP (Gaya Lama) mulai diintegrasikan ke dalam Crash Programe. Dan sejak tahun 1976 itu muncullah PGSLP yang Disempurnakan yang merupakan dari Sub Proyek PGSLP (Crash Programe)⁸⁴⁾ Tetapi untuk daerah ini PGSLP yang Disempurnakan itu baru dilaksanakan/dibuka pada tahun 1978 - yang untuk daerah lain barangkali sudah merupakan tahun/angkatan ke - 3. Dalam pengelolaan PGSLP yang Disempurnakan ini terdapat kerjasama antara Kanwil Departemen P dan K Propinsi Sumatera Selatan dengan Unsri/Fkg, yaitu dalam penerimaan / testing masuk penempatan/pengangkatan - administrasi / ikatan dinas, semua dilaksanakan bersama - sama.

Menurut Drs. Zainal Abidin Gaffar, pimpinan PGSLP yang Disempurnakan, bahwa animo masyarakat cukup besar terhadap Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama yang Disempurnakan ini. Mungkin hal ini disebabkan

⁸⁴⁾Wawancara dengan Drs. Zainal Abidin Gaffar, 22 - 1 - 1981.

adanya pengangkatan langsung dan disamping itu adanya ikatan dinas, justru pada dewasa ini di daerah Sumatera Selatan untuk diangkat menjadi pegawai negeri khususnya guru sangat sulit. Lamanya pendidikan PGSLP yang Disempurnakan ini satu tahun, dan Propinsi Sumatera Selatan (Palembang) hanya menghasilkan satu angkatan saja (1978 – 1979).

Bidang Studi yang dilaksanakan di kota Palembang, yaitu :

- (1). Bidang Studi Bahasa Indonesia.
- (2). Bidang Studi Bahasa Inggris.
- (3). Bidang Studi Matematika.
- (4). Bidang Studi Ilmu Pengetahuan Alam.
- (5). Bidang Studi Bimbingan dan Penyuluhan.

Sedangkan Bidang Studi Ketrampilan Teknik dan Ketrampilan Jasa dalam pelaksanaannya dititipkan di Semarang.

Pada tahun 1979 PGSLP yang Disempurnakan di hapuskan dan digantikan oleh Program D1 (Diploma 1) sebuah proyek dari P2 DK (Proyek Pendidikan Diploma Kependidikan), yang pelaksanaannya dipercayakan sepenuhnya kepada Unsri/Fkg. Adapun bidang studi Program D1 yang dibuka di daerah ini ialah :

- (1). Bidang Studi Bahasa Indonesia.
- (2). Bidang Studi Bahasa Inggris.
- (3). Bidang Studi Matematika.
- (4). Bidang Studi Ketrampilan Teknik.
- (5). Bidang Studi Ketrampilan Jasa.⁸⁵⁾

Pimpinan Program D1 ini ialah Drs. Zainal Abidin Gaffar (dosen Fkg).

Pada tahun 1980 P2DK diubah menjadi P3DK (Proyek Pengembangan Pendidikan Diploma Kependidikan), maka disamping Program D₁ juga diadakan Program D₂. Jika Program D1 lama pendidikannya selama satu tahun, tetapi D₂ lama pendidikannya dua tahun dan keduanya diprogramkan untuk tenaga pengajar di SLTP. Baik PGSLP yang disempurnakan, Program D1 mau

⁸⁵⁾Wawancara dengan Drs. Zainal Abidin Gaffar, 22 - 1 - 1981.

pun Program D₂, ketiga - tiga mendapat tunjangan ikatan dinas dari Pemerintah, hanya bedanya pada Program D₂ baru diberikan kepada siswa pada tahun kedua 9 kelas 2). Direktur Program D₁ dan D₂ (P3DK) ini ialah Drs. Mahyuddin KR (dosen Fkg) dan bidang studi yang dibuka di Palembang ialah :

Program D₁ (P3DK) :

- (1). Bahasa Indonesia
- (2). Matematika
- (3). Ilmu Pengetahuan Alam

Program D₂ (P3DK) :

- (1). Bahasa Indonesia
- (2). Bahasa Inggris.
- (3). Matematika
- (4). Ilmu Pengetahuan Alam.

Sekolah Guru Olah - Raga Palembang (SGO).

Oleh karena sangat dirasakan kurangnya tenaga guru Olah - Raga dulu disebut pendidikan jasmani, untuk daerah Propinsi Sumatera Selatan pada tahun 1958 di kota Palembang didirikan Sekolah Guru Pendidikan Djasmani (SGPD), yang disponsori oleh Soetarto. Sebagai Kepala Sekolah SGPD yang pertama ialah Soetarto, tetapi hanya selama setahun oleh karena ibu Soetarto kurang kerasan tinggal di Palembang, oleh karena itu jabatan Kepala Sekolah diserahkan kepada Sonny Andarsoemarto (Drs. Sonny Andarsoemarto menja di direktur Sekolah Pendidikan Djasmani ini sampai berubah menjadi SMOA (Sekolah Menengah Olah - Raga Atas dari tahun 1960 s/d tahun 1969. ⁸⁶⁾

Tujuan dibukanya SGPD ini menurut Soetarmo BA, seorang guru pada sekolah tersebut, ialah untuk mempersiapkan tenaga pengajar pendidikan jasmani bagi SLTP. Tetapi karena kondisi pendidikan kita pada dewasa itu, maka mereka yang tamat dari SGPD ini banyak yang diangkat menjadi guru SLTA. Adapun syarat untuk masuk ke sekolah ini ialah ijazah SLTP.Negeri, tetapi pada umumnya di daerah ini yang masuk ke SGPD ialah mereka yang berijazah SGB yang mendapat ranking/prestasi baik.

Animo masyarakat daerah ini terhadap SGPD mula - mula cukup baik, dan lama pendidikannya 4 tahun. Sedangkan gedungnya mula - mula di gedung SMP.Negeri IV di Jalan Duku Palembang. SGPD ini di bawah naungan Direktorat Jenderal Olah - Raga (Dir.JORA).

⁸⁶⁾ Wawancara dengan Soetarmo BA, 30 - 12 - 1980.

Tahun 1963 merupakan masa transisi, karena pada waktu itu disamping SGPD dibuka pula SMOA (Sekolah Menengah Olah - Raga Atas) yang lama pendidikannya 3 tahun, yang bertujuan untuk menggantikan SGPD.

Sementara SMOA telah berdiri, siswa - siswa SGPD yang duduk di kelas II kelas III dan kelas IV ditamatkan, sehingga akhirnya SGPD tidak mempunyai murid lagi dan sepenuhnya digantikan oleh SMOA (1963-1978/1979). Tujuan SMOA ialah :

- (1). Dipersiapkan untuk melanjutkan ke STO.
- (2). Kader prestasi (Olahragawan).
- (3). Pembina Dasar / Guru.

Pada tahun 1966 SMOA pindah dari Jalan Duku ke gedung bekas milik Cina di Jalan Sudirman (Km $3\frac{1}{2}$) Palrmbang, yaitu di belakang SMA, Negeri III. Sebagai direktur SMOA telah digantikan oleh Drs. Poerwadi sejak tahun 1970 - 1975, dan pada tahun 1975 Drs. Poerwadi digantikan oleh Drs. Matdjari Murah sampai sekarang ini.

Pada tahun 1977 disamping SMOA dibuka pula Sekolah Guru Olah - Raga (SGO) yang bertujuan untuk menggantikan SMOA. Seperti halnya siswa - siswa SGPD, murid - murid SMOA yang duduk di kelas tertinggi juga diselesaikan sampai habis, dan baru pada tahun 1978/1979 semua murid SMOA telah tamat studinya. Adapun tujuan dibukanya SGO, yaitu Seperti SGPD - untuk dipersiapkan menjadi guru olah - raga , hanya bedanya jika SGPD sebagai guru SLTP, SGO untuk guru SD. Tetapi bagi mereka yang mendapat prestasi baik/rangking dapat melanjutkan ke FKIK di Jakarta atau tempat lain.⁸⁷⁾

Meskipun SGO ini hanya memiliki 5 buah lokal kelas, tetapi karena sekolah ini sebagian pelajarannya dilakukan di lapangan, maka ia dapat memiliki 7 buah kelas yang semua belajar pada pagi hari, yang memakai lokal secara bergantian. Jumlah siswa SGO pada tahun 1980 ini sebanyak 245 orang yang terdiri dari 7 kelas. Perbandingan murid laki - laki dan perempuan ialah sebagai 4 : 1 . Syarat untuk masuk ke SGO ini ialah mereka yang berijazah SMP.Negeri dan Tsanawiyah Negeri Sekolah Guru Olah - Raga ini sekarang di bawah Bidang Pendidikan Dasar dan Guru Kanwil Departemen P dan K Propinsi Sumatera Selatan.

⁸⁷⁾Wawancara dengan Soetarmo BA, 30 - 12 - 1980

Tenaga pengajar SGO ini ada sebanyak 14 orang guru tetap dan 4 orang guru tidak tetap. Dari 14 orang tetap tersebut, 7 orang diantaranya dari STO, sedangkan yang 7 orang lainnya memiliki ijazah Fkg dan FIP Universitas Sriwijaya Palembang. Direktur sekolah ini, Drs. Matdjari Murah berasal dari STO, yang Soetarmo BA (informan) dari FIP. Unsri yang sejak tahun-tahun permulaan SGPD didirikan telah mengajar di sekolah ini. Untuk mengetahui perincian jumlah kelas dan jumlah murid dari SGO di kota Palembang, yang merupakan Sekolah Guru Olah-Raga di Propinsi Sumatera Selatan, akan kami laporkan disini yang kami kutip dari papan pada sekolah tersebut, yaitu sebagai berikut :

(1) Kelas I A	jumlah	muridnya	sebanyak	40 orang
(2) Kelas I B	jumlah	muridnya	sebanyak	32 orang
(3) Kelas I C	jumlah	muridnya	sebanyak	39 orang
(4) Kelas IIA	jumlah	muridnya	sebanyak	36 orang
(5) Kelas IIB	jumlah	muridnya	sebanyak	37 orang
(6) Kelas IIIA	jumlah	muridnya	sebanyak	31 orang
(7) Kelas IIIB	jumlah	muridnya	sebanyak	30 orang

Sekolah Guru Kepandaian Putri (SGKP) / SMK K.

Pada tahun 1957 di kota Palembang dengan disponsori oleh " Yayasan Batanghari Sembilan " yang diketahui oleh R.A. Rani telah didirikan sebuah Sekolah Guru Kepandaian Putri (SGKP) yang berstatus swasta. Sebagai Kepala Sekolah SGKP swasta ini diangkat guru-guru SKP. Negeri Palembang yaitu : Ny. Sumihar yang kemudian digantikan oleh Ny. Marwiah yang masing-masing menjabat sebagai direktoris SGKP swasta ini selama satu tahun, yaitu sampai tahun 1959.⁸⁸⁾

Pada tahun 1959 atas permohonan dari pihak " Yayasan Batanghari Sembilan " sendiri, SGKP tersebut dinegerikan dan sebagai Direktorisnya diangkat Tati Soediarti yang menjabat sebagai pimpinan SGKP, Negeri tersebut juga selama setahun. Pada tahun 1960 Tati Soediarti digantikan oleh Gan Tjiap Nio yang menjabat sebagai Direktoris sekolah tersebut untuk kurun waktu yang cukup lama. Baru pada tahun 1975 ketika Ibu Gan Tjiap Nio mencapai masa pensiun (MPP), ia digantikan oleh Ny. Kartini Erwan

⁸⁸⁾ Wawancara dengan Ny. Nurtjahya, Karyawan Kanwil Dep. P dan K Propinsi Sumatera Selatan Bidang PMK, tanggal 12 - 12 - 1960.

yang menjabat sebagai pimpinan sekolah ini sampai saat sebakarang ini, yang pada kenyataannya nama SGKP telah tidak ada lagi dan telah berubah menjadi SMKK (Sekolah Menengah Ketrampilan Keluarga). ⁸⁹⁾

Dalam perjalanan sejarahnya SGKP. Negeri di Palembang ini telah banyak mengalami perubahan. Ketika masih bernama Sekolah Guru Kepandaian Putri (SGKP) sampai tahun 1968, lama pendidikan adalah 4 tahun, sedangkan tujuannya ialah untuk mempersiapkan tenaga pengajar bagi sekolah Kepandaian Putri (SKP). Sekolah Guru Kepandaian Putri di Palembang terdiri dari dua bagian, yaitu :

- (1) Bagian A / Bagian Masak / Rumah Tangga, dan
- (2) Bagian B / Bagian Menjahit.

Pada tahun 1968 Sekolah Guru Kepandaian Putri tersebut mengalami perubahan, namanya diganti menjadi Sekolah Ketrampilan Keluarga Atas (SKKA). Sehubungan dengan perubahan tersebut, SKP - pun berubah menjadi SKKP (Sekolah Ketrampilan Keluarga Pertama). Lama pendidikannya juga mengalami perubahan, yaitu tidak lagi 4 tahun tetapi berubah menjadi tiga tahun. Adapun tujuan dari SKKA ini, yaitu :

Di satu pihak masih dipersiapkan untuk menjadi guru SKKP.

Dilain pihak dipersiapkan untuk ketrampilan, yaitu lulusannya di samping menjadi guru diharapkan juga untuk dapat berwiraswasta atau bekerja pada rumah - rumah Sakit atau Hotel - hotel. (bagian dapur/ gizi).

Oleh karena pada struktur programnya masih terdapat program akademis, maka bagi tamatan SKKA yang memperoleh perestasi baik/mendapat ranking pada ujian akhir, diboleh melanjutkan pelajaran ke pendidikan yang lebih tinggi yang relevan, misalnya ke Akademi Ketrampilan Wanita (AKWA) atau ke IKIP Jurusan Decoration dan lain - lain.

SKKA ini seperti juga SGKP juga mempunyai 2 bagian / jurusan.

Pada tahun 1977 Sekolah Ketrampilan Keluarga Atas (SKKA) berubah pula menjadi Sekolah Menengah Keterampilan Keluarga (SMKK), lama pendidikannya tetap tiga tahun. SMKK ini betul - betul dikhususkan untuk ketrampilan, yaitu murid - muridnya dipersiapkan untuk ber - Wiraswasta,

⁸⁹⁾Wawancara dengan Ny. Nurtjahaya, 12 -- 12 -- 1980.

Lulusan SMKK tidak disalurkan untuk menjadi guru, hal mana sangat erat hubungannya dengan diintegrasikannya/dihapuskannya SKKP secara berangsur - angsur sejak tahun 1975. Jika SKKA mempersiapkan siswanya untuk menjadi guru - ber-Wirawasta - memungkinkan untuk melanjutkan studi, tetapi SMKK hanya mempersiapkan wanita yang trampil dalam bidangnya.

SMKK ini terdiri dari tiga Bagian / Jurusan, yaitu :

- (1) Bagian / jurusan Boga atau Makanan
- (2) Bagian / jurusan Busana atau Pakaian
- (3) Bagian / jurusan Graha atau Rumah Tangga 90)

Rupa - rupanya animo masyarakat daerah ini terhadap sekolah-sekolah ke juruan pada umumnya SMKK pada khususnya boleh dikatakan agak kurang jika di bandingkan dengan animo masyarakat terhadap sekolah menengah umum seperti SMP dan SMA. Lebih - lebih pada akhir - akhir ini mereka yang berasal dari sekolah kejuruan (SMKK, STM, SPG, PGA dll) sangat sulit untuk masuk ke perguruan tinggi. Oleh karena itu menurut pengamatan kami daya serap SMKK khususnya sangat minim, sedangkan fasilitas yang diberikan kepada sekolah ini nampaknya cukup besar, gedungnya besar bertingkat dan baru, sarana lainnya nampak mencukupi jika dibandingkan dengan sekolah - sekolah lainnya. Untuk Propinsi Sumatera Selatan pada tahun 1980 / 1981 ini hanya terdapat 3 buah SMKK. Negeri, yaitu :

- (1) SMKK. Negeri di Palembang yang tadinya bernama SKKA, dengan SK Menteri No. 0290/C/1976 tertanggal 9 - 12 - 1976.
- (2) SMKK. Negeri di Baturaja, yang merupakan peningkatan dari SKKP menjadi SMKK berdasarkan SK. Menteri Nomor : 0191/0/1979 tertanggal 3 - 9 - 1979.
- (3) SMKK. Negeri di Lubuk Linggau yang juga merupakan peningkatan dari SKKP menjadi SMKK pada tahun 1979 berdasarkan SK. Menteri Nomor : 0191/0/1979 tertanggal 3 - 9 - 1979. 91)

SMKK. Negeri di Kota Palembanglah yang memiliki bagian/jurusan yang paling lengkap, yakni : Boga, Busana dan Rumah - tangga (Graha),

90) Wawancara dengan Ny. Tjikaju Soemarni, Karyawan Kanwil Departemen P dan K Bidang PMK, tanggal 11 - 12 - 1980.

91) Diambil dari Laporan Bidang PMK Kanwil Dep. P dan K Sum Sel).

sedangkan SMKK. Negeri di Baturaja hanya memiliki bagian/jurusan Boga (Makanan), dan SMKK. Negeri di Lubuk Linggau memiliki 2 buah bagian/jurusan yakni Boga dan Busana (Pakaian). Lulusan dari SMKK. Negeri ini sebagian ada yang ber-Wiraswasta dan sebagian lagi bekerja pada hotel-hotel dan pada rumah Sakit di bagian Gizi/dapur.⁹²⁾

TABEL. XI

KEADAAN SKKA NEGERI/SMKK NEGERI DI SUMATERA SELATAN
TAHUN 1966 - 1978 / 1979

TAHUN	J U M L A H		
	Sekolah	M u r i d	G u r u
1966	1	55	16
1967	1	131	18
1968	1	161	21
1969	1	244	29
1970	1	275	29
1971	1	283	11
1972	1	258	18
1973	1	316	20
1974	1	321	17
1975	1	376	15
1976	1	341	19
1977	1	304	21
1978/1979	1	259	31

SUMBER : Kanwil Departemen P dan K Propinsi Sumatera Selatan

⁹²⁾Wawancara dengan Ny. Tjikaju Soemarni, 11 - 12 - 1980.

Pendidikan Guru Agama Negeri (PGA. Negeri)

Pada tahun 1957 di kota Palembang dibuka sebuah sekolah Pendidikan Guru Agama Atas Negeri yang lama pendidikannya 2 tahun dengan kepala sekolahnya yang pertama ialah Kyai Haji Gani Sindang. PGAA. Negeri ini berlokasi di Balayudha menumpang di gedung Muhammadiyah Balayudha Km. 4½ Palembang. Siswa - siswa PGAA. Negeri ini mendapat tunjangan ikatan dinas dari Departemen Agama RI. Untuk propinsi Sumatera Selatan yang meliputi Lampung, Bengkulu, Jambi dan Palembang, PGAA. Negeri hanya terdapat di kota Palembang. Sedangkan di Tanjung Karang sendiri terdapat Sekolah Pendidikan Guru Pertama Negeri, yang lama pendidikannya 4 tahun. Setelah dibawah pimpinan kepala sekolahnya yang ke-2, Kyai Azis Hadiwijaya (1959 - 1962) PGAA. Negeri diubah menjadi PGA.Negeri 6 tahun.

Pada tahun 1964 PGA.Negeri 6 tahun pindah ke lorok Pakjo atau Jalan Inspektur Marzuki, yaitu gedung milik sendiri, lengkap dengan Asrama siswa-siswa serta perumahan guru/karyawannya. Dan pada tahun 1968 siswa - siswi PGA.Negeri 6 tahun ini tidak lagi menerima tunjangan ikatan dinas, karena Pemerintah tidak mengangkat pegawai - pegawai baru pada waktu itu. Tetapi meskipun tidak ada ikatan dinas lagi PGA.Negeri ini masih dibanjiri oleh siswa - siswa, karena tugas PGA.Negeri ini tidak hanya mencetak pegawai negeri saja tetapi juga manusia yang dibutuhkan masyarakat daerah ini umumnya dan keluarga khususnya. Oleh sebab itu animo masyarakat daerah ini terhadap sekolah PGA.Negeri ini lebih besar jika dibandingkan dengan animo masyarakat terhadap SPG. Negeri pada waktu itu. PGA.Negeri dibanjiri oleh calon - calon siswa dari seluruh wilayah propinsi Sumatera Selatan.⁹³⁾

Sejak tahun 1978 PGA. Negeri 6 tahun di Palembang diubah menjadi PGA. Negeri 3 tahun berdasarkan SK. Menteri Agama RI Nomor : 48 tahun 1978 : Pasal 1 ayat 1 PGA. Negeri untuk mengajar Agama pada Sekolah Dasar, Sekolah Luar Biasa, Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan Taman Kanak - kanak. Ayat 2 : Pendidikan di PGA.Negeri berlangsung 3 tahun dengan menggunakan sistim kelas dan menerapkan sistim semester.

Mereka yang diterima dari Tsanawiyah. Negeri dan yang sederajat. Untuk Propinsi Sumatera Selatan terdapat 3 buah PGA.Negeri, yaitu : di Palembang di Lahat dan Pangkal Pinang. Sejak tahun 1978 tidak ada lagi PGA Swasta

⁹³⁾ Wawancara dengan Drs.H.Murzal H.M.Taher, Direktur PGA.Negeri Palembang, tanggal 20 - 1 - 1981.

di daerah ini. 94)

PGA.Negeri 3 tahun di Palembang mempunyai 4 Takhasus (spesialisasi) :

- Takhasus A, yaitu untuk guru Agama pada Sekolah Dasar.
- Takhasus B1, yaitu guru IPS/Bahasa Indonesia/Agama pada MIN/MAS.
- Takhasus B2, yaitu untuk guru Matematika/IPA pada MIN/MAS.
- Takhasus C, yaitu untuk guru Agama Taman Kanak - kanak, tetapi bisa juga untuk guru Agama di Sekolah Dasar.

Mereka itu dispesialisasikan di kelas II, sedangkan kurikulum yang dipakai oleh PGA.Negeri 3 Tahun ini ialah Kurikulum 1978 dari Departemen Agama RI, yang terdiri dari 30% pelajaran Agama dan 70 % pelajaran umum. Sedangkan PGA.Negeri 6 tahun Kurikulumnya terdiri 60 % pelajaran Agama dan 40 % pelajaran umum. 95)

Akhir-akhir ini banyak diantara tamatan PGA.Negeri daerah ini tidak meneruskan ke Institut Agama Islam Negeri tetapi ke Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dibawah naungan Departemen P dan K Menurut perkiraan mereka yang menyimpang ke Perguruan Negeri/Swasta (Dep. P dan K) mencapai 70 %. Menurut Drs. H. Murzal, direktur PGA. Negeri Palembang, hal ini disebabkan karena policy dari Departemen Agama RI sendiri yang tidak memberikan tempat yang pasti kepada mereka, baik yang dari PGA.Negeri maupun dari IAIN. Oleh karena itu mereka menyimpang dari induknya, justru Departemen P dan K lebih memberikan perhatian/memberikan wadah yang pasti.

94) Wawancara dengan Drs. H. Murzal H.M. Taher, 20 - 1 - 1981

95) Sda.

T A B E L . X I I

Kedadaan PGA.Negeri di Palembang 1967 - 1980

T A H U N	J U M L A H	
	M u r i d	G u r u
1967	758	34
1968	754	39
1969	1086	47
1970	1143	52
1971	1063	53
1972	1157	52
1973	1074	53
1974	1160	55
1975	687	45
1976	562	44
1977	551	38
1978	615	40
1979	497	31
1980	501	38

SUMBER : PGA.Negeri Palembang.

Tahun 1975 sampai tahun 1978 merupakan masa peralihan, oleh karena itu jumlah murid tahun 1975 sampai tahun 1978 yang dihitung hanya dari kelas IV.V. dan VI saja, sedang, sedang kelas I.II.dan III sudah mulai di pisahkan menjadi Tsanawiyah Negeri yang masih berlokasi di gedung PGA. Negeri Palembang. Sedangkan pada tahun 1980 / 1981 PGA, Negeri Palembang memiliki 14 kelas, yaitu yang terdiri dari :

-	Kelas	I	sebanyak	4 kelas.
-	Kelas	II	sebanyak	4 kelas.
-	Kelas	III	sebanyak	6 kelas.

Jumlah murid rata - rata tiap - tiap kelas ialah 36 orang, dan perbandingan antara murid putra dan putri ialah 2 : 3. Sejak tahun 1979 semua siswa diharuskan tinggal di asrama PGA. Negeri. Dan menurut peraturan dari Departemen Agama RI sejak tahun 1979, PGA.Negeri Palembang hanya boleh menerima murid sebanyak 100 orang. Guru - guru PGA.Negeri pada umumnya

Kursus Persamaan SGB dan

Kursus Persamaan SGB dan KGA/KPG.Negeri.

Pada tanggal 1 Desember 1951 di kota Palembang didirikan Kursus Persamaan SGB yang lama pendidikannya 2 tahun. Adapun tujuan/maksud didirikannya Kursus Persamaan SGB tersebut ialah untuk meningkatkan pengetahuan serta menstabilkan/memantapkan kedudukan guru - guru sekolah Rakyat / Sekolah Dasar yang belum memiliki Ijazah SGB di Propinsi Sumatera Selatan. Pengikut dari pada kursus Persamaan SGB di kota Palembang terdiri dari pada umumnya guru - guru Sekolah Rakyat yang berijazah OVVO Leergang yang berasal dari seluruh wilayah propinsi Sumatera Selatan. Pelaksanaannya diserahkan kepada guru - guru SGB, oleh karena itu guru - guru serta tempat belajarnya menjadi satu dengan SGB. Animo masyarakat khususnya masyarakat guru cukup besar terhadap Kursus tersebut yang untuk pertama kalinya memiliki 2 buah kelas, yaitu kelas pagi untuk guru SR yang mengajar pada sore hari dan kelas sore bagi guru SR yang mengajar waktu pagi. oleh karena dibukanya Kursus Persamaan SGB tersebut banyak guru - guru SR di daerah Ulu yang minta pindah ke kota Palembang dengan alasan untuk mengikuti Kursus, sebab jika mereka tamat akan mendapat penghargaan yang sama dengan mereka yang memiliki ijazah SGB 4 tahun. ⁹⁶⁾

Menurut H.M. Pulungan meskipun SGB.Negeri diintegrasikan ke dalam SGA.Negeri,namun Kursus Persamaan SGB masih ada, karena di daerah ini masih dibutuhkan. Kursus Persamaan SGB ini tadinya memang dibawahhi oleh Kabin (Kantor Pembinaan) Kanwil Departemen P dan K Propinsi Sumatera Selatan, tetapi pada kira - kira tahun 1970 ditangani langsung oleh BPG

⁹⁶⁾Kementerian Penerangan RI, Op. cit, halaman 651.

Bandung yang rupa - rupanya dilaksanakan secara tertulis. Di daerah masih ada pengikutnya, tetapi karena ditangani oleh BPG Bandung di Kanwil tidak ada datanya.

Disamping Kursus Persamaan Lisan SGB tersebut diatas di kota Palembang pada tahun 1954 dibuka juga KGA (Lisan) yang pelaksanaannya di serahkan kepada SGA.Negeri di kota Palembang. Oleh karena itu guru - guru dan tempat belajarnya juga menjadi satu dengan SGA.Negeri Palembang. Tujuan dibukanya KGA.Negeri ini ialah untuk meningkatkan dan memantapkan kedudukan guru - guru Sekolah Rakyat yang belum memiliki ijazah SGA.Negeri, pada waktu itu umumnya yang berijazah SGB.Negeri.

Animo dari pada Kursus KGA inipun cukup besar dari masyarakat daerah ini terutama tentunya masyarakat guru. Pengikutnya berasal dari seluruh wilayah Propinsi Sumatera Selatan yang mendapat ijin belajar dari belajar ke kota Palembang dan harus mengajar di Sekolah Rakyat di kota Palembang. Dalam perkembangannya kemudian dengan diubahnya SGA.Negeri menjadi SPG.Negeri KGA.Negeri-pun berubah namanya menjadi KPG.Negeri. Mula-mula pengikut dari KGA.Negeri/KPG.Negeri ini adalah mereka yang memiliki ijazah SGB.Negeri atau Kursus Persamaan SGB, namun dalam perkembangan selanjutnya terutama dengan adanya peraturan Pemerintah bahwa mereka yang menjadi guru harus memiliki ijazah guru. Peraturan Pemerintah tersebut untuk daerah ini membawa akibat banyak guru - guru yang tidak memiliki ijazah guru dan hanya mempunyai ijazah non - guru (SMA.Negeri SMEA.Negeri, STM.Negeri dll yang sederajat) harus berusaha mencari ijazah/memiliki ijazah guru. oleh karena itu kira - kira sejak tahun tujuh puluhan ke atas KPG.Negeri tidak hanya menarik perhatian guru-guru yang berijazah SGR/Perseamaan SGB tetapi juga mereka yang telah menjadi guru tetapi hanya memiliki ijazah non-guru. Untuk memberi kesempatan kepada mereka yang belum memiliki ijazah guru tetapi telah bekerja sebagai guru, maka Pemerintah mengambil kebijaksanaan dengan membuka 3 paket, yaitu :

- (1). Paket A : diperuntukkan bagi guru - guru yang hanya berijazah SLTP non-guru. Lama pendidikannya 3 tahun. Tetapi untuk Paket A ini di Palembang belum berani membuka.
- (2). Paket B : diperuntukkan bagi guru - guru yang berijazah SGB dan Perseamaan SGB, yang lama pendidikannya ialah 2 tahun. Untuk Palembang baru Paket B inilah yang dibuka untuk sementara ini.

(3). Paket C : diperuntukkan bagi guru - guru yang berijazah SLTA non-guru, lamanya hanya 1 tahun. Untuk Paket C inipun Palembang belum membuka. Dan diperkirakan pengikutnya tidak banyak jika di buka. karena mereka lebih senang memilih Program Diploma.

Oleh karena daerah ini (Palembang) belum berani membuka ketiga Paket tersebut di atas, dan baru membuka Paket B saja, maka kenyataannya se karang ini ada guru - guru yang hanya memiliki ijazah dasar SLTP non - guru yang mengikuti Paket B secara tidak terang - terangan atau dengan kata lain Bidang Pendidikan Dasar dan Guru pura - pura tidak tahu. Disamping itu ada juga guru - guru yang telah memiliki ijazah SLTA non guru mungkin karena terpaksa mengikuti Paket B. yang sebenarnya untuk mereka hal tersebut merugikan dari segi waktu. ⁹⁷⁾

Untuk seluruh Propinsi Sumatera Selatan hanya memiliki sebuah KPG. Negeri, yaitu di kota Palembang. Pada dewasa ini pengikutnya terdiri dari 2 macam :

orang yang mendapat ijin belajar, yang pada umumnya berasal dari guru-guru di daerah Uluang yang dikirim oleh Kande - Kande untuk belajar di Palembang disamping mengajar dan setelah menamatkan Kursusnya harus kembali ke daerah (Kabupaten). Yang kedua ialah siswa /pengikut bebas, yaitu orang mendaftar sendiri.

KPG.Negeri di Palembang mempunyai 4 kelas, yaitu :

Tingkat I. 2 kelas.
Tingkat II. 2 kelas.

Rata - rata jumlah pengikutnya dalam 1 kelas sebanyak $\pm$ 40 orang, dan memakai sistem semester. ⁹⁸⁾

Animo terhadap KPG.Negeri ini pada dewasa ini masih besar, dan pelaksanaan diserahkan kepada pimpinan SPG.Negeri Palembang, yaitu Ibu Siti Rukmini Subronto. Sedangkan Kursus guru lainnya dikoordinir oleh BPG Bandung.

Sekolah Kepandaian Putri Negeri (SKP.Negeri)/SKKP.Negeri.

Seperti telah diketahui bahwa pada jaman pemerintahan kolonial Belanda di kota Palembang pernah didirikan 2 macam sekolah kepandaian putri atas

⁹⁷⁾ Wawancara dengan H.M.Pulungan, 26 - 1 - 1981.

⁹⁸⁾ Sda.

inisiatif partikelir, yaitu : pada tahun 1938 dengan diketuai oleh Ny. Ir. Ibrahim didirikan Nijverheidsschool dengan dua kelas dibawah pimpinan Nona Rosna, dan pada tahun 1941 dibuka pula Mevrouwde Jonge School. Kedua sekolah ini bertahan hanya beberapa tahun saja dan dengan meletusnya Perang Pasific, maka keduanya terpaksa ditutup. Beda kedua sekolah tersebut hanya dalam penerimaan murid - muridnya, yakni pada Nijverheidsschool yang diterima ialah anak - anak yang telah tamat pada HIS, sedangkan pada sekolah Mevrouw de Jonge School yang diterima ialah anak - anak dari Maisjes School yang lama pendidikannya 5 tahun. ⁹⁹⁾

Setelah Proklamasi Kemerdekaan seperti telah kami singgung dimuka di kota Palembang bersamaan dengan dibukanya SMOP dan SGM, pada 1 Februari 1946 didirikan pula sekolah kerajinan dengan nama Sekolah Kepandaian Putri (SKP) dibawah pimpinan Ibu Masnun. Seperti juga SMOP dan SGM, sebagai akibat pertempuran Lima Hari Lima Malam SKP inipun di tutup. Tetapi kemudian pada jaman Recomba (Pemerintahan Federal) di kota Palembang didirikan Sekolah Kepandaian Gadis (SKG) yang dipimpin oleh Zuster Prudentia dari misi Roma Katolik. Sekolah ini dibagi dalam 2 bagian , yaitu : satu bagian memakai bahasa pengantar bahasa Belanda dan yang satunya memakai bahasa pengantar bahasa Indonesia. Oleh karena Zuster Prudentia pada tahun 1949 meletakkan jabatan sebagai pimpinan digantikan oleh Ibu Hakim. Mula - mula sekolah ini berlokasi di jalan Merdeka di depan Rumah sakit Mata Sekarang, baru pada tahun 1950 pindah ke Talang Semut dekat Gereja Ayam, yang sekarang menjadi SMP.Negeri XIII. ¹⁰⁰⁾

Pada tahun 1950 Sekolah Kepandaian Gadis diambil alih oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan, namanya diganti menjadi Sekolah Kepandaian Putri (SKP) dan dipimpin oleh Ny. Supadio. Lama pendidikannya 3 tahun, dan pada tahun 1950 SKP.Negeri mempunyai 3 kelas I dan sebuah kelas II. Pada tahun 1952 untuk pertama kali SKP.Negeri ini menamatkan 33 orang siswinya dari 40 orang yang mengikuti ujian. Meskipun ada tamatan SKP.Negeri tersebut meneruskan ke SGTk,SGKP dan ke sekolah Bidan, namun pada umumnya mereka mengalami kesulitan untuk meneruskan pelajaran ke sekolah yang lebih tinggi, disamping di kota Palembang belum ada sekolah yang relevan yang lebih tinggi pada waktu itu, mereka

⁹⁹⁾Kementerian Penerangan RI, Opcit, halaman 654 - 655

¹⁰⁰⁾Wawancara dengan Ny. Tjikaju Soemarni, 11 - 12 - 1980.

tidak mendapat penghargaan yang sama dengan sekolah yang sederajat yang sama lama pendidikannya, misalnya SMP. Kenyataannya untuk masuk ke Sekolah - sekolah SGKP, SGTk atau Bidan dll lebih diutamakan/disukai anak - anak yang tamat dari SMP.Negeri. Pada tanggal 1 Juli 1952 pimpinan SKP.Negeri digantikan oleh Ibu Aswarini. 101)

Pada tahun ajaran 1953/1954 SKP.Negeri mengalami perubahan, yaitu lama pendidikannya dibagi menjadi 2 macam : (a). yang lama pendidikan nya 2 tahun, (b) yang lama pendidikannya 4 tahun. Yang lama pendidikan nya 2 tahun menerima murid yang tidak lulus ujian,tetapi masih mempunyai angka 15 - 16 (untuk Bahasa Indonesia, Berhitung, dan Pengetahuan Umum) Pada bagian murid - murid diberi pelajaran praktek rumah tangga dan beberapa pengetahuan umum. Kepada mereka yang telah menyelesaikan pendidikan selama 2 tahun tidak diberi ijazah, tetapi hanya menerima surat keterangan saja, karena tujuan pendidikan yang 2 tahun itu, yaitu :

- Memberi kesempatan kepada gadis - gadis yang tidak dapat melanjutkan pendidikannya ke SKP yang 4 tahun atau ke SMP.
- Mencegah pengangguran gadis - gadis dan perkawinan anak - anak.
- Mendidik gadis - gadis menjadi Warga - Negara yang berguna
- Dapat mempergunakan kepandaian itu untuk mencari nafkah.

SKP yang 4 tahun, menerima murid - murid yang lulus ujian masuk ke SLTP. Bagian ini dipecah menjadi 2 bagian, yaitu 2 tahun lagi, yaitu 2 tahun di kelas persiapan dan 2 tahun lagi ke bagian kejuruan. Di kelas persiapan murid - murid diberi pelajaran kerumah - tanggaan dan pengetahuan umum, dan setelah jika mereka cakap dapat memilih untuk masuk ke salah satu kejuruan seperti :

- A. Kejuruan Memasak
- B. Kejuruan Menjahit pakaian
- C. Kejuruan memimpin rumah - tangga
- D. Kejuruan membuat / kerajinan tangan
- E. Kejuruan menenun dan menganyam
- F. Kejuruan menghias dan membuat barang
- G. Kelas persiapan untuk dapat melanjutkan pendidikan ke SGB, SKP, SGKP, Sekolah Bidan dan Sekolah Jururawat. 102)

101)Kementerian Penerangan RI, Op cit, halaman 655.

102)Ibid, halaman 656 - 657.

kebutuhan masyarakat, oleh karena itu tidak perlu di pertahankan atau di tiadakan, yang dapat dilaksanakan dengan 2 cara/jalan :

(1). Dengan mengintegrasikan ke dalam SMP, dan

(2). Dengan meningkatkannya menjadi SMKK.

Sehubungan dengan itulah maka SKKP.Negeri di seluruh Propinsi Sumatera Selatan secara bertahap diintegrasikan atau ditingkatkan. Sejak tahun ajaran 1975/1976 SKKP.Negeri di kota Palembang diintegrasikan menjadi SMP.Negeri XIII, dengan menyelesaikan studi anak - anak SKP.Negeri yang duduk di kelas II dan kelas III. Hal ini secara bertahap diikuti oleh SKKP.Negeri di daerah Kabupaten, kecuali SKKP.Negeri di Baturaja dan di Lubuk Linggau.¹⁰⁵⁾ masih tetap/dipertahankan, karena masih dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Baru pada tahun 1979 keduanya ditingkatkan menjadi SMKK.Negeri Baturaja dan SMKK.Negeri Lubuk Linggau berdasarkan SK.Menteri yang tanggal dan nomornya sama, yaitu SK.No. 0191/0/1979 tanggal 3 - 9 - 1979, seperti telah dikemukakan dimuka (lihat SMKK.Negeri).

Dengan demikian pada tahun 1980/1981 Sekolah Ketrampilan Keluarga Pertama (SKKP) sudah tidak ada lagi di daerah Propinsi Sumatera Selatan. Bagaimana perkembangan SKP.Negeri/SKKP.Negeri di seluruh Propinsi Sumatera Selatan dari tahun 1966 sampai dengan tahun 1979 dapat dilihat dari tabel yang kami kutip dari tahun 1966 sampai dengan tahun 1979 dapat dilihat dari tabel yang kami kutip dari Kanwil P dan K Propinsi Sumatera Selatan, sedangkan keadaan sebelum datanya tidak ada.

¹⁰⁵⁾Wawancara dengan Ny. Tjikaju Soemarni.

TABEL. XIII**Keadaan SKKP. Negeri di Propinsi Sumatera Selatan****Tahun 1966 - 1980**

TAHUN	J U M L A H		
	Sekolah	Murid	Guru
1966	7	776	71
1967	7	850	72
1968	7	806	79
1969	7	958	79
1970	7	973	66
1971	7	726	61
1972	7	861	51
1973	7	798	48
1974	7	871	54
1975	7	1073	51
1976	7	1220	51
1977	3	464	6
1978/1979	3	233	16
1979/1980	2	97	12
1980	0	0	0

SUMBER : Kanwil Departemen P dan K Propinsi Sumatera Selatan

Sekolah Menengah Ekonomi Pertama Negeri (SMEP. Negeri)

Seperti telah diketahui bahwa pada jaman pemerintahan kolonial Belanda di kota Palembang pernah dibuka KHS (Klein Handelschool) yang lama

pendidikannya 2 tahun, yang mempunyai tujuan untuk mendidiki anak-anak agar mereka dapat berdiri sendiri dalam lapangan perekonomian.

Pada jaman Jepang sekolah dagang (KHS) ini ditutup seperti juga sekolah - sekolah lanjutan lainnya. Tetapi setelah kemerdekaan, yaitu setelah Pemerintah mendapat penjelasan bahwa masyarakat daerah ini juga membutuhkan Sekolah Menengah Ekonomi Pertama di buka kembali. Mula - mula SMEP akan dibuka dalam tahun 1950, tetapi mengalami kegagalan, karena orang yang akan mengepalai sekolah tersebut tidak jadi datang dan kemudian orang lain yang ditetapkan untuk menjadi kepala SMEP itu hanya sanggup tinggal di kota Palembang hanya + 15 hari, dengan alasan standard hidup di daerah ini terlalu tinggi. ¹⁰⁶⁾

Akhirnya oleh Inspeksi Pusat Pengajaran Ekonomi agar Madian yang pada waktu itu sedang menjabat kepala Inspeksi Sekolah Rakyat Kotabesar Palembang, untuk menjadi kepala Sekolah dari SMEP tersebut.

Setelah ada kesedian dari Madian, maka pada bulan Agustus 1951 diresmikanlah berdirinya SMEP.Negeri berdasarkan SK. No. 8380/B tanggal 1-10-1951, dengan murid pertama berjumlah 44 orang untuk kelas I, sedangkan gurunya ketika itu baru Madian sendiri. Sebulan kemudian datang seorang guru lagi dan pada bulan Oktober 1951 ditambah pula kelas satu lagi dengan murid 18 orang, sehingga jumlah murid dalam tahun 1951 itu 62 orang yang terdiri dari 2 kelas, yaitu kelas IA dan kelas IB. Sejalan dengan ditambahnya jumlah kelas, maka pada bulan Nopember 1951 ditambah pula 2 orang guru lagi. Ketiga - tiga guru baru tersebut tamatan dari SMEA.Negeri (2 orang) dan tamatan SMA/C (1 orang). ¹⁰⁷⁾

Menurut Madian SMEP tidak menghadapi masalah kekurangan tenaga pengajar seperti sekolah - sekolah lanjutan lainnya di daerah ini, karena Inspeksi Pusat Pengajaran Ekonomi di Jakarta dapat memproduksi guru sendiri, yang dilaksanakan di SMEA dan oleh B I Ekonomi. Kesulitan yang dihadapi hanyalah masalah gedung sekolah. Tempat belajarnya masih menumpang di gedung SMP.Negeri I di Talang Semut, dan baru pada bulan Desember 1952 pindah keJalan Pagar Alam (sekarang Jalan Mayor Ruslan), yaitu ke gedung SMEP.Negeri I yang sekarang menjadi SMP.Negeri XIV.

¹⁰⁶⁾ Kementerian Penerangan RI, Op cit, halaman 646 - 648.

¹⁰⁷⁾ Ibid, halaman 648

Pada penerimaan murid tahun 1952 dan tahun 1953 nampaknya adanya peningkatan, yaitu 62 orang (1952) dan 72 orang, (1953) untuk 2 kelas. Hal ini menunjukkan adanya perhatian dari masyarakat daerah ini terhadap SMEP. Nampaknya pada tahun - tahun permulaan didirikan perkembangan SMEP di kota Palembang ini cukup memuaskan - animo masyarakat untuk memasukkan anaknya ke sekolah kejuruan ini cukup besar, sehingga dari tahun ke tahun jumlah pendaftaran semakin bertambah. Hal ini berjalan sampai kira - kira tahun 1956, sebab waktu itu anak - anak lulusan SMEP mudah mencari pekerjaan (di bank, kantor, perusahaan swasta), langsung terjun ke masyarakat menjadi pengusaha kecil. Sebelum PGPN 1955 anak yang lulus SMEP bila bekerja pada Pemerintah diangkat dalam golongan IIIA/B, sedangkan dari SMP hanya dalam golongan IIIA. Disamping itu ketika itu alat - alat untuk praktek sangat diperhatikan/dipenuhi oleh Pemerintah. ¹⁰⁸⁾

Oleh karena kekurangan lokal untuk kelas, maka dalam penerimaan murid baru pada tahun ajaran 1953/1954 terpaksa SMEP.Negeri harus belajar pada pagi dan petang harinya. Sebenarnya gedung SMEP tersebut kurang memenuhi syarat untuk sekolah kejuruan seperti SMEP yang membutuhkan banyak lokal, karena harus ada lokal untuk praktek, untuk toko dan untuk gudang barang dagangan anak - anak. Perkembangan SMEP.Negeri di kota Palembang diikuti dengan meluasnya ke daerah - daerah Kabupaten di seluruh Propinsi Sumatera Selatan.

Pada tahun ajaran 1953/1954 dibuka SMEP di Baturaja (Kab.OKU) Muara Enim (Kab.LIOT), Kayu Agung (Kab. OKI) dan Lahat. Pada tahun ajaran 1956/1957 didirikan SMEP di Pangkal Pinang (Bangka), pada tahun ajaran 1957/1958 didirikan SMEP di Tanjung Pandan (Belitung), pada tahun ajaran 1959/ 1960 didirikan SMEP.Negeri II di Kota Palembang yang lokasi di Seberang Ulu. Dan pada tahun 1966 didirikan SMEP di Sekayu, yang merupakan SMEP yang termuda di Propinsi Sumatera Selatan. ¹⁰⁹⁾

Perlu diketahui bahwa pada umumnya SMEP yang terdapat di daerah Kabupaten - Kabupaten tersebut di atas sebelum dinegerikan adalah berstatus Swasta.

¹⁰⁸⁾Wawancara dengan Drs. Moch. Dai Sulaiman, bekas direktur SMP. Negeri I, sekarang direktur SMP. Negeri XIV, 11 - 12 - 1980

¹⁰⁹⁾Wawancara dengan Drs. Moch. Dai Sulaiman, 11 - 12 - 1980.

Kurikulum SMEP dari tahun 1950 - 1968 sama dengan kurikulum SMP di tambah dengan mata pelajaran khusus, sedangkan kurikulum SMEP tahun 1968 - 1973 berbeda dengan kurikulum SMP, tetapi kurikulum SMEP 1973-1976 sama dengan kurikulum SMEP tahun 1950. Sesudah tahun 1956 animo masyarakat terhadap sekolah kejuruan ini agak menurun, mereka segan mema sukan anaknya ke SMEP. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, bahwa mereka yang lulusan SMEP sulit untuk melanjutkan seko lahnya ke tingkat yang lebih tinggi, sedangkan untuk terjun ke masyarakat ma sih terlalu muda. Untuk menjadi buruh, umur mereka belum memenuhi sya rat, karena menurut Undang - Undang Perburuahan harus umur 18 tahun ke atas. ¹¹⁰⁾ Faktor - faktor inilah barangkali yang menyebabkan Pemerintah mengambil kebijaksanaan untuk mengintegrasikan/meningkatkan sekolah - sekolah kejuruan menengah pertama ke dalam SMP atau ke SMEA.

Pada tahun 1975 keluar Peraturan Pemerintah untuk mengintegrasikan sekolah - sekolah kejuruan menengah pertama ke SMP, kecuali di daerah - daerah yang masih dibutuhkan. Dalam konteks itulah SMEP.Negeri di daerah Propinsi Sumatera Selatan kecuali SMEP.Negeri di Baturaja, Berintegrasi ke SMP.Negeri, dengan menyelesaikan studi anak - anak yang duduk di kelas II dan kelas III, yang berakhir sampai tahun 1977. Adapun SMEP.Negeri I di kota Palembang menjadi SMP.Negeri XIV, dan SMEP.Negeri II menjadi SMP. Negeri XV. Sedangkan SMEP di Baturaja masih berdiri sampai tahun 1979, dan baru pada tahun 1980 menjadi SMP.Negeri ¹¹¹⁾

Menurut Drs. Moch. Dai Sulaiman, bekas Kepala SMEP.Negeri I Palembang orang - orang yang pernah menjadi Kepala SMEP.Negeri I Palembang adalah sebagai berikut : Madian (1951 - 1959), Amir Mukminin (1959 - 1961), Drs. Sukma Rahum (1961 - 1966), Drs. Ali Latief (1966 - 1970), Ibu rohani Herman (1970 - 1974). Drs. Moch. Dai Sulaiman (1974 sampai sekarang setelah diintegrasikan menjadi SMP.Negeri XIV). Guru-guru SMEP. Negeri I pada umumnya berijazah SMEA.Negeri, PGSLP, BI Ekonomi, Sarjana Muda Fkg Jurusan Ekonomi.

¹¹⁰⁾Wawancara dengan Drs. Moch. Dai. Sulaiman, 11 - 12 - 1980

¹¹¹⁾Wawancara dengan Bakaruddin, 12 - 12 - 1980.

T A B E L. XIV.

Keadaan SMEP.Negeri di Propinsi Sumatera Selatan
Tahun 1966 - 1979

T A H U N	J U M L A H		
	Sekolah	Murid	Guru
1966/1967	12	1845	110
1967/1968	12	1677	112
1968/1969	13	1929	111
1969/1970	13	2070	121
1970/1971	13	2085	116
1971/1972	10	1624	86
1972/1973	10	1619	97
1973/1974	10	2153	90
1974/1975	10	2242	101
1975/1976	10	2512	89
1976/1977	10	2591	116
1977/1978	1	311	17
1978/1979	1	250	17
1979/1980	0	0	0

SUMBER : Kanwil Departemen P dan K Propinsi Sumatera Selatan.

Sekolah Menengah Ekonomi Atas Negeri (SMEA.Negeri)

Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) merupakan lembaga pendidikan menengah kejuruan yang diasuh berturut - turut oleh Sub. Direktorat Ekonomi, Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Sebagai sekolah kejuruan pertumbuhan dan perkembangannya selalu disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan jaman, terutama pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha. Nama sekolah kejuruan ini mula - mula Sekolah Ekonomi Menengah (SEM) atau Sekolah Dagang Menengah (SDM), kemudian setelah terbentuk kembali Negara Kesatuan RI (1950) menjadi Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) sampai sekarang. ¹¹²⁾

Dengan disponsori oleh Drs. S.W.Tanya, pada tahun 1952 di kota Palembang dibuka Sekolah Menengah Ekonomi Atas Negeri (SMEA.Negeri). Gedungnya mula - mula masih menjadi satu dengan gedung SMEP.Negeri di Jalan Mayor Ruslan, yang sekarang menjadi gedung SMP.Negeri XIV. Kemudian pindah ke gedung SMEA.Negeri I yang sekarang ini yang terletak di Lorong Kapten atau Jalan Letnan Jaimas Palembang. Direktur SMEA.Negeri I yang pertama ialah Drs. S.W.Tanya. Sesudah itu SMEA.Negeri I dipimpin secara berturut - turut oleh : Drs. Kasim Ali, Drs. Suradjiman, Darwis, Sarwoko Drs. A. Siahaan, Mubakir, Drs. Burhanuddin Senaris. ¹¹³⁾

Sebelum tahun 1960 SMEA belum diadakan pembagian jurusan, oleh karena itu SMEA dikatakan merupakan saudara kembar dari SMA/C. Baru pada tahun 1960 diadakan penjurusan, yaitu : Tata Buku, Koperasi, Tata Usaha, yang kemudian berubah menjadi jurusan Tata Buku, Tata Perusahaan dan Tata Usaha. Pada tahun 1968 pembagian jurusan berubah lagi menjadi : Tata Buku, Tata Niaga, dan Kesekretariatan. Dalam Perkembangan selanjutnya dalam Kurikulum 1973, pembagian jurusan tidak lagi dimulai dari kelas I akan tetapi dimulai dari awal kelas III, dan jurusan Kesekretariatan di ubah namanya menjadi Tata Usaha kembali. Dengan adanya pembagian menjadi jurusan - jurusan, maka SMEA betul - betul terarah.

Menurut almanak 1950, Jawaban Pendidikan Kejuruan, tujuan Instiusional SMEA adalah sebagai berikut : (1). menyiapkan tenaga - tenaga yang cakap mempunyai inisiatif dan bekal keahlian untuk berusaha sendiri dalam lapisan pelbagai cabang usaha pertengahan. (2). menyiapkan tenaga - tenaga ahli administrasi menengah yang diperlukan bagi usaha pembangunan baik di kantor - kantor Pemerintah maupun di perusahaan - perusahaan partikelir. Selanjutnya dikatakan bahwa para lulusannya mempunyai kemungkinan :

¹¹²⁾Wawancara dengan Drs.Moch.Dai Sulaiman, 12 - 12 - 1980

¹¹³⁾Wawancara dengan Drs. A'. Siahaan (bekas Direktur SMEA.Negeri I), 16 - 12 - 1980.

- (1). Mempunyai dan memimpin perusahaan sendiri
- (2). Bekerja pada perusahaan - perusahaan perdagangan, kantor - kantor Pemerintah bagian pembukuan dan administrasi, sebagai guru pada KDPN.
- (3). Meneruskan pelajaran ke Fakultas Ekonomi dengan saringan
- (4). Ke kursus - kursus B.I jurusan Perniagaan, Ekonomi, dan Administrasi.

Kurikulum SMEA selalu mengalami perubahan, karena selalu harus di selaraskan dengan situasi dan tuntutan jaman; kurikulum yang mula - mula dipakai ialah kurikulum 1950 - kemudian kurikulum 1960 - kurikulum 1965 - kurikulum 1968 - dan sekarang kurikulum 1976. Nampaknya untuk daerah ini SMEA cukup mendapat perhatian dari masyarakat (meski tidak sebesar SMA), sehingga dalam perkembangannya jumlahnya semakin bertambah, tidak diselenggarakan oleh Pemerintah tetapi juga oleh badan - badan swasta. Pada umumnya SMEA.Negeri yang terdapat di daerah Kabupaten sebelum mendapat mendapat status negeri terlebih dahulu berstatus swasta.

Di kota Palembang pada tahun ajaran 1959/1960 dengan disponsori oleh Moh. Yunus (sekarang Drs.Moh.Yunus) didirikan SMEA.Negeri II, yang mula - mula berlokasi di SMEA.Negeri I di Jalan Jaimas dan belajar pada petang hari. Kemudian pada tahun 1962 pindah ke jalan Jaksa Agung R. Suprpto. Direktornya yang pertama ialah Drs. Moh. Yunus (1960 - 1966), kemudian digantikan oleh Drs. Sukma Rahim (1966 - 1971), selanjutnya di gantikan oleh Drs. Buhanuddin Senaris (1971 - 1980), dan pada tahun 1980 di gantikan oleh E.M.Katamsi. SMEA.Negeri II ini seperti juga SMEA.Negeri I memiliki 3 jurusan, yaitu : Tata Buku, Tata Niaga, dan Tata Usaha. Di seluruh Propinsi Sumatera Selatan terdapat 8 buah SMEA.Negeri, yaitu 2 buah di Kotamadya Palembang, dan masing - masing sebuah di Muara Enim (1964), Lahat (1967). Pangkal Pinang (1967), Kayu Agung (1968), Lubuk Linggau (1972), dan Baturaja (1979). Sedangkan Kabupaten yang belum memiliki SMEA.Negeri ialah : Sekayu (MUBA), Belitung, dan Bangka. ¹¹⁴⁾

SMEA.Negeri I dan SMEA.Negeri II berdasarkan SK.Menteri Nomor 090/0/1979 tanggal 26 - 5 - 1979 ditingkatkan menjadi SMEA.Negeri Pembina. Adapun SMEA.Negeri di Baturaja merupakan peningkatan dari SMEP. Negeri menjadi SMEA.Negeri berdasarkan SK.Menteri No. 0191/)/1979 tanggal 3 - 9 - 1979, dan hanya mempunyai 2 jurusan, yaitu : Tata Buku dan Tata Niaga. SMEA.Negeri Muara Enim didirikan berdasarkan SK.Menteri No. 309/

¹¹⁴⁾Wawancara dengan Drs. A. Sihaan, 12 - 12 - 1980.

B3/Kej/1964 tanggal 25 - 7 1964, yang juga hanya memiliki 2 jurusan, yaitu : Tata Buku dan Tata Usaha - SMEA.Negeri Lubuk Linggau didirikan berdasarkan SK.Menteri No. 105/C/1973 tanggal 3 - 2 - 73, yang juga mempunyai 2 jurusan, yaitu : Tata Buku dan Tata Niaga - SMEA .Negeri Kayu Agung didirikan berdasarkan SK.Menteri No, 176/UKK.3/1968 tanggal 8 - 5 - 1968, juga memiliki 2 jurusan, yaitu : Tata Buku dan Tata Usaha - SMEA.Negeri Pangkal Pinang didirikan berdasarkan SK.Menteri No. 72/B3/Kej/1967 tanggal 25 - 3 - 1967, yang mempunyai 3 jurusan, yaitu : Tata Usaha, Tata Buku dan Tata Niaga - SMEA.Negeri Lahat didirikan berdasarkan SK.Menteri Nomor 71/B3/Kej/1967 tanggal 25 - 3 - 1967. ¹¹⁵⁾

TABEL XV.

Keadaan SMEA.Negeri di Propinsi Sumatera Selatan
Tahun 1966 - 1980

TAHUN	JUMLAH		
	Sekolah	Murid	Guru
1966/1967	3	1041	24
1967/1968	6	1616	28
1968/1969	6	1584	47
1969/1970	6	1460	50
1970/1971	6	1813	42
1971/1972	7	1725	42
1972/1973	7	1894	61
1973/1974	7	1931	57
1974/1975	7	1866	71
1975/1976	7	2069	60
1976/1977	7	2497	89
1977/1978	7	2864	99
1978/1979	8	2957	134
1979/1980	8	2906	98

SUMBER : Kanwil Departemen P dan K Propinsi Sumatera Selatan.
Bidang PMK

¹¹⁵⁾Kanwil Departemen P dan K Propinsi Sumatera Selatan.Bidang PMK.

Sekolah Teknik Negeri (ST.Negeri)

Ketika kota Palembang diduduki oleh tentara Belanda, oleh pemerintah Recomba pada bulan Agustus 1948 didirikan sebuah Ambachtschool atau Sekolah Teknik Pertama, yang mula - mula terdiri dari 2 kelas dengan 63 orang murid, yaitu 1 kelas dengan bahasa pengantar bahasa Belanda dan yang 1 kelas lagi dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia. Gurunya terdiri dari 5 orang, yaitu : T.van Hoevelaak (kepala, P.E..Siebert, Hutagalung, G.A. Suntu dan Tamsir. Gedungnya mula - mula di asrama putri SGA.Negeri di Jalan Inderapura, tetapi pada bulan September 1949 pindah ke Jalan Dempo. Disamping itu di sungai Liat (Bangka) pada tahun 1949 juga didirikan Sekolah Teknik Pertama (Ambachtschool) - di Bengkulu dan Tanjung Karang didirikan Sekolah Teknik Pertama (STP), masing - masing pada bulan Nopember 1951 dan Agustus 1952. Lama pendidikan STP ini ialah 2 tahun.¹¹⁶⁾

STP di Palembang mula - mula hanya membuka bagian besi, dan baru pada tahun ajaran 1949/1950 dibuka bagian kayu, dan pada tahun ajaran itu jumlah muridnya meningkat menjadi 202 orang, terdiri dari 2 kelas II dan 4 kelas I. Pada akhir tahun ajaran 1949/1950 untuk pertama kali menamatkan 30 orang murid bagian besi, dan pada tahun ajaran 1950/1951 tamat pula 30 orang bagian besi. Pada bulan Agustus 1951 kepala STP di gantikan oleh A.J. Frietman dan kemudian oleh J.Peeters.Anak - anak STP yang telah tamat banyak diantaranya meneruskan pelajarannya ke Jawa, karena pada waktu itu di Sumatera Selatan belum ada ST.yang merupakan lanjutan dari STP. Baru tahun 1953 berdasarkan SK.Menteri No. 10/ tak terbaca/1953 tanggal 27 - 2 - 1953 di kota Palembang didirikan sebuah ST.Negeri bagian Mesin dan Bangunan (Sipil) sebagai lanjutan STP. Pendirian ST. Negeri ini disponsori oleh guru - guru STP antara lain A.J. Frietman kepala STP.Negeri Palembang.

Beberapa bulan kemudian didirikan pula ST.Negeri di Tanjung Enim berdasarkan SK.Menteri No. 3237/B/53 tanggal 14 - 7 - 1953, yang terdiri dari bagian Mesin dan Listrik. Pada tahun 1956 di daerah Sumatera Selatan dibuka pula 3 buah ST.Negeri, yaitu : di Sungai Liat (Bangka) berdasarkan SK.Menteri No. 4361/B3/Kej/1956 tanggal 25 - 8 - 1956, dan 2 buah di kota Palembang masing-masing berdasarkan SK.Menteri No. 4361/B3/1956 tanggal 28 - 8 - 1956 dan SK.Menteri No. 4361/BIII/1956 tanggal 28 - 8 - 1956 Dengan demikian di kota Palembang terdapat 3 buah ST.Negeri : ST.Negeri I,

¹¹⁶⁾Kementerian Penerangan RI, Op cit, halaman 643 - 644

ST.Negeri II dan ST.Negeri III. ¹¹⁷⁾ Disamping itu didirikan pula ST.Negeri di Lahat, di Pangkal Pinang dan Tanjung Pandan berdasarkan SK.Menteri Nomor 294/Kep Dirpt/26/1968 tanggal 9 - 4 - 1968 yang terdiri dari bagian Sipil, Listrik, Mesin, sehingga pada tahun 1966 tercatat daerah Propinsi Sumatera Selatan memiliki 8 buah ST.Negeri.

Pada tahun 1975/1976 seperti juga sekolah menengah kejuruan pertama lainnya, maka 2 buah ST.Negeri diintegrasikan ke SMP.Negeri, yaitu ST.Negeri Lahat dan ST.Negeri Pangkal Pinang, tetapi anak - anak yang duduk di kelas II dan kelas III diselesaikan studinya, sehingga pada tahun 1977 di daerah Sumatera Selatan tinggal 6 buah ST.Negeri yang masih dipertahankan hanya 2 buah lokasinya dipindahkar, yaitu : ST.Negeri I dipindahkan ke Tanjung Raja (OKI) dan ST.Negeri II dipindahkan ke Gumawang-Belitang (OKU), ST.Negeri III tetap di Palembang, ST.Negeri Sungai Liat, ST.Negeri di Tanjung Enim, ST.Negeri Tanjung Pandan. ¹¹⁸⁾

¹¹⁷⁾ Kanwil Departemen P dan K Bidang PMK

¹¹⁸⁾ Wawancara dengan R.Manalu, Karyawan Kanwil Dep. P dan K, 16 - 12 - 1980.

TABEL XVI

Kadaan ST.Negeri di Propinsi Sumatera Selatan
Tahun 1966 - 1980

T.AHUN	J U M L A H		
	Sekolah	Murid	Guru
1966/1967	12	1845	110
1967/1968	12	1677	112
1968/1969	13	1929	111
1969/1970	13	2070	121
1970/1971	13	2085	116
1971/1972	10	1624	86
1972/1973	10	1619	97
1973/1974	10	2153	90
1974/1975	10	2242	101
1975/1976	10	2512	89
1976/1977	10	2591	116
1977/1978	1	311	17
1978/1979	1	250	17
1979/1980	0	0	0

SUMBER : Kanwil Departemen P dan K Propinsi Sumatera Selatan

Sekolah Menengah Pendidikan Sosial (SMPS)

Pada tahun limapuluhan di kota Palembang didirikan Sekolah Hakim dan Djaksa (SHD), yang lama pendidikannya 3 tahun, dibawah naungan Departemen Kehakiman. Sekolah ini mula - mula berlokasi di gedung SMEA. Negeri I di Jalan Letnan Jaimas, kemudian baru pindah ke Seberang Ulu, yang ketika itu SHD telah berubah nama menjadi Sekolah Panitra Pengadilan, yang lama pendidikannya masih 3 tahun. Sekolah ini masih dibawah asuhan

Departemen Kehakiman.¹¹⁹⁾

Pada tahun 1968 Sekolah Panitra Pengadilan ini diambil alih oleh Departemen P dan K, oleh karena itu tidak lagi bernama Sekolah Panitra Pengadilan tetapi diubah menjadi Sekolah Pendidikan Sosial Atas (SPSA), tempat belajarnya masih di Seberang Ulu - bekas sekolah Cina. Kemudian namanya berubah lagi menjadi Sekolah Menengah Pendidikan Sosial berdasarkan SK. Menteri Nomor : 404/UKK/3/68 tanggal 30 - 12 - 1968.¹²⁰⁾

Jika pada SPSA belum mempunyai jurusan tetapi pada SMPS (Sekolah Menengah Pendidikan Sosial) telah diadakan pembagian jurusan, yaitu :

- (1). Jurusan Pelayanan Sosial (PS)
- (2). Jurusan Pelayanan Masyarakat (PM)

Lama masa pendidikan SMPS ini ialah 4 tahun, sedangkan SPSA lamanya hanya 3 tahun. Pada tahun 1980 SMPS sebagai Sekolah Menengah Pendidikan Sosial satu - satunya di Propinsi Sumatera Selatan, mempunyai 8 kelas, yaitu kelas I terdiri dari 2 kelas, kelas II 2 kelas, kelas III 2 kelas, kelas IV 2 kelas. Adapun jumlah murid rata - rata tiap - tiap kelas lebih kurang sebanyak 30 orang. Dan jumlah seluruhnya + 250 orang. Direktornya ialah Drs. Abdul Muin Zulfah.¹²¹⁾ Kurikulum yang dipergunakan pada SMPS di Palembang ialah kurikulum 1976. Pada tahun 1976 SMPS pindah dari Seberang Ulu ke Lorok Pakjo No. 881 Palembang. Guru - guru SMPS ini kebanyakan berijazah Sarjana Muda Fakultas Ilmu Pendidikan. Lulusan SMPS disalurkan ke Panti-panti Sosial dan Lembaga Pemasyarakatan.

Sekolah Menengah Farmasi (SMF).

Sangat dirasakan berapa langkanya tenaga Apoteker di daerah Sumatera Selatan ini pada tahun limapuluhan. Hal inilah yang mendorong didirikannya sebuah Sekolah Asisten Apoteker (SAA) di kota Palembang pada tahun 1955 yang disponsori oleh Drs. Bouman sebagai kepala Sekolah SAA yang pertama. Oleh karena belum memiliki gedung sendiri, terpaksa tempat belajarnya berpindah - pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, kadang - kadang di Direktorat Farmasi yang terletak di Jalan Kerangga (dibelakang Kodam)

¹²⁰⁾ Kanwil Dep. P dan K Propinsi Sumatera Selatan.

¹²¹⁾ Wawancara dengan Baharuddin, 11 - 12 - 1980

kadang - kadang di Apotek Kinol di Jalan Jenderal Sudirman - kadang-kadang di RSUP.Palembang. Akhirnya pada tahun 1980 baru berhasil mempunyai gedung sendiri terletak di Jalan Bukit Darat Palembang, sehingga siswa - siswa nya tidak perlu lagi selalu berpindah - pindah atau nomaden.

Sekolah Asisten Apoteker ini mula - mula hanya mempunyai 3 orang tenaga pengajar, yaitu : Drs. Bouman (sebagai pendiri dan Kepala Sekolah) Drs. Tabrani Basri, dan Gan Tju Hok (sekarang bernama Drs. Sutikno). Pada tahun 1957 siswa - siswa SAA ini untuk pertama kalinya mengikuti ujian akhir, berhasil lulus 10 orang. Lama pendidikan SAA ini ialah 3 tahun.

Dalam perjalanan sejarahnya Sekolah Asisten Apoteker ini telah mengalami perubahan - perubahan nama, yaitu dari Asisten Apoteker (SAA) menjadi Sekolah Pengatur Obat (SPO) dan akhirnya sampai sekarang menjadi Sekolah Menengah Farmasi (SMF). Sekolah ini dikelola oleh Departemen Kesehatan, dan untuk daerah Propinsi Sumatera Selatan hanya terdapat sebuah, yaitu di Kotamadya Palembang. Siswa SMF pada tahun 1980 tercatat sebagai berikut : kelas I sebanyak 41 orang, kelas II 26 orang dan kelas III sebanyak 21 orang. Jadi jumlah seluruhnya sebanyak 88 orang.

Sedangkan jumlah tenaga pengajarnya pada tahun 1980 ini sebanyak 15 orang yang terdiri dari 6 orang guru tetap dan 9 orang lainnya adalah tenaga tetap.¹²²⁾

Menurut Eddy Utomo, Kepala Bagian Pendidikan SMF ini Sekolah Menengah Farmasi dipimpin berturut - turut oleh Kepala Sekolah sebagai berikut :

- (1). Drs. Bouman (Pendiri)
- (2). Drs. Ko King Tik
- (3). Drs. Umar Farok
- (4). Drs. Hasrul Buyung
- (5). Drs. Maulana Affandi (Kep. Direktorat Farmasi)
- (6). Drs. H. Fahrudin (Pemilik Apotek Pribumi).

Sekolah Bidan, SPR dan SPK.

Pada tanggal 1 - 10 - 1957 di kota Palembang dibuka Sekolah Bidan

¹²²⁾Wawancara dengan Eddy Utomo, Kepala Bagian Pendidikan SMF.
2 - 12 - 1980.

ber 1958. Menurut Dr. H. A. Madjid Sr., Pimpinan Harian/pelaksana SPR, bahwa jumlah pelamar sekolah ini ketika pertama kali dibuka hanya sebanyak 20 orang sedangkan yang diterima sebanyak 9 orang, tetapi semakin lama animo masyarakat daerah ini terhadap sekolah SPR ini semakin lama semakin meningkat, hal mana dapat kami hubungkan dengan data yang berhasil kami peroleh dari sekolah tersebut, seperti dibawah ini :

Tahun	Pelamar	Tahun	Pelamar.
1957	20	1966	-
1958	20	1967	145
1959	25	1968	150
1960	30	1969	160
1961	30	1970	210
1962	37	1971	174
1963	35	1972	230
1964	85	1973	270
1965	100	1974	256

Pada tahun 1975 dan tahun 1976 SPR tidak menerima murid baru dan bersamaan dengan dileburnya Sekolah Bidan ke dalam SPK, maka pada tanggal 1 Januari 1977 SPR di Palembang tersebut juga dilebur atau dihapuskan.

Menurut Br. H.A. Madjid Sr, Sekolah Pengatur Rawat sejak berdirinya sampai tahun 1969 telah menerima murid sebanyak 397 orang, sedangkan siswa yang telah lulus sampai dilebur sebanyak 119 orang. dan Jumlah tenaga pengajar pada SPR berjumlah sebanyak 26 orang. Seperti halnya Sekolah Bidan Sekolah Pengatur Rawat (SPR) inipun menerima tunjangan ikatan dinas dari Pemerintah cq Kementerian Kesehatan, dan para siswanya juga diharuskan tinggal di asrama. Lama pendidikan juga tiga tahun.

Sekolah Perawat Kesehatan (SPK)

Pada tahun 1976 sebagai pengganti dari Sekolah Bidan Sekolah Pengatur Rawat, dibukalah Sekolah Kesehatan berdasarkan SK. No. 346/Pend/1976/Ka Kanwil tanggal 2 Februari 1976. Landasan pemikiran ialah : un-

yang berlokasi di Rumah Sakit Umum Pusat Palembang, dengan disponsori oleh Zuster Harnizun yang menjabat sebagai Kepala Sekolah dan guru.

Faktor yang mendorong didirikannya Sekolah Bidan di daerah ini ialah sangat kurangnya tenaga Bidan untuk Propinsi Sumatera Selatan. Sekolah Bidan ini berada dibawah naungan Departemen Kesehatan RI. Dan sebagai pimpinan Pengawas Sekolah Bidan ialah Dr. E. Wanne, Kepala RSUP Palembang. Angkatan pertama (1957) berjumlah 8 orang. Adapun syarat - syarat untuk masuk Sekolah Bidan ini ialah : ijazah SMP.Negeri dengan angka - angka baik dan merupakan jatah daerah, umur minimal 17 tahun dan maksimal 20 tahun. Lama pendidikannya 3 tahun dan siswa - siswa Bidan ini menerima tunjangan ikatan dinas 3 tahun, dan tinggal di asrama.

Guru - guru dari Sekolah Bidan ini ialah terdiri dari bidan - bidan yang telah berpengalaman yang telah mendapat pendidikan selama 6 bulan lamanya di Bandung, yaitu pada Sekolah Guru Bidan.¹²³⁾

Ikatan dinas dari siswa - siswa Bidan di Palembang ini berupa asrama plus pendidikan gratis, disamping itu sejak tahun 1960 - 1963 mendapat uang saku - mula - mula sebanyak Rp. 180 - kemudian berubah menjadi Rp. 300,- Tetapi sejak tahun 1964 tidak menerima uang saku - asrama harus membayar Rp. 1000,- dengan 10 kg beras - untuk biaya pendidikan harus membayar sebanyak Rp. 65,- yang oleh Sekolah harus disetor ke KBN, atau dengan kata lain sejak tahun 1964 para siswa Bidan tidak lagi menerima tunjangan ikatan dinas dari Pemerintah.

Menurut Zuster Christine bekas seorang guru bidan dan kini menjadi tenaga pengajar pada SPK, bahwa sejak tanggal 1 Januari tahun 1977 Sekolah Bidan di Palembang ditutup atau dilebur ke dalam Sekolah Perawat Kesehatan (SPK).

Sekolah Pengatur Rawat (SPR).

Bersamaan waktunya dengan berdirinya Sekolah Bidan, yaitu pada tanggal 1 oktober 1957 dibuka dikota Palembang sebuah Sekolah Pengatur Rawat (SPR). Sebagai pimpinan Sekolah ini (SPR) ialah Dr. Edwar Oemar, dan sebagai Pimpinan Pengawas Pendidikan ialah dr. E. Wanne berdasarkan SK. Menetri Kesehatan RI No. 186/UM/PM/Pend/1958 tanggal 22 Septem-

¹²³⁾ Wawancara dengan Zr. Christine, 22 - 1 - 1981.

tuk merealisasikan pelayanan kesehatan secara merata dan menyeluruh pada lapisan masyarakat. Hal ini dinyatakan dalam GBHN, Pelita II dan instruksi Presiden tentang pengembangan Puskesmas.

Menurut Zuster Chritine seorang guru pada sekolah Perawat Kesehatan ini bahwa dengan didirikannya SPK yang merupakan pengganti dari kedua sekolah yang pernah ada, yaitu Sekolah Bidan dan SPR diharapkan akan dapat menghasilkan tenaga - tenaga yang berpendidikan / trampil dalam kebidanan dan sekaligus dalam perawatan kesehatan masyarakat, yang tujuan terutama akan disebarkan ke Puskesmas - Puskesmas di seluruh wilayah Propinsi Sumatera Selatan.

Sebagai pimpinan SPK yang pertama ialah dr. Sumatman (1976 - 1981) dan baru pada akhir bulan Januari 1981 ini digantikan oleh dr. Juliar Maratulis. Oleh karena dua sekolah terdahulu tidak menerima murid baru sebab akan ditutup, maka pada penerimaan siswa SPK baru tahun 1976, jumlah pelamarnya cukup banyak, yaitu sebanyak 560 orang, yang barangkali memegang rekor dalam sejarah sekolah kesehatan di daerah ini. Sedangkan menurut instruksi dari pusat SPK hanya boleh menerima siswa sebanyak 30 orang, tetapi atas kebijaksanaan pimpinan Pengawas SPK di daerah ini telah diterima sebanyak 60 orang siswa. Alasan / pertimbangannya karena kedua sekolah terdahulu (Bidan & SPR) telah sejak tahun 1974 tidak menerima siswa baru. Semua siswa / siswi SPK ini diwajibkan tinggal di asrama dan mereka tunjangan ikatan dinas dari Pemerintah.

Seperti Sekolah Bidan dan SPR, SPK inipun lama pendidikannya adalah 3 tahun, dan perbandingan antara siswa dan siswi adalah sebagai 1 : 4. Sejak bulan Desember 1980 siswa/siswi SPK ini diwajibkan membayar IPP (Iyuran Pembinaan Pendidikan) sebanyak Rp. 3000,- sebanyak Rp. 65,- masuk ke KBN. Jumlah tenaga Pengajar SPK sebanyak 25 orang, yang terdiri dari 14 orang tenaga tidak tetap dan 11 orang guru tetap. SPK telah 2 kali meluluskan murid, yaitu tahun 1979 sebanyak 51 orang, dan tahun 1980 sebanyak 90 orang. Menurut data yang kami peroleh dari SPK, peminat dari sekolah ini cukup besar, sedangkan jumlah yang diterima hanya sedikit yaitu : Pelamar tahun 1978 sebanyak 157 yang diterima hanya sebanyak 31 orang - pelamar tahun 1979 sebanyak 237 orang yang diterima hanya sebanyak 36 orang - pelamar tahun 1980 sebanyak 306 orang, yang diterima hanya sebanyak 40 orang.

Adapun Jadwal SPK di daerah ini adalah sebagai berikut : 2 hari ke masyarakat (Public Health) plus belajar, 4 hari ke Puskesmas/ke Rumah Sakit plus belajar. Adapun daerah Binaan SPK (Public Health) terpilih daerah Kampung 20 Ilir / I.II Kecamatan Ilir Timur I Palembang.

Angkatan I	membina	1001	k.k. =	5934	jiwa.
Angkatan II	membina	514	k.k. =	2758	jiwa
Angkatan III	membina	417	k.k. =	2149	jiwa.
Angkatan IV.	membina	184	k.k. =	3865	jiwa.
Angkatan V	membina	339	k.k. =	1990	jiwa ¹²⁴⁾

Seluruhnya berjumlah 2455 k.k. sama dengan 16696 jiwa.

Syarat untuk masuk ke SPK seperti juga halnya ke sekolah Bidan dan ke Sekolah Pengatur Rawat ialah ijazah SMP.Negeri dan berumur minimal 16 tahun, Adapun tempat belajar dari siswa / siswi SPK belajar ialah di Aula RSUP Palembang dan di Asrama SPK Putri yang terletak di dekat RSUP Palembang.

Sekolah Teknologi Menengah Negeri (STM.Negeri).

Menurut R.Manalu, Karyawan Kanwil Departemen P dan K Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan Propinsi Sumatera Selatan, bahwa pada tahun 1959 di kota Palembang didirikan sebuah Sekolah Teknologi Menengah Negeri berdasarkan SK.Menteri No. : 1290/B3/Kej/1959 tanggal 12 - 10 - 1959 dengan disponsori oleh guru - guru ST.Negeri Palembang. Adapun faktor-faktor yang mendorong didirikannya STM tersebut ialah karena belum adanya sekolah tersebut di daerah ini, dan disamping itu semakin banyak anak - anak daerah ini yang lulus dari ST.Negeri yang tidak sanggup untuk melanjutkan studinya ke Jawa atau ke tempat lain, sehingga dengan dibuka STM.Negeri di daerah ini akan dapat menampung mereka yang dari ST yang berminat melanjutkan. Lama pendidikannya ialah tiga tahun.

STM ini kemudian menjadi STM.Negeri I, karena dibukanya STM yang lain di kota Palembang.

Pada tahun 1965 di kota Palembang didirikan pula STM.Instruktur berdasarkan SK.Menteri No. 113/Dirpt/BI/1965 tanggal 26 - 8 - 1965. STM.Ins-

¹²⁴⁾Wawancara dengan Br. H.A. Madjid Sr, 25 - 1 - 1981

truktor ini berlokasi di Jalan Mayor Ruslan satu kompleks dengan ST.Negeri I. Maksud/tujuan dibukanya STM.Instruktur ini ialah untuk mencetak guru-guru ST di seluruh Propinsi Sumatera Selatan. Tetapi setelah kebutuhan akan guru - guru ST. sudah dianggap cukup dan dengan adanya kebijaksanaan Pemerintah untuk mengintegrasikan/meningkatkan ST.Negeri menjadi STM. Negeri, maka STM.Instruktur ini diubah menjadi STM.Negeri Umum (non guru). Dengan demikian STM.Negeri di kota Palembang dengan nama STM. Negeri I dan STM.Negeri II. Diubahnya STM.Instruktur menjadi STM.Negeri II (non guru) berdasarkan SK.Menteri No. A02/Set/08/1975 tanggal 2 - 1 - 1975. 125)

Disamping itu menurut R Manalu, pada tahun 1965 di kota Lahat didirikan pula sebuah STM.Negeri berdasarkan SK.Menteri No. 130/Dirpt/BI/1965 tanggal 30 - 9 - 1965. Dan pada tahun 1968 di Pangkal Pinang dibuka pula sebuah STM.Negeri berdasarkan SK.Menteri No. DO11/Set Dirpt/68 tanggal 31 - 7 - 1968. Sedangkan di kota Lubuk Linggau pada tahun 1979 telah dinegerikan pula sebuah STM yang tadinya berstatus Swasta yang telah didirikan sejak tahun 1964, yang berdasarkan SK.Menteri No. 0190/0/1979 tanggal 3 - 9 - 1979 telah syah memperoleh status negeri. Dengan demikian pada tahun 1979 di seluruh Propinsi Sumatera Selatan telah terdapat 5 buah STM.Negeri.

STM.Negeri di daerah ini mempergunakan 2 macam kurikulum, yaitu Kurikulum 1964 dan Kurikulum 1976. Yang mempergunakan Kurikulum 1964 di daerah ini hanyalah STM.Negeri Lubuk Linggau, sedangkan yang lainnya memakai Kurikulum 1976. Perbedaan pokok pada kedua kurikulum tersebut ialah pada pembagian jurusanannya, yaitu sebagai berikut :

Jurusan pada Kurikulum 1964.

- (1). Jurusan Mesin
- (2). Jurusan Listrik
- (3). Jurusan Bangunan
- (4). Jurusan Kimia
- (5). Tambang

Jurusan pada kurikulum 1976

- (1). Jurusan Mesin Produksi
- (2). Jurusan Otomotif
- (3). Jurusan Listrik
- (4). Jurusan Bangunan

125) Kanwil Dep. P dan K Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan.

STMNegeri yang memakai Kurikulum 1976 yang memiliki jurusan yang paling lengkap ialah STM.Negeri I di Palembang, sedangkan yang lainnya seperti STM.Negeri di Lahat hanya mempunyai 3 buah jurusan : Bangunan, Mesin Produksi, dan Listrik - STM.Negeri di Pangkal Pinang memiliki 3 jurusan : Bangunan, Listrik dan Mesin Produksi - STM.Negeri II Palembang juga memiliki 3 buah jurusan saja : Bagungan, Listrik dan Mesin Produksi¹²⁶⁾

Menurut Drs. Soetrisno Wp, Kepala Sub Bidang Kurikulum PMK Kanwil Departemen P dan K Propinsi Sumatera Selatan, pada tahun 1980 STM. Negeri I dibawah pimpinan oleh Drs. Syarofah Jafri - STM.Negeri II dipimpin oleh Drs. Suparmo Syamsuddin - STM.Negeri Lahat dipimpin oleh M. Harsjik Mastjik - STM.Negeri Lubuk Linggau dipimpin oleh Drs. Rusli Sani - STM Negeri Pangkal Pinang dipimpin oleh Achmad Yunus, BE.

Dikatakannya pula bahwa di kota Palembang telah terdapat BLPT (Balai Latihan Pendidikan Teknik) yang berlokasi di Jalan Basuki Rachmad Kotamadya Palembang.

¹²⁶⁾ Kanwil Dep. P dan K Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan.

T A B E L. XVII

Keadaan STM.Negeri di Propinsi Sumatera Selatan
Tahun 1966 - 1980

T A H U N	J U M L A H		
	Sekolah	Murid	Guru
1966/1967	3	995	49
1967/1968	3	1011	69
1968/1969	4	1391	69
1969/1970	4	1395	72
1970/1971	4	1406	72
1971/1972	4	2130	49
1972/1973	4	3248	50
1973/1974	4	3323	52
1974/1975	4	3391	56
1975/1976	4	3794	52
1976/1977	4	4199	78
1977/1978	4	4154	96
1978/1979	4	3414	157
1979/1980	5	3233	139

SUMBER : Kanwil Departemen P dan K Propinsi Sumatera Selatan.

SPP. SMPA.Negeri Palembang (Sembawah).

Menurut Drs. A. Moeis Bakry, Kepala Bagian Pengajaran SPP.SMPA. Negeri Palembang yang berlokasi di Sembawa, bahwa pada tahun 1950 -an di daerah Sumatera Selatan ini sangat kurangnya kader - kader/tenaga pertanian yang terdidik/trampil dari yang berpendidikan rendah apalagi yang berpendidikan menengah dan tinggi. Hal ini mendorong Dinas Pertanian Rakyat Propinsi Sumatera Selatan yang dikepalai oleh Umbuh Alwie pada tahun

1952 mendirikan Sekolah Pertanian Rendah (SPR) di Muara Enim dan Curup - Sekolah Usaha Tani (SUT) di Pekalongan (Lampung Tengah) di Haji Mena (Lampung Selatan) di Petaling (Bangka), untuk mengisi lowongan Menteri-Menteri Tani. Sedangkan mengenai kebutuhan tenaga menengah oleh Dinas Pertanian Rakyat Propinsi Sumatera Selatan, telah dicantumkan dalam rencana 5 tahun disusun pada awal tahun 1954 agar di Sumatera Selatan dapat didirikan Sekolah Pertanian Atas. Hal mana mendapat tanggapan yang positif dari Pusat Jawatan Pertanian di Jakarta, dan direncanakan untuk Sumatera Selatan akan didirikan Sekolah Pertanian Menengah Atas dalam tahun 1956.

Dalam hal ini Umbuh Alwie, Kepala Dinas Pertanian Rakyat Propinsi Sumatera Selatan, mendapat dukungan penuh dari Gubernur Kepala Daerah Sumatera Selatan, Winarno Danuatmojo. Rupa - rupanya kedua orang tokoh tersebut tidak sabar menunggu realisasi dari rencana dibukanya SPMA di daerah ini. Oleh karena itu setelah mereka berdua pulang dari menghadiri peresmian pembukaan Fakultas Pertanian di Payakumbuh (Sumatera Barat) pada awal tahun 1955, mereka mengundang tokoh-tokoh Pemerintahan/masyarakat/pendidikan daerah ini untuk suatu pertemuan dalam rangka merealisasikan rencana tersebut di atas. pada tanggal 4 - 2 - 1955. Dalam pertemuan itu telah berhasil dibentuk suatu Panitia Pendirian SPMA di daerah ini. Sususnan Panitia tersebut adalah sebagai berikut :

Pelindung	:	R. Winarno Danuatmojo, Gubernur Sumatera Selatan Bambang Utojo, Pangti TT.II
Penasehat	:	Abdul Rozak, Residen Palembang.
Ketua	:	M.A. Hanafiah, DPD seksi PP & K
Wakil Ketua	:	Mgs. A. Rachman
Sekretaris	:	Tje'mat M. Jusuf
Bendahara	:	R. Moh. Ali
Bag. Penerangan	:	Sutadji
Kep. Bag. Saran fisik	:	Ir. Tjung Fat Kiong. ¹²⁷⁾

¹²⁷⁾ Wawancara dengan Drs. A. Moeis Bakry, tanggal 17 - 1 - 1981

Berkat usaha/jerih payah dari Panitia tersebut, maka pada tanggal 15 September 1955 didirikanlah sebuah Sekolah Menengah Pertanian atas di Palembang, dan pilihan lokasi jatuh pada desa Sembawa yang menang sangat tepat untuk membuka Sekolah Pertanian, karena disekitarnya terdapat banyak perkebunan rakyat dan perkebunan Pemerintah. Sembawa terletak pada Km.29, yang sebenarnya telah masuk dalam Kabupaten MURA. SPMA. tersebut baru diresmikan pada tanggal 17 Nopember 1955. Sekolah Pertanian Menengah Atas ini memiliki areal tanah seluas 115 ha, dengan 10 buah kebun dan 10 kompleks, lengkap dengan asrama siswa, perumahan tenaga pengajar/karyawan non guru. Disamping itu SPMA ini mempunyai fasilitas - fasilitas yang lengkap (olahraga, kepramukaan, tempat praktek)

Lama pendidikan SPMA. ialah 3 tahun, tetapi pada tahun 1968 - 1969 dicoba menjadi 4 tahun, dan pada tahun 1970 kembali lagi menjadi 3 tahun. Bagi para siswa/siswi disediakan asrama. Syarat untuk masuk sekolah kejuruan ini ialah ijazah SMP.Negeri dengan nilai pelajaran non sosial (eksakta) rata - rata 6 ke atas (ini baru tahap pendaftaran). Kemudian mereka harus mengikuti testing masuk, yang meliputi : PMP, Matematika, IPA, dan Psiko-test. SPMA. Rayon Palembang ini mula - mula meliputi lima daerah (1968 s/d 1978), yaitu : Palembang (Sum.Sel), Bengkulu, Jambi, dan Kerinci. Tetapi sejak tahun 1979 terjadi perubahan, Rayon Palembang tidak lagi meliputi 5 daerah, tetapi hanya meliputi : Palembang, Bengkulu dan Lampung. Di Lampung dan Bengkulu terdapat SPMA. Daerah yang berstatus Negeri - di Bengkulu dibina/dibiaya oleh Gubernur Kep. Daerah Tk.I - di Lampung oleh Dinas Pertanian.

Menurut Drs. A. Moeis Bakry, pada tahun 1975 khusus dalam lingkungan Departemen Pertanian muncul suatu nama/istilah SPP (Sekolah Pertanian Pembangunan). Muncul/lahirnya SPP ini berdasarkan SK. Menteri Pertanian RI No. 480/Kpts/Um/12/1975 tanggal 8 - 12 - 1975, untuk menggantikan nama Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA), yang harus disesuaikan dengan situasi politik Pemerintah RI (Pelita). Adapun tujuan SPP ialah mendidik lulusan menjadi warganegara yang baik dan tenaga kerja tingkat menengah yang trampil dalam bidang kejuruan pertanian.

Pada tahun 1976 SPMA Palembang menjadi SPP. SPMA.Palembang,dan sejak itu pada sekolah kejuruan pertanian ini mulai diterapkan kurikulum " Polypalen ", yaitu kurikulum yang merupakan peleburan (fusi) dari kurikulum sekolah kejuruan dalam lingkungan Departemen Pertanian, yaitu

SPMA., Sekolah Peternakan, dan Sekolah Perikanan - kemudian kurikulum ini (polypalen) dipakai bersama - sama oleh ketiga sekolah tersebut, hanya pembobotannya/penekanannya yang berbeda. Jika SPP.SPMA ditetapkan/ pembobotannya pada mata pelajaran yang menyangkut pertanian, sedangkan SPP. Perikanan, dan SPP.Peternakan pembobotannya pada pelajaran menyangkut perikanan, dan peternakan (untuk SPP.Peternakan). ¹²⁸⁾

Menurut Drs. A.Moeis Bakry, anak - anak lulusan SMP.Negeri yang mendapat ranking 1 diterima tanpa testing. Menurut peraturan dari Pusat jumlah siswa yang harus diterima sebanyak 60 orang, tetapi SPP.SPMA di Palembang pada tahun 1976 menerima 90 orang, sedangkan tahun - tahun sebelumnya rata - rata 80 orang. SPP.SPMA Palembang mempunyai 6 kelas, yang terdiri dari : kelas I . 2 kelas, kelas II . 2 kelas; kelas III. 3 kelas. Para siswa/siswi sejak tahun 1978 diwajibkan tinggal di dalam asrama atas biaya sendiri terdiri dari uang Rp. 1000,- dan beras 15 kg. Disamping itu mereka diwajibkan membayar Sumbangan Pendidikan Rp. 3000,- Jumlah tenaga pengajar pada tahun 1960/1961 sebanyak 10 orang, sedangkan Kepala Sekolah sejak berdirinya SPMA sampai sekarang adalah sbb :

- (1). Safoean (1955 - 1960)
- (2). Bahrin Somad (1960 - 1962)
- (3). Ir. Bakru Hamid (1962 - 1963)
- (4). Ir. Salim Sophian (1963 - 1976)
- (5). Ir. Moch. Sobirin (1976 - 1981)

¹²⁸⁾ Wawancara dengan Drs. Moeis Bakry, 17 - 1 - 1981

T A B E L. XVIII

Keadaan Murid SPMA.Negeri/SPP.SPMA.Negeri Palembang
Tahun 1965 - 1981

T A H U N	K E L A S				J U M L A H
	I	II	III	IV	
1965	39	11	29	-	79
1966	41	33	39	-	113
1967	-	30	23	-	-
1968	21	-	24	21	66
1969	40	13	-	24	-
1970	88	33	9	-	130
1971	84	68	27	-	179
1972	83	70	54	-	207
1973	82	77	71	-	230
1974	77	74	70	-	221
1975	82	73	71	-	226
1976	84	80	69	-	233
1977	84	81	67	-	232
1978	84	83	65	-	232
1979	83	77	77	-	237
1980/1981	90	79	77	-	236

SUMBER : SPP. SPMA.Negeri Palembang

Kursus - kursus Pegawai Negeri.

Kurus Dagang Pertengahan Negeri (KDPN) :

Atas permintaan para pegawai negeri agar di kota Palembang dibuka suatu kursus dagang, maka tanggal 1 Januari 1952 didirikanlah sebuah " Mid-

denstand - cursus ", yang murid - muridnya/ pengikutnya terdiri dari para - pegawai - pegawai negeri dari hampir seluruh Jawatan Pemerintahan di kota Palembang, termasuk pula mereka dari Polisi dan Tentera.

Muridnya mula - mula sebanyak 80 orang yang terdiri dari 2 kelas, dan belajarnya pada sore hari dari pukul 16.25 - 20. Kemudian namanya diubah menjadi Kursus Dagang Pertengahan Negeri (KDPN). Tahun berikutnya siswanya telah berjumlah 110 orang, yang terdiri dari 2 kelas II, 2 kelas I. dengan gurunya berjumlah 8 orang. 129) Bagaimana perkembangan selanjutnya kurang diketahui, dan sekarang ini kursus Dagang Pertengahan sudah tidak ada lagi di daerah ini.

Kursus Pegawai Administrasi (KPA)

Pada tahun 1955 di kota Palembang di buka pula sebuah Kursus Pegawai Administrasi yang diikuti oleh pegawai - pegawai negeri yang berijazah Sekolah Dasar. Animo masyarakat khususnya pegawai negeri cukup besar terhadap kursus tersebut. Kursus tersebut didirikan berdasarkan SK.No. 3085/Sek 7/a tanggal 1 - 9 - 1955, 130) dan tempat belajarnya ialah di Kebon Duku No.24 di gedung SMP.Negeri II, pada sore hari. Menurut Drs. Zainin Wahab, dosen Fkg Unsri yang banyak mengetahui tentang hal ini, bahwa sponsor pendirian kursus tersebut ialah W.A. Simanjuntak.

Sedangkan Kepala KPA.Negeri Palembang sekarang adalah T.B. Tambunan. Di Lubuk Linggau juga pernah didirikan Kursus Pegawai Administrasi Negeri tetapi sekarang telah ditutup.

Kursus Pegawai Administrasi Atas Negeri (KPAA.Negeri).

Menurut Drs. Zainin Wahab seorang dosen Fakultas Keguruan Unsri, yang juga sebagai tenaga pengajar pada kursus ini, pada tahun 1960 di kota Palembang didirikan Kursus Pegawai Administrasi Atas, yang disponsori oleh Drs. Jan Dahari. Syarat untuk mengikuti kursus ini ialah mereka yang berijazah SMP.Negeri/KPA.Negeri, dan lama pendidikannya mula - mula 3 tahun, tetapi sekarang 2 tahun. Lokasi/tempat belajar ialah di SMEA.Negeri I di Jalan Letnan Jaimas Palembang. Kepala KPAA.Negeri Palembang pada saat ini ialah A Halim Kaluran, B.A.

129) Kementerian Penerangan RI, Op cit, halaman 649.

130) Kanwil Departemen P dan K Prop. Sum.Sel. Bidang PMK.

Di Kota Lubuk Linggau (MUBA) juga pernah didirikan KPAA.Negeri, tetapi sekarang telah ditutup.

Kursus Karyawan Perusahaan Negeri (KKP.Negeri)

Menurut Drs. Zainin Wahab pada tahun 1963 di kota Palembang dibuka pula Kursus Karyawan Perusahaan Negeri, yang sebenarnya juga di Kebon Duku. Seperti halnya KPA, KKP.Negeri ini diikuti oleh pegawai - pegawai negeri yang berijazah SD.

Kursus Karyawan Perusahaan Atas Negeri (KKPA,Negeri).

Pada Tahun 1965 di kota Palembang didirikan pula Kursus Karyawan Perusahaan Atas Negeri. Menurut Drs. Zainin Wahab berdirinya KKP.Negeri dan KKPA.Negeri adalah ulah orang - orang PKI untuk menyaingi KPA.Negeri dan KPAA.Negeri Berdirinya KKPA.Negeri berdasarkan SK.Menteri No. 462/B3/Kej/1965 tanggal 11 - 8 - 1965. Syarat untuk mengikuti KKPA.Negeri ini ialah ijazah SMP.Negeri/KKP.Negeri/KPA.Negeri. Kepala KKPA.Negeri sekarang ini ialah C. Parapat, SH. Tempat belajarnya juga di Kebon Duku Palembang.

4. Pendidikan Tinggi.

a. Universitas Sriwijaya.

Sejarah Universitas Sriwijaya mempunyai hubungan erat dengan sejarah Perguruan Tinggi Syakhyakirti yang mulai sejak bulan Agustus 1952. Sebelumnya atas inisiatip Kantor Urusan Pemuda yang dikepalai oleh A.S. Sumadi, di kota Palembang pada tahun 1946 telah didirikan sebuah Volksuniversiteit atau Panti Pengetahuan Umum, yang diikuti oleh + 200 orang. Dosen - dosen nya terdiri dari para pemimpin Pemerintahan/Jawatan seperti : dr.M.Isa, dr. AK.Gani,Mr.A. Sidik, A, S.Sumadi, Nungtijk AR, dr.A.Hakim,Ir.Ibrahim, R.S. Josodipuro,K.H.Masjhur Azhari, dr. Ibnu Sutowo, Abdul Malik.¹³¹⁾

Sebagai akibat pertempuran Lima Hari Lima Malam di Kota Palembang pada awal Januari 1947, Panti Pengetahuan Umum tersebut ditutup. Tetapi pada tahun 1948 di kota Lubuk Linggau, yang pada waktu itu menjadi ibu kota Keresidenan Palembang, didirikan pula Panti Pengetahuan Umum dan dosen-dosennya ialah orang - orang yang memberi kuliah di Palembang dulu yang

¹³¹⁾ Kementerian Penerangan RI Op cit, halaman 659 - 660.

sebagian ikut pindah ke pedalaman. Namun usaha inipun kandas dengan pindahnya pusat Pemerintahan RI ke Curup sebagai akibat Aksi Militer ke - II.

Setelah pengakuan kedaulatan, lebih-lebih setelah terbentuk kembali Negera Kesatuan, para pemuka masyarakat/tokoh - tokoh perpindahan daerah ini semakin menyadari betapa pentingnya suatu perguruan tinggi di Sumatera Selatan. Keinginan untuk memiliki perguruan tinggi semakin besar, mengingat Propinsi - propinsi lain di Indonesia sebagian besar telah mendirikan perguruan tinggi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun atas inisiatif swasta. Disamping itu potensi ekonomi daerah ini memungkinkan berdirinya sebuah perguruan tinggi. Ditinjau dari segi historis daerah ini pernah memiliki sebuah perguruan tinggi yang terkenal di kawasan Asia Tenggara, dimana musafir - musafir asing (Cina) memperdalam ilmunya sebelum mereka berkunjung ke India.

Dalam hubungan itulah, maka tanggal 17 Agustus 1952 beberapa orang tokoh masyarakat/pendidikan daerah ini mengadakan pembicaraan tentang kemungkinan untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi di Sumatera Selatan ini, diantaranya : dr.M.Isa (Gubernur Sumatera Selatan), Liem Tjong Hien, SH (Pengacara dan Ketua P5), A.S. Sumadi (Kepala Jawatan Penerangan Sumatera Selatan), M.L.Tobing (Kepala Tata Usaha/Kepala Bag. Pawartaan Jawatan Penerangan Propinsi Sumatera Selatan), Abdul Rozak (Residen Palembang), dr. A.Hakim (Ketua Yayasan Syakhyakirti), R.A.Rani (Kepala Perwakilan PPK Propinsi Sumatera Selatan) dan R.Nawawi (Sekretaris Daerah Kota Praja Palembang). Sebagai hasil pertemuan tersebut, pada tanggal 1 April 1953 terbentuklah Yayasan Perguruan Tinggi Syakhyakirti dengan pengurusnya : dr.A.Hakim, M.L.Tobing, dan Liem Tjong Hien,SH. Untuk keperluan pendirian Yayasan tersebut, pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Syakhyakirti menghadap notaris Palembang, Ch.Masthius. Modal pertama Yayasan Rp. 100.000,- yang diterima dari P5 (Perkumpulan Perusahaan Penggilingan Para Palembang) melalui Presiden Soekarno. Pada tanggal 31 Oktober 1953 peresmian pembukaan Fakultas Ekonomi Perguruan Tinggi Syakhyakirti yang diketahui oleh Drs. S.W.Tanya, dengan jumlah mahasiswa 166 orang, semuanya tingkat Persiapan. Tempat kuliah masih menumpang - mula mula di Gubernuran - kemudian pindah ke gedung DPR.SS., karena belum mempunyai gedung 132)

¹³²⁾M.Amantjik & Mochtar Effendy, Menyambut Peresmian Universitas Negeri Sriwijaya, Panitia Peresmian Unsri,Palembang, 1960, hal 19 - 20

Pada tanggal 1 Maret 1956 diadakan penanda tangan naskah perjanjian afiliasi antara Fakultas Ekonomi Perguruan Tinggi Syakhyakirti Palembang dengan Fakultas Universitas Indonesia oleh Drs. A.W.Tanya dan Prof. Dr.Sumitro Djojohadikusumo. Dengan surat Presiden Universitas Indonesia No.101/14/51 tanggal 21 Maret 1957, Fakultas Ekonomi Syakhyakirti diakui sama tingkatnya dengan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, baik mengenai nilai ujian maupun gelar dan ijazahnya. Hal mana dipertegas/dikuatkan oleh surat Biro Koordinator Perguruan Tinggi Kementerian PPK No.124492/BKPT/D tanggal 10 Nopember 1958. yang menyatakan ijazah Fakultas Ekonomi Perguruan tinggi Syakhyakirti tingkat sarjana muda diakui sama ijazah Universitas Negeri. ¹³³⁾

Pada tanggal 31 Oktober 1957 Perguruan Tinggi Syakhyakirti membuka Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, yang diresmikan pada tanggal 1 Nopember 1957, dan diketuai oleh Malikuswari Mochtar, SH. dengan jumlah mahasiswa 178 orang. Pada bulan Desember 1959 Peperda mengirim delegasi untuk menghadap Menteri PPK untuk membicarakan masalah penegerian Perguruan Tinggi Syakhyakirti, yang kemudian disusul pula dengan surat No. B-0069/SPP/60 tanggal 16 Januari ditujukan kepada Menteri PPK perihal Universitas untuk Sumatera Selatan. Sesuai dengan ajuran Pemerintah Pusat, dalam persiapan penegerian Perguruan Tinggi Syakhyakirti, maka dibentuk Dewan Kurator (23 Juni 1960) dan persiapan untuk membuka Fakultas Teknik oleh sebuah Panitia yang diketahui oleh Prof. Dr. Hazairin, SH dan Sekretarisnya R.A.Rani (13 Februari 1960). Pada tanggal 1 Oktober 1960 Fakultas Teknik tetapi peresmiannya bersamaan dengan Universitas Sriwijaya. ¹³⁴⁾

Pada tanggal 25 Juni 1960 sebuah delegasi terdiri dari dua rombongan menghadap Pemerintah Pusat. Rombongan pertama menghadap Presiden Soekarno, terdiri dari dr.AK Gani (Ketua Dewan Kurator), Kol.Harun Sohar (Ketua Peperda), Ahmad Bastari (Sub. Sum.Sel), rombongan kedua terdiri dari R.A. Rani (Ketua Persiapan Universitas Negeri), Drs.M.A.A.Nawawi (Wakil Ketua Panitia), Drs.Sjafran Sjamsuddin(Sekretaris Panitia) dan Lettu Mochtar Effendy, menghadap Menteri PPK. Pada tanggal 29 Oktober 1960 Perguruan Tinggi Syakhyakirti dinegerikan dengan nama Universitas

¹³³⁾Buku Petunjuk Universitas Sriwijaya, Palembang, 1978, hal 2 - 3.

¹³⁴⁾Dep. P & K Universitas Sriwijaya, Palembang, 1980, hal 16.

Sriwijaya berdasarakan Piagam Pendirian dan Peraturan Pemerintah No.42 tahun 1960, Lembaran Negara No.135 tahun 1960 tertanggal 29 Oktober 1960, dan bersamaan dengan itu telah terhadap Fakultas Ekonomi, Hukum dan Teknik. Dua hari kemudian peletakan batu pertama gedung Universitas Sriwijaya dan tanggal 3 Nopember 1960 Presiden Soekarno meresmikan berdirinya Universitas Sriwijaya di Palembang, sehingga dengan demikian Propinsi Sumatera Selatan mempunyai Universitas Negeri. ¹³⁵⁾

Pada tanggal 7 juli 1960 pembentukan Panitia Persiapan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang diketahui oleh R.A.Rani dan Sekretarisnya Amran Halim. Dengan SK.Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 6/1961 tanggal 13 Juni 1961 disyahkan Fakultas Keguruan dan Pendidikan (FKIP) Palembang sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi Negeri dan terhitung 1 Juli 1961 tergabung dalam Universitas Sriwijaya. Setelah itu Unsri membuka 2 buah Fakultas lagi, yaitu : Fakultas Kedokteran (1 Oktober 1962) berdasarkan SK.Menteri PTIP No. 688/A/1962 dengan drg. M.Isa sebagai Dekannya - Fakultas Pertanian (17 Agustus 1963) berdasarkan SK.Menteri PTIP No. 108/1963 tanggal 20 September 1963, masing - masing diresmikan oleh Sekjen Dep.PPK Prof.Dr.Soemantri Hardjoprakoso dan Menteri PTIP Prof. Dr.Ir.Tojib Hadiwijaya. ¹³⁶⁾

Pada tanggal 3 Januari 1963 FKIP Universitas Sriwijaya dilebur menjadi IKIP Bandung Cabang Palembang dengan SK.Presiden No. 1 tahun 1963 tanggal 1 Januari 1963. Tetapi kemudian diintegrasikan kembali ke dalam Unsri menjadi 2 Fakultas, yaitu Fakultas Keguruan dan Fakultas Ilmu Pendidikan berdasarkan SK.Menteri PTIP No. 161/1967 yang disempunakan dengan SK.No.1/1968. ¹³⁷⁾ Dewasa ini Universitas Sriwijaya memiliki 7 Fakultas, 2 buah Lembaga, dan sebuah Badan Perencanaan Universitas, yaitu sbb :

- | | |
|----------------------------|--|
| (1). Fakultas Ekonomi | (6). Fakultas Keguruan |
| (2). Fakultas Hukum | (7). Fakultas Ilmu Pendidikan |
| (3). Fakultas Teknik | (8). Lembaga Bahasa |
| (4). Fakultas Kedokteran | (9). Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. |
| (5). Fakultas Pertanian | (10). B P U. |

¹³⁵⁾ Buku Petunjuk Universitas Sriwijaya, hal 1 - 4.

¹³⁶⁾ Ibid, halaman 4.

¹³⁷⁾ Ibid, halaman 5 - 6

Fakultas Cabang, Extension, dan Fakultas Sore.

- (a). Fakultas Hukum/Pengetahuan Masyarakat dan Fakultas Ekonomi Cabang Lampung. berdirinya berdasarkan Keputusan Presiden Universitas Sriwijaya No. D.-40-7-1961 tertanggal 14 Februari 1961, dan memisahkan diri dari Universitas Sriwijaya pada tahun 1963.
- (b). Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi Cabang Bangka, berdirinya No. 4263/A/II/1965 tanggal 25 Nopember 1965 yo SK.Menteri PTIP 272/tahun 1965 tertanggal 29 Nopember 1965.
- (c). Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Sore : berasal dari Fakultas Extension yang didirikan berdasarkan SK.Menteri No. 77/Dirjend/PTIP yo SK.Rektor Universitas Sriwijaya No. 1645/B/IV/1967 tertanggal 25 Juli 1967, yang berlaku surut terhitung tanggal 1 Pebruari 1967. Dengan dikeluarkan SK.Rektor Universitas Sriwijaya No. 405/A/II/1969 tertanggal 1 Maret 1969, maka Fakultas Hukum Extension tersebut diubah menjadi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Sore.
- (d). Berdasarkan SK.Rektor Universitas Sriwijaya No. 1026/A/II/1968 tertanggal 22 Mei 1968, maka pada tanggal 1 Juli 1968 dibuka Fakultas Hukum Cabang Curup.
- (e). Berdasarkan SK.Rektor Universitas Sriwijaya No.2372/A/II/1968, maka dibuka Fkg-FIP cabang kuliah Lahat pada tanggal 2 Nopember 1968.
- (f). Berdasarkan SK.Rektor Universitas Sriwijaya No. 1026/A/II/1968, maka pada tanggal 6 Juli 1968 dibuka cabang kuliah Fakultas Hukum di Kayu Agung dan di Tanjung Pandan.
- (g). Pada tahun 1968 dibuka Fakultas Keguruan dan Fakultas Ilmu Pendidikan kuliah Sore.
- (h). Pada tahun 1970, dengan SK.Rektor Unsri No. 722/A/II/1970 trntanggal 31 Maret 1970, Fkg. dan FIP diperluas lagi dengan mengakui IKIP Muara Enim. Sebagai Fkg-FIP Cabang Kuliah Muara Enim.¹³⁸⁾
- (i). Fakultas Ekonomi Extension dan PAAP :
 - Fakultas Ekonomi Extension berdiri tahun 1965 berdasarkan SK. Menteri PTIP No. 263/tahun 1965 tertanggal 22 Nopember 1965.
 - PAAP berdiri tahun 1976 merupakan peleburan dari AAN berdasar

138) Ibid, halaman 5 - 116.

kan Instruksi Ditjend. PT. Dep. P dan K tanggal 3 - 5 - 1976 No.489/ Set/1976.

(j). P.A.T. : pada Fakultas Teknik terdapat mahasiswa kuliah sore, yaitu PAT yang merupakan peleburan dari A.T.N. berdasarkan Instruksi Dirjend. PT Dep. P dan K No. 0489/Sep/1976 tertanggal 3 - 5 - 1976.

Mengingat efektivitas dari point - point (a) sampai (j) tersebut di atas maka akan ditinjau kembali mengingat keputusan Presiden RI No. 42/tahun 1972 yo Instruksi Presiden No. 18/1978. ¹³⁹⁾

Jumlah Mahasiswa Universitas Sriwijaya.

Jumlah mahasiswa di lingkungan Universitas Sriwijaya dalam tahun Akademis 1979/1980 adalah 8054 orang dengan perincian sebagai berikut :

(a). Fakultas Ekonomi Pagi dan Sore	1372 orang
Fakultas Ekonomi Bangka dan PAAP	391 orang
(b). Fakultas Hukum Pagi dan Sore dan Bangka	1379 orang
(c). Fakultas Teknik dan PAT	1891 orang
(d). Fakultas Kedokteran	474 orang
(e). Fakultas Pertanian	400 orang
(f). Fakultas Keguruan Pagi dan Sore	1280 orang
(g). Fakultas Ilmu Pendidikan Pagi dan Sore	642 orang
(h). Program D1	225 orang

J U M L A H = 8054 orang. ¹⁴⁰⁾

Lulusan (Out put).

Sejak berdirinya Universitas Sriwijaya sampai sekarang meluluskan Sarjana Muda dan Sarjana Lengkap, yaitu dari tahun 1963 s/d 1980 sbb : Sarjana Muda 1227 orang dan Sarjana Lengkap 1385 orang dengan perincian sebagai berikut :

¹³⁹⁾Dep. P dan K Universitas Sriwijaya, Op cit, hal 19

¹⁴⁰⁾Ibid, halaman 8 - 9.

(a). Alumni Sarjana Muda :

- Fakultas Keguruan = 755 orang.
- Fakultas Ilmu Pendidikan = 472 orang.

(b). Alumni Sarjana Lengkap :

- Fakultas Ekonomi = 332 orang.
- Fakultas Hukum = 304 orang.
- Fakultas Teknik = 159 orang.
- Fakultas Kedokteran = 332 orang.
- Fakultas Pertanian = 96 orang.
- Fakultas Keguruan = 97 orang.
- Fakultas Ilmu Pendidikan = 65 orang.¹⁴¹⁾

TABEL. XIX

Kedaaan Tenaga Pengajar Universitas Sriwijaya 1980.

T A H U N	Tetap Gol. III/a ke atas	Tetap Gol. II/b ke atas	T. Tetap Gol. III/a ke atas	T. Tetap 12 / a ke atas
F. Ekonomi	58	64	53	60
F. Hukum	39	40	22	29
F. Teknik	41	42	38	145
F. Kedokteran	150	157	14	190
F. Pertanian	52	62	46	55
F. Keguruan	73	83	53	59
F. Ilmu Pendidik an.	39	50	27	106
J U M L A H	462	502	260	677

SUMBER : Universitas Sriwijaya.

¹⁴¹⁾ Ibid, halaman 9.

Pimpinan / Rektorium Universitas Sriwijaya

- (1). 1960 - 1964 Presiden : drg. M. I s a
 Sekretaris : Drs. Sjafran Sjamsuddin
- (2). 1964 - Maret 1966 Rektor : drg. M. I s a
 P . R . I : Drs. Sjafran Sjamsuddin
 P . R . II : dr. A. Agus.
 P . R . III : Ir. Alting Panji Indra.
- (3). April 1966 s/d Agustus 1966
 Ketua Presidium : Amir Datuk Palinggih, SH.
 Anggota : Amrah Muslimin, SH
 dr. K.A. Sjamsuddin
 dr. Mustafa Abubakar
 Drs. Usman Gani
- (4). 1966 - 1967 Pejabat Rektor : dr. Noesmir
 P . R . I : dr. K.A. Sjamsuddin
 P . R . II : Amrah Muslimin, SH
 P . R . III : dr. Mustafa Abubakar
 dr. A. Karim Thado
- (5). 1968 - 1973 Rektor : H. Djuaini Mukti, MA
 P . R . I : dr. K. H. O. Gajahbata
 P . R . II : Amrah Muslimin, SH
 P . R . III : dr. K.A. Sjamsuddin
- (6). 1973 - 1978 Rektor : Prof. H. Djuaini Mukti, MA
 Sekretaris : Drs. Lipurnaim.
- (7). 1978 s/d sekarang Rektor : Drs. Sjafran Sjamsuddin
 P . R . I : Ir. Bakry Hamid
 P . R . II : Drs. M. Basir Kimin

P . R . III : dr. Mungguna Sasmitapura.¹⁴²⁾

Dekan - dekan Fakultas dalam lingkungan Universitas Sriwijaya sbb :

Dekan Fakultas Ekonomi	: Drs. Amiruddin
Dekan Fakultas H u k u m	: Toto Kasiha, . SH
Dekan Fakultas Teknik	: Ir. Machmud Hasjim, MME
Dekan Fakultas Kedokteran	: dr. A. Agus.
Dekan Fakultas Pertanian	: Ir. A. Rasyid Hanafiah
Dekan Fakultas Keguruan	: Drs. Zainal Abidin Gaffar
Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan	: Drs. Ichtiar, MED

Kampus Universitas Sriwijaya.

Kampus Unsri terletak di Bukit Besar atau Jalan Jaksa Agung R Suprpto. Luas tanah lokasi Unsri 300 Ha, dan yang telah dikuasai baru seluas 32 Ha Dalam rangka pengembangan peningkatan produktivitas Unsri, maka pada tanggal 13 Nopember 1978 telah ditetapkan dalam Keputusan Rapat Senat Rapat Senat Universitas Sriwijaya untuk memindahkan lokasi kampus UNSRI, karena di kampus yang sekarang tidak memungkinkan untuk menambah sara na fisik. Perlu diketahui bahwa Fakultas - fakultas dalam lingkungan UNSRI belum berada dalam lingkungan satu kampus. Di mes.

Perpustakaan.

Perpustakaan Pusat Universitas Sriwijaya merupakan satu unit perpustakaan Fakultas dan Lembaga dalam lingkungan UNSRI. Perpustakaan Pusat terletak di dalam kampus UNSRI dan menempati sebagian dari ruangan Aula, sementara menunggu gedung Perpustakaan yang baru yang sedang di bangun yang terletak di dalam kampus UNSRI. Sampai tahun 1980 mempunyai buku buah. Sebagai Kepala Perpustakaan sekarang ialah Dra. Chusaimah Diem Lembaga Bahasa.

Lembaga Penelitian dan Pengajaran Bahasa Universitas Sriwijaya (selanjutnya disebut Lembaga Bahasa UNSRI) didirikan pada tanggal 1 - 8 - 1970. Lembaga Bahasa UNSRI adalah suatu badan otonom setingkat fakultas dengan tugas - tugas pengajaran, penelitian dan pengabdian dalam bidang bahasa Adapun Direktornya yang sekarang Drs. Zulkarnain Mustafa.

¹⁴²⁾Ibid, halaman 1 - 2

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Perguruan Tinggi dengan Tridharmanya berkewajiban memberikan dharmanya kepada masyarakat berdasarkan amal ilmiah untuk dapat mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, dan melakukan kegiatan penelitian dalam usaha memelihara dan memajukan/mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada mulanya pengelolaan kegiatan - kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat pada Universitas Sriwijaya berada di bawah wewenang P.R.I. dan P.R. III. Baru kemudian sesuai dengan syukur organisasi UNSRI yang baru dan meningkatkan kegiatan dibentuk suatu Lembaga pada pertengahan tahun 1968. Pejabat Ketua LPPM UNSRI sekarang ialah Ir. Bochari Rachman MSc, sedangkan sebelumnya Drs. Usman G. sebagai Direkturnya 1978 - 1980.

Laboratory School.

Menyadari betapa pentingnya Laboratory School bagi Fakultas Keguruan dan Fakultas Ilmu Pendidikan UNSRI, maka pada tahun 1968 didirikan SMA.Fkg-FIP UNSRI, dan pada tahun 1975 dibuka pula SMP dan STK. SMA-nya dikelola oleh Fakultas Keguruan, sedangkan SMP dan STK dikelola oleh Fakultas Ilmu Pendidikan.

Program D₁ dan D₂ (Lihat pada laporan di muka).

b. Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah.

Untuk mengucapakan sejarah berdiri/perkembangan IAIN.Raden Fatah, tidak dapat terlepas dari dua buah Yayasan Islam di Sumatera Selatan, yang mempunyai andil besar dalam kehadiran sebuah Lembaga pendidikan Islam tinggi di daerah ini. Pada tahun 1958 di kota Palembang telah berdiri sebuah Yayasan Perguruan Islam Tinggi dengan Akte Notaris Nomor 49 tertanggal 16 Januari 1958 yang diketahui oleh Kyai H Rasjid Sidik dan sebagai Sekretarisnya ialah Husin Abdul Muin (sekarang Drs. Husin Abdul Muin). Yayasan Perguruan Islam Tinggi ini membuka sebuah Fakultas Hukum Islam dan Pengetahuan Masyarakat, dengan tempat kuliah di sebuah gedung pinjaman dari Yayasan Pembangunan Islam (ex Kantor Masyumi), yang sekarang menjadi kantor Partai Persatuan Pembangunan, terletak di jalan Jenderal

Sudirman No. 901 Palembang. ¹⁴³⁾

Pada tanggal 25 Mei 1961 Fakultas Hukum Islam dan Pengetahuan Masyarakat ini dinegerikan menjadi Fakultas Syari'ah IAIN Palembang Cabang dari IAIN Jogjakarta (sekarang bernama IAIN Sunan Kalijaga). Sebagai Dekan IAIN Palembang ini, K.H.Abubakar Bastari (25 Mei 1961 s/d Juli 1962), sedangkan sebagai Presiden Al - Jami'ah ialah Prof.R.H.A. Sunaryo, SH yang berdomisili di Jagyakarta. Tetapi sejak tanggal 1 Agustus 1963 IAIN Cabang Palembang ini berganti induk, menjadi Cabang IAIN Ciputat Jakarta (sekarang IAIN Syarif Hidayatullah). Sebagai Dekan ialah Prof. K.H.Ibrahim Husin (sejak tahun 1962), dan sebagai Rektor IAIN Ciputat Jakarta, Prof.Drs. Soenarja. Perlu diketahui bahwa bersamaan dengan dinegerikannya Fakultas Syari'ah Palembang ini (1961) diresmikan pula pendirian Sekolah Persiapan IAIN Al-Jami'ah Palembang dengan Direkturnya. ¹⁴⁴⁾

Disamping Yayasan Perguruan Islam Tinggi tersebut di atas di kota Palembang didirikan pula sebuah Yayasan Taqwa Sumatera Selatan pada tahun 1963 yang diketahui oleh Prof. K.H. Zainal Abidi Fikry dan pada tahun itu juga telah mendirikan Fakultas Tarbiyah di Palembang dengan Let. Kol. Drs. Hasbullah Bakry sebagai Dekan - M. Isa Sarul, MA sebagai Wakil Dekan - Drs.Hasanuddin sebagai Sekretaris, dan Jauhari BA sebagai Kepala Kantor.

Berdirinya Fakultas - fakultas Agama Islam di Kota Palembang sangat besar pengaruhnya terhadap umat Islam di daerah pedalaman, seperti Curup, Lahat dll. Dalam waktu yang hampir bersamaan (1963), atas desakan dari sebagian besar umat Islam terutama pemuka - pemuka masyarakat Islam di Curup, maka oleh Yayasan Taqwa Sumatera Selatan Cabang Curup, didirikan lah Fakultas Ushuluddin Curup yang dipimpin oleh Drs. Ahmad Zaidah Jauhari sebagai Dekan dan Drs.Djamaan Nur sebagai Wakil Dekan. Pada tahun 1964 dengan SK.Menteri Agama RI Nomor : 86 tahun 1964 Fakultas Ushuluddin Curup ini dinegerikan, dan berdasarkan SK.Menteri Agama RI Nomor 87 tahun 1964 menjadi bagian dari Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah. ¹⁴⁵⁾

¹⁴³⁾Panitia Dasawarsa IAIN Raden Fatah, Sepuluh Tahun IAIN Raden Fatah Palembang, Palembang, 1975, halaman 29.

¹⁴⁴⁾Ibid, Loc cit.

¹⁴⁵⁾Ibid, halaman 73 - 79.

Demikian pula di Lahat atas prakarsa para pemuda Islam daerah itu dan dengan dukungan Pemda Lahat, pada tahun 1964, yaitu sebelum lahirnya IAIN Raden Fatah di kota Palembang, didirikan Fakultas Ushuluddin di Lahat yang herstatus swasta dengan Drs. Kafrawi Rahim (Sekda Kabupaten Lahat) sebagai Dekan, Drs. A. Rasjid Ismail sebagai Wakil Dekan. Kemudian dengan SK. Menteri Agama RI No. 196 tahun 1968 tertanggal 20 Mei 1968, Fakultas Ushuluddin dari Yayasan Taqwa Lahat dinegerikan dengan Raden Fatah Cabang Lahat. Sebagai Dekan ialah Drs. M.Yamin Maris, sebagai Wakil Dekan merangkap Sekretaris ialah Drs. Saleh Bina.¹⁴⁶⁾

Pada tahun 1964, berdasarkan SK.Menteri Agama RI Nomor : 87 tahun 1964 tertanggal 13 Nopember 1964 diresmikanlah berdirinya Institut Agama Islam Negeri Al - Jami'ah Raden Fatah, sebagai IAIN yang menempati urutan keempat di Indonesia yang pada tahun 1964 berjumlah 14 buah. Upacara peresmian pembukaannya diadakan di gedung DPRD Propinsi Sumatera Selatan Jalan Kapten A. Rivai Palembang oleh Prof. K.H.Syaifuddin Zuhri selaku Menteri Agama RI. Pada saat peresmiannya IAIN Raden Fatah mengasuh 5 buah Fakultas dan sebuah Sekolah Persiapan IAIN Al-Jami'ah, yaitu :

- (1). Fakultas Syari'ah di Palembang
- (2). Fakultas Tarbiyah di Palembang
- (3). Fakultas Ushuluddin di Curup.
- (4). Fakultas Syari'ah di Jambi
- (5). Fakultas Tarbiyah di Tanjung Karang
- (6). Sekolah Persiapan IAIN Al- Jami'ah di Palembang.¹⁴⁷⁾

Tetapi mulai bulan Juli tahun 1967 Fakultas Syari'ah di Jambi melepaskan hubungan administratif dari IAIN Raden Fatah dengan diresmikannya IAIN Sultan Thaha Syaifuddin untuk wilayah Propinsi Jambi. Begitu pula halnya dengan Fakultas Tarbiyah di Tanjung Karang yang melepaskan diri dari IAIN Raden Fatah, karena diresmikannya IAIN Raden Intan di Propinsi Lampung. Meskipun 2 Fakultas tersebut melepaskan diri dari IAIN Raden Fatah, namun muncul pula 3 buah Fakultas baru dipangkunya.

¹⁴⁶⁾ Ibid, halaman 79.

¹⁴⁷⁾ Ibid, halaman 30.

- 1). Fakultas Ushuluddin Lahat yang telah disebut di muka
- 2). Fakultas Ushuluddin di Palembang, yang didirikan pada tahun 1967 di bawah naungan Yayasan Taqwa Sumatera Selatan, dan pada tahun 1968 dinegerikan berdasarkan SK.Menteri Agama RI No. 126 tahun 1968 dan menjadi bagian dari IAIN Raden Fatah.
- 3). Fakultas Syari'ah di Bengkulu didirikan pada tahun 1965 di bawah naungan Yayasan Taqwa Sumatera Selatan di Bengkulu, kemudian di negerikan berdasarkan SK.Menteri Agama RI No. 161 tahun 1970 tanggal 30 September 1970 dan menjadi bagian dari IAIN Raden Fatah.¹⁴⁸⁾

Lembaga Research dan Survey.

Lembaga Ilmiah pada suatu Perguruan Tinggi merupakan unit organisasi yang sangat penting dalam rangka pengembangan Ilmu Pengetahuan dan pengabdian Perguruan Tinggi dalam masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi). Dalam hubungan itulah, atas instruksi Rektor IAIN Raden Fatah No. 1 tahun 1969 dikeluarkan SK.Rektor No. II tahun 1969 yang untuk pertama kalinya membentuk Lembaga - lembaga :

(a). Lembaga Ilmiah (b). Lembaga Dakwah (c) Lembaga Penerbitan. yang dengan SK. Rektor IAIN Raden Fatah No. III Th. 1970 disederhanakan menjadi Lembaga Ilmiah dan Lembaga Penerbitan. Kemudian berkeinginan dengan keluarnya SK.Menteri Agama RI No. 105 Tahun 1972 tentang IAIN, maka Lembaga Ilmiah dan Penerbitan diganti dengan nama Lembaga Research dan Survey IAIN Raden Fatah.¹⁴⁹⁾

Sekolah Persiapan IAIN Raden Fatah.

Disamping Fakultas - fakultas serta Lembaga Research dan Survey tersebut di atas, IAIN Raden Fatah juga mengasuh Sekolah - sekolah Persiapan, sampai tahun 1975 terdapat 7 buah Sekolah Persiapan dan sebuah Inspektorat Sekolah Persiapan, yaitu :

- 1) Sekolah Persiapan IAIN di Palembang didirikan berdasarkan SK.Men

¹⁴⁸⁾ Ibid, halaman 79 - 91

¹⁴⁹⁾ Ibid, halaman 59 - 60

- teri Agama RI No. 87 Tahun 1963 yang mempunyai daya surut sampai 1 September 1961.
- 2). Sekolah Persiapan IAIN di Curup, dinegerikan berdasarkan SK.Menteri Agama RI No. 87 Tahun 1968 tanggal 23 April 1968. Sebelum dinegerikan sekolah ini merupakan SLA Swasta yang didirikan pada tahun 1963 di bawah naungan Yayasan Taqwa Sumatera Selatan Perwakilan Curup.
 - 3). Sekolah Persiapan IAIN Lahat, dinegerikan dengan SK.Menteri Agama RI No. 109 Tahun 1968 tanggal 20 Mei tahun 1968. Sebelum dinegerikan Sekolah ini merupakan SLA Swasta yang diasuh oleh Yayasan Pendidikan Islam di Lahat. Pada tahun 1972 lokasi sekolah ini dipindahkan ke Pagar Alam dengan SK.Rektor IAIN Raden Fatah No. VI Tahun 1972 tanggal 5 April 1972, karena situasi daerah Lahat sulit untuk Perkembangan lembaga pendidikan ini.
 - 4). Sekolah Persiapan IAIN Muara Enim, didirikan berdasarkan SK. Menteri Agama RI No. 125 Tahun 1968 tanggal 15 Juni 1968.
 - 5). Sekolah Persiapan IAIN Kayu Agung, yang dinegerikan berdasarkan SK. Menteri Agama RI No. 257 Tahun 1968 tanggal 30 Nopember 1968.
 - 6). Sekolah Persiapan IAIN Baturaja, didirikan pada tahun 1967 atas usaha swasta. Sekolah ini dinegerikan berdasarkan SK.Menteri Agama RI No. 127 Tahun 1969 tanggal 7 - 10 - 1969, tunduk di bawah IAIN Raden Fatah.
 - 7). Sekolah Persiapan IAIN Lubuk Linggau, dinegerikan berdasarkan SK. Menteri Agama RI No. 215 Tahun 1970 tanggal 14 - 9 - 1970. Sesudah itu tak pernah lagi dibuka sekolah baru.¹⁵⁰⁾

Inspektorat Sekolah Persiapan.

Inspektorat Sekolah Persiapan IAIN Raden Fatah dibentuk oleh Rektor IAIN Raden Fatah dengan SK. Rektor IAIN Raden Fatah No. III tahun 1968 tanggal 1 - 2 - 1968 dengan Drs. Poesponegoro (Wakil Rektor II) sebagai Pejabat Sementara Inspektur (1 Februari s/d 16 Mei 1968). Pada saat pembentukannya ini Sekolah Persiapan IAIN Raden Fatah baru ada sebuah, yaitu Sekolah Persiapan Palembang.

¹⁵⁰⁾ Ibid, halaman 92 - 108

Lembaga Bahasa.

Lembaga Bahasa pada suatu Perguruan Tinggi tidak kurang pentingnya, oleh karena itu berdasarkan SK. Rektor IAIN Raden Fatah No. IV tahun 1975, IAIN Raden Fatah mendirikan sebuah Lembaga Bahasa, yang diperlukan dengan SK. Dirjen Bimas Islam No. Kep/B.V/237/1976 tanggal 29 - 11 - 1976.

Perpustakaan.

Perpustakaan IAIN Raden Fatah sejak diresmikan sampai tahun 1979 memiliki buku - buku ilmiah sebanyak 12.643 buah dengan pengunjung pada tahun 1980 rata - rata setiap bulan 800 orang mahasiswa dari Fakultas Induk. Adapun perpustakaan IAIN Raden Fatah dibangun dengan biaya Peta Nasional tahun 1977/1978 dengan luas 350 M2. Buku - buku di perpustakaan itu terdiri dari buku pelajaran agama Islam, pelajaran umum dan buku-buku sosial budaya.¹⁵¹⁾

Kampus IAIN Raden Fatah.

Pada saat IAIN Raden Fatah diresmikan belum memiliki kampus. Tempat kuliah dari kedua Fakultas Induk yang di Palembang masih terpisah pada gedung pinjaman. Demikian juga Fakultas - fakultas yang terdapat di daerah pedalaman kuliah di gedung pinjaman. Baru pada tahun 1966, berdasarkan SK.Gubernur Prop. Sumatera Selatan No. 0/151/1966 tanggal 4 Juni 1966, sesuai dengan Keputusan Pelelrada Sumatera Bagian Selatan tanggal 10 Mei 1966, IAIN Raden Fatah mendapat Kampus berstatus hak pakai dengan luas areal menurut situasi peta Bulan Agustus 1974 dari Kadaster Palembang adalah 335.000 M2. statusnya milik Pemerintah RI, yang mulai ditempati pada tanggal 13 Juni 1966. Di dalam Kampus tersebut terdapat :

- (1). Gedung Kuliah 4 buah : Untuk Fakultas Syari'ah - Ushuluddin - Tarbiyah - Sekolah Persiapan, serta Aula/ruang kuliah besar.
- (2). Perumahan dosen/karyawan, terdiri dari : 5 buah kopel (ex Cina) - 4 buah rumah kelas 7, yang dibangun atas biaya Pelita Regional merupakan bantuan Gubernur Sumatera Selatan - bedeng 3 buah yang ditem-

¹⁵¹⁾ Ketua Senat/Rektor IAIN Raden Fatah, Laporan Pada Peringatan hari Jadi ke - XV IAIN Raden Fatah dan Wisuda ke - V, Bengkulu, 1979, hal 9-12

pati 14 kepala keluarga - sebuah rumah type B seluas 120 M2 untuk do
sen Bantuan.

- (3). Asrama mahasiswa, yang baru dibangun pada 4 Juni 1966 untuk me-
nampung mahasiswa/Mahasiswi/pelajar Sekolah Persiapan, asrama putri
dapat menampung 200 orang, asrama putra 100 orang.
- (4). Perkantoran/Lembaga Bahasa : Kantor Pusat berlantai 2 dengan luas
600 M2, yang dibangun atas dana Pelita I 1977/1978. Sedangkan kan-
tor - kantor Fakultas Induk dan Lembaga Bahasa menempati gedung
bekas milik Cina terdiri dari 8 lokal yang luasnya 8 x 65 m.
- (5). Gedung Perpustakaan, yang dibangun dengan biaya Pelita tahun 1977/
1978, dengan luas 350 M2.
- (6). Mesjid DARUL MUTTAQIEN, yang dibangun atas biaya Pelita I dan
di Resmikan pemakaiannya pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 1975
oleh Gubernur Sumatera Selatan.
- (7). Aula IAIN yang lama digunakan untuk Taman Kanak - kanak Purwani-
da IAIN Raden Fatah. ¹⁵²⁾

Rektor IAIN Raden Fatah.

- 1). Prof. K.H. Ibrahim Husen (13 Nopember 1964 s/d 24 Septembe 1965)
- 2). K.H. Ahmad Syajari (24 September 1965 s/d 31 Maret 1966)
- 3). Brigjen. Inf. H. Abu Yasis Bustomi (31 Maret 1966 s/d 19 Juni 1967)
- 4). Rof. K. H. Zainal Abidin Fikry (19 Juni 1967 s/d 8 September 1972)
- 5). K. H. M. Isa Sarul, MA (8 September 1972 sampai tahun 1977)
- 6). Prof K. H. Zainal Abidin Fikry (tahun 1977 sampai sekarang).

Tenaga Dosen/Ass. Dosen (Tenaga Edukatif) tahun 1980.

Dari 5 Fakultas dan sebuah Lembaga Bahasa IAIN Raden Fatah dewasa
ini mempunyai tenaga edukatif sebagai berikut :

- | | | |
|------|--|-----------|
| a). | Dosen / Ass. Dosen Tetap | 67 orang |
| b). | Dosen / Ass. Dosen Tidak Tetap | 112 orang |
| c). | Guru Besar Tetap | 1 orang |
| d). | Guru Besar Tidak Tetap | 8 orang |

J U M L A H 188 orang

¹⁵²⁾Ibid, halaman 11 - 12.

Tenaga Administrasi tahun 1980.

Dewasa ini IAIN Raden Fatah mempunyai 170 orang tenaga administrasi yang terdiri dari :

Golongan I	63 orang
Golongan II	81 orang
Golongan III	26 orang

J U M L A H..... 170 orang¹⁵³⁾

Dalam laporan Rektor tahun 1979 dan tahun 1980 " Dalam Memperingati Hari Jadi ke - XV dan Wisuda ke - V dan " Dalam Memperingati Hari Jadi ke - XVI dan Wisuda ke - VI IAIN Raden Fatah ", IAIN Raden Fatah pada saat ini mengasuh 5 buah Fakultas, yaitu 3 buah Fakultas Induk dan 2 buah Fakultas Cabang. Jumlah mahasiswa dari kelima Fakultas tersebut pada tahun 1979 sebanyak 1019 orang, dan pada tahun 1980 sebanyak 1103 orang.

T A B E L. XX

Jumlah mahasiswa IAIN Raden Fatah tahun 1979 - 1980

Nomor	F A K U L T A S	T A H U N	
		1979	1980
1.	Syari'ah Palembang	382	374
2.	Tarbiyah Palembang	311	348
3.	Ushuluddin Palembang	142	165
6.	Ushuluddin Curup	68	67
7.	Syari'ah Bengkulu	116	149
J U M L A H		1019	1103

SUMBER : IAIN Raden Fatah Palembang

¹⁵³⁾Rektor IAIN Raden Fatah, Laporan Pada Peringatan Hari Jadi ke XVI dan Wisuda ke VI, Palembang, 1980, halaman 10.

T A B E L. XXI

Jumlah Alumni Sarjana Lengkap IAIN Raden Fatah 1971 - 1980

FAKULTAS	T A H U N			JUMLAH
	1971-1978	1979	1980	
Syari'ah Palembang	56	40	28	124
Tarbiyah Palembang	27	6	28	61
Ushuluddin Palembang	25	9	6	40
Ushuluddin Curup	4	-	-	4
J U M L A H	112	55	62	229

SUMBER : IAIN Raden Fatah Palembang.

Menurut Laporan Ketua Senat tahun 1979 tersebut di atas alumni Sarjana Muda tahun 1979 sebanyak 97 orang dengan perincian sebagai berikut :

- 1). Fakultas Syari'ah Palembang 30 orang
- 2). Fakultas Tarbiyah Palembang 23 orang
- 3). Fakultas Ushuluddin Palembang 8 orang
- 4). Fakultas Ushuluddin Curup 18 orang
- 5). Fakultas Syari'ah Bengkulu 18 orang

J U M L A H 97 orang

Dikatakan pula dalam laporan tersebut, sampai tahun 1979 (1962 - 1979) IAIN Raden Fatah telah menghasilkan Sarjana Muda sebanyak 1202 orang, sedangkan laporan tahun 1980 belum masuk.

c. Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Palembang.

Pada tanggal 1 juni 1965 di Kotamadya Palembang didirikan sebuah Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) berdasarkan SK.Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 1965 tanggal 15 Mei 1965. Adapun latar belakang yang mendorong pendiriannya ialah untuk membentuk kader - kader Pimpinan Pemerintahan Tingkat Menengah guna memenuhi kebutuhan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan. dan Bengkulu.¹⁵⁴⁾

Jumlah mahasiswa Akademi Pemerintahan Dalam Negeri Palembang ini mula - mula sebanyak 80 orang, yang terdiri dari :

- 1). Tingkat I, berijazah SMA. Negeri sebanyak 40 orang
- 2). Tingkat II, berijazah K.D.C. sebanyak 40 orang

Sedangkan jumlah tenaga pengajar (dosen) sebanyak 12 orang, yang terdiri dari 2 orang dosen tetap dan 10 orang dosen tidak tetap.

Gedung tempat kuliah APDN Palembang ini terletak di Jalan Pendawa 2 Ilir Palembang, yaitu milik Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, yang sebelumnya dipergunakan untuk tempat Kursus Dinas C (K.D.C.) dan kursus Kuangan Daerah (KKD).

Pada tahun 1980 ini jumlah mahasiswa Akademi Pemerintahan Dalam Negeri Palembang sebanyak 83 orang, yang terdiri dari :

- 1). Tingkat II sebanyak 27 orang
- 2). Tingkat III sebanyak 56 orang

Adapun jumlah tenaga pengajarnya sebanyak 20 orang, yang terdiri dari 4 orang dosen tetap dan 16 orang dosen tidak tetap. Direktur APDN Palembang yang sekarang ialah Drs. Idrus Achmad. Kurikulum yang diterapkan pada APDN Palembang ini ialah Kurikulum APDN Palembang tahun 1980. Menurut Drs. Idrus Achmad lama pendidikan APDN Palembang ini ialah 3 tahun.

d. Akademi Administrasi Niaga Negeri (AANN) Palembang.

Pada tanggal 1 Oktober 1964 dengan disponsori oleh Yayasan Panca Palembang bersama - sama Perwakilan Dep. P dan K Propinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, berdirilah Akademi Administrasi Niaga Yayasan Pancasila Palembang di kota Palembang.

¹⁵⁴⁾

Wawancara dengan Drs. Idrus Achmad, direktur APDN, 22 - 11 - 1980.

Jumlah mahasiswa mula - mula sebanyak 379 orang dengan tenaga pengajar sebanyak 27 orang, yang terdiri dari para Sarjana yang berdomisili di kota Palembang yang semuanya berstatus tenaga tidak tetap.¹⁵⁵⁾

Dengan rekomendasi dari Gubernur Sumatera Selatan dan Kepala Perwakilan Dep. P dan K Propinsi Sumatera Selatan kepada Menteri P dan K, maka AAN Yayasan Pancasila Palembang terhitung sejak tanggal 1 Januari 1965 telah menjadi Akademi Administrasi Niaga Negeri berdasarkan SK. Menteri P dan K No. 85 / B3 / Kedj tertanggal 19 Februari 1965 dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, dengan memiliki 2 Jurusan, yakni Kesekretariatan dan Akonting. Pada tanggal 17 Mei 1965 Menteri P dan K Ny. Hartati Marzuki datang meresmikan berdirinya AAN.Negeri di Palembang.

Oleh karena mahasiswa AAN.Negeri di seluruh Indonesia menginginkan agar pengurusan dan pembinaan AAN.Negeri diserahkan kepada Dir.Jen. Perguruan Tinggi, keinginan mana disalurkan melalui Ikatan Mahasiswa AAN seluruh Indonesia, yang telah mengadakan Muekernas sebanyak 3 kali untuk tujuan tersebut. Hasilnya ialah diterimanya kehendak mereka oleh Menteri P dan K, yaitu pembinaan AAN.Negeri ditempatkan di bawah Dir.Jen. Perguruan Tinggi dan akan dilaksanakan secara bertahap. Mulai Januari 1969 AAN.Negeri sepenuhnya di bawah Dir.Jen Perguruan Tinggi berdasarkan SK.Menteri P dan K RI No. 01/69 tertanggal 23 Januari 1969.¹⁵⁶⁾

Untuk meningkatkan mutu AAN.Negeri sebagai salah satu lembaga perguruan tinggi, Menteri P dan K RI dengan SK. No.0189/1970 tanggal 13 - 10 - 1970, menetapkan persyaratan minimal bagi AAN. Negeri di Indonesia, Status, Kurikulum, Staf Pengajar dan Perlengkapan material. Dengan sendirinya AAN yang ada tetapi tidak dapat memenuhi persyaratan minimal sesuai dengan ketentuan tersebut di atas akan dihapuskan. Sehubungan dengan maksud itulah Menteri P dan K menginstruksikan kepada para Koordinator Perguruan Tinggi Jakarta Raya telah ditetapkan " Tim Ahli Peninjauan AAN Negeri dalam lingkungan Koperti Jakarta Raya " dengan SK. No. 37/tahun 1970 tanggal 19 - 9 - 1970. Sesuai hasil peninjauan Tim tersebut, maka dengan SK. Menteri P dan K No. 0250/1970 tanggal 31 - 12 - 1970, di tetap

¹⁵⁵⁾ Drs. H. Mochtar Abubakar dan Drs. Mansur Rahman, Memorandum Akhir Tugas dan Laporan Phasing Out AAN, Negeri Palembang, 1977/1978, halaman 1 - 2

¹⁵⁶⁾ Ibid, halaman 4.

kan AAN.Negeri yang diberi hak hidup dan tetap di bawah lingkungan Dep. P dan K ada sebanyak 11 buah, termasuk AAN.Negeri Palembang.¹⁵⁷⁾

Untuk menertibkan Perguruan Tinggi Kedinasan dan sekaligus menyempurnakan pembinaan lembaga Perguruan Tinggi Negeri, maka dengan SK. Presiden RI No. 34/1972 tertanggal 18 - 4 - 1972, bahwa Menteri P dan K ber tugas dan bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan umum dan kejuruan. Untuk ini Dir.Jen Pendidikan Dep. P dan K dalam Raker para Direktur AAN. Negeri seluruh Indonesia tanggal 11 Agustus 1972 di Cibogo menyatakan, untuk tahap pertama akan dilaksanakan pengintegrasian Perguruan Tinggi Kedinasan dalam lingkungan Departemen P dan K lebih dulu (AAN,ATA, ABA), dan setelah itu baru Perguruan Tinggi Kedinasan di luar Dep. P dan K.

Sebagai tindak lanjut pernyataan Dir.Jen. Pendidikan di atas, keluarlah .

- 1). SK. Dir.Jen Pendidikan Dep. P dan K No. 21/Set/Kep/1972 tertanggal 11 - 10 - 1972 tentang Integrasi Perguruan Tinggi Kedinasan dalam lingkungan Dep. P dan K yang meliputi : proses dan prosedur pengambil alihan AAN, dan mulai tahun 1973 tidak menerima mahasiswa baru.
- 2). Pedoman pelaksanaan pengambil alihan diatur oleh Koordinator Pelaksanaan Pimpinan Harian Bidang Sarana Akademis Dir.Jen Pendidikan Dep. P dan K tanggal 15 - 11 - 1974 sebagai berikut :
 - Pelaksanaan pengambil alihan AAN dan ATN harus sudah selesai pada akhir tahun kuliah 1975.
 - Penyaluran tenaga - tenaga tetap AAN.Negeri dan ATN akan dilaksanakan menurut ketentuan dan persyaratan yang berlaku sesuai dengan hasil rapat antar Fakultas Ekonomi, Konsersium Science dan Teknologi serta Dir. Pendidikan Tinggi pada tanggal 6 dan 7 Mei 1974.
- 3). Program diploma Pendidikan Ahli Administrasi Perusahaan (PAAP) beserta kurikulum dan selebinya akan segera ditetapkan bersama dengan Konsersium Science dan Teknologi serta Sub Konsersium Ilmu Ekonomi.
- 4). Persiapan pelaksanaan program PAAP dan PAT harus sudah selesai selambat - lambatnnya pada akhir bulan Desember 1974.

¹⁵⁷⁾ Ibid, halaman 5,

- 5). Penerimaan mahasiswa baru program PAAP untuk tahun kuliah 1975 dan seterusnya dilakukan oleh dan menjadi tanggung jawab Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri yang bersangkutan dengan persyaratan - persyaratan yang akan ditetapkan bersama dengan pimpinan AAN,Negeri setelah kurikulum dan silabus tersebut pada 3) selesai disusun.

Sebelum pengambil alihan dilaksanakan, turunlah SK.Menteri Nomor : 44328/C/1/1978 tanggal 13 - 10 - 1975, tentang penunjukkan Caretaker Ketua dan Sekretaris pada AAN.Negeri Palembang. Sedangkan serah terima jabatan dari Direktur kepada Caretaker Ketua AAN.Negeri Palembang baru dilaksanakan pada tanggal 1 April 1976, yaitu dari Drs. Mansur Rahman (Direktur AAN.Negeri Palembang) kepada Drs. Mochtar Abubakar sesuai dengan Surat Kawat Dit. Pembinaan Sarana Akademis. Dan pada tanggal 3 April 1976 telah dilaksanakan pula serah terima dari Sekretaris AAN.Negeri Palembang dari Drs. Arsual Adam kepada Caretaker Sekretaris Drs. Mansur Rahman.¹⁵⁸⁾ Dengan demikian berakhirlah AAN.Negeri Palembang setelah di lebur menjadi PAAP dan diintegrasikan ke dalam Fakultas Ekonomi USRI.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya Caretaker Ketua dan Sekretaris berusaha agar :

- 1). Penyelesaian studi mahasiswa sedapat mungkin diselesaikan dengan se baik - baiknya.
- 2). Penyaluran pegawai, baik administratif maupun edukatif, tidak sampai merugikan mereka dan pengusulan pegawai harian/honoror yang telah berjasa untuk dapat diangkat menjadi pegawai negeri. Sebagian besar mereka disalurkan ke UNSRI, dan terhitung mulai tanggal 1 April 1977 menjadi pegawai UNSRI.
- 3). Penyaluran inventaris diselenggarakan dengan secermat - cermatnya¹⁵⁹⁾

Gedung/tempat kuliah.

Sejak berdiri sampai pengambil alihan, AAN.Negeri Palembang tidak pernah memiliki gedung sendiri, sehingga selalu memakai gedung pinjaman, telah beberapa kali berpindah - pindah dari pinjaman yang satu ke yang lain.

¹⁵⁸⁾ibid, halaman 30 - 51.

¹⁵⁹⁾ibid, halaman 30 - 32.

Pada mulanya berdiri - dari berstatus swasta sampai berstatus Negeri AAN. Palembang ini kuliah di SMEA.Negeri I pada sore hari Kemudian sejak tanggal 4 Jun 1966 pindah ke gedung ex SKOMDAK VI Sumatera Selatan di Jalan Merdeka, kuliah masih dilakukan pada sore hari. Akhirnya karena gedung SKOMDAK VI akan dibongkar, dengan izin Gubernur Sumatera Selatan tanggal 19 Januari 1976 No. 1 / 1 / 9 / 1976 AAN.Negeri Palembang menempati gedung ex Kim " Sahabat " di komplek Sriwijaya Fair, yang sebenarnya telah ditempati sejak tanggal 15 - 9 - 1975.

Alumni AAN. Negeri Palembang.

Menurut Drs. Zainin Wahab seorang dosen pada AAN.Negeri Palembang dan sekarang menjadi dosen Fkg - UNSRI, AAN.Negeri Palembang telah menghasilkan 678 orang sarjana Muda dengan perincian sebagai berikut :

- 1). Jurusan Akonting sebanyak 288 orang
- 2). Jurusan Kesekretariatan sebanyak 325 orang
- 3). Jurusan Perbankan sebanyak 65 orang

Lulusan yang pertama ialah pada tahun 1967 dan yang terakhir ialah pada tahun 1977, sedangkan jurusan Perbankan hanya meluluskan 2 angkatan.

T A B E L. XXII

Perkembangan Jumlah Mahasiswa AAN.Negeri Palembang
Tahun 1965 - 1976

T A H U N	J U M L A H		K E T E R A N G A N
	Smt. I	Smt II	
1965	379	318	Sistim Semester. Diterima Smt. II 146 orang
1966	326	281	Sistim Tk, Kur. tetap Smt - di terima 121 orang.
1967	328	291	Diterima 115 orang
1968	417	369	Diterima 191
1969	478	486	Diterima 193
1970	337	337	Tidak menerima mahasiswa baru.
1971	496	496	Diterima 271 orang. Mulai Program mayor dan minor.
1972	565	565	Diterima 228 orang
1973	265	265	Tidak menerima mahasiswa baru.
1974	349	349	Diterima 146 orang
1975	101	101	Tidak menerima mahasiswa baru
1976	99	99	

SUMBER : Memorandum Akhir Tugas dan laporan Phasing - Out AAN.Negeri Plg.

Pimpinan (Direktur / Caretaker) AAN.Negeri Palembang.

Di dalam Memorandum Akhir Tugas dan Laporan Phasing - Out AAN. Negeri Palembang disebutkan personalia pimpinan AAN.Negeri Palembang sebagai berikut :

- 1). Drs. A.L. Syamsuddin, Direktur (1 - 1 - 1965 s/d 1 - 7 - 1966)
 - 2). Drs. Mansur Rahman, Direktur (1 - 7 - 1966 s/d 1 - 4 - 1976)
 - 3). Drs. Mochtar Abubakar, Caretaker (1 - 4 - 1976 s/d 1 - 4 - 1977)
- e. Akademi Teknologi Negeri Palembang (ATN)/P.A.T.

Pada bulan September 1965 di kota Palembang telah didirikan sebuah Kursus Dinas Pendidikan Teknologi (KDPT) yang disponsori oleh Drs. Abdullah. Mahasiswa mula - mula berjumlah 120 orang yang terdiri dari tiga jurusan, yaitu : jurusan Mesin, jurusan Electro, dan jurusan Sipil (Bangunan). Maksud dari pada pendirian KDPT ini ialah untuk meningkatkan mutu tenaga guru Teknik di daerah ini. Tenaga pengajarnya mula - mula terdiri dari 12 orang, sedangkan tempat kuliahnya yang pertama ialah di gedung ST.Negeri di Jalan Pagar Alam atau Jalan Mayor Ruslan Palembang.¹⁶⁰⁾

Pada bulan Januari 1967 Kursus Dinas Pendidikan Teknologi Palembang ini berubah menjadi Akademi Pendidikan Teknologi Negeri (APTN) dan tempat kuliahnya sejak tahun 1967 itu pindah ke bekas SEKOMDAK di Jalan Merdeka di sebelah Kantor Pos Besar. Baik Kursus Dinas Pendidikan Teknologi (September 1965 - Januari 1967) maupun Akademi Pendidikan Teknologi Negeri (Januari 1967 - Januari 1970) berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar.¹⁶¹⁾

Pada bulan Januari tahun 1970 Akademi Pendidikan Teknologi Negeri berubah pula menjadi Akademi Teknologi Negeri (ATN). Pada tahun 1974 Akademi Teknologi Negeri ini dilebur menjadi Pendidikan Ahli Teknologi (PAT) dan PAT sendiri diintegrasikan ke dalam Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Palembang. Tetapi mahasiswa ATN Tk. II dan Tk. III harus diselesaikan studinya, dan pada tahun 1976 barulah ATN habis. Tempat kuliah sejak tahun 1975 pindah ke Kampus Sriwijaya Fair Palembang.

Baik Akademi Teknologi Negeri maupun Pendidikan Ahli Teknologi berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pendidikan Ahli Teknologi (PAT) bertujuan sebagai berikut :

- 1). Mengisi kekurangan serta menyempurnakan mutu pendidikan teknik.
- 2). Memberi kesempatan kepada para lulusan STM untuk memperdalam ilmu pengetahuan bidang keteknikannya dalam tingkat Akademis.

¹⁶⁰⁾Wawancara dengan Drs. Abdullah ex dosen ATN (yang disalurkan ke Fkg - UNSRI Palembang), 5 Desember 1980.

¹⁶¹⁾Wawancara dengan M. Ali (Bag. Pengajaran), 6 Desember 1980.

- 3). Mendidik tenaga - tenaga pelaksana tingkat Akademis, yang langsung dapat bekerja pada masyarakat dengan tidak mengabaikan mutu keilmuannya.

Sejalan dengan tujuan tersebut di atas, maka Pendidikan Akhli Teknologi (PAT) Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya, bertujuan untuk mendidik, membina mahasiswa - mahasiswa, terutama ditujukan pada segi praktis, dengan maksud supaya :

- 1). Lulusan PAT dapat mengisi kekurangan - kekurangan tenaga kerja antara tenaga sarjana dengan tenaga menengah.
- 2). Lulusan PAT dapat langsung menyumbangkan tenaganya kepada masyarakat dan Negara. ¹⁶²⁾

Lama pendidikan Pendidikan Akhli Teknologi ini ialah tiga tahun yang terbagi menjadi 6 semester. Penghargaan resmi bagi mahasiswa yang lulus ujian Sarjana Muda Lengkap, diberi hak untuk menggunakan sebutan " Akhli Teknologi " dan dalam bidang kepegawaian dimasukkan dalam golongan gaji Bakaloret seperti tersebut dalam PGPS 1968.

PAT Fakultas Teknik UNSRI terdiri dari tiga jurusan : jurusan Mesin, Jurusan Electro, dan Jurusan Sipil, dan PAT ini diasuh oleh tenaga - tenaga yang berasal dari Fakultas dalam lingkungan Universitas Sriwijaya dan tenaga - tenaga dalam lingkungan Kotamadya Palembang, yang pada tahun 1978 berjumlah 41 dosen dan 23 orang asisten dosen.

f. Akademi Perawat (AKPER) Jurusan Umum Palembang.

Pada tahun 1968 di Kotamadya Palembang didirikan sebuah Akademi Perawat (AKPER) Jurusan Umum berdasarkan SK.Menteri Kesehatan RI No. 73/PEND tanggal 12 Desember 1967. Adapun latar belakang dibukanya Akademi Perawat ini ialah untuk memberikan pelayanan kesehatan di seluruh pelosok tanah air Indonesia. Jumlah mahasiswa mula - mula sebanyak 50 orang, sedangkan tenaga pengajarannya ialah diperbantukan dari Departemen Kesehatan RI c/q Pusdiklat (Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Kesehatan Republik Indonesia), yaitu : pada tahun 1968 sebanyak 15 orang, dan pada tahun 1969 sebanyak 24 orang. ¹⁶³⁾

Gedung tempat kuliah Akademi Perawat Palembang ini ialah di Jalan Merdeka No. 10 A. yang merupakan bantuan dari Departemen Kesehatan RI,

¹⁶²⁾Buku Petunjuk PAT Fakultas Teknik UNSRI, Palembang, 1978, halaman 1 - 3

¹⁶³⁾Wawancara dengan Cipto Utomo Ramli Bag. Pengajaran, Desember 1980.

yaitu berupa 2 buah lokal tempat kuliah dan sebuah Kantor Sekretariat Pendidikan. Adapun tempat praktek dari Mahasiswa Akademi Perawat Palembang ini ialah di rumah Sakit dr. A.K. Gani Palembang, yang oleh masyarakat daerah ini dikenal dengan nama Rumah Sakit Benteng, di Rumah Sakit PN. Pertamina Plaju, di Puskesmas Kotamadya Palembang, di Balai Lab. Tk. I Palembang. Sedangkan K.K.N. (Kerja Lapangan) dilakukan di Rumah Sakit - Rumah Sakit di Kabupaten dan di Puskesmas di Kecamatan.

Kurikulum Akademi Perawat (AKPER) ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan c/q Pusdiklat Departemen Kesehatan Republik Indonesia sbb :

- Tingkat I terdiri dari 24 mata kuliah
- Tingkat II terdiri dari 25 mata kuliah
- Tingkat III terdiri dari 11 mata kuliah

Sebagai direktur Akademi Perawat Palembang yang pertama ialah dr. H. Mustafa Abubakar, yang menjabat sejak tahun 1968 sampai dengan tahun 1980. Pada bulan Agustus tahun 1980 digantikan oleh Drs. H. Agustjik sampai sekarang. Dalam perkembangannya sampai sekarang Akademi Perawat Jurusan Umum Palembang ini memiliki 4 buah lokal tempat kuliah, asrama putra dan asrama putri, yang merupakan bantuan dari Pemda. Propinsi Sumatera Selatan. Disamping itu Akademi Perawat Palembang ini telah pula memiliki sebuah Perpustakaan. Jumlah tenaga pengajar (dosen) pada saat ini sebanyak 62 orang yang terdiri dari 12 dosen tetap, dan 50 orang dosen Luar Biasa (tenaga honorer).¹⁶⁴⁾

¹⁶⁴⁾ Wawancara dengan Cipto Utomo Ramli, BSc, Desember 1980

TABEL XXIIIJumlah Mahasiswa AKPER Palembang Tahun 1980/1981

TINGKAT	WANITA	PRIA	JUMLAH	KETERANGAN
I	49	13	62	Junior Senior
II	29	10	39	
III	20	9	29	
III	46	12	58	
JUMLAH	144	44	188	

SUMBER : Kantor Sekretariat Akademi Perawat Palembang.

TABEL XXIVJumlah Alumni Akademi Perawat Palembang 1972 - 1980

TAHUN	ANGKATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		PRIA	WANITA	
1972	I	9	7	16
1973	II	11	17	28
1974	III	20	18	38
1975	IV	21	20	41
1976	V	24	23	47
1977	VI	15	25	40
1978	VII	32	43	75
1979	VIII	20	47	67
1980	IX	16	46	62
JUMLAH		168	246	414

SUMBER : Kantor Sekretariat Akademi Perawat Palembang.

g. Akademi Koperasi Palembang (AKOR).

Seperti telah diketahui bahwa pada tahun enam puluhan Pemerintah Orde Lama sedang giat menggalakkan Koperasi sesuai dengan UUD 1945 pasal 33, yang baru saja dicanangkan melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 - ekonomi terpimpin mulai diterapkan, diaman koperasi sebagai alat penyalur. Pemerintah sendiri pada saat itu aktif menggiatkan koperasi dengan rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana Delapan Tahun (Pemasbede) tahun 1961 - 1969, seperti dibentuknya " Badan Penggerak Koperasi " (Babangkop) " Kesatuan Organisasi Koperasi Seluruh Indonesia (KOKSI) dan " Tim Penerangan Koperasi " (TRK). Departemen Transmigrasi Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa (Transkopemada) sendiri telah mendirikan sekolah Koperasi, yaitu Sekolah Koperasi Menengah Atas (SKOPMA) dan Akademi Koperasi (AKOP).¹⁶⁵⁾

Sehubungan dengan itu di kota Palembang pada 1965 didirikan Akademi Koperasi Negeri, di bawah naungan Dirjen Transkopemada. Lama pendidikannya 3 tahun, dan tempat kuliahnya ialah di Jalan Kapten A.Rivai Palembang. Sebagai Direktur Akademi Negeri Palembang ialah Drs. Hamdan Zainuri dan sebagai Sekretarisnya ialah Drs. Samsul Bahari Muda. Isi dari tiap - tiap Tingkat dari AKOP ini sekitar 40 orang.

Adapun tenaga pengajarnya antara lain : Drs. Hamdan Zainuri, Drs. Samsul Bahari Muda, Drs. Sahuddin Azis, Drs. Ibrahim HS, Drs. Ayub Akbar, Drs. Burhanuddin Kosmos, Sutrisno, Drs. Poerwadi, Syarkowi Sirod,SH.¹⁶⁶⁾

Pada tahun 1968 pembinaan / pengelolaan Akademi Koperasi ini diambil alih oleh Departemen Dalam Negeri. Dan sejak tahun 1970 status Negerinya tidak tegas, karena Departemen Dalam Negeri menggiatkan Akademi Koperasi hanya di Jakarta, sehingga Akademi Koperasi Bersifat Nasional dan berpusat di Jakarta. Sejak Tahun 1972 boleh dikatakan kegiatan Akademi Koperasi di Palembang terhenti dan sekarang ini Akademi koperasi tinggal namanya saja, karena bekas lokasi AKOP tersebut terkenal dengan nama Lorong AKOP.¹⁶⁷⁾

¹⁶⁵⁾ Wawancara dengan Drs. Dai Sulaiman, 16 - 12 - 1980

¹⁶⁶⁾ Wawancara dengan Wahap Nangutih, BSc, Karyawan Pkg. 7 - 12 - 1980

¹⁶⁷⁾ Wawancara dengan Drs. Ibrahim HS, dosen Fkg dan AKOP, 7-12-1980.

h. Kursus B.I. Bahasa Inggris.

Untuk mengisi kekurangan tenaga guru bahasa Inggris di SLTA di daerah ini, maka tahun 1958 di kota Palembang telah didirikan Kursus B.I. Bahasa Inggris yang disponsori oleh Amran Halim (Sekarang Prof. Dr. Amran Halim). Jumlah pengikut/mahasiswanya sebanyak 28 orang, dan tempat kuliahnya ialah Jalan Guru - Guru Kebon Duku Palembang paginya untuk Sekolah Dasar. Sebagai pimpinannya ialah Ibu Djuairiah Akip (yang pada tahun 1962 mengikuti kuliah di FKIP Rawamangun Jakarta Jurusan Bahasa Inggris). Adapun tenaga pengajar dari Kursus B.I. ini antara lain ialah : Ibu Djuairiah Akip sendiri, Amran Halim, Wahyu Utomo dll.

Dari 28 orang mahasiswa B.I. yang mengikuti ujian, yang lulus sebanyak 15 orang yaitu pada tahun 1960. Penguji - pengujinya sebagian didatangkan dari Jakarta. Tetapi setelah meluluskan satu angkatan pada tahun 1961 Kursus B.I. ini diintegrasikan ke dalam FKIP Universitas Sriwijaya.¹⁶⁸⁾

5. Pendidikan Non Formal.

Disamping formal yang telah dilaporkan melalui tulisan di muka, Pemerintah RI c/q Departemen P dan K juga menyelenggarakan pendidikan non formal. Menurut laporan Kandep P dan K Kotamadya Palembang melalui Daftar kursus - kursus P.L.S.M (Pendidikan Luar Sekolah Masyarakat) yang terdaftar ialah sebagai berikut :

1).	Teknologi Kerumah - tanggaan sebanyak	38 buah.
2).	Olah Raga	1 buah.
3).	Teknik	10 buah.
4).	Administrasi dan Niaga	24 buah.
5).	Bahasa	35 buah.
6).	Khusus	4 buah.

J U M L A H = 102 buah.

¹⁶⁸⁾ Wawancara dengan Ny. Asmah, Karyawan Kanwil Dep. P dan K Bidang Pendidikan Menengah Umum Plg, 10 - 12 - 1980.

Di daerah - daerah Kabupaten di daerah Propinsi Sumatera Selatan pada umumnya Departemen P dan K s/q Kandep - kandep P dan K juga menyelenggarakan pendidikan non formal dalam bentuk kursus - kursus melalui Proyek Penmas (Pendidikan Masyarakat), misal di Kabupaten Lahat yang berhasil kami rekam sebagai berikut :

- 1). Ketrampilan Pemotretan (dari memoto s/d mencuci dan mengenal alat)
- 2). Ketrampilan Perbengkelan sepeda motor - dari mengenal alat - alat sampai dengan bongkar pasang.
- 3). Ketrampilan memangkas rambut.
- 4). Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- 5). Kursus membuat dekorasi (tata ruang dan merangkai janur)
- 6). Kursus Ketrampilan membuat jala/jaring
- 7). Kursus Pertukangan kayu.
- 8). Kursus Kelompok Belajar Pendidikan Dasar (dulu PBH)
- 9). Kursus Kelompok Belajar Pembina Kesejahteraan Keluarga (Sekolah Guru untuk ibu - ibu). **)

**) Wawancara dengan Bapak Arsyad Yakin, Kasi Masorda Kandep P & K Kabupaten Lahat, tanggal 23 - 9 - 1980.

B. PENDIDIKAN SWASTA :

Yang dimaksud dengan pendidikan Swasta adalah pendidikan yang tidak diselenggarakan oleh Pemerintah, 169) dan pendidikan itu sendiri sudah ada disegala jaman, kecuali dimasa pendudukan Jepang di daerah ini. Adapun yang dimaksudkan sekolah Negeri adalah lembaga pendidikan yang didirikan, dibiayai, diawasi dan dibina oleh Pemerintah, sedangkan sekolah Swasta sendiri adalah sekolah yang diusahakan oleh perorangan atau badan Swasta lainnya dibawah pengawasan Pemerintah. Sekolah Swasta yang mendapatkan bantuan atau subsidi dari Pemerintah disebut Sekolah subsidi Sekolah Berbantuan. 170)

Mengenai pendidikan Swasta pada jaman Kolonial Belanda dan sekarang ini, ada yang diselenggarakan oleh organisasi, missi/zending, yayasan dan lain-lain seperti : sekolah yang diorganisir oleh Muhammadiyah, Xaverius, Methodist, Tamansiswa dan sebagainya.

a. Pendidikan Swasta jaman pendudukan Jepang.

Apa yang telah diuraikan diatas, bahwa pada masa pendudukan Jepang di daerah ini, secara praktis sekolah - sekolah yang dimaksudkan itu tidak berkembang atau ditutup sama sekali. Tidak hanya sekolah - sekolah Swasta saja yang ditutup atau tidak melakukan kegiatan pada waktu itu misalnya : Madrasah - madrasah, Perguruan Islam Air Item dan Yayasan Semarak Bengkulu serta HIS yang diawasi oleh Locale Read di Tanjungraja dan Kayuagung, 171) tetapi juga sekolah - sekolah Pemerintah/Swasta yang berbahasa pengantar bahasa Belanda harus di tutup. Demikian pula sekolah - sekolah yang sebagian besar guru - gurunya orang Belanda harus ditutup pada waktu itu.

Seperti yang telah kita ketahui hingga Jepang masuk dan menduduki daerah ini, sekolah Menengah Pertama yang disebut MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) milik Pemerintah Belanda hanyalah satu buah di Palembang dan lima buah milik Swasta : sebuah milik Katholik di Lahat, sebuah milik Yayasan Semarak Bengkulu di Bengkulu dan tiga buah milik Tamansiswa (Palembang

169) Prof. Sugarda Poerbakawatja, Op cit, halaman 206

170) BP3K, Op cit, halaman 151

171) Kementerian Penerangan RI, Op cit, halaman 629.

bang, Telukbetung dan Bengkulu), dan disamping itu ada pula sekolah Menengah Muhammadiyah.¹⁷²⁾

Berdasarkan jumlah sekolah Menengah di daerah ini sangat terbatas, maka tidak mengherankan bagi pemuda - pemuda yang akan meneruskan pelajarannya terpaksa pergi keluar daerah ini misalnya ke Jawa atau ke Bukit Tinggi. Terbatasnya sekolah Menengah di daerah ini pada waktu itu antara lain disebabkan ; adanya peraturan yang dikenal dengan Wilde Scholen Ordonnantie, jumlah HIS sangat sedikit karena dibatasi, sukar-nya untuk memasuki HIS Pemerintah karena berdasarkan status kelahiran dan kebanyakan orang tua lebih suka melanjutkan sekolah anaknya ke Jawa, karena masalah biaya lebih rendah.

Pada jaman pendudukan Jepang, baik sekolah Menengah Swasta maupun milik Pemerintah Belanda tidak melakukan kegiatan sama sekali dan bekas gedung - gedungnya dipergunakan Jepang untuk bengkel, asrama militer, gudang untuk barang logistik dan lain - lain. Nampaknya hanyalah sekolah Guru yang sederajat dengan sekolah Menengah saja yang dibuka, dan kegiatannya selalu disesuaikan kebutuhan Jepang dalam menghadapi Perang Asia Timur Raya.

Pihak Swasta baru mulai lagi kegiatannya dalam bidang pendidikan, setelah Indonesia Merdeka.

b. Pendidikan Swasta Jaman Merdeka :

Apa yang kita lihat pada jaman pendudukan Jepang terhapusnya dualisme dalam dunia pendidikan dan pengajaran, dan semua sekolah di daerah ini adalah sekolah Negeri. Dibutuhkan atau tidaknya sekolah - sekolah Swasta tergantung dari pada penguasa yang sedang memerintah. Dalam alam kemerdekaan Indonesia dan sesuai dengan isi Pembukaan UUD 1945 yang kemudian ditegaskan pada pasal 31 serta hasil laporan Panitia Penyelidikan Pengajaran tahun 1946, maka adanya pendidikan Swasta merupakan keharusan. Sebagai tindak lanjut dari pada isi UUD 1945 dan laporan Panitia tersebut, maka pemerintah mengeluarkan Undang - undang No. 4 tahun 1950 mengenai sekolah partikelir ditetapkan dalam Bab IX pasal 13 dan pasal 14. Pada pasal 13 menyebutkan : (1) Atas dasar kebebasan tiap - tiap warganegara me nganut sesuatu agama atau keyakinan hidup, maka kesempatan leluasa diberi

¹⁷²⁾ Ibid, halaman 628 - 630

kan untuk mendirikan dan menyelenggarakan sekolah partikelir, dan (2) Peraturan - peraturan yang khusus tentang sekolah - sekolah tersebut ditetapkan dalam Undang - undang. Demikian pula isi pasal 14 menyebutkan : (1) Sekolah - sekolah partikelir yang memenuhi syarat dapat menerima subsidi dari Pemerintah untuk pembiayaannya, dan (2) syarat - syarat tersebut pada ayat 1 dan peraturan pemberian subsidi ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. 173)

Kesempatan yang telah diberikan oleh Pemerintah berdasarkan UU No. 4 tahun 1950 itu, telah dipergunakan oleh masyarakat dengan sebaik-baiknya, sehingga ada yang mendirikan sekolah dari tingkat Taman Kanak-kanak sampai kepada tingkat Perguruan Tinggi. Atas dasar kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah itu, maka di daerah bermunculanlah lembaga - lembaga pendidikan Swasta seperti jamur dimusim hujan. Sebelum kita membicarakan Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu kiranya dibicarakan lebih dulu beberapa lembaga Pendidikan Swasta yang giat dalam dunia pendidikan di daerah ini sebagai berikut :

PERGURUAN TAMANSISWA :

Pada jaman pendudukan Jepang Perguruan Tamansiswa dibekukan dan tidak ada kegiatan sama sekali, dan baru dibuka kembali setelah Indonesia Merdeka. Apa yang dikatakan oleh saudara Bachtiar sebagai Ketua dan Pembimbing Tamansiswa Sumatera Selatan, Lampung dan Bengkulu ; Sejak tahun 1942 hingga sekarang perguruan Tamansiswa cabang Palembang berlokasi di sekitar lapangan Hatta didepan Gereja Batak. Dewasa ini telah memiliki Taman Indrya (TK), Taman Muda (SD), Taman Dewasa (SMP) dan Taman Madya (SMA). Adapun Taman Madya didirikan pada tanggal 22 April 1955 dengan tokoh - tokohnya : Ki Hanif DK, R.M. Akil, Drs.Wan Ahmad dan Drs. Amancik.

Mengenai jumlah murid Taman Siswa di segala tingkat yang berlokasi didepan Lapangan Hatta berjumlah seluruhnya 1926 orang, Tamansiswa cabang Sungai Gerong (TK dan Taman Muda) berjumlah 1459 orang, Tamansiswa cabang Sungai Buah (Taman Muda) berjumlah 392 orang, Taman siswa cabang Prabumulih (Taman Muda, Taman Dewasa dan Taman Madya)

173) Prof. Soegarda Purbakawatja, op cit, halaman 208.

berjumlah 529 orang, Tamansiswa cabang Lahat (Taman Muda dan Taman Dewasa) berjumlah 534 orang, Tamansiswa cabang Pagaralam (SD dan SMP) berjumlah 333 orang, Tamansiswa cabang Curup dengan tingkat SD dan SMP berjumlah 286 orang. Kemudian persiapan Tamansiswa cabang Sungai Dua (SMP) jumlah muridnya 51 orang dan persiapan Tamansiswa di Benakat (SMP) berjumlah 53 orang.

Tamansiswa cabang Telukbetung (Lampung) yang memiliki semua tingkat dengan jumlah muridnya 2084 orang dan akhirnya Tamansiswa yang berlokasi di Tanjung Karang (SD, SMP dan Teknik Menengah Atas) jumlah muridnya 235 orang, sehingga jumlah murid keseluruhannya adalah $\pm$ 7888 orang.

Disamping Tamansiswa dengan segala cabangnya yang tersebut diatas ada pula Perguruan Tamansiswa di Pendopo. Perguruan ini pada umumnya di biyai dengan sistem " Zelf bedruiping " atau membiayai diri sendiri, yang diperoleh dari bantuan wali murid, bekas murid, Majelis luhur Tamansiswa Jogjakarta dan dari Pemerintah. Mengenai gaji para pamong dan karyawan pernah mengikuti peraturan gaji PGPS/1968, tetapi sejak bulan Agustus 1980 ditentukan oleh Tamansiswa setempat. Murid - murid membayar uang sekolah (SPP) tidak ditentukan menurut pendapatan orang tua, dan nyatanya perguruan tersebut dapat menambah gedung - gedung tempat belajar sebagai hasil sumbangan dari para dermawan, orang - orang yang simpatisan dan bekas - bekas murid Tamansiswa yang sekarang menduduki posisi penting.

YAYASAN XAVERIUS KEUSKUPAN PALEMBANG :

Menurut penjelasan sdr. Drs. Bandiman, sekolah - sekolah Xaverius di daerah ini pada umumnya dan di kota Palembang pada khususnya, pada jaman pendudukan Jepang ditutup sama sekali, karena sebagian besar guru - gurunya warga negara Belanda. Para Pastur dan pater - pater/suster pada waktu itu ditawan (diinternir). Kemudian setelah tahun 1947 barulah sekolah - sekolah yang dikelola oleh Missi dihidupkan kembali dengan peralatan (sarana) yang ada dan berdasarkan Akte Yayasan tertanggal 20 Nopember 1948. Dalam Akte tersebut tercantum nama - nama sebagai berikut : Pastor Wilhelmus Lorentius Cornelis Joeren sebagai Ketua Yayasan; Isaak Soediro sebagai Sekretaris; Lodewijk Leonard Tjia sebagai Bendaharawan, dan anggota anggotanya Tjiu Tjeng Hok, Frater Leonardus Franciscus Johannes Nienhuis dan lain - lain. Dengan susunan pengurus yang baru ini, Yayasan mulai me

ngembangkan sayapnya dengan mendirikan sekolah - sekolah lanjutan seperti SMP, SKP, SMA dan SPG di dalam kota Palembang sendiri maupun diseluruh wilayah Keuskupan Palembang. Dalam rangka reorganisasi pengurus Yayasan, pada tahun 1965 terjadi pembaharuan Akte Yayasan dengan susunan sebagai berikut : R.I. Soediro Pranoto sebagai Ketua I, J.P. Manarap sebagai Ketua II J.W.L. Toruan sebagai Sekretaris I, Pastor J.J. Goeman sebagai Sekretaris II, Frater J.J. Bosma sebagai Bendahara dengan anggota - anggotanya : Lim Tjong Hian SH dan Tjiu Tjeng Hok.

Berdasarkan Akte tahun 1965, Yayasan Xaverius berkantor di jalan Tasik 18 Palembang dan kemudian pindah ke jalan Kol. Atmo 132, yang sejak itu pula R.I. Soediro Pranoto diangkat sebagai pimpinan Kantor Yayasan Xaverius Pusat. Yayasan tersebut sekarang ini membina 52 buah sekolah yang tersebar di delapan cabang dan tiga Perwakilan sebagai berikut :

1. Jambi memiliki dari Taman Kanak - Kanak sampai dengan tingkat Sekolah Menengah Atas, yang masing - masing sebuah.
2. Curup memiliki sebuah SD dan sebuah SMP.
3. Sindang memiliki sebuah SD.
4. Palembang kota memiliki 5 buah TK. 9 buah SD, 5 buah SMP dan satu SMA.
5. Tanjung Enim memiliki sebuah TK, satu SD dan satu SMP.
6. Tanjungsakti memiliki satu SD dan satu SMP.
7. Pagaralam terdapat sebuah SD dan sebuah SMP.
8. Lubuk Linggau memiliki TK sampai dengan tingkat SMA, yang masing masing sebuah.
9. Tugu Mulyo memiliki sebuah SD dan sebuah SMP.
10. Gumawang/Belitang terdapat satu SD, satu SMP dan satu SPG.
11. Baturaja memiliki TK, SD dan SMP masing - masing sebuah Secara keseluruhan jumlah Guru + 615 orang dengan murid 24.000 orang.

SEKOLAH MITHODIS I PALEMBANG :

Menurut penjelasan saudara SMH. Penggabean SH sebagai Kepala Mithodist I Palembang, bahwa lembaga pendidikan ini baru dibuka kembali pada ta-

tahun 1947, karena di jaman pendudukan Jepang nasibnya sama dengan sekolah Swasta lainnya. Ketika lembaga ini dibuka kembali, maka sponsornya antara lain : Tan Hong Ki, ML. Tobing dan Napiun. Sebagai Lembaga yang ber bahasa pengantar bahasa Inggeris, kurikulumnya sama dengan yang ada di Amerika dan lama belajar 12 tahun. Pemimpin - pemimpinnya orang asing seperti Albert Hamel dan John Wesley Day, sedangkan guru - gurunya banyak orang Indonesia. Sebagai akibat kebijaksanaan Pemerintah, maka pada tahun 1959 sekolah - sekolah asing harus dinasionalisir, dan oleh karena itu lembaga pendidikan ini menyesuaikan diri dengan kurikulum Pemerintah dan bahasa pengantarnya bahasa Indonesia.

Pada tahun 1964 Gereja Mithodis Indonesia melepaskan diri dari Amerika dan berdiri sebagai Gereja Mithodis Indonesia berpusat di Medan. Segala sesuatu dikomandokan dari Medan, sehingga kegiatan pendidikan di daerah di daerah ini tergantung kepada pimpinan Pusat di Medan, yang sampai sekarang ini di dalam kota Palembang sendiri memiliki 3 sekolah Mithodist, yaitu Mithodist I, Mithodist II dan Mithodist III. Sedangkan di luar kota Palembang sendiri terdapat sekolah Mithodist di Prabumulih (baru di buka tingkat SD dalam tahun 1975) dan di Pagaram (baru di buka TK pada tahun 1978). Sekolah yang dibina oleh Mithodist I meliputi SD, SMP dan SMA, sedangkan Mithodist II meliputi SD, SMP dan SMA, dan demikian pula Mithodist III mengelola SD, SMP dan SMA. Pada tahun ajaran 1980 jumlah semua murid 2780 orang dengan perincian : SD 403 murid dengan 8 kelas, SMP 759 orang dengan 15 kelas dan SMA 1618 murid dengan 33 kelas.

PERGURUAN KRISTEN PALEMBANG :

Menurut penjelasan saudara C. Prapat SH, lembaga pendidikan ini yang dikenal dengan nama " Beatrix School " dengan guru - gurunya orang Belanda mengalami nasib yang sama, ketika Jepang menduduki daerah ini. Pada tahun 1964 Vereniging Voor Christelijk Onderwijs to Palembang menjadi " Perkumpulan Perguruan Kristen Palembang " dengan Akte Notaris Tan Thong Kie No. 9 tahun 1964 tanggal 7 Desember 1964.

Dalam Akte tersebut tercantum nama - nama : BAS. Lumban Tobing. PM. Tampobolon, Willem Mamesah dan Sudin Simandjuntak. Organisasi ini telah membina SD, SMP dan kemudian SMA dibuka tahun 1965, yang pada waktu itu SMP dan SMA dipimpin oleh R.B. Siahaan.

Pada tahun 1977 Perkumpulan Perguruan Kristen Palembang berubah menjadi " Pendidikan dan Perguruan Kristen Palembang " dengan Akte Notaris Yustin Aritonang SH No.14/1977. Jumlah murid pada tahun ajaran 1980 ± 1322 orang dengan perincian 15 kelas SD 680 orang; 9 kelas SMP 402 dan 6 kelas SMA 240 orang. Lembaga pendidikan ini dibina oleh 3 Gereja : Gereja Siloan (gereja Kristen Jawa), Gereja GPIB (gereja Protestan Indonesia Batak) dan Gereja HKBP (huria Kristen Batak Protestan).

MUHAMMADYAH :

Fahan Muhammadiyah tiba di daerah ini sekitar tahun 1928, dan kemudian menjadi suatu organisasi Islam diantara organisasi - organisasi paralel, yang cukup banyak memberikan andilnya untuk masyarakat Islam dalam sosial budaya, terutama dibidang pendidikan.

Menurut penjelasan saudara Ibrahim Jakfar, salah seorang tokoh Muhammad yah menjadi suatu organisasi di daerah ini, maka setiap Keresidenan diangkat lah seorang " Konsul " yang mendapat pengesahan dari pusatnya di Jogjakarta. Tetapi dalam perkembangan akhir - akhir ini daerah Sumatera Selatan Selatan dijadikan daerah wilayah sejak tahun 1960. Setelah perubahan tersebut, dimana Palembang dan Bangka dijadikan wilayah dipimpin oleh Bapak K. Masyhur Azhari, kemudian digantikan oleh Bapak Siddik Adim (almarhum) dan pada tahun 1975 dipimpin oleh M. Rasyid Thalib.

Sesuai dengan struktur organisasinya yang terbagi atas majelis - majelis, dan salahsatu majelis itu adalah " majelis pendidikan dan pengajaran " Muhammadiyah wilayah Sumatera Selatan. Oleh karena tujuan Muhammadiyah itu sendiri ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dan mewujudkan masyarakat Islam sebenar - sebenarnya, maka kegiatan pendidikan dan pengajaranpun tidak dapat lepas dari pada tujuannya semula. Dibawah ini kami kemukakan kegiatan Muhammadiyah dalam bidang pendidikan di daerah ini sebagai berikut :

1. Kotamadya Palembang; 19 buah SD, 8 buah SMP, 3 buah SMA, 3 buah SPG, satu PGA, satu Madrasah Muallimin 6 tahun, satu SMEA dan satu STM.
2. Kabupaten OKI ; 17 SD, 2 SMP, 1 PGA.
3. Kabupaten OKU; 24 SD, 5 SMP, 1 SMA dan 1 SPG.

4. Kabupaten LIOT; 9 SD, 4 SMP, 1 SMA dan sebuah SPG.
5. Kabupaten Lahat; 34 SD, 7 SMP, 1 SMA, 1 SPG dan 1 PGA.
6. Kabupaten MURA; 9 SD, 1 SMP, 1 SPG, 1 PGA, 1 Madrasah Mualimin 6 tahun.
7. Kabupaten MUBA; 10 SD, 1 SMP dan 2 PGA.
8. Kotamadya Pangkalpinang; 1 SD, 1 SMP, 1 SMA.
9. Kabupaten Bangka; sebuah SMP.
10. Kabupaten Belitung; 2 buah SD.

PERGURUAN YAYASAN IBA PALEMBANG :

Menurut penjelasan saudara M. Asaaf sebagai administratur Yayasan tersebut, bahwa Yayasan IBA Palembang didirikan pada tanggal 1 September 1959 dengan Akte Notaris Tan Thong Kie No. 1 tahun 1959. Dalam Akte tersebut tercantum nama : BAYUMI WAHAB DAN DR.M.IBA. Sejak berdiri yayasan IBA bergerak dalam dunia pendidikan dan masih terbatas dalam kota Palembang saja. Pada waktu peresmian pemakaian gedung sendiri pada tanggal 3 Oktober 1965, dilakukan oleh Bapak Jenderal Makmun Murod. Tingkat persekolahan yang pertama dibuka adalah TK dan SD Ketika diresmikan gedung tersebut berjumlah murid TK 60 orang dengan 2 orang guru (Ny. Zuraidah dan Maryam), sedangkan SD muridnya 40 orang dengan 5 orang Guru (M. Jamin, Salim, Sundari, Zubaidah dan Amri nah). Dalam perkembangan selanjutnya Yayasan IBA telah berhasil mendirikan SMP dalam tahun 1970, SMA dalam tahun 1970, STM dalam tahun 1972, ST dalam tahun 1974, SMEA dalam tahun 1974 dan SPG dalam tahun 1977.

Semenjak berdiri sampai sekarang ini Yayasan IBA tidak banyak mengalami hambatan - hambatan dalam hubungannya dengan perkembangan kehidupan sekolah - sekolah yang bernaung dibawah Yayasan tersebut. Pada tahun ajaran 1980 tercatat sekolah - sekolah dibawah yayasan IBA sebagai berikut : Sebuah TK dengan murid 129 orang (lima orang Guru), sebuah SD dengan murid 908 (16 orang Guru), dua SMP dengan murid 574 (28 Guru), sebuah SMA dengan murid 712 (27 orang Guru), sebuah ST dengan murid 28 (10 orang Guru), sebuah STM dengan 459 murid (23 orang Guru) sebuah Sekolah Menengah Ekonomi Atas dengan 53 murid (7 orang Guru)

dan sebuah SPG dengan 230 murid (13 Guru). Jumlah murid seluruhnya ± 3093 dengan 129 tenaga pengajar.

YAYASAN PENDIDIKAN UMUM BINA WARGA :

Menurut penjelasan Kepala Sekolah Menengah Atas Bina Warga (saudara Drs. Zainal Abidin Ali); Yayasan ini didirikan pada tanggal 5 Nopember 1966 atas permufakatan guru - guru SMP IV Negeri Palembang antara lain saudara Zainal Abidin Ali dan R.A. Karim. Sebagai latar belakang berdirinya sekolah - sekolah yang diusahakan oleh yayasan ini, adalah untuk membantu pemerintah dalam memberikan kesempatan belajar kepada anak - anak yang tidak tertampung pada sekolah pemerintah.

Mula - mula berdiri SMP pada tahun 1968 dengan 69 orang murid, dan pada tahun 1969 berdiri SMA dengan 45 orang murid dan SD pada tahun yang sama. Oleh karena sekolah - sekolah yang dikelola oleh Yayasan tersebut dari tahun dengan hasil yang baik, maka pemerintah memberikan subsidi.

LEMBAGA PENDIDIKAN MAARIF NU :

Berdasarkan penjelasan saudara Mahmud Yunus BA sebagai Kepala SMP - NU; sejak berdiri NU pada tahun 1926 sampai tahun 1953 bergerak dalam bidang dakwah dan pendidikan. Tetapi karena keadaan politik pada waktu itu memaksa NU - disamping bidang dakwah dan pendidikan, bergerak dalam lapangan politik sesuai dengan keputusan Mukhtamar NU seluruh Indonesia di Palembang. Kemudian dalam tahun 1973 berdasarkan hasil Kongres NU seluruh Indonesia di Jakarta, NU melepaskan diri dari kegiatan politik dan kembali pada kegiatan semula, khusus dalam dunia pendidikan dan dakwah. SMP - NU didirikan pada tanggal 13 Januari 1972 yang langsung dikelola oleh Pengurus cabang Kotamadya Palembang dengan seponsornya : K.A. Malik Tadjudin, Mahmud Yunus BA dan Taufik Abdullah Gathmyr.

Perkembangan SMP - NU yang berlokasi di Jalan A. Yani seberang Ulu, menunjukkan perkembangan yang cukup baik, apabila dilihat dari jumlah murid dari tahun ke - tahun semakin bertambah dan fasilitas pendidikannya. Sejak tahun 1975 sampai sekarang ini SMP - NU telah diberi kepercayaan untuk menyelenggarakan EBTA sendiri dengan STTB dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tahun ajaran 1979/1980 SMP - NU memiliki murid sebanyak 350 orang, memiliki 7 lokal belajar, sebuah Kantor dan sebuah

rumah sebagai tempat tinggal Kepala Sekolah. Disamping itu SMP - NU menerima beberapa orang Guru dari Departemen Agama dan buku - buku paket dari Departemen P dan K. Dari Kotamadya Palembang sendiri menerima uang Rp. 1.060.000,- sebagai biaya rehabilitasi gedung - gedung sekolah, dan demikian pula mendapatkan bantuan dari Bapak Gubernur Sumatera Selatan sebesar Rp. 5.000.000,-

Sekolah - sekolah yang dikelola oleh Lembaga pendidikan Maarif NU cabang Sumatera Selatan : dalam kota Palembang sendiri terdapat SD dan SMP - NU; SD, SMP dan SMA - NU di kota Lahat ; SD, SMP dan Mualimin atas di Pagaralam; SD dan SMP di Muara Dua; Madrasah - madrasah dan sekolah Umum di daerah OKI.

VIKARIAT APOSTOLIK PANGKAL PINANG :

Pada tahun 1949 di Prefektur Apostolik Bangka dan Belitung terdapat 5 sekolah Dasar dengan 1082 orang murid, dan pada tahun 1951 SD menjadi 10 buah dengan 1503 orang murid. Kemudian Prefektur Apostolik tersebut dirubah statusnya menjadi Vikariat Apostolik Pangkalpinang pada tanggal 8 Februari 1951 dibawah pimpinan Pastor Van der Western.

174) Mulai saat itu daerah pengaruhnya meliputi Bangka, Belitung dan Riau. Usaha Missi Katholik ini terutama ditujukan kepada anak - anak Cina dalam rangka Kristianisasi melalui jalur pendidikan di Tanjungbalai dipulau Karimun, di Tanjungpinang dan di Belinyu. Ketiga sekolah tersebut pada tahun 1957 dijadikan sekolah Indonesia.

Pada permulaan tahun 1951/1952 di Vikariat Pangkalpinang terdapat 16 sekolah dengan perincian : 8 SD, 4 SMP dan 4 sekolah menjahit. Lokasi SMP terdapat diPangkalpinang, di Sungai Liat dan Belinyu, tetapi pada tahun 1953 SMP Katholik di Belinyu ditutup karena kekurangan tenaga guru. Dalam rangka mensukseskan usaha Missi di daerah ini, pada tanggal 10 Juli 1951 beberapa orang sudter Pemeliharaan Illahi tiba di Sungai Liat untuk memimpin sekolah puteri disana, dan dalam tahun 1953 Missi membangun gedung - gedung sekolah di Pangkalpinang, Tanjung pinang dan Beliyu. Pada tanggal 1 Juli 1956 di Pangkalpinang di buka SGA Puteri dengan tenaga pengajarnya 6 orang dan 11 orang murid.

174) Bagian Dokumentasi Penerangan Kantor Waligereja Indonesia, Sejarah Gereja Katholik Indonesia, jilid 3a, Arnoldus Ende - Flores, 1974 halaman 285.

Kemudian dalam bulan Agustus 1959 SMP di Belinyu dibuka lagi dan dalam tahun itu juga dibuka SMP di Tanjungpinang. Pada tahun 1961 dibuka lagi SMP di Sungai Liat. Akhirnya sampai tahun 1961 sekolah Katholik di Vikariat Pangkalpinang berjumlah 20 buah yang terdiri dari : 10 SD, 5 SMP, 1 SGA dan 4 sekolah menjahit dengan jumlah murid seluruhnya 5011 orang tanpa murid TK. ¹⁷⁵⁾

YAYASAN " TUNAS KARYA " KEUSKUPAN PANGKALPINANG :

Ketika Keuskupan Pangkalpinang dibentuk, terjadilah 9 paroki yang meliputi daerah : Pangkalpinang, Mentok, Belinyu, Sungai Liat, Manggar, Tanjungpandan, Tanjungbalai, Tanjungpinang dan Tanjungbatu (Moto). Tetapi setelah tahun 1967 jumlah paroki berkurang menjadi 7 buah paroki, sebab ada paroki yang digabungkan menjadi satu. dan Pangkalpinang sendiri tetap merupakan pusat paroki yang memiliki gereja Keuskupan. ¹⁷⁶⁾

Urusan sekolah diwilayah Keuskupan Pangkalpinang dipegang oleh Yayasan " TUNAS KARYA " yang didirikan pada tahun 1958. Broeder Budi Mulia yang berpusat di Jakarta memiliki sekolah sendiri dan mengurus sebuah SD dan sebuah SMP Broederan. Dalam tahun 1961 di wilayah Keuskupan Pangkalpinang tercatat 15 buah sekolah Missi dengan perincian : 10 CD, 4 SMP dan satu SPG dengan jumlah muridnya 8564 orang ¹⁷⁷⁾.

¹⁷⁵⁾ Ibid, halaman 292 - 295

¹⁷⁶⁾ Ibid, halaman 299 - 300

¹⁷⁷⁾ Ibid, halaman 305

Kadaan Sekolah, murid di Wilayah Keuskupan Pangkal Pinang

Tahun 1961 – Tahun 1972

Tahun	Pulau / Keperluan	Jenis Sekolah	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid
1961	Bangka	SD	7	3830
		SMP	3	
		SPG	1	
	Belitung Riau	SD	1	148
		SD	2	325
		SMP	1	
1972	Bangka	ST	10	6612
		SMP	6	
		SMA	1	
		SPG	1	
	Belitung	SD	1	628
		SMP	1	
	Riau	SD	2	1324
		SMP	2	

SUMBER : Kanwil Departemen P dan K Propinsi Sumatera Selatan.

1. Pendidikan Dasar :

Dengan aktifnya kembali pihak Swasta dalam dunia pendidikan, maka pada tahun 1952 dapat diketahui keadaan sekolah Rakyat partikelir di daerah ini, baik yang diusahakan oleh organisasi keagamaan maupun oleh suatu Yayasan. Pada tahun ajaran 1951 / 1952 tercatat 335 sekolah dengan tenaga pengajar 1515 orang dan 61.905 murid. Adapun sekolah - sekolah partikelir yang dimaksudkan ini diselenggarakan oleh Tamansiswa 7 buah, Islam 135 buah Kristen 11 buah, Cina 124 buah, Konkordan 12 buah dan lain - lain 46 buah. ¹⁷⁸⁾ Untuk mengetahui perkembangan SD swasta di daerah ini, di bawah ini kami gambarkan data kuantitatif sejak 1969 - 1980, sedangkan keadaan sebelumnya tidak kami dapati.

¹⁷⁸⁾ Kementerian Penerangan RI, Op cit, halaman 625

Keadaan SD Swasta di Propinsi Sumatera Selatan
Tahun 1969 / 1980

TAHUN	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru
1969	405	102202	2335
1970	406	65436	2102
1971	411	99905	2424
1972	436	112713	2651
1973	400	76300	2340
1974	447	106449	2539
1975	450	111935	2836
1976	424	111287	2867
1977	411	98782	2791
1978/1979	430	108234	3026
1979/1980	378	105513	2933

SUMBER : Kanwil Departemen P dan K Propinsi Sumatera Selatan.

2. Pendidikan Menengah :

2. 1. Sekolah Menengah :

Keadaan SMP partikelir di Sumatera Selatan hingga bulan Desember 1952 tercatat 41 buah dengan perincian sebagai berikut; Keadaan pada 1 Juli 1952 tercatat 37 orang sekolah dengan murid 5338 orang dan 238 orang tenaga pengajar, sedangkan pada tanggal 1 Desember 1952 tercatat 41 sekolah dengan 5845 murid dan 275 Guru.¹⁷⁹⁾

Timbulnya SMP swasta di daerah ini, disebabkan semakin banyaknya lulusan SD yang tidak tertampung oleh SMP Negeri, karena kemampuan Pemerintah dalam menangani sarana pendidikan masih terbatas. Di bawah ini kami gambar kan keadaan SMP Swasta dari tahun 1966 - 1980 .

¹⁷⁹⁾Kementerian Penerangan RI, Op cit, halaman 635

Keadaan SMP Swasta di Propinsi Sumatera Selatan
Tahun 1966 - 1980

Tahun	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru
1966	83	12149	412
1967	92	12431	442
1968	97	12842	455
1969	104	15056	480
1970	116	15858	540
1971	128	18530	627
1972	148	19687	618
1973	166	25211	904
1974	175	28256	974
1975	192	34475	1038
1976	210	39605	1319
1977	218	44902	1425
1978/1979	245	49651	2534
1979/1980	268	54059	2933

SUMBER : Kanwil Departemen P dan K Propinsi Sumatera Selatan.

2. 2. Sekolah Menengah Atas (SMA) :

Yayasan Xaverius Palembang mendirikan SMA/B pada tanggal 15 Juli 1951 dimulai dengan 1 kelas dan murid sebanyak 36 orang. Sekolah ini mula-mula untuk menampung murid - murid lulusan SMP Xaverius dari berbagai tempat, yaitu dari Palembang, Lahat, Tanjung karang, Pringsewu dan kalau masih ada tempat bisa menerima lulusan dari SMP Negeri. Setahun kemudian sekolah ini menerima subsidi dari Pemerintah, dan sponsor - sponsornya tercatat : L. Nienhuis dan kemudian diteruskan oleh J. Soudant.

Berhubung belum memiliki gedung sendiri, SMA/B Xaverius ini menumpang pada gedung SMP Xaverius yang terletak di jalan Talangjawa, dan sejak tanggal 10 Agustus 1953 pindah ke gedung sendiri yang terletak di jalan Pagaralam sekarang ini. Adapun Guru - Gurunya antara lain : L. Nienhuis, J. Soun-

dant, J. van Beek, J. Boonen dan J. Wensten. 180)

Oleh karena banyaknya murid SMP Negeri yang tidak dapat ditampung pada SMA Negeri, maka atas usaha R.Nawawi mendirikan SMA/B Malam pada tanggal 21 Agustus 1953 dengan Direkturnya R. Nawawi sendiri yang di bantu oleh beberapa orang tenaga pengajar seperti : R.M. Akil, R.M. Saleh R. Kuparman dan Kgs. Nuroni Adil.

Pada tanggal 16 April 1953 atas usaha Yayasan Pendidikan Umum yang diketuai oleh A. S. Sumadi (eks. Kepala Penerangan Propinsi Sumatera Selatan) mendirikan SMA/C dengan 24 orang murid. Sekolah ini bermaksud untuk menampung anak - anak lulusan SMP Negeri dan pegawai Negeri yang tak dapat kesempatan bersekolah pada waktu pagi hari. Direkturnya A.Situ-morang yang dibantu oleh tenaga pengajar seperti : R.Adikusumo, RPL. To-bing, AS. Sumadi, Tadjudin, R.M.Akil, E.E. van Duersen, Hasan Delais dan A' Siregar. Untuk sementara waktu kegiatannya sekolah ini masih menum-pang pada gedung SMP Xeverius Puteri.

Dalam tahun 1952 di Pangkalpinang (Bangka) berdiri SMA Partikelir dan setahun kemudian di Tanjungkarang (Lampung) berdiri SMA Partikelir, sehingga secara keseluruhan masyarakat di daerah ini telah berusaha secara maksimal untuk mengatasi kekurangan sekolah - sekolah tingkat Atas pada waktu itu. Faktor kelangkaan ini pulalah yang menyebabkan para pemuda yang banyak meneruskan pelajarannya ke Jawa. Dibawah ini kami kemukakan data kwantitatif mengenai SMA Swasta sejak tahun 1966 - 1980.

180) Ibid, halaman 641

Keadaan SMA Swasta di Propinsi Sumatera Selatan
Tahun 1966 - 1980

Tahun	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru
1966	22	3772	133
1967	26	3292	134
1968	37	3820	143
1969	39	4414	149
1970	39	4772	164
1971	36	5522	175
1972	36	5901	175
1973	36	5864	212
1974	37	6400	207
1975	36	5227	221
1976	41	7282	225
1977	43	9503	557
1978/1979	57	13920	980
1979/1980	60	15408	990

SUMBER : Kanwil Departemen P dan K Propinsi Sumatera Selatan.

2. 3. Pendidikan Kejuruan :

Data mengenai sekolah Kejuruan Swasta di daerah ini tidak begitu lengkap yang meliputi : SMEP, SKKP, ST, SMEA, SKKA, STM dan SPG sejak tahun 1966 - 1980 yang tertera dibawah ini :

Keadaan SMEP Swasta di Propinsi Sumatera Selatan
Tahun 1966 - 1980

Tahun	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru
1966	7	331	50
1967	6	284	56
1968	7	349	57
1969	10	539	61
1970	12	607	75
1971	10	607	-
1972	10	656	75
1973	10	613	104
1974	9	655	43
1975	9	645	43
1976	8	580	33
1977	8	433	53
1978/1979	10	750	120
1979/1980	-	-	-

SUMBER : Kanwil Departemen P dan K Propinsi Sumatera Selatan

Keadaan SKKP Swasta di Sumatera Selatan
Tahun 1966 - 1980

Tahun	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru
1966	3	- *)	-.*)
1966	6	-	-
1967	5	-	-
1968	5	-	-
1969	5	-	-
1970	5	-	-
1971	2	-	-
1972	1	45	4
1973	1	33	4
1974	1	34	4
1975	1	34	4
1976	1	34	4
1977	1	35	6
1978/1979	2	47	19
1979/1980	-	-	-

*) Murid dan Guru bergabung pada SKKP Negeri.

Keadaan ST Swasta di Sumatera Selatan tahun 1966 - 1980

Tahun	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru
1966	11	1513	- *)
1967	12	1566	-
1967	11	1646	-
1968	11	2014	-
1969	11	2093	-
1971	11	1503	156
1972	12	1556	170
1973	12	1670	185
1974	12	2253	149
1975	13	2505	190
1976	13	2431	210
1977	12	2075	208
1978/1979	12	1158	126
1979/1980	7	587	70

*)Guru bergabung pada ST Negeri.

Keadaan SMEA Swasta di Sumatera Selatan tahun 1966 - 1980

Tahun	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru
1966	9	911	10
1967	6	427	17
1968	6	631	95
1969	8	934	103
1970	8	1012	108
1971	10	902	48
1972	10	976	93
1973	10	969	124
1974	10	922	50
1975	10	879	55
1976	10	1103	35
1977	10	1647	39
1978/1979	11	1567	173
1979/1980	11	1719	192

Kedua daftar diatas ini berasal dari sumber Kanwil P dan K Propinsi Sumatera Selatan.

Keadaan STM Swasta di Sumatera Selatan tahun 1966 - 1980

Tahun	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru
1966	11	1310	161
1967	11	1284	168
1968	12	2841	181
1969	13	2873	201
1970	13	2992	234
1971	11	597	185
1972	14	980	168
1973	17	1862	305
1974	17	2389	91
1975	17	2485	60
1976	17	3104	66
1977	16	4020	123
1978/1979	16	4274	367
1979/1980	19	4079	426

SUMBER : Kanwil Departemen P dan K Propinsi Sumatera Selatan

Keadaan SKKA Swasta di Sumatera Selatan tahun 1966 - 1980

Tahun.	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru
1966	1	- *)	- *)
1967	1	-	-
1968	1	-	-
1969	1	-	-
1970	2	-	-
1971	2	-	-
1972	2	-	-
1973	2	-	-
1974	2	57	7
1975	2	76	4
1976	2	74	20
1977	2	77	24
1978/1979	4	125	49
1979/1980	1	37	25

*) Murid dan Guru bergabung pada SKKA Negeri.

SUMBER : Kanwil Departemen P dan K Propinsi Sumatera Selatan.

Sekolah Pendidikan Guru (SPG) :

Berdasarkan hasil penelitian mengenai SPG Swasta di daerah ini, maka dengan ini tercatat sebagai berikut : Di dalam Kotamadya Palembang terdapat SPG Muhammadiyah I didirikan pada tanggal 6 - 1 - 1968 Direktrisnyanya Dra. Su warni Nursato; SPG Muhammadiyah II didirikan tanggal 15 - 1 - 1975 Direktrisnyanya Ibu Sumarti; SPG Aisyah didirikan pada tanggal 1 - 1 - 1960 Direktrisnyanya Dra. Siti Hodidjah; SPG Trisula didirikan 17 - 8 - 1963; SPG PGRI didirikan 15 - 1 - 1975 dibawah pimpinan Drs. Bachri ; SPG Yayasan IBA 1 - 1 - 1976 dipimpin oleh Ali Idrus Ishak BA; SPG Qur'anyah 1 - 1 - 1976 dipimpin oleh Drs. Syafei Alim dan SPG Yaperzi (Yayasan Perguruan Fauziah) 1 - 1 - 1976 Direktrisnyanya Dra. Elly Manizar.

Di daerah MUBA terdapat SPG - PGRI di Sekayu 1 - 1 - 1976 dipimpin oleh Drs. M. Zain dan SPG Yapi (.Yayasan Pendidikan Islam) di Musi Landas di didirikan 1 - 1 - 1977 dipimpin oleh Anang Usih BBA. Di daerah OKI terdapat SPG - PGRI di Kayuagung dan SPG - PGRI di Tanjungraja didirikan 1 - 1 - 1976 di bawah pimpinan Drs. Syarkowi. Di daerah OKU terdapat SPG - PGRI di Baturaja didirikan pada tanggal 1 - 2 - 1969 dipimpin oleh M. Yusuf, SPG Muhammadiyah di Baturaja didirikan 1 - 1 - 1975 dipimpin oleh Drs. Ali Akbar, SPG Xaverius di Belitang didirikan 4 - 1 - 1971 dipimpin oleh Suryono BA, SPG Muhammadiyah di Belitang didirikan 8 - 1 - 1975 dipimpin oleh Wiyono BA dan SPG Sumber Asih di Gumawang Belitang didirikan 1 - 1 - 1974 dibawah pimpinan Siwoyo BA.

Di daerah LIOT (Muara Enim) terdapat : SPG Muara Enim didirikan 6 - 1 - 1969 dibawah pimpinan Subri BA; SPG - PGRI di Prabumulih didirikan 1 - 1 - 1971 dibawah pimpinan Nurhayati BA; SPG Muhammadiyah di Tanjung Enim didirikan 1 - 1 - 1974 yang dipimpin oleh Tony S. Isa dan SPG - ZION (Zending Protestan) di Tanjung Enim didirikan 1 - 1 - 1975 dibawah pimpinan Dra. F. Hutapea. Di Kabupaten Lahat terdapat SPG - PGRI didirikan 13 - 9 - 1970 di bawah pimpinan Yapri BA, SPG Muhammadiyah di Lahat didirikan 3 - 1 - 1977 dipimpin Dahrumuddin MS. BA dan SPG - PGRI Pagaralam didirikan 1 - 1 - 1969 dipimpin oleh Marspin. Di daerah MURA terdapat SPG - PGRI Tugumulyo didirikan 1 - 1 - 1975 dipimpin oleh F.X. Salim BA, SPG - PGRI Lubuk Linggau didirikan 1 - 3 - 1967 dipimpin oleh Sukismoyo BA dan SPG Muhammadiyah Lubuk Linggau yang didirikan 1 - 1 - 1975. Di Bangka terdapat pula SPG - Pemda Sungai Liat yang dipimpin oleh Drs. Achyar didirikan 1 - 1 - 1972, SPG Theresia di Pangkal Pinang dipimpin oleh J.B. Soeharto

berdiri sejak 17 - 7 - 1956 dan SPG Nasional di Tanjung Pandan didirikan 6 - 12 - 1964 dipimpin oleh Sulaiman Rozak BA. Disamping itu terdapat pula KPG Lisan Swasta diawasi oleh Kabid Pendidikan Dasar / Guru seperti : KPG di Sekayu, KPG di Pangkal Pinang dan KPG di Belitung. KPG di Belitung ini atas permintaan Bupati setempat diakui kembali pada Bulan Januari 1981. Mereka yang mengikuti KPG tersebut diatas adalah mereka yang telah memiliki ijazah SGB atau persamaan SGB.

Keadaan SPG Swasta di Sumatera Selatan tahun 1966 - 1980

Tahun	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru
1966	11	226	21
1967	4	243	27
1968	6	308	27
1969	8	481	85
1970	10	707	127
1971	12	1118	157
1972	10	1399	145
1973	11	1528	142
1974	12	1795	138
1975	14	2625	182
1976	19	3425	189
1977	24	4246	375
1978/1979	27	4988	475
1979/1980	28	5557	496

SUMBER : Kanwil Departemen P dan K Propinsi Sumatera Selatan.

2. 4. Pendidikan Tinggi :

Status Sekolah Swasta pada tingkat Perguruan Tinggi terbagi atas tiga yaitu : yang disamakan, yang diakui dan yang terdaftar sesuai dengan isi Undang - undang No. 22 tahun 1961 pasal 26 dan pasal 27 yang berbunyi sebagai berikut : Apabila suatu Perguruan Tinggi Swasta telah memenuhi persyaratan tertentu dapat digolongkan kedalam Perguruan Tinggi terdaftar, dan selanjutnya atas putusan Menteri dapat ditingkatkan menjadi Perguruan

Tinggi diakui, dan bila persyaratannya telah dipenuhi, maka Perguruan Tinggi diakui ini dapat lebih ditingkatkan menjadi Perguruan Tinggi yang disamakan. Perguruan Tinggi yang disamakan ini dapat menyelenggarakan ujian dan promosi sendiri, dimana ijazahnya disamakan dengan ijazah Perguruan Tinggi Negeri.

Adapun Pendidikan Tinggi Swasta yang ada di daerah ini antara lain : Akademi Perbankan " Perbanas ", Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammad yah dan Sekolah Tinggi Ilmu - Ilmu Sosial " Candradimuka ".

a. Akademi Perbankan " Perbanas " Palembang :

Berdasarkan laporan tahunan 1979 Akademi tersebut, bahwa pada tanggal 15 Januari 1968 didirikanlah suatu Yayasan dengan nama " Yayasan Mamahameru Palembang " dengan susunan pengurusnya : Abu Zed Ali sebagai Ketua : Muhammad Zen-BA sebagai Sekretaris ; Abumansyur dan Aruji Kartawinata masing - masing sebagai anggota. Struktur personalia ini di tuangkan dalam Akte Notaris Soeharto SH tertanggal 15 Januari 1968 No. 7 Yayasan ini bertujuan untuk memajukan dan menambah pendidikan Tinggi di daerah ini, khusus dalam Kotamadya Palembang. Sebagai tindak lanjutnya maka pada tanggal 3 Maret 1968 didirikanlah sebuah Akademi dengan nama " Akademi Keuangan & Perbankan Mahameru Palembang " (AKUBANK MAHAMERU) dengan susunan pimpinan senagai berikut : Drs. Syahrudin Aziz sebagai Ketua; Abu Zed Ali sebagai Sekretaris dan Muhammad Zen BA sebagai Bendahara. Ketika diumumkan penerimaan calon mahasiswa, ternyata yang mendaftarkan sebanyak 600 orang, tetapi oleh karena sarana lokal kuliah tidak mengijinkan, maka hanya dapat diterima 400 orang saja. Kegiatan perkuliahan diadakan pada sore dan malam hari di SD Negeri Jalan Kolonel Atmo Palembang.¹⁸¹⁾

Sebagai hasil pertemuan antara Pengurus Yayasan dan Pimpinan Akademi pada tanggal 10 Maret 1971, maka ditunjuklah Moh.Hatta Ismail SH sebagai Direktur Akademi, dan telah berhasil mengadakan kontak dengan Bapak Drs. O.P. Simorangkir sebagai Sekretaris Yayasan Pendidikan Perbanas Jakarta. Akhirnya Akademi Perbanas Mahameru Palembang menjadi bagian dari pada Yayasan Pendidikan Perbanas Jakarta.¹⁸²⁾ Dengan kata lain

¹⁸¹⁾ Akademi Ilmu Perbankan Perbanas Palembang, Laporan Tahunan 1979, halaman 1

¹⁸²⁾ Ibid, halaman 2.

sejak itu pula (13 April 1971) Akte yang lama diperbaharui dengan Akte Notaris Aminus SH tanggal 27 Mei 1971 No. 74 dan sekaligus berubah namanya dengan nama " Akademi Ilmu Perbankan Perbanas Cabang Palembang " dengan susunan pengurusnya : Moh. Hatta SH sebagai Direktur; Drs. A. Siahaan sebagai Sekretaris dengan dibantu oleh Direktur Bidang Akademis, Direktur bidang Keuangan, Direktur bidang Kemahasiswaan, yang masing - masing dijabat oleh Drs. A. Rahman Manaf, Drs. A. Siahaan dan Drs. M. B. Sianipar. Pada tanggal 22 Juni 1972 Akademi Ilmu Perbankan Perbanas cabang Palembang dengan status terdaftar. Dewasa ini Akademi tersebut telah memiliki gedung sendiri yang terletak di jalan Mayor Santoso dekat Perkuburan Kamboja, yang telah ditempati sejak tanggal 11 Juni 1977. Jurusan yang ada pada Akademi itu adalah jurusan Perbankan, yang pada tahun 1979 terdaftar 492 Mahasiswa dengan 34 orang Dosen. ¹⁸³⁾

b. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Palembang :

Menurut penjelasan drs. Djakfar Murod dan berdasarkan buku pedoman Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Palembang tahun 1980, bahwa sekolah Tinggi ini didirikan pada tanggal 10 Maret 1965 dengan nama " Universitas Muhammadiyah cabang Jakarta " dengan memiliki satu Fakultas yaitu Fakultas Hukum dan Ilmu Filsafat, dengan jumlah mahasiswa 40 orang dan berlokasi di Mesjid Bukit Kecil. Sebagai sponsornya antara lain :

Ki Mansyur Asa'ri, Zamhari Abidin SH, Drs. Djakfar Murod, Wantjik Saleh SH Muchdi Muchtar SH dan Ali El Farissi SH. Pada tahun 1968 kegiatan kuliah dipindahkan ke jalan Kol. Atmo dibelakang Gaya Baru Sekarang, dengan perubahan nama " Fakultas Hukum dan Ilmu Masyarakat ".

Oleh karena tidak memenuhi persyaratan dari KOPERTIS, maka pada tanggal 28 Januari 1974 Universitas Muhammadiyah cabang Jakarta di Palembang di bekukan, karena pada tanggal 1 juli 1973 telah didirikan Yayasan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Palembang dengan Nomor Akte 68 (Notaris Aminus SH).

Diatas puing - puing Universitas Muhammadiyah itu pulalah berdiri Yayasan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Palembang, yang berazaskan Pancasila dan UUD 1945 dan bertujuan untuk membentuk Sarjana Muslim yang bertaqwa kepada Allah serta berbakti pada masyarakat dan Negara.

¹⁸³⁾Ibid, halaman 15 dan 13.

Untuk mencapai tujuan Yayasan tersebut antara lain usahanya :

- 1) Mendirikan, membina dan menyantuni Perguruan - Perguruan Tinggi, Akademi dan Lembaga - lembaga pendidikan lain yang bersifat umum atau keagamaan. Sebagai langkah pertama Yayasan mendirikan " Sekolah Tinggi Ilmu Hukum yang berkedudukan di Palembang.
- 2) Mengadakan ceramah - ceramah, diskusi, seminar dan penerbitan buku-buku atau majalah ilmiah.
- 3) Mengadakan penelitian dalam usaha membantu Pemerintah di bidang Pembangunan.
- 4) Selanjutnya Yayasan akan melakukan segala usaha - usaha lain yang di pandang perlu yang tidak bertentangan dengan hukum, tata susila dan ketertiban Umum.

Terhitung sejak tanggal 28 Januari 1974 berdirilah " Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah " dengan pendirinya : Ali El Farissi SH dan Sulaiman Mastanun SH, yang pada tanggal 20 Mei 1975 Sekolah Tinggi tersebut berstatus " terdaftar " dengan surat keputusan No. 11/SKT/1975 dari Departemen P dan K. Pada bulan Maret 1976 pimpinan dipegang oleh Mustofa Seri SH sebagai pejabat sementara, dan berdasarkan keputusan Senat terpilih Sulaiman Mustanun SH sebagai Direktur sekolah Tinggi tersebut pada bulan Mei 1976. Tetapi pada tanggal 16 juni 1976 sekolah Tinggi menghendaki Drs. Djakfar Murod sebagai Caretaker Pimpinan dalam bulan Juli 1977 pimpinan diserahkan kepada Hambali SH berdasarkan surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah MAPENDAPU No. E - 2 /B.89/1977 tertanggal 21 Juli 1977

Setelah memiliki gedung sendiri, maka pada tahun 1976 kegiatan administrasi dan perkuliahan pindah ke jalan Ahmad Yani, dan mulailah terjadi pengembangan Sekolah Tinggi ini dengan membuka 3 Fakultas :

1. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
2. Fakultas Ekonomi.
3. Fakultas Teknik

Dalam proses pengembangan ini tercatat beberapa sponsor seperti : Adji Pasin SH, Drs. Djakfar Murod, Drs. Amiruddin, Drs. Syahrial Daya Alam, Drs. Tarmizi, Drs. Zainal Abidin Gaffar, Drs. M. Arif, Drs. Muchtar dan Drs. Syarkowi Nur.

Pengembangan Sekolah Tinggi itu baru dimulai tahun 1979, yang pada tahun 1980 tercatat mahasiswa 520 orang dengan tenaga pengajarnya berstatus tidak tetap. Kegiatan perkuliahan dilakukan pada sore dan malam hari, sehingga banyak tenaga - tenaga Dosen dari UNSRI dapat dimanfaatkan pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah.

c. Sekolah Tinggi Ilmu - Ilmu Sosial " Candradimuka " Palembang :

Menurut penjelasan Ketua Sekolah Tinggi ini (Drs. Ismail Djalili), bahwa sekolah ini didirikan pada tanggal 28 Oktober 1979 dibawah naungan Yayasan Seni & Ilmu Pengetahuan Palembang (YASIP).

Oleh karena Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi tidak menentu statusnya, maka ia bernaung dibawah YASIP, dan disamping itu YASIP menyantuni Akademi Publistik Candradimuka Palembang (APCP) yang telah berdiri pada tanggal 23 Maret 1967. Dalam proses perkembangan lebih lanjut YASIP menampung STIA kedalam APCP dengan peningkatannya menjadi STIS Candradimuka Palembang yang terbagi atas 2 Departemen :

- 1). Eks APCP menjadi Departemen Ilmu Publistik.
- 2). Eks STIA Palembang menjadi Departemen Ilmu Administrasi.

Berdasarkan SK. No. 110/1979 tanggal 28 September 1979 status STIS " Candradimuka " Palembang adalah Perguruan Tinggi Swasta dibawah Kotepertis Wilayah II Departemen P dan K, dimana Departemen Ilmu Publistik sampai pada tingkat Sarjana Muda telah terdaftar, sedangkan untuk tingkat Sarjana masih dalam proses. Latar belakang pendirian STIS ini tidak lain dari pada untuk menampung kehendak dan aspirasi masyarakat di daerah ini, yang tidak dapat mengikuti perkuliahan di pagi hari karena sebagian besar mereka itu adalah pegawai negeri / swasta. Pada umumnya tenaga pengajar adalah dosen tidak tetap, dan tercatat semua tingkat yang ada sebanyak + 700 mahasiswa.

Departemen Ilmu Publistik terdapat 3 jurusan : Jurusan Pers, jurusan Radio/Telivisi - Film dan jurusan hubungan Masyarakat.

Sedangkan Departemen Ilmu Administrasi memiliki 2 jurusan : Jurusan Administrasi Niaga.

Yasip berdiri berdasarkan badan hukum dengan Aktenotaris Aminus SH No.25 tanggal 28 Oktober 1967. Tempat kegiatan kuliah di SMP I Negeri

Palembang dengan pimpinannya sebagai berikut :

Drs. Ismail Djalili sebagai Ketua STIS dengan dibantu oleh Drs. Syahril Daya Alam sebagai Kepala Akademis dan Pengajaran, Drs. Syaifuddin sebagai Kepala bidang administrasi/Keuangan, Sumanto sebagai kepala bidang Kemahasiswaan, Drs. Tadjri Lukman Hanafi sebagai Kepala Sekretariat dengan dibantu oleh M. Ridwan Syakroni BA, M. Nurdin Ali, M. Safawi BA, Malikin, Drs. Su madi dan lain - lain.

Adapun Ketua Departemen Ilmu Publistik yaitu Drs. Djekson H. Arifai yang dibantu oleh M. Ridwan Syarkhroni BA. M. Safawi BA, Drs. Tadjri Luk man Hanafi dan lain - lain. Sedangkan Ketua Departemen Ilmu Adinistrasi tercatat Max M. Mamesa SE, yang dibantu oleh Yasbudaya BA, Therik Yoel,, Drs. B. Syurmin, Drs. Fahrudin dan lain - lain.

PENDIDIKAN NON FORMAL :

Pendidikan non formal yang dimaksudkan adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dibawah pengawasan Dep. P dan K, yang terkenal dengan sebutan " Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh Masyarakat " (PLSM). Dalam pelaksanaan PLSM di daerah ini berbentuk kursus kursus yang memakan waktu 2 atau 3 bulan lamanya. Setelah jangka waktu itu berakhir, diadakan ujian Negara dan ijazahnya dari Jakarta. Adapun kursus - kursus yang dimaksudkan itu misalnya : kursus menjahit, Kursus Kecantikan/Tata rambut, Kursus Mengetik, Kursus Bahasa Inggris, Kursus Tatabuku dan lain - lain. Hampir semua daerah Kabupaten di daerah ini menyelenggarakan PLSM dibawah Kandep P dan K setempat. Kursus - kursus yang terdaftar pada Kandep Kotamadya Palembang sampai akhir tahun 1980 adalah sebagai berikut :

Kursus - kursus PLSM dalam Kotamadya Palembang

Kecamatan	R U M P U N											Keterangan
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Juml.	
Ilir Timur I	15	-	1	-	-	-	2	8	18	3	47	Rumpun : 1. Rumah tang ga. 2. Kesehatan 3. Olah raga 4. Pertanian 5. Kesenian 6. Kerajinan 7. Teknik 8. Adm. dan niaga 9. Bahasa 10. Khusus.
Ilir Timur II	7	-	-	-	-	-	3	3	3	1	17	
Ilir Barat I	7	-	-	-	-	-	3	7	4	-	21	
Ilir Barat II	6	-	-	-	-	-	2	-	3	-	11	
Seberang Ulu I	2	-	-	-	-	-	-	-	5	-	7	
Seberang Ulu II	1	-	-	-	-	-	-	6	2	-	9	
Jumlah	38	-	1	-	-	-	10	24	25	4	112	

SUMBER : Kandep P dan K Kotamadya Palembang.

Salah satu PLSM di dalam kota Madya Palembang yang diselenggarakan secara rutin adalah " Karang Taruna " yang terletak di jalan Jenderal Sudirman Palembang dibawah pimpinan Drs. Kencanawati, yang sebagian besar menampung anak - anak drop - out yang belum berkeluarga. Disamping itu ada juga kegiatan PLSM dilokasi Tunasusila KM 9 Palembang dan PLSM yang dikelola oleh Kanwil Depsos Sumatera Selatan yang terletak di Indralaya, khusus mengenai bidang jahit menjahit dan Rumah Tangga.

Sekolah luar biasa (Y.P.A.C) cabang Palembang :

Sebagai akibat revolusi fisik di Indonesia, maka banyak pejuang - pejuang kita yang mengalami invalid, dan dalam masyarakat terdapat juga orang - orang/anak - anak seperti itu. Pada awal tahun 1952 di Indonesia berjangkit wabah penyakit kelumpuhan terhadap anak - anak yang lazim disebut " Polio-myelitis ", yaitu infeksi virus pada syaraf yang melanda anak - anak di kota-kota besar seperti : Jakarta, Bandung, Semarang, Surakarta, Pangkal Pinang dan Palembang sendiri. Pada saat itu usaha pencegahan belum dapat dilakukan, sedangkan para korban penyakit folio memerlukan perawatan khusus, dan dalam hubungan ini pulalah timbul idee/gagasan Bapak Prof.Dr.Soeharso

untuk mendirikan **Rehabilitasi Centre**, yang mula - mula kampanye ini ditujukan kepada perkumpulan Wanita di kota Solo dan kepada Pemerintah Kota madya Solo. Akhirnya pada tanggal 5 Februari 1953 berdirilah Yayasan Pemelihara Anak - anak Cacat (Y.P.A.C.) di Solo dengan Akte Notaris No. 18 yang berstatus Swasta bersubsidi. Sebagai Ketua Umum pertama adalah Ny. Padmonegoro dan tiga tahun kemudian digantikan oleh Ny. D. Soeharso sampai sekarang.

Dalam mengembangkan Y.P.A.C. di seluruh tanah air, Bapak Dr. Soeharso dan Ibu mendirikan perwakilan - perwakilan selain di pulau Jawa juga di luar pulau Jawa, dan perwakilan Y.P.A.C. yang pertama didirikan di luar pulau Jawa adalah Y.P.A.C Pangkal Pinang (Bangka) Yang dipimpin oleh Bapak Ikes, Dr. Moedarmo dan Ibu. Seperti apa yang kita ketahui di Bangka sekitar tahun 1956 - 1958, epedemi Polio melanda pulau Bangka dan banyak anak - anak yang menjadi cacat tubuh yang harus mendapatkan pertolongan khusus. Keadaan seperti ini tidak hanya terdapat di Bangka, tetapi juga terdapat di kota Palembang dan sekitarnya. Oleh sebab itu, ketika Bapak Prof. Dr. Soeharso dan Ibu mengunjungi Palembang dalam rangka kampanye untuk mengembangkan Y.P.A.C di daerah ini, mendapat respon dari Ibu Siti Bambang Utoyo dan langsung mengadakan pertemuan antara ibu - ibu terkemuka di daerah ini di rumah kediaman Bapak Mayjen Bambang Utoyo untuk mendapatkan petunjuk - petunjuk langsung dari Ibu Soeharso.

Setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu Soeharso tentang tugas-tugas Y.P.A.C, maka atas prakarsa Ibu Siti Bambang Utoyo dengan beberapa orang Ibu mengadakan kunjungan/peninjauan di Y.P.A.C. Cabang Pangkal Pinang (Bangka). Setelah mereka kembali ke Palembang, maka pada tanggal 22 Desember 1959 - tepat pada hari Ibu dan Hari Sosial, didirikanlah Y.P.A.C. Cabang Palembang dengan susunan pengurusnya sebagai berikut : Ny.R.Bambang Utoyo sebagai Ketua; Ny. Z. Husin sebagai Wakil Ketua, Ny. L. Irsan Radjamin sebagai Sekretaris I, Ny. Soejono sebagai Sekretaris II, Ny. W.M. Wnee sebagai Bendahara I, Ny. Oen Poo Khien sebagai Bendahara II dan dibantu oleh staf - staf lainnya seperti :

Bagian Medis ditangani oleh Dr. H. Goepito - Dr. I.P. Radjamin - H.Marzoeki D - Sunardi. Bagian Pendidikan oleh Dr. Ny. Ch. Goepito - Ny. Subronto yang dibantu oleh Nona Zoeliana Nain dan Ny. Darnelist Sayuti.

Bagian Usaha oleh Ny. Oei Khik Tjihiang - Ny. Noesmin - Ny. Soejono. Bagian Sosial oleh Ny. R. Tobing - Ny. S.Tafsil Chatib - Ny. Ibnu Hajar.

Bagian Penerangan oleh Ny. Nadjamuddin - Ny. Myrin Koesumo. Bagian Tata usaha dikelola oleh Zainal Arifin - Tomi Hanif. Pembantu Pengurus adalah Ny. F. Manoe - Ny. Syarif dan untuk Work Shop dipegang oleh saudara Mochtar Affendi.¹⁸⁴⁾

Yayasan ini sifat dan tujuannya mengobati, mendidik dan membimbing anak - anak cacat tubuh agar dapat kembali ke masyarakat dengan penuh kepercayaan terhadap diri sendiri dengan keterampilan yang dimilikinya. Sesuai dengan tugas Y.P.A.C. sebagai wadah pusat Rehabilitasi yang disahkan oleh Pemerintah sebagai satu - satunya organisasi yang menangani pertolongan kecacatan anak - anak, maka Y.P.A.C berkewajiban mengkoordinir kegiatan - kegiatan yang serupa didalam wilayahnya. Oleh sebab itu atas prakarsa pengurus Yayasan Taman Bunga dalam asuhan Pansos Katholik di kota Palembang, maka pada tanggal 9 Januari 1978 Yayasan tersebut bersepakat untuk bergabung dan meleburkan diri dalam Y.P.A.C. cabang Palembang. Sebagai sponsor Yayasan Taman Bunga adalah Suster Jeanne d'Arc, yang pada saat itu mengasuh anak - anak sejumlah 50 orang dan berlokasi di jalan Letkol Iskandar No. 403.

Berdasarkan hasil Munas I di Semarang 19 s/d 20 Juli 1977, maka Y.P.A.C cabang Palembang membentuk Medical Board pada tanggal 130 September 1978 yang diketahui oleh Dr.H.R.Soepanto bagian Bedah dan Dr. Rusdi Ismail sebagai dokter anak - anak. Adapun Medical Board ini merupakan bagian yang sangat penting dalam tubuh Y.P.A.C sebagai tenaga - tenaga pembantu pengurus yang merupakan suatu team tenaga ahli dalam memberikan bantuan - bantuan medis yang terdiri dari para spesialis. Sejak berdirinya Y.P.A.C (1959 - 1979) terdaftar 771 orang, yang meliputi semua jenis kecacatan kecuali tunanetra :

a. Poliomyelitis Anterior Acuta	304 orang
b. Cerebral Palsy	284 orang
c. Congenital Deformety	88 orang
d. Borne Disordes	23 orang
e. Other Diseases	72 orang

Alat penolong 196 buah terdiri dari : 106 Brace, 22 Kruk, 18 Prothese, 50

¹⁸⁴⁾Yayasan Pemelihara anak - anak cacat (Y.P.A.C) Cabang Palembang Palembang, 1979, halaman 30 - 31.

Reparasi Brace dan Prothese dan pendidikan murid 149 orang terdiri dari sekolah - sekolah : 39 orang Taman Kanak - kanak, 35 orang S.L.B. bag. B, 18 orang S.L.B bag. C, 34 orang S.L.B bag. D, dan 23 orang Kelas Karya. Untuk membiayai Sekolah Luar biasa ini yang dikoordinir oleh Y.P.A.C Cabang Palembang, mendapatkan biaya dari Pemerintah, para donatur tetap, wali - wali murid dan bantuan dari luar Negeri. Sekarang ini. Y.P.A.C. berlokasi di Jalan Rajawali dengan memiliki gedung sendiri diatas tanah + 1 hektar Dewasa ini Sekolah Luar Biasa tersebut dipimpin oleh Sr. Jeanne d'Arc sebagai Direktris, H. Marzoeki SM. Ph sebagai Kabag Fisioterapi, Zainal Arifin sebagai Kabag Tata - Usaha, Mochtar Effendi sebagai Kabag Orthopaedical work shop, Ruslin Djakfar sebagai Kabag Specch Terapi, Sr. Catharina sebagai Kabag Rumah Tangga, Drs.S.M. Tambunan sebagai Kabag/Kepala SLB bag. C Arif Budyanto sebagai Kabag/Kepala SLB bag. D., Th. Sugirno BA sebagai Kabag/Kepala SLB bag. B.,M.Zaini A. Muin Ks sebagai Wkl. Kepala/Guru SLB. Bag. C., Sr. Erlina CB sebagai Wakil Kepala/Guru SLB bag. D dan Tiorly Hoetabarat sebagai Wakil Kepala/Guru SLB bag. B.¹⁸⁵⁾

¹⁸⁵⁾ ibid, halaman 17

PESANTREN DAN MADRASAH :

Sejak zaman Hindia Belanda dan Indonesia Merdeka lembaga pendidikan tersebut diusahakan oleh Swasta, seperti halnya di tempat - tempat lain di Indonesia seperti Madrasah Swasta tingkat Ibtida'iyah, Tingkat Tsanawiyah dan tingkat Aliyah. Dalam tahun ajaran 1979/1980 ketiga tingkat madrasah itu hampir terdapat di seluruh Kabupaten/Kotamadya di daerah ini : Kota madya Palembang terdapat 85 MIS, 4 MTs.S dan 5 MAS; di MUBA terdapat 44 MIS dan 9 MTs.S; di OKI terdapat 72 MIS, 6 MTs.S dan 6 MAS; di LIOT tercatat 45 MIS, 10 MTs.S dan 5 MAS; di Lahat terdapat 32 MIS dan 4 MTs.S di OKU terdapat 85 MIS, 20 MTs.S dan 4 MAS; di MUBA terdapat 56 MIS, 9 MTs.S dan 2 MAS; di Bangka tercatat 12 MIS, 4 MTs.S dan 1 MAS, dan akhirnya di Belitung terdapat 8 MIS, 1 MTs.S dan 1 MAS. 186) Secara keseluruhan dapat kami kemukakan didini mengenai Madrasah - madrasah Swasta di daerah Sumatera Selatan :

MIS jumlah sekolahnya 439 buah, muridnya 45123 dan gurunya 1740; MTs.S sekolahnya 66 buah, muridnya 3225 dan gurunya 742; MAS jumlah sekolahnya 24 buah, muridnya 2460 dan gurunya 255 dan akhirnya Pendidikan Guru Agama Swasta di daerah ini hanya dapat diketahui jumlah muridnya saja yaitu 1497. 187)

Mengenai pondok Pesantren yang ada di daerah ini sampai tahun 1979/1980 tercatat 23 buah dengan perincian sebagai berikut :: 3 Pesantren di Palembang, 3 Pesantren di MUBA, 8 pesantren di OKI, 2 pesantren di OKU, 2 pesantren di LIOT, sebuah pesantren di Lahat, sebuah pesantren di MUBA dan 3 pesantren di Bangka. 188)

Pondok Pesantren " Nurul Islam " Seri Bandung (OKI) :

Berdasarkan penjelasan saudara Hadori Sekretaris Pondok pesantren Nurul Islam, bahwa pada tahun 1949 dibuka lagi tingkat Ibtida'iyah untuk puteri, dan dalam tahun 1954 dibuka tingkat Tsanawiyah untuk putera-puteri tingkat Tahdiriyah dan tingkat Alyah. Kemudian pada 15 Februari 1955 di buka fakultas Syari'ah, sehingga pondok pesantren Nurul Islam memiliki :

186) Kanwil Departemen Agama Sumatera Selatan, Laporan tahunan Bidang Pendidikan Agama Islam tahun 1979/1980, halaman 29.

187) ibid, halaman 37 dan 41

188) ibid, halaman 38

tingkat Tahdiryah, tingkat Ibtida'iyah, tingkat Tsanawiyah, tingkat Alyah dan tingkat perguruan tinggi (Fakultas Syari'ah). Sarana yang dimiliki oleh Pesantren Nurul Islam di Seri Bandung adalah sebagai berikut : Luas tanah 12 hektar dan beru dipergunakan 7 hektar, Gedung permanen yang terdiri dari 4 gedung dengan 20 buah lokal, 3 gedung sekolah semi permanen dengan 12 lokal sebuah gedung Work Shop yang semi permanen dengan 3 lokal, 3 gedung permanen untuk asrama yang dapat menampung 190 orang, 3 gedung semi permanen untuk asrama puteri dengan daya tampung 150 orang, gedung perpustakaan 6 x 10 meter, sebuah mushollah 10 x 10 meter, sebuah aula dalam tahap penyelesaian, sebuah balai obat semi permanen, ruang kantor dan guru terdapat pada tiap - tiap sekolah dan 600 pondok ukuran 2 x 3 meter yang di buat sendiri oleh para pelajar untuk tempat tinggal disana.

Pada tahun ajaran 1979/1980 jumlah siswa pada tingkat Tahdiryah 84 orang; tingkat Ibtida'iyah 512 pria dan 363 wanita; tingkat Tsanawiyah 76 pria dan 32 wanita; tingkat alyah 31 pria dan 24 wanita dan pada Fakultas Syari'ah jumlah mahasiswanya 81 orang. Mengenai Guru - gurunya : 26 orang untuk tingkat Tahdiryah, 12 orang, untuk Tsanawiyah, 12 untuk Alyah dan 21 dosen untuk Fakultas Syari'ah. Kurikulumnya pada tingkat Tahdiryah/ Ibtida'iyah 20% Umum dan 80% pelajaran Agama; Tingkat Tsanawiyah 40% Umum dan 60% pelajaran agama; tingkat Alyah fifty - fifty dan kurikulum Fakultasnya disesuaikan dengan kurikulum IAIN.

Pondok Pesantren ini dikelola oleh : Ki H. Ahmad Dimiyati Anwar sebagai Kepala (Mudir); Ki. H. Zumrowi sebagai Sekretaris yang dibantu oleh kepala - kepala bagian seperti tingkat Tahdiryah dan Ibtida'iyah dipimpin oleh Ki. H. Zumrowi Anwar BA, tingkat Tsanawiyah, dipimpin oleh Ki. H. Anwar dengan merangkap Alyah dan tingkat Perguruan Tinggi (Fakultas Syari'ah) dipimpin oleh Ki. H. Fachrurrozi Lc. T. H.

Metode yang dipergunakan adalah metode ceramah, demonstrasi dan sistem sorokan.

Keadaan Siswa sejak tahun 1943 - 1980

Tahun	Laki	Peremp.	Jumlah	Tahun	Laki	Peremp.	Jumlah
1943	160	-	160	1962	1000	370	1370
1944	160	-	160	1963	1181	398	1579
1945	160	-	160	1964	920	330	1250
1946	160	-	160	1965	1060	340	1400
1947	160	-	160	1966	980	357	1337
1948	160	-	160	1967	1100	600	1700
1949	160	4	164	1968	637	429	1066
1950	160	4	164	1969	850	514	1364
1951	160	-	160	1970	886	625	1511
1952	160	-	160	1971	924	657	1581
1953	400	160	560	1972	918	671	1589
1954	600	200	800	1973	930	666	1596
1955	700	250	950	1974	1176	767	1943
1956	821	336	1157	1975	1241	768	2009
1957	888	353	1251	1976	1266	734	2000
1958	966	374	1340	1977	1201	692	1893
1959	1040	414	1454	1978	1111	704	1815
1960	1090	392	1482	1979	846	568	1414
1961	1091	340	1431	1980	770	443	1213

SUMBER : Kepala bagian administrasi Pondok Pesantren " Nurul Islam "
Seri Bandung Tanjung Batu (OKI)

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abu Ahmadi, Drs. Sejarah Pendidikan, CV. Toha Putera, Semarang, 1975
- Ali, R. Moh, Peranan Bangsa Indonesia dalam Sejarah Asia Tenggara, Bhratara, Jakarta, 1963.
- Amir Hamzah Wiryosukarto, Drs. Pembaharuan Pendidikan dan Pengajaran agama Islam yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah, Peny. Publikasi Pembaharuan Pendidikan dan Pengajaran Islam, Jogya karta, 1962.
- Aziz, M.A, Japan's Colonialisme and Indonesia, Martinus Nijhoff The Hague, 1955.
- Bulletin Muhammadiyah Sumatera Selatan, Nomor 3, Maret 1980.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pendidikan di Indonesia Dari Jaman ke - Jaman, Jakarta, 1979.
- Pendidikan di Indonesia 1900 - 1940, Jakarta, 1977.
- Pendidikan di Indonesia 1900 - 1974, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
- Dinas Sosial Daerah Tk. I Sumsel, Perintis Kemerdekaan Indonesia, Palembang, 1951.
- Ensiklopedia Umum, Yayasan Kanisius, Jogjakarta, 1973
- Graaf, H. J. de, Geschiedenis van Indonesia, W van Hoeve 'Gravenhage, Bandung, 1949.
- Fakultas Teknik UNSRI, Buku Petunjuk Pendidikan Ahli Teknologi (PAT) Palembang 1978.
- I. Djumhur & Drs. H. Danasuparta, Sejarah Pendidikan, CV. Ilmu, Bandung, 1976
- Y.P.A.C Cabang Palembang 22 - 12 - 1959 - 22 - 12 - 1979, Palembang 1979
- Kementerian Penerangan, Republik Indonesia Propinsi Sumatera Selatan, Palembang, 1954
- Koentjaraningrat, Prof. Dr, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, Jembatan, Jakarta, 1976
- The Yavanese of South - Central Yava dalam GP. Murdock (ed) Social Structure of South East Asia, Chicago, 1960

- Krom, Prof. Dr.N.J. (terjemahan Arif Effendi), Zaman Hindu. PT. Pembangunan, Jakarta, 1954
- Ketua Senat/Rektor IAIN Raden Fattah, Laporan pada Peringatan Hari jadi ke XV IAIN Raden Fattah dan Wisuda ke - V, Bengkulu, 1979
- Leur, J.C. van, Indonesian Trade and Society, The Hague Bandung, 1955
- Mahmud Yunus, Prof.H, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Mutiara, Jakarta, 1979
- M.O. Parlindungan, Tuanku Rao, Tanjung Pengharapan, Medan, 1964
- Mochtar Abubakar, Drs. H. & Drs. Mansur Rachman, Memorandum akhir tugas dan laporan phasing out AAN Negeri Palembang, 1977/78
- Panitya Peny. MTQ Pertamina se Indonesia ke - 2 / 1974, Masuk dan Perkembangan agama Islam di Bumi Sriwijaya, Plaju, 1974
- Proyek IDKD Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Sejarah Sumatera Selatan 1977 - 1978
- Panitya Dasawarsa IAIN Raden Fattah, Sepuluh tahun IAIN Raden Fattah Palembang, Palembang, 1975
- Soegarda Purbakawatja, Prof., Pendidikan dalam alam Indonesia Merdeka, Gunung Agung, Jakarta, 1970
- Schrieke, B., Indonesia Sociological Studies I, Sumur, Bandung, 1960
- Sutari Iman Barnadib, Dra., Pengantar Sejarah Pendidikan I, Yayasan Penerbit FIP - IKIP, Jogjakarta, 1975 (diktat)
- Sutedjo Bradjanegara, Sejarah Pendidikan Indonesia, Fasco, Jakarta, 1956
- Van Sevenhoven, Lukisan Kota Palembang, Bhratara, Jakarta, 1971
- Vlekke, BHM., Nusantara, a history of Indonesia, PT. Soeroengan Jakarta, 1961
- Vriens S.J.,G, Sejarah Gereja Katholik Indonesia jilid 3a, Arnoldus, Ende, 1974

LAMPIRAN. IKeadaan Mahasiswa P3DK UNSRI Semester I tahun 1980/1981

PROGRAM	Bidang Studi	MAHASISWA		
		L	P	JUMLAH
D ₁	Bhs. Indonesia	23	65	88
	Matematika	24	23	47
	IPA	35	60	95
D ₂	Bhs. Indonesia	13	29	42
	Bhs. Inggris	19	17	36
	Matematika	27	13	40
	IPA	14	21	35
				153
JUMLAH SELURUHNYA				383

SUMBER : Sekretariat P3DK UNSRI Palembang.

LAMPIRAN. II.Keadaan Jumlah Mahasiswa ATN/PAT Palembang Tahun 1974 - 1980

TAHUN	J U R U S A N			JUMLAH
	Mesin	Electro	Sipil	
1974	50	50	43	143
1975	63	57	43	163
1976	86	56	45	187
1977	82	61	68	211
1978	104	81	95	279
1979	115	111	114	340
1980	119	110	110	339
1980/1981	147	147	154	448

SUMBER : Kantor Sekretariat ATN/PATLAMPIRAN. IIIAlumni ATN Sebelum Integrasi (11 Peb. 1971 s/d Sep. 1976).

T A H U N						
1971	1972	1973	1974	1975	1976	JUMLAH
3	5	1	3	25	77	113

SUMBER : Kantor Sekretariat ATN / PAT

LAMPIRAN. IV.Program Tempat Praktek Mahasiswa AKPER Palembang.

Tk.	Semester	Lama	TEMPAT
I	II	6 bl	R.S. dr. A. K. Gani Palembang
II	III / IV	12 bl	R.S. dr. A. K. Gani Palembang.
III	V		- R.S. PN. Pertamina Plaju. - R.S. Jiwa Palembang. - Balai Lab. Tk. I. Palembang. - Puskesmas Kotamadya Plg. - K.K.N (Kerja Lapangan) — R.S. di Kabupaten — Puskesmas di Kec. dsbnya.
III	VI		- R.S. dr. A. K. Gani Palembang.

SUMBER : Sekretariat Akademi Perawat Jurusan Umum Palembang.

LAMPIRAN.Keadaan Jumlah Mahasiswa PAAP - UNSRI Palembang 1975 - 1979

T A H U N				
1975	1976	1977	1978	1979
111	136	192	246	281

SUMBER : Kantor Sekretariat PAAT UNSRI Palembang.

LAMPIRAN VCONTOH HURUF ULU YANG TERDAPAT DI DAERAHSumatera Selatan

       
 ké gē ngē pē bē mē tē dē

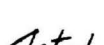
       
 nē tjē jē rē lē wē aē sē

  
 djē njē kē

Keterangan : Huruf diatas ini merupakan huruf asli yang terdiri dari 19 huruf.

        
 i o ng n ai h r ow u

Dibawah ini contoh tulisan setelah dirangkaikan menjadi kata :

       
 ka ju a gung mang ku a lam

       
 tu pai dju wa dah pe lo por

       
 dang su sah lan bow pe ngan ten

DAFTAR NAMA – NAMA INFORMASI

- Abdulmalik SH, Eks. Walinegara
Sumatera Selatan, Jenderal
Sudirman KM. 4½ Palembang
(almarhum)
- A. Siahaan, Drs.Eks Dir. SMEA
Neg. I Plg. 47 th. Kanwil
P & K.
- A. Muis Bakry, Drs. Kep. Bag. Pedd
SPMA, 43 th. Sumbawa Plg.
- Abdullah, Drs. Dosen Fak.Keg.
UNSRI, 45 th. UNSRI Plg.
- Asemah, Karyawan Kanwil P & K
Sumatera Selatan, 42 th.
P dan K Sumsel.
- Arsyad Yakin,Kasi Masorda Kandep
Lahat, 47 th. Lahat.
- Bakhtiar, Ketua Pengurus Taman-
siswa cabang Palembang, 45th
Perg. Tamansiswa Palembang.
- Baharuddin, Karyawan Dep. P & K
Sumsel, 46 th. PMK P & K
- Cipto Utomo Ramli BSc, RSUP
Palembang, 30 th. RSUP Plg.
- Cik Ayu Sumarni, Karyawan P & K,
42 th. Kanwil Dep. P & K
Sumatera Selatan Palembang
- Eddy Utomo, Kep. Bag. Pendidikan
SMF Plg, 35 th. SMF Plg.
- Haji. A. Majid, Karyawan RSUP
Palembang, 48 th. RSUP Plg.
- Haji Murzal, Drs., Kepala PGA Neg.
Plg. 49 th PGA Palembang.
- H.M. Pulungan, eks, Kepala SGA
Neg. Plg. 49 th. Kanwil P & K
- Idrus Achmad, Drs. Direktur APDN
42 th.,APDN Palembang.
- Ibrachim HS, Drs, Dosen Fak.Keg.
UNSRI, 46 th.,UNSRI Plg.
- Moh.Ali, Kep.bag.Pengajaran ATN
Plg, 43 th.,ATN Palembang
- Moh.Dai Sulaiman, Drs.,Kep. SMP.
14 Plg, 47 th. SMP 14 Negeri
Palembang.
- Ma'moen Abd, Drs., Dosen Fak.
Keg. UNSRI, 50 th., UNSRI
Palembang.
- Nawawi Gaffar, Purnawirawan, 58
th, Veterang Palembang.
- Nurtjahaya, Karyawan Kanwil P&K
45 th., Kanwil Sumatera Sela-
tan Palembang.
- RHA. Rani, Eks, Kepala Perwakilan
P & K, 60 th. jalan Rengas Plg
- R. Manulu, Karyawan P & K Sum-
sel, Kanwil P & K Palembang.
- Syargawi, Kep. MIN Lumpatan, 50
th. Lumpatan Muba.
- Sutarmo BA, Wkl. Kep. SMOA Plg,
47 th., Kompleks SMOA Plg.
- Wahab Nangutih, Karyawan Fkg,
40 th. Fkg.UNSRI Palembang
- Zaihal A. Gaffar,Dekan Fkg.UNSRI
38 th.Fak.Keg.UNSRI Plg.
- Zuzter Christine, Kep. Bidang,
RSUP. Plg, 42 th. RSUP Plg.

DAFTAR KATA -- KATA

- | | |
|---|--|
| A. Alyah. 138, 139, 280. | O. Onderafdeling. 2, 59, |
| B. Budha. 1, 17, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
Batanghari Sembilan. 5, 7, 22, 35.
Borobudur. 30, 31 | Onhouding politik. 4, 57 |
| C. CVO. 62, 95, 140, 153
Candradimuka. 268, 272 | P. Politik Etika. 18, 53, 54, 54
Poyang. 17, 24

Pesantren. 39, 48, 66, 76, 77, 279, 280. |
| D. Demang. 2, 60, 85, 109 | S. Sriwijaya. 1, 17, 25, 26, 27, 29, 30, 31 |
| G. Goeroe Ordonantie. 48, 67 | Sekolah Desa. 18, 33, 55, 56, 60, 61, 95 |
| H. HIS. 18, 57, 58, 62, 63, 64, 65, 74, 80, 91, 97, 109, 116, 121, 127, 245.
HCS. 18, 57, 64, 80, 81, 91, 109
Hakko-I-Chiu. 19, 83, 84, 87 | Schakel School. 63, 71, 91, 97, |
| I. I - Tsing. 26, 27, 29. | T. Tamansiswa. 68, 69, 70, 94, 123, 245, 246, 248, 249 |
| K. Kubu. 8, 16, 22
Kweekschool. 64, 65. | U. Ulama Guru. 18, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 52 |
| M. Muhammaddiah. 15, 18, 68, 72, 73, 74, 75, 87, 245, 246, 253, 266, 267, 270, 271, 272
MULO. 18, 62, 63, 64, 70, 74, 80, 81, 94, 109, 116, 124, 127, 132, 141, 143, 246

Machmud Badharuddin II, 32, 34, 47, 52.

Methodist. 82, 87, 245, 251, 252. | V. VOC. 32, 47, 50, 51, 52

X. Xaverius. 79, 245, 249, 250, 261, 262

Y. Y.P.A.C. 275, 276, 272, 278 |

SEJARAH PENDIDIKAN DAERAH SUMATERA SELATAN

Perpustakaan
Jenderal Keb

370.98

MAM

S

C1: